

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

RPJM Kabupaten Bireuen Periode 2017-2022 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025. RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK), Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2017-2022.

RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 merupakan arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen periode 2017-2022, Bapak H. Saifannur, S.Sos dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si yang dilantik pada Tanggal 10 Agustus 2017. RPJMK Bireuen 2017-2022 juga merupakan perumusan visi dan misi pembangunan yang menunjukkan cita-cita bersama masyarakat Kabupaten Bireuen atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Bireuen.

RPJMK Bireuen selanjutnya menjadi acuan seluruh Perangkat Kabupaten Bireuen sesuai tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam dokumen RENSTRA Perangkat Kabupaten sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunannya. Dokumen RPJMK diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bireuen.

Dokumen RPJMK seterusnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK). RKPK merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPK menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. Oleh karenanya RPJMK Bireuen dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan tahunan di wilayah Kabupaten Bireuen yang perlu dipacu oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Dalam masa pelaksanaan RPJMK selama 3 tahun (2017-2019) diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian sehingga mengharuskan adanya perubahan. Perubahan RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu antara lain pada : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 342 ayat (1) mengamanatkan perubahan RPJP dan RPJM dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Bireuen, terdapat 5 (lima) alasan utama Perubahan RPJMK Bireuen yang meliputi:

- 1) Adanya penetapan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, serta adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi birokrasi, dimana ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan mengalami perubahan dan penambahan baik nomenklatur

maupun tupoksinya, sehingga OPD tersebut akan terpisah kewenangannya dan perlu penyesuaian untuk indikator programnya (cascading). Selain dari tiga alasan diatas, pemerintah juga dituntut mengakomodasi, untuk mengelola dinamika-dinamika perkembangan publik yang berkembang setiap hari yang harus dikelola hari perhari disamping harus visioner,

- 2) Revisi dan Refokusing dokumen perencanaan yang dianjurkan Kemenpan RB agar tujuan dan sasaran berorientasi impact/ultimate outcome dan indikator kinerjanya harus memenuhi kriteria spesifik, measurable dan relevant;
- 3) Perubahan proyeksi pendapatan dari dana transfer Pemerintah Aceh sesuai Qanun Aceh No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh No 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
- 4) Perlunya penentuan indikator tujuan RPJM;
- 5) Inkonsistensi antar bab.

Penyusunan Kegiatan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bireuen Tahun 2017–2022 dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan Penyusunan Perubahan RPJM
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJM
- 3) Penyusunan Rancangan Perubahan RPJM
- 4) Pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJM
- 5) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RPJM
- 6) Penyusunan Rancangan Qanun Perubahan RPJM
- 7) Penetapan Qanun Perubahan RPJM

Poin-poin yang mendasari penyusunan dokumen Perubahan RPJMK Bireuen tahun 2017-2022 sangat penting untuk segera ditindaklanjuti agar menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD tahun 2017-2022. Perubahan Renstra PD menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen 2017-2022, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPK memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja

Perangkat Kabupaten. Dengan berpedoman pada Renstra dan RKPK, setiap Perangkat Kabupaten menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja). Renja inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan perangkat kabupaten.

1.2 Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan Kegiatan Review RPJM Kabupaten Bireuen ini, sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
15. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
16. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Bireuen
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025.

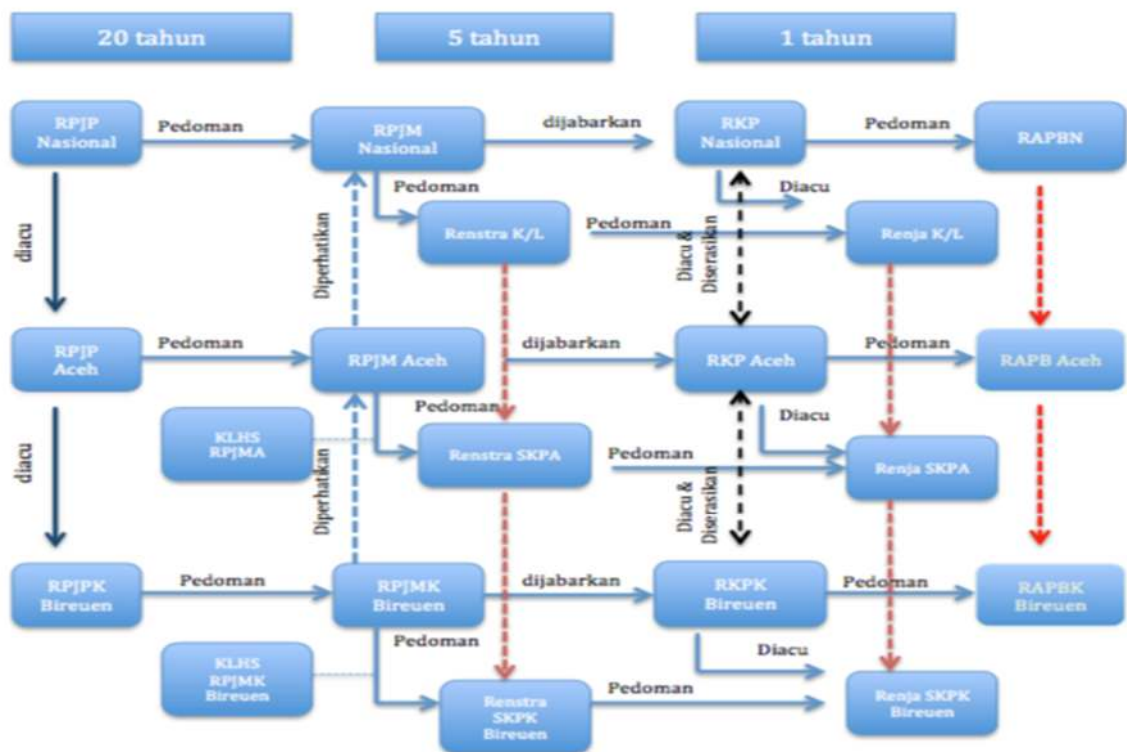
I.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMK merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Untuk itu RPJMK harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJM merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai penjabaran RPJP yang memiliki kurun waktu 20 tahun mencakup RPJPN Tahun 2005-2025, RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025, dan RPJP Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2012-2032. Dokumen Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen tahun 2017-2022 juga mengacu pada dokumen KLHS yang menunjukkan capaian Sustainable Development Goals di Kabupaten Bireuen. Penyusunan Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen tahun 2017-2022 juga berpedoman pada RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

yang mana juga berpedoman kepada RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Aceh. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Bireuen dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Aceh dan RTRW Kabupaten Bireuen digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah periode 2017-2022. Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui gambar berikut :

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen



I.3.1 Telaah keselarasan Agenda Pembangunan Nasional dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024, RPJM Aceh Tahun 2017-2022 dan Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022.

RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJM Aceh Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang dipedomani dalam penyusunan Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022. Keselarasan RPJMN, RPJM Aceh, dan RPJM Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada misi daerah yang mendukung misi pada dokumen RPJMN 2020-2024 dan RPJM Aceh Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Keselarasan Agenda Pembangunan Nasional, Misi RPJMN, RPJM Aceh, dengan Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen

No.	7 Agenda Pembangunan Nasional	Misi RPJM Nasional	Misi Pembangunan Aceh	Misi Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Manusia Indonesia	Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum	Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Misi 4 : Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri, dan industri kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk perluas lapangan kerja serta memberikan akses permodalan	Misi 3 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi.

No.	7 Agenda Pembangunan Nasional	Misi RPJM Nasional	Misi Pembangunan Aceh	Misi Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;	Misi 7 : Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum	Misi 1: Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur dan terintegrasi berdasarkan Syariat Islam. Misi 7: Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

No.	7 Agenda Pembangunan Nasional	Misi RPJM Nasional	Misi Pembangunan Aceh	Misi Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Revolusi Mental dan Membangun Kebudayaan	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;	Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.	Misi 4 : Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

No.	7 Agenda Pembangunan Nasional	Misi RPJM Nasional	Misi Pembangunan Aceh	Misi Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;	Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Misi 7 : Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;	Misi 7 : Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.
		Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;	Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Misi 7 : Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam

No.	7 Agenda Pembangunan Nasional	Misi RPJM Nasional	Misi Pembangunan Aceh	Misi Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.	kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Tabel 1.2
Keselarasan Misi RPJM Kabupaten Bireuen dengan Kebijakan RTRW Nasional, Kebijakan RTRW Aceh, dan Kebijakan RTRW Kabupaten Bireuen

No.	Misi RPJM Kabupaten Bireuen 2017-2022	Kebijakan RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032	Kebijakan RTRW Aceh Tahun 2012-2032	Kebijakan RTRW Nasional
1.	Misi 1: Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur dan terintegrasi berdasarkan Syariat Islam.	Kebijakan a: Mengembangkan, meningkatkan dan mendorong produktivitas wilayah dengan intensifitas lahan serta pengelolaan kawasan budidaya yang berbasis pada kawasan agropolitan dan minapolitan sehingga dapat dikelola secara terpadu, modernisasi dan tepat guna agar lebih ramah lingkungan.	Kebijakan a: peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Aceh	Kebijakan a: Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional

No.	Misi RPJM Kabupaten Bireuen 2017-2022	Kebijakan RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032	Kebijakan RTRW Aceh Tahun 2012-2032	Kebijakan RTRW Nasional
	Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Kebijakan c: Mengembangkan dan mendorong pertumbuhan bidang jasa-jasa, terutama jasa perbankan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, profesional dan terdepan	Kebijakan a: peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Aceh	Kebijakan e : Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa;
	Misi 3: Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi	Kebijakan a: Mengembangkan, meningkatkan dan mendorong produktivitas wilayah dengan intensifitas lahan serta pengelolaan kawasan budidaya yang berbasis pada kawasan agropolitan dan minapolitan sehingga dapat dikelola secara terpadu, modernisasi dan tepat guna agar lebih ramah lingkungan. Kebijakan b: Mengedepankan potensi wilayah dan membuka investasi modal sebagai perwujudan untuk pengembangan	Kebijakan b: peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional. Kebijakan c: peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi listrik, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana	Kebijakan c : Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional Kebijakan d : Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

No.	Misi RPJM Kabupaten Bireuen 2017-2022	Kebijakan RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032	Kebijakan RTRW Aceh Tahun 2012-2032	Kebijakan RTRW Nasional
		<p>perindustrian skala besar dan menengah dengan memberikan kenyamanan berinvestasi pada setiap pelaku usaha dengan menumbuhkan dorongan industri yang berbasis lingkungan hidup</p>	<p>di seluruh wilayah Aceh.</p>	
	<p>Misi 4: Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.</p>	<p>Kebijakan b: Menedepankan potensi wilayah dan membuka investasi modal sebagai perwujudan untuk pengembangan perindustrian skala besar dan menengah dengan memberikan kenyamanan berinvestasi pada setiap pelaku usaha dengan menumbuhkan dorongan industri yang berbasis lingkungan hidup</p>	<p>Kebijakan b: peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional.</p>	<p>Kebijakan a: Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional Kebijakan c: Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam</p>

No.	Misi RPJM Kabupaten Bireuen 2017-2022	Kebijakan RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032	Kebijakan RTRW Aceh Tahun 2012-2032	Kebijakan RTRW Nasional
				perekonomian internasional Kebijakan d: Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
	Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kebijakan f: Peningkatan untuk fungsi kepentingan pertahanan dan keamanan negara	-	Kebijakan c: Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional Kebijakan d: Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
	Misi 6: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan	Kebijakan d: Mempertahankan kelestarian alam dengan memperkecil resiko kebencanaan dengan melakukan penerapan dan pengelolaan terhadap ruang berbasis mitigasi kebencanaan	Kebijakan c: peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi listrik, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber	Kebijakan g: Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan. Kebijakan f: Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar

No.	Misi RPJM Kabupaten Bireuen 2017-2022	Kebijakan RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032	Kebijakan RTRW Aceh Tahun 2012-2032	Kebijakan RTRW Nasional
		Kebijakan e: Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka perwujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis agropolitan, minapolitan, perindustrian, jasa-jasa dan mitigasi bencana	daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh	biosfer, dan Ramsar.
	Misi 7: Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat	Kebijakan f: Peningkatan untuk fungsi kepentingan pertahanan dan keamanan negara	Kebijakan c: peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi listrik, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh	Kebijakan b: Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;

Tabel 1.3
Keselarasan Misi RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 dengan
Perubahan RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025

Misi RPJM Kabupaten Bireuen 2017-2022	Keselarasan		Misi RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025
	Ya	Tidak	
Misi 1: Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur dan terintegrasi berdasarkan Syariat Islam.	V		Misi 1: Menerapkan nilai-nilai islami dalam membangun sumber daya manusia dan seluruh aspek pembangunan lainnya
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	V		Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan khususnya industri kreatif dan sumberdaya lokal. Mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi pemuda, memperhatikan keberpihakan gender, dan disabilitas.
Misi 3: Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi	V		Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan khususnya industri kreatif dan sumberdaya lokal. Mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi pemuda, memperhatikan keberpihakan gender, dan disabilitas. Misi 3: Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui pendayagunaan sektor pertanian

Misi RPJM Kabupaten Bireuen 2017-2022	Keselarasan		Misi RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025
	Ya	Tidak	
			secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta SDM pelaku usaha tani yang berkualitas sehingga memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha, serta meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui peranan industri pengolahan yang berorientasi ekspor.
Misi 4: Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.			Misi 2 : Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan khususnya industri kreatif dan sumberdaya lokal. Mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi pemuda, memperhatikan keberpihakan gender, dan disabilitas. Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan kearifan lokal serta pembangunan yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan agar terwujudnya inovasi yang berkelanjutan dan memiliki keunggulan kompetitif dalam pembangunan.
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	V		Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dengan mengedepankan kearifan lokal serta pembangunan yang berkualitas melalui penelitian dan pengembangan agar terwujudnya inovasi yang berkelanjutan dan memiliki keunggulan kompetitif dalam pembangunan.

Misi RPJM Kabupaten Bireuen 2017-2022	Keselarasan		Misi RPJP Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025
	Ya	Tidak	
Misi 6: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan	V		Misi 6: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana yang berkelanjutan.
Misi 7: Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat	V		Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Bireuen yang aman, damai dan berkeadilan sosial dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta menegakkan perlindungan hukum.

1.3.4 Keselarasan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 dengan RPJM Daerah sekitar

Tabel 1.4
Keselarasan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 dengan RPJM Daerah sekitar

Misi RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022	Keselarasan		Misi RPJM Kabupaten Aceh Utara 2017-2022	Misi RPJM Kabupaten Bener Meriah 2017-2022	Misi RPJM Kabupaten Pidie Jaya 2019-2024
	Ya	Tidak			
Misi 1: Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur dan terintegrasi berdasarkan Syariat Islam.	V		Misi 2: Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas, berbudaya dan pengarusutamaan gender sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam	Misi 1: Mewujudkan pelaksanaan syariat islam secara Kaffah	Misi 1 : Memperkuat pelaksanaan syariat islam beserta nilai-nilai keislaman dengan membangkitkan kembali budaya lokal dalam kehidupan masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan	V		Misi 3: Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat	Misi 5 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas	Misi 4 : Membangun masyarakat yang berkualitas

Misi RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022	Keselarasan		Misi RPJM Kabupaten Aceh Utara 2017-2022	Misi RPJM Kabupaten Bener Meriah 2017-2022	Misi RPJM Kabupaten Pidie Jaya 2019-2024
	Ya	Tidak			
kesehatan			melalui layanan kesehatan yang bermutu	dan berdaya saing Misi 6 : Mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat	melalui peningkatan efisiensi dan daya saing, serta penguatan mutu pendidikan dan kesehatan secara lebih merata
Misi 3: Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi	V		Misi 5: Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah, perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.	Misi 8 : Mewujudkan perekonomian yang kuat, mandiri dan berkeadilan.	Misi 7 : Memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui optimalisasi pemberdayaan pemerintahan gampong dan membangun sentra-sentra produksi komoditas unggulan serta UKM yang kompetitif untuk memperluas penyediaan lapangan kerja yang berdasarkan nilai-nilai sosial budaya daerah
Misi 4: Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.		V	Misi 5: Memfokuskan peningkatan ekonomi atas dasar optimalisasi potensi daerah,	Misi 8 : Mewujudkan perekonomian yang kuat, mandiri dan berkeadilan	Misi 7 : Memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui optimalisasi pemberdayaan pemerintahan

Misi RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022	Keselarasan		Misi RPJM Kabupaten Aceh Utara 2017-2022	Misi RPJM Kabupaten Bener Meriah 2017-2022	Misi RPJM Kabupaten Pidie Jaya 2019-2024
	Ya	Tidak			
			perbaikan iklim investasi, pemberdayaan gampong yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.		gampong dan membangun sentra-sentra produksi komoditas unggulan serta UKM yang kompetitif untuk memperluas penyediaan lapangan kerja yang berdasarkan nilai-nilai sosial budaya daerah
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	V		Misi 1: Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA	Misi 2 : Mewujudkan pelayanan prima sebagai wujud reformasi birokrasi	Misi 2 : Melanjutkan reformasi birokrasi dengan meningkatkan layanan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, mudah, cepat, dan berwibawa dalam semangat keadilan yang lebih merata
Misi 6: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan	V		Misi 4: Meningkatkan infrastruktur dasar dan pemerintahan dengan memperhatikan penataan ruang, kelestarian lingkungan dan	Misi 3 : Mewujudkan infrastruktur publik yang berkeadilan	Misi 5: Memperbaiki kualitas infrastruktur layanan dasar masyarakat secara terintegrasi dan terkoneksi secara

Misi RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022	Keselarasan		Misi RPJM Kabupaten Aceh Utara 2017-2022	Misi RPJM Kabupaten Bener Meriah 2017-2022	Misi RPJM Kabupaten Pidie Jaya 2019-2024
	Ya	Tidak			
			mendukung pertanian berkelanjutan		proposional berbasis kewilayahan dan lingkungan
Misi 7: Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat	V		Misi 1: Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penegakan hukum serta penegakan syariat islam dengan semangat MoU Helsinki & UUPA;	Misi 7 : Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang harmonis	Misi 3: Mengedepankan dan memelihara perdamaian untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan

I.4 Maksud dan Tujuan

Maksud perubahan RPJMK Bireuen tahun 2017-2022 pada dasarnya adalah untuk menfokuskan pembangunan yang ingin dicapai hingga akhir periode dan menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bireuen yang sesuai dengan regulasi terkini untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan. Dengan demikian, semua dokumen operasional dalam perencanaan hingga akhir periode RPJM Kabupaten Bireuen tahun 2022 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bireuen harus mengacu pada Perubahan RPJMK ini.

Penyusunan dokumen Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen bertujuan:

1. Sebagai rekonstrukturisasi kerangka logis pembangunan yang merupakan detail pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 yang menjabarkan visi dan misi dalam

- bentuk strategi, arah kebijakan, dan menetapkan program pembangunan daerah;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK) hingga tahun 2022, termasuk dalam perubahan program-program prioritas;
 3. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, RAPBK semenjak perubahan RPJM Kabupaten Bireuen ini disahkan hingga tahun 2022;
 4. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen semenjak perubahan RPJM Kabupaten Bireuen ini disahkan hingga tahun 2022;
 5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
 6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia.
 7. Mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian perubahan RPJMK Bireuen Tahun 2017-2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sistematika penulisan pada dokumen RPJMK Bireuen disajikan sebagai berikut:

- BAB I** **PENDAHULUAN**
- Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan RPJMK Bireuen, serta sistematika penulisan.
- BAB II** **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
- Bab ini menguraikan aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- BAB III** **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**
- Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup deskripsi tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.
- BAB IV** **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**
- Bab ini mencakup uraian terkait dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah dalam lima tahun kedepan.
- BAB V** **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**
- Bab ini menyajikan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen terpilih, diikuti dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam periode 2017-2022.
- BAB VI** **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
- Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu pada bab ini turut disampaikan penjelasan hubungan antar setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat penjelasan terkait dengan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta menggambarkan kerangka pendanaan serta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

BAB IX PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dalam dokumen Perubahan RPJMK Bireuen periode 2017-2022.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1 Aspek Geografi dan Demografi

II.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

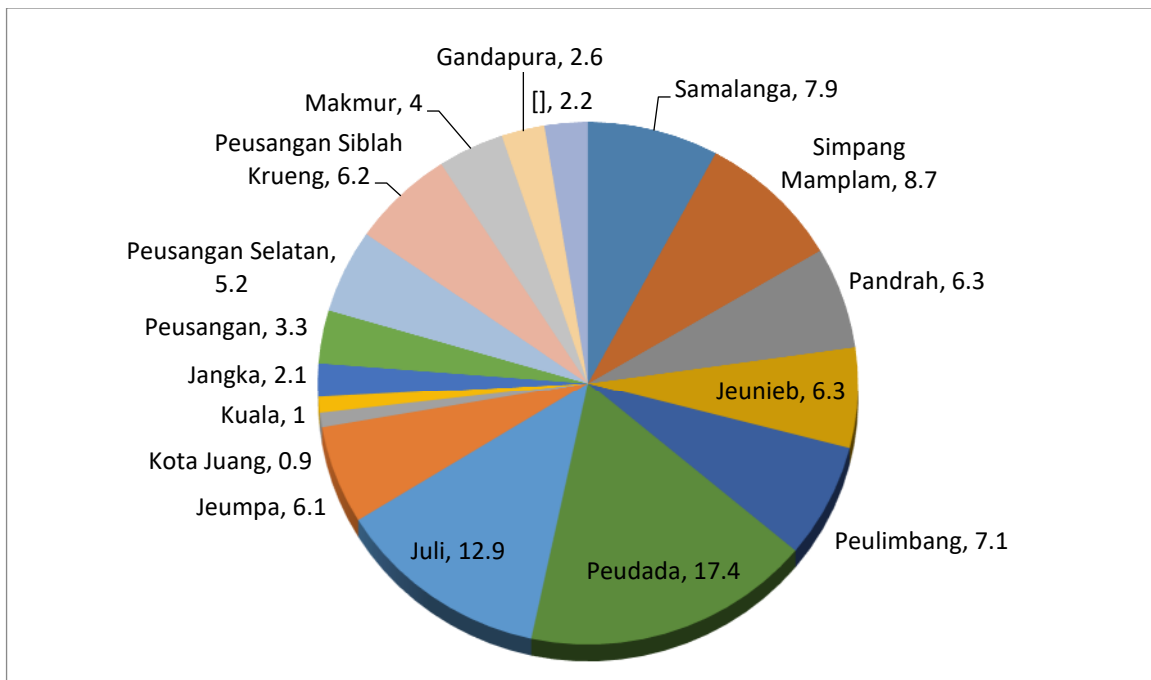
II.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Bireuen terbentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000. Daerah kabupaten yang terletak di wilayah pesisir Provinsi Aceh ini sebelumnya merupakan wilayah administrasi pemerintahan dari Kabupaten Aceh Utara yang dimekarkan pada tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tersebut.

Secara geografis, posisi Kabupaten Bireuen berada pada titik koordinat antara $4^{\circ} 53'20,3''$ - $5^{\circ} 16'25,8''$ Lintang Utara (LU) dan $96^{\circ} 55'30,1''$ - $96^{\circ} 19' 45,9''$ Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah seluas 1.798,25 kilometer persegi (km^2) atau seluas 179.825 hektar (Ha). Luas wilayah Kabupaten Bireuen tersebut adalah sekitar 3,13 persen dari total luas wilayah Provinsi Aceh secara keseluruhan ($57.365,57 \text{ km}^2$). Secara administrasi, wilayah daerah Kabupaten Bireuen secara langsung berbatasan pada masing-masing sisi sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Utara;
- Sebelah Utara dengan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie Jaya;
- Sebelah Tenggara dengan Kabupaten Bener Meriah; dan
- Sebelah Barat Daya dengan Kabupaten Pidie;

Pembagian wilayah administrasi pemerintahan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bireuen saat ini terdiri dari sebanyak 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan, meliputi: Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunib, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Makmur, Gandapura, dan Kuta Blang. Di antara seluruh kecamatan tersebut, Kecamatan Peudada dan Kecamatan Juli merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling dominan.



Sumber : Kabupaten Bireuen dalam Angka, 2020

Grafik 2.1 Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2019

Kecamatan terluas dalam hal ini adalah Kecamatan Peudada, dengan wilayah seluas 312,81 Km² atau 17,42 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen. Berikutnya adalah Kecamatan Juli dengan wilayah seluas 231,18 Km² atau 12,87 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan. Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah paling kecil di daerah ini adalah Kecamatan Kota Juang (16,91 Km²) dan Kecamatan Kuala (17,11 Km²), dengan proporsi luas wilayah masing-masing sebesar 0,94 persen dan 1 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan. Gambaran distribusi luas wilayah Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut:

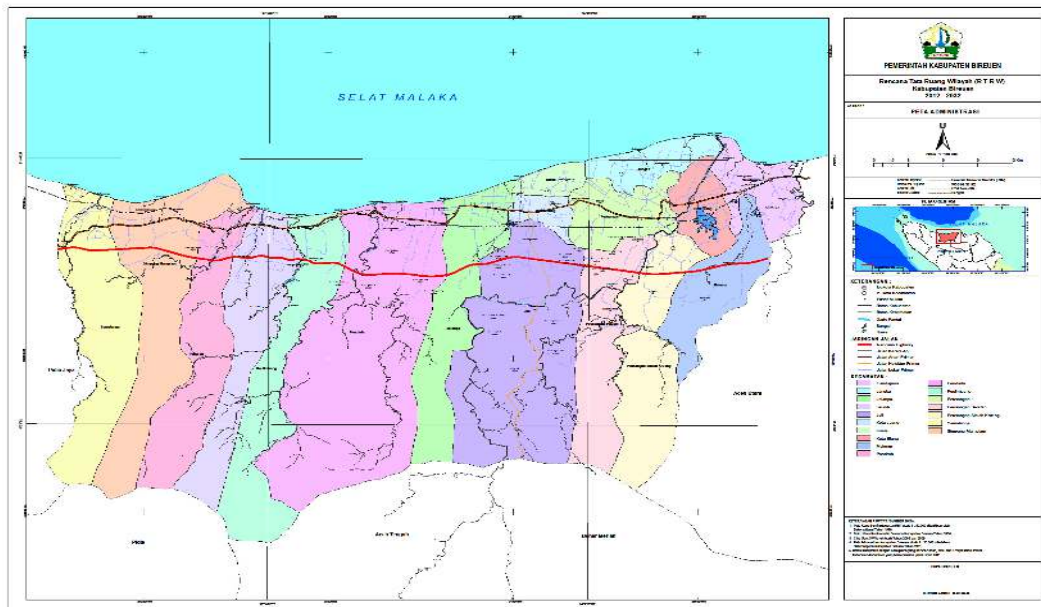
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Bireuen Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (persen)
1	Samalanga	141,42	7,9
2	Simpang Mamplam	155,50	8,7
3	Pandrah	114,01	6,3
4	Jeunieb	112,51	6,3
5	Peulimbang	127,89	7,1
6	Peudada	312,81	17,4
7	Juli	231,18	12,9
8	Jeumpa	109,14	6,1
9	Kota Juang	16,91	0,9
10	Kuala	17,11	1,0
11	Jangka	37,58	2,1

12	Peusangan	59,08	3,3
13	Peusangan Selatan	94,15	5,2
14	Peusangan Siblah Krueng	111,57	6,2
15	Makmur	71,74	4,0
16	Gandapura	46,95	2,6
17	Kuta Blang	38,70	2,2
Jumlah		1 798,25	100,00

Sumber : Bireuen Dalam Angka 2020

Selain itu, letak geografis Kabupaten Bireuen juga terletak di kawasan perlintasan jalan nasional lintas pulau Sumatera juga merupakan nilai strategis yang perlu dimanfaatkan sebagai peluang bagi daerah ini untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Dalam posisi tersebut, Kabupaten Bireuen diharapkan menjadi suatu kawasan pertumbuhan ekonomi di kawasan sentral pantai utara-timur, serta juga menjadi sentral untuk wilayah tengah dari Provinsi Aceh. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memanfaatkan letak strategis daerah ini diantara sejumlah daerah lain di sekitarnya, terutama Kabupaten Pidie Jaya, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Utara. Posisi Kabupaten Bireuen dalam pusat perdagangan dan bisnis (*Central Distric of Bussiness*), hal ini juga memungkinkan sebagai sentra kemitraan lintas daerah dalam bentuk transaksi perdagangan, pariwisata, maupun jasa-jasa lainnya.



Sumber Bappeda Kabupaten Bireuen 2019

Gambar 2.1 Peta Administratif Kabupaten Bireuen

Oleh karena itu pula, dapat dilakukan upaya untuk menjadikan Kabupaten Bireuen sebagai suatu Kawasan sentra pertumbuhan ekonomi,

kiranya perlu didukung dengan keberadaan sejumlah prasarana dan sarana infrastruktur penunjang bagi aktivitas sektor perdagangan, pariwisata serta jasa-jasa lainnya, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan aktifitas usaha sektor perdagangan, pariwisata dan jasa ini pula yang diharapkan dapat memberikan manfaat serta dampak secara lebih luas (*multiplier effect*) bagi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen, serta semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah ini nantinya.

Letak geografis dari sebagian besar wilayah Kabupaten Bireuen pada sisi utara yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, merupakan potensi sekaligus peluang pada sektor perikanan yang dapat dimanfaatkan secara lebih potensial. Potensi tersebut didukung oleh keberadaan dari sejumlah aliran sungai di daerah ini, yang hampir seluruhnya bermuara ke Selat Malaka. Selain itu, juga dapat menjadi sumber air yang dapat mengairi lahan pertanian maupun kebutuhan masyarakat lainnya. Keberadaan aliran sungai yang bermuara (*kuala*) di sejumlah kawasan di Kabupaten Bireuen juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang bermata pencaharian nelayan sebagai jalur keluar masuk para nelayan menuju perairan saat akan mencari dan menangkap ikan di laut. Meskipun demikian selama ini sejumlah muara sungai atau *kuala* di sejumlah kawasan telah mengalami pendangkalan, sehingga untuk itu diperlukan perhatian pemerintah untuk melakukan pengerukan dan upaya pemeliharaan secara berkala, agar pemanfaatan dari keberadaan muara aliran sungai ataupun *kuala* tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian sehingga dapat dirasakan peningkatan kesejahteraan oleh masyarakat.

Potensi sektor perikanan terutama subsektor kelautan di Kabupaten Bireuen selama ini juga telah didukung dengan keberadaan fasilitas tempat pendaratan ikan (TPI) yang ada di sejumlah wilayah kecamatan, serta pelabuhan pendaratan ikan (PPI) yang terdapat di Kecamatan Peudada, beserta infrastruktur penunjang operasional lainnya, termasuk dalam hal pengelolaan hasil tangkapan para nelayan di daerah ini. Namun demikian, upaya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor perikanan tersebut masih memerlukan keseriusan dan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat itu sendiri, untuk dapat menggali potensi sektor kelautan secara lebih maksimal, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai kearifan lokal (*local wisdom*),

terutama menyangkut dengan konsep pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (sustainable development).

Bentuk upaya yang dirasa cukup penting dalam hal ini adalah adanya kesadaran di kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan untuk tidak melakukan metode ataupun teknik penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut itu sendiri, misalnya dengan tidak menggunakan pukot harimau, bom ikan, maupun jenis alat tangkap lainnya yang dapat mengancam kelestarian ekosistem laut tadi. Terkait hal tersebut masyarakat juga diharapkan harus dapat bekerjasama dengan pemerintah terutama untuk menjaga dan mengawal wilayah laut dan perairan di daerah ini dari ancaman penjarahan dan pengrusakan oleh nelayan-nelayan asing, yang pada umumnya menggunakan teknologi peralatan tangkap yang dapat mengancam serta menyebabkan kerusakan ekosistem laut tadi secara masif. Untuk itu diperlukan peran dan dukungan semua pihak, karena jika hal ini tidak dilakukan maka keberadaan potensi kekayaan alam hasil laut yang ada, mungkin hanya akan dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang, tapi tidak akan dapat dinikmati lagi oleh generasi penerus bangsa ini dimasa yang akan datang.

Kabupaten Bireuen dianugerahi sejumlah kuala yang dapat digunakan oleh para nelayan sebagai jalur keluar masuk ke laut lepas seperti yang telah diuraikan di atas. Namun demikian, hampir semua kuala yang ada relatif dangkal, bahkan sebagiannya dalam kondisi tersumbat. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas nelayan untuk melaut, di samping berpengaruh pada kurang lancarnya arus air keluar masuk ke areal pertambakan rakyat. Kondisi kuala tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Nama dan Kondisi Kedalaman Kuala
Di Kabupaten Bireuen

No.	Kecamatan	Desa	Nama Kuala	Kondisi
1.	Samalanga	- Meunasah Lancok	- Kuala Sukun	Dangkal
		- Pante Rheng	- Kuala Samalanga	Dangkal
		- Arongan	- Kuala Arongan	Dangkal
2.	Sp. Mamplam	- Tambue	- Kuala Tambue	Dangkal
		- Curee Tunong	- Kuala Cangkoi	Dangkal
		- Ulee Kareuen	- Kuala Jeumeulok	Dangkal
3.	Pandrah	- Nasee Me	- Kuala Pandrah	Dangkal

4.	Jeunieb	- Blang Lancang	- Kuala Pandrah	Dangkal
5.	Plimbang	- Seuneubok Plimbang	- Krueng Nalan	Dangkal
6.	Peudada	- Padang Kasab	- Krueng Bugeng	Dangkal
		- Sawang	- Kuala Sawang	Sumbat
7.	Jeumpa	- Matang Pasi/Blang Kubu	- Kuala Peudada	Sumbat
		- Kukue	- Kuala Kukue	Dangkal
		- Kuala Jeumpa	- Kuala Jeumpa	Dangkal
8.	Kuala	- Batee Timeuh	- Kuala Batee Timeuh	Dangkal
		- Lipah Cut	- Kuala Lipah	Dangkal
		- Krueng Juli Barat	- Kuala Krueng Juli	Sumbat
9.	Jangka	- Kuala Raja	- Kuala Rapi	Sumbat
		- Jangka Masjid	- Kuala Jangka	Sumbat
10.	Kutablang	- Punjot	- Kuala Pawoeu	Sumbat
		- Kuala Ceurape	- Kuala Ceurape	Dangkal
11.	Gandapura	- Mon Keulayu	- Kuala Mon Keulayu	Dangkal
		- Mon Keulayu	- Kuala Abu	Dangkal
		- Lapang Barat	- Kuala Bugeng	Dangkal
		- Ie Rhop	- Kuala Mane	Dangkal

Sumber : Bappeda Kabupaten Bireuen, 2020

II.1.1.2 Topografi

Dari sisi topografi lahan, secara umum wilayah Kabupaten Bireuen terdiri dari wilayah yang datar dan bergelombang dengan elevasi antara 0 - 2 persen, terutama pada wilayah pesisir di sebelah utara. Sedangkan di bagian sebelah selatan, topografi lahan daerah ini pada umumnya adalah daerah berbukit dengan kemiringan atau elevasi antara 15 - 40 persen. Penjabaran kelerengan pada tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Kemiringan Lereng Kabupaten Bireuen Tahun 2019

Kecamatan	Kemiringan Lereng				
	0-2 persen	2-5 persen	5-15 persen	15-40 persen	>40 persen
Gandapura	1.487,52	2.117,23	1.051,06	-	-
Jangka	1.089,59	1.303,24	1.356,09	-	-
Jeumpa	1.742,88	466,26	3.546,04	4.627,17	503,67
Jeunieb	2.334,71	638,87	1.477,06	4.669,19	2.117,66
Juli	491,78	883,31	10.510,60	11.193,43	39,24
Kota Juang	840,23	776,34	74,31	-	-
Kuala	1.122,25	-	602,31	-	-
Kuta Blang	1.516,48	691,84	1.661,81	-	-
Makmur	131,38	682,87	6.043,10	-	-

Pandrah	999,15	680,90	1.093,50	5.682,51	5.682,51
Peudada	2.872,79	256,08	9.516,78	16.815,23	16.815,23
Peulimbang	1.067,17	745,28	1.912,49	6.219,20	6.219,20
Peusangan	2.259,19	1.680,10	1.650,48	317,86	317,86
Peusangan Selatan	596,09	1.135,87	2.679,14	5.003,60	5.003,60
Peusangan Siblah Krueng	37,23	270,16	7.744,42	3.153,54	3.153,54
Samalanga	1.972,52	453,71	1.570,47	5.332,35	5.332,35
Simpang Mamplam	3.154,17	1.193,87	2.570,56	6.575,80	6.575,80

Sumber : RTRW Bireuen, 2012-2032

II.1.1.3 Geologi

Geologi wilayah Kabupaten Bireuen dapat di bagi atas beberapa jenis bebatuan yang menjadi tumpukan dan penampang pembentukan permukaan tanah. Hal ini didukung juga oleh penampang geologi permukaan sebagai sebaran bebatuan baik lateral maupun vertikal hingga sampai pada kedalaman batuan dasar. Sebaran geologi diantaranya adalah aluvial, batuan sedimen, batuan gunung api, dan batuan sedimen-meta sedimen.

II.1.1.4 Hidrologi

Dalam menunjang berbagai kegiatan seperti pertanian, industri, rumah tangga dan lain sebagainya, sumber daya air yang dapat dimanfaatkan di wilayah Kabupaten Bireuen yaitu:

1. Daerah Aliran Sungai

Perairan terbuka yang dapat dimanfaatkan di wilayah ini adalah sungai, semuanya berhulu di dataran tinggi bukit barisan dan bermuara ke Selat Malaka. Terdapat 1 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup besar yaitu DAS Krueng Peusangan sedangkan sub DAS lainnya, diantaranya Krueng Peudada, Krueng Pandrah, dan Krueng Jeunieb. Jika dilihat bentuk pola alirannya, maka sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini berbentuk sub paralel di bagian hulu, hal ini karena wilayah yang bergunung sehingga pola aliran yang terbentuk mengikuti lereng dari suatu jalur pegunungan, sedangkan pada bagian hilir berbentuk linier. Keadaan sungai-sungai tersebut sebagian ada yang sudah terkena erosi yang mengakibatkan lingkungan rusak dan rawan bahaya banjir. Banjir ini disebabkan karena terjadinya penggundulan hutan di wilayah hulu sungai.

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara general adalah suatu daerah aliran sungai dan anak-anak sungainya, dalam banyak literatur disebut

juga daerah tangkapan air atau basin (cekungan, lembah) sungai (river basin) atau satuan wilayah sungai dengan batasan bahwa semua air yang jatuh dari hujan atau keluar dari sumber air akan mengalir dalam suatu aliran pembuangan air (drainase) dan berkumpul di suatu outlet di wilayah pesisir yang dapat berupa estuari atau muara atau delta dan lahan basah. Daerah resapan air di Kabupaten Bireuen meliputi DAS Peusangan dan DAS Meuredu yang berhulu di dataran tinggi bagian selatan yang merupakan lembah-lembah atau punggung bukit yang berfungsi untuk menangkap air hujan (*Catchment Area*). Terdapat 16 (enam belas) sungai yang mengalir wilayah ini dengan luas 1.842 ha, yang terbesar adalah sungai peusangan di samping sungai, daerah rawa-rawa (Paya) termasuk daerah resapan air yang perlu di jaga kelestariannya. Di Kabupaten Bireuen terdapat 29 (dua puluh sembilan) daerah rawa seluas 310 ha.

2. Daerah Rawa

Di Kabupaten Bireuen daerah berawa tersebar di beberapa kecamatan, dari Kecamatan Samalanga sampai Gandapura, daerah-daerah tersebut merupakan sumber daya air dan daerah resapan yang perlu dijaga kelestariannya. Adapun daerah rawa (Paya) yang paling besar adalah Paya Nie seluas 150 ha yang berada di Kecamatan Kuta Blang. Luas keseluruhan daerah rawa di wilayah ini adalah 310 ha.

Tabel 2.4
Luas Rawa dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2019

No	Kecamatan	Rawa	Luas (Ha)
1	Kecamatan Samalanga	Cot Mane	5
		Batee Glungku	6
		Glee Mendong	3
		Pingan	1
2	Pandrah	Alue Igeuh	3
		Kupula	1
		Cot Nase	2
		Kubang Tujoh	1
		Reudeup	1
3	Jeunib	Ruseb	1
		Jambo Dalam	5
		Alue Syueng	1.5
4	Peudada	Paya Kameng	7
		Pinto Rimba	3.5
5	Jeumpa	Paya Jagat	14
6	Juli	Paya Geudeubang	16
7	Peusangan	Paya Cut	3

		Krueng Panjo	7
		Paya Lipah	5
		Paya Kura	3
		Beusalok	5
		Paya Umpung	8
8	Jangka	Paya Bieng	5
		Paya Krueng Mate	15
		Paya Krueng Nie	8
9	Makmur	Paya Leubu	7
		Paya Meuseujid	8
10	Kutablang	Paya Nie	150
11	Gandapura	Paya Geurogok	15

Sumber: RTRW Kabupaten Bireuen 2012-2032

II.1.1.5 Klimatologi

Iklm merupakan salah satu faktor yang berperan penting untuk pertumbuhan tanaman. Kondisi iklim di Kabupaten Bireuen sebagaimana pada umumnya di Indonesia, Kabupaten Bireuen merupakan daerah tropis dengan tipe iklim muson, berdasarkan klasifikasi sistem mohr, schmidt dan ferguson termasuk dalam tipe C. Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Bireuen relatif lebih kering di banding dengan bagian lain di Provinsi Aceh. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pegunungan Bukit Barisan, yang mana secara umum wilayah Timur dan Utara merupakan wilayah yang lebih kering dibandingkan dengan wilayah sebelah Barat dan Selatan. Keadaan iklim secara umum di wilayah Kabupaten Bireuen dengan suhu rata-rata 30 °C dan kelembaban udara berkisar 84-89 persen, bila dirata-rata dalam sepuluh tahun berkisar 86,6 persen.

Tabel 2.5
Keadaan Curah Hujan dan Hari Hujan Rata-rata Dirinci Menurut Bulan
Di Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2019

No.	Bulan	Tahun			
		2018		2019	
		Curah Hujan (mm)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1.	Januari	91	6	26	12
2.	Februari	62	11	42	9
3.	Maret	19	2	41	9
4.	April	73	7	47	9
5.	Mei	185	15	119	18
6.	Juni	85	5	80	13
7.	Juli	95	6	62	11
8.	Agustus	38	4	88	14
9.	September	143	10	108	13
10.	Oktober	344	14	120	23
11.	November	235	13	109	24
12.	Desember	211	11	128	18
Jumlah/Rata-rata		111	9	81	14

Sumber : Bireuen Dalam Angka 2020

Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kabupaten Bireuen selama tahun 2019 terjadi pada bulan Desember, yaitu sebanyak 128 mm di bulan November, yaitu sebanyak 24 hari. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Bireuen sepanjang tahun 2019 adalah 81 mm.

II.1.1.6 Penggunaan Lahan

Sebagaimana permasalahan yang umumnya dialami oleh hampir seluruh daerah ataupun kawasan yang sedang tumbuh dan berkembang, dalam konsep perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bireuen masa yang akan datang juga perlu mengantisipasi keterbatasan potensi sumber daya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan daerah itu sendiri. Kecenderungan peningkatan aktivitas perekonomian yang terus berkembang dan tumbuh setiap tahunnya, dibagian hilir tentunya berdampak pada kebutuhan sumber daya lahan yang dapat mendukung pengembangan infrastruktur kawasan permukiman berikut dengan berbagai fasilitas sosial-ekonomi lain seperti perdagangan, industri dan jasa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Sementara di sisi lain, aktivitas ekonomi di bagian hulu seperti sektor perkebunan dan pertanian tentunya akan semakin berkurang ketersediaannya akibat peralihan fungsi lahan tersebut. Oleh karena itu, dalam rencana pembangunan jangka menengah (2017-2022), konsep penataan dan pengelolaan sumberdaya lahan secara lebih berkelanjutan di Kabupaten Bireuen juga dinilai sangat penting untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan keberadaan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen, untuk menjadi acuan dan pedoman dalam pemanfaatan ruang/lahan dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Berdasarkan sebaran penggunaan lahannya, penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen terbagi atas tiga wilayah yaitu wilayah pantai, wilayah tengah dan wilayah pedalaman. Wilayah pantai didominasi kegiatan sawah dan tambak, wilayah tengah kegiatan perdagangan dan jasa serta sawah dan wilayah pedalaman kegiatan dominan perkebunan untuk pertanian tanaman pangan, dan kehutanan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen terbagi dalam 12 jenis, dengan luas terbesar 59.525,16 Ha yaitu pertanian lahan kering campur, dan luas terkecil dengan peruntukan rawa seluas 101,56 Ha. Gambaran lebih rinci terkait rencana penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Rencana Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen

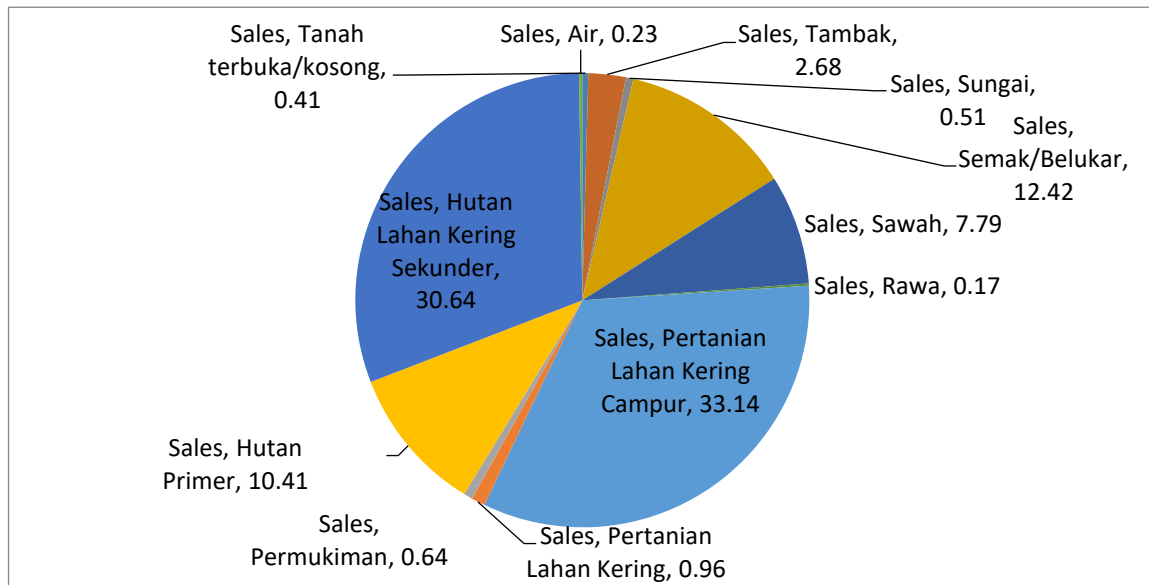
KELAS GUNA LAHAN	LUAS (HA)	Persen
Tanah Terbuka/kosong	742.03	0.41
Tambak	4.814,43	2.68
Sungai	925,06	0.51
Semak/Belukar	22.313,63	12.42
Sawah	13.990,00	7.79
Rawa	310.00	0.17
Pertanian Lahan Kering Campur	59.525,16	33.14
Pertanian Lahan Kering	1.717,75	0.96
Permukiman	1.146,62	0.64
Hutan Primer	18.500,49	10.41
Hutan Lahan Kering Sekunder	55.034,42	30.64
Air	418,18	0.23
Total	179.825,00	100.00

Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen 2012-2032

Dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan yaitu seluas 179.825 Ha, sebagian besar diantaranya adalah merupakan Kawasan lahan yang tergolong pada lahan kawasan budidaya. Sebagaimana maksud dari konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dalam hal ini pemanfaatan dan penggunaan lahan di daerah ini tentunya perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lebih baik, dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan beserta ekosistem yang terdapat didalamnya. Peran dan fungsi kawasan ini sekaligus juga sebagai penyangga keberlanjutan sumberdaya air dan kelestarian lingkungan Kabupaten Bireuen di masa mendatang.

Sesuai kondisi geografis dan topografi wilayah daerah ini, terdapat lahan budidaya yang dinilai berpotensi untuk diarahkan peruntukannya bagi pengembangan sektor perkebunan dan hutan produksi. Hal tersebut tentunya perlu menjadi perhatian dan fokus dalam kaitannya dengan penyusunan dokumen konsep perencanaan pembangunan dimasa mendatang, agar kiranya terdapat sinergi dan kesesuaian dari berbagai program yang diusulkan dalam perencanaan, termasuk kesesuaiannya dengan konsep rencana tata ruang wilayah (RTRW), sehingga ke depan pembangunan yang berlangsung di daerah ini betul-betul mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam hal serta kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dari Grafik 2.2 terlihat penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen yang paling luas adalah untuk

penggunaan Pertanian Lahan Kering Campur yaitu 59.525,16 Ha, atau seluas 33,14 persen dari luas kabupaten ini. Selanjutnya penggunaan lahan diikuti untuk lahan Hutan Lahan Kering Sekunder yaitu seluas 55.034,42 Ha atau sebesar 30.64 dari luas Kabupaten Bireuen. Sementara itu penggunaan lahan yang paling kecil adalah untuk penggunaan rawa yaitu sebesar 310,00 Ha atau seluas 0.17 persen dari luas Kabupaten Bireuen.



Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen 2012-2032

Grafik 2.2 Rencana Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen (persen)

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian terkait dengan alokasi peruntukan lahan tersebut adalah kecenderungan terus meningkatnya arus perpindahan (migrasi) penduduk dari daerah lain ke wilayah Kabupaten Bireuen pasca konflik di bumi Aceh serta peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah ini sehingga dapat tertariknya masyarakat ingin pindah ke kabupaten ini. Kondisi dan kenyataan tersebut perlu diantisipasi dengan upaya dan kesadaran bersama dari segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk masyarakat dalam hal ini, untuk ikut serta menjaga kemampuan dan ketersediaan lahan pemukiman yang dapat menampung kebutuhan lokasi tempat hunian bagi warga/masyarakat penduduk daerah ini dalam jangka panjang, sehingga nantinya tidak justru akan mengancam ataupun mengurangi porsi ketersediaan lahan dengan peruntukan lainnya, terutama pada jenis-jenis peruntukan dan pemanfaatan lahan bagi aktifitas usaha ekonomi yang menjadi tumpuan masyarakat daerah ini, seperti lahan pertanian, perkebunan dan perikanan, yang juga perlu dipastikan ketersediaannya.

II.1.2 Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Bireuen. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

Kualitas dan produktivitas masyarakat merupakan sasaran dan tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah dari proses pembangunan yang dilaksanakannya, termasuk dalam hal ini yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen. Kualitas penduduk yang meningkat serta memiliki daya saing yang tinggi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi ataupun sumber daya alam yang dimiliki secara lebih optimal dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang pada akhirnya dapat mewujudkan pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera.

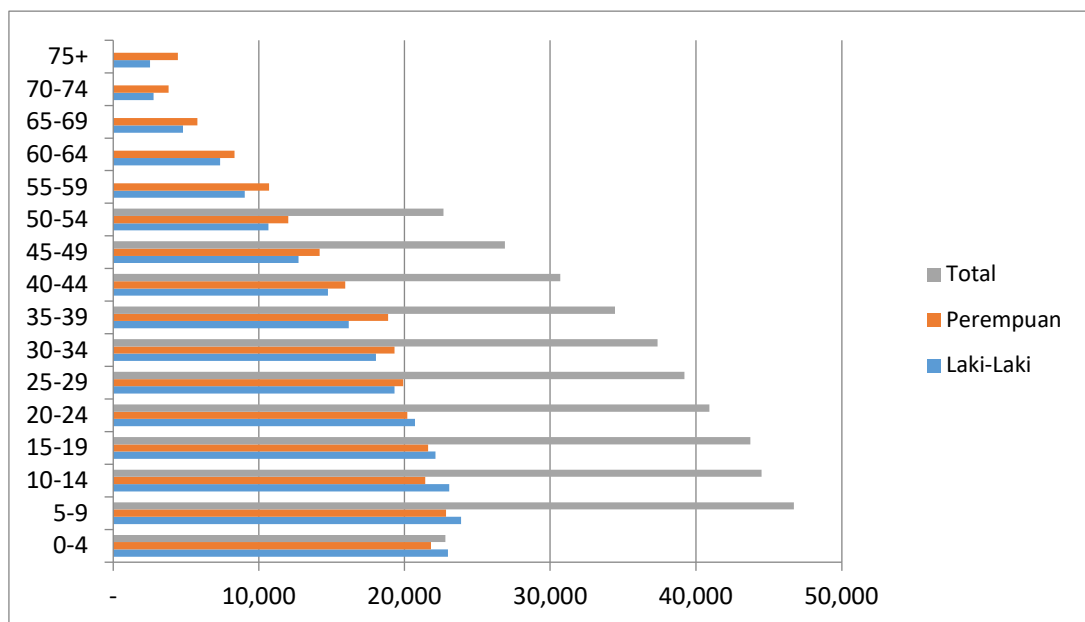
Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Bireuen diharapkan dapat memainkan peran dan fungsinya secara lebih maksimal dengan terlibat secara aktif sebagai bagian ataupun pelaku dari proses pembangunan daerah itu sendiri. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka keberadaan SDM di daerah dikhawatirkan justru dapat menjadi beban bahkan dapat menjadi penghambat dari pembangunan itu sendiri dimasa mendatang.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	22 992	21 810	44 802
5-9	23 878	22 850	46 728
10-14	23 076	21 420	44 496
15-19	22 133	21 615	43 748
20-24	20 733	20 203	40 936
25-29	19 322	19 902	39 224

30-34	18 048	19 319	37 367
35-39	16 176	18 267	34 443
40-44	14 740	15 944	30 684
45-49	12 730	14 173	26 903
50-54	10 663	12 018	22 681
55-59	9 030	10 706	19 736
60-64	7 353	8 334	15 687
65-69	4 798	5 795	10 593
70-74	2 784	3 817	6 601
75+	2 549	4 457	7 006
Jumlah	231 005	240 630	471 635
2018	225 920	235 806	461 726
2017	221 798	231 426	453 224
2016	217 105	226 522	443 627
2015	212 907	222 393	435 300

Sumber ; Bireuen dalam angka 2020



Grafik 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2019

Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk Kabupaten Bireuen terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,13 persen pertahun, tahun 2018 jumlah penduduk di Kabupaten Bireuen mencapai 461 726 jiwa, meningkat 2.1 persen pada tahun 2019 menjadi 471 635 jiwa. Dibanding dengan tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Bireuen meningkat 2,7 persen, dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk kabupaten Bireuen masih sebanyak 435 300 jiwa.

Penduduk Kabupaten Bireuen berdasarkn usia masih didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara 15-59 tahun dengan jumlah 295 722

jiwa atau sebesar 62,70 persen dari total jumlah penduduk di tahun 2019, sianya sebanyak 175 893 jiwa atau sebesar 3,30 persen merupakan penduduk tidak produktif yaitu penduduk dengan usia 0-14 tahun dan penduduk usia lanjut 60-75 tahun. Kondisi tersebut meperlihatkan kondisi Kabupaten Bireuen masih memiliki bonus demografi yaitu proporsi penduduk usia produktif masih mendominasi dibandingkan dengan penduduk tidak produktif.

II.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Struktur Ruang

Kondisi objektif hirarki pusat-pusat permukiman eksisting Kabupaten Bireuen Tahun 2011, kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi yang menempatkan Bireuen sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), hirarki pusat-pusat permukiman saat ini (eksisting) berada pada 17 Kecamatan. Salah satu peranan rencana penataan ruang adalah untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah (kecamatan) dan sekaligus mengantisipasi pertumbuhan pembangunan yang terkonsentrasi pada pusat kota (ibu kota kabupaten) atau pada kawasan tertentu saja. Hal ini juga berkenaan dengan penciptaan sistem pusat-pusat kota yang berjenjang sehingga terbangun suatu sistem perkotaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, terdapat pusat-pusat permukiman yang perlu didorong pertumbuhannya dan ada pula yang hanya cukup dikendalikan sesuai potensinya, bahkan mungkin dibatasi.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Matang Geulumpang Dua adalah Ibukota Kecamatan Peusangan merupakan pusat kegiatan pendukung dari PKW Bandar Bireuen sebagai pengembangan dengan fungsi utama dalam bidang pendidikan, perdagangan, perindustrian, simpul transportasi bagian timur, pertanian lahan basah, perikanan, pertahanan keamanan, pertambangan dan permukiman dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

2. Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten, mengatur keseimbangan

dan keserasian peruntukan ruang, sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun dan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten. Penjelasan lebih lanjut dan mendetil mengenai struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Bireuen tertuang dalam Dokumen RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032.

II.1.4 Wilayah Rawan Bencana

1. Daerah Rawan Gempa

Gempa adalah suatu kejadian dimana lapisan bumi mengalami pergeseran, baik pergeseran arah vertikal maupun horizontal. Ini dipengaruhi oleh adanya lapisan/gugusan lempengan sembak yang melintang dari ujung barat Kota Banda Aceh sampai sepanjang pesisir pantai barat, yang mengakibatkan imbasan gerakan lempeng tersebut dapat dirasakan sampai ke pesisir pantai timur yang melintasi Kabupaten Bireuen.

Jika ditinjau dari Struktur Tatanan Geologi Tektonik Regional Pulau Sumatera dari arah barat laut melalui pulau Jawa sampai di Indonesia Bagian Timur merupakan jalur magmatik dan jalur busur luar dari rangkaian gunung berapi aktif dan di bagian pantai barat terdapat *Trench* (Palung).

2. Daerah Rawan Abrasi dan Tsunami

Wilayah Kabupaten Bireuen termasuk yang terkena dampak dari hantaman gelombang tsunami pada Tanggal 26 Desember 2004. Wilayah pesisir merupakan daerah yang paling terkena dampak abrasi dan tsunami, yang sebagian besar peruntukan lahannya sebagai tambak dan pantai. Faktor lain yang memperparah kerusakan adalah tidak adanya kawasan penyangga alamiah (*Buffer Zone*) yang dapat menahan laju gelombang tsunami ke arah darat.

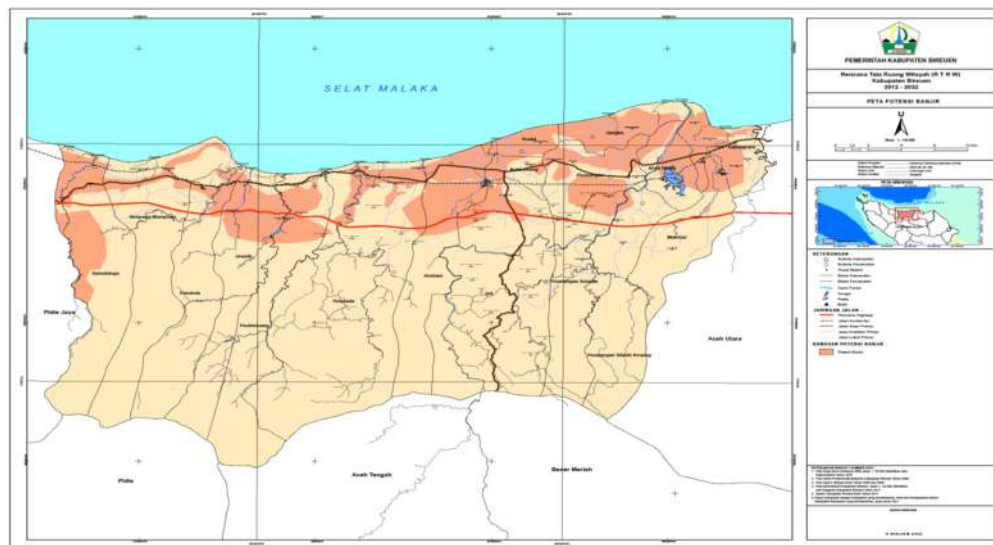
3. Daerah Potensi Banjir

Kabupaten Bireuen berpotensi banjir ringan atau rendah. Hal ini disebabkan topografi Kabupaten Bireuen dengan kelerengan yang bervariasi dan hanya sebagian kecil wilayah pesisir yang memiliki potensi banjir. Faktor terjadinya banjir sangat memungkinkan dikarenakan kondisi curah hujan yang anomali. Untuk lebih jelas mengenai potensi banjir di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Tingkat Kerawanan wilayah berpotensi banjir Kabupaten Bireuen

Tinggi Genangan	Keterangan	Luas (Ha)
0.0 - 0.50 m	Rendah	18.227,72
0.50 - 1.00 m	Sedang	5.046,37
1.00 - 1.50 m	Tinggi	403,32
1.30 - 1.50 m	Sangat tinggi	16.584,51
1.50 - 2.00 m	Berbahaya	13.648,64
		53.910,55

Sumber :RTRW (diolah) Kabupaten Bireuen, 2012-2032



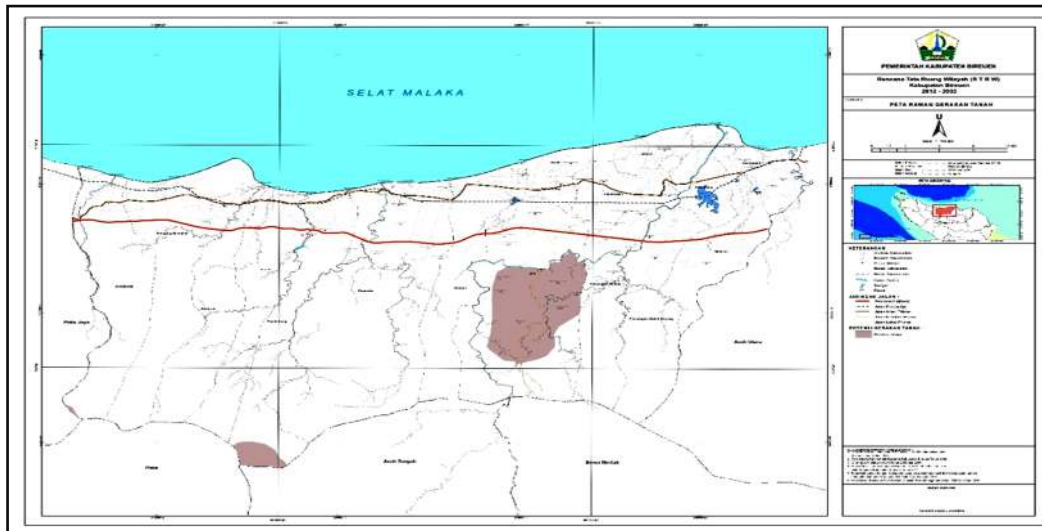
Sumber : Bappeda Kabupaten Bireuen, 2019

Gambar 2.2 Peta Potensi Banjir Kabupaten Bireuen

4. Daerah Rawan Longsor dan Gerak Tanah

Kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor di Kabupaten Bireuen seluas 8.379,23 ha, meliputi Kecamatan Samalanga seluas 48,57 ha, Peulimbang seluas 1.047,75 ha dan Juli seluas 8.330,66 ha. Kawasan gerak tanah yang berpotensi rawan secara menyatu terdapat pada jalan nasional Bireuen – Aceh Tengah sekitar km 11 sampai km 30.

Dampak dari gerakan tanah tersebut mengakibatkan hancurnya kawasan permukiman penduduk, rusaknya perkebunan masyarakat, infrastruktur, jaringan listrik dan komunikasi. Kerusakan infrastruktur mengakibatkan putusnya akses dari Kabupaten Bireuen ke Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, sehingga pergerakan orang dan barang antar kabupaten terhambat.



Gambar 2.3 Peta Potensi Gerak Tanah Kabupaten Bireuen

II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

II.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

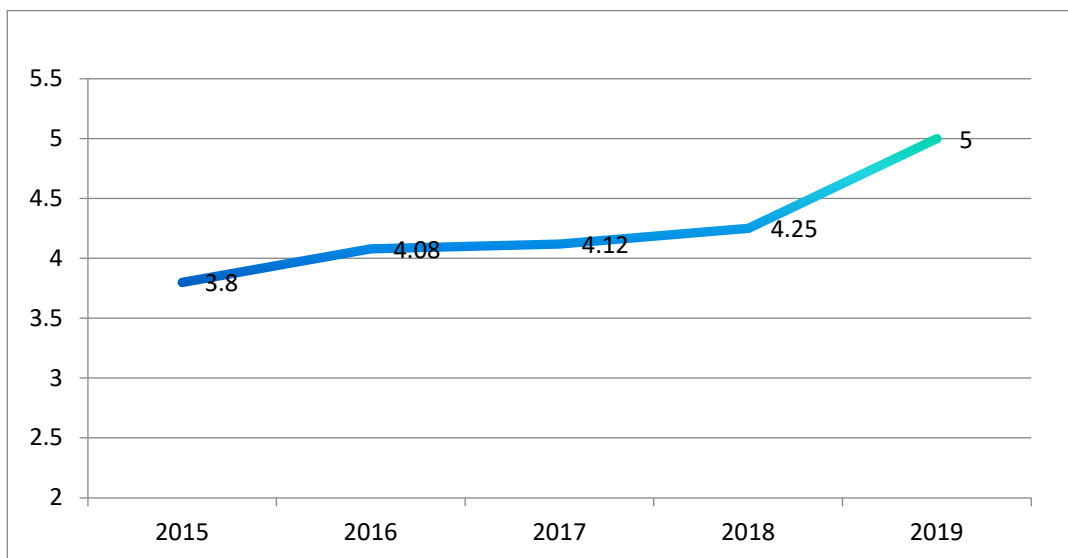
II.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mengkaji tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat, maka digunakan indikator perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha disuatu daerah dalam periode waktu tertentu. Perhitungan PDRB terbagi dalam dua kategori utama, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga konstan (ADHK) 2010. Sejak tahun 2014, perhitungan PDRB (regional) dan PDB (nasional) telah menggunakan tahun dasar 2010 dan tidak lagi menggunakan tahun dasar 2000. Penggunaan tahun dasar 2010 dimaksudkan agar nilai pertumbuhan PDRB sebagai parameter penilaian kinerja perekonomian suatu daerah dapat lebih akurat dan objektif.

Secara umum, perekonomian Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang relatif pesat. Kondisi ini juga dapat menggambarkan bahwa usaha ekonomi yang dijalankan oleh warga masyarakat Kabupaten Bireuen selama ini semakin berkembang. Gambaran secara lebih nyata dari realita tersebut juga terlihat dari kecenderungan peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tanpa memasukkan perhitungan angka inflasi, nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kabupaten Bireuen selama periode 2015–2019 menunjukkan trend peningkatan. Besaran rata-rata peningkatan nilai PDRB

ADHK Kabupaten Bireuen selama kurun waktu tersebut adalah 4,25 persen per-tahun. Pada tahun 2019 nilai PDRB ADHK tercatat sebesar Rp. 10,076 triliun, yang meningkat bila dibandingkan dengan nilai PDRB ADHK tahun 2015 sebesar Rp. 8,48 triliun. Trend peningkatan nilai PDRB ADHK tersebut selama ini juga harus diakui sebagai bagian dari buah upaya kerja keras pemerintah daerah melalui implementasi berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini, serta upaya dan peran serta masyarakat dan pelaku dunia usaha/swasta dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Gambaran perkembangan nilai PDRB Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu tahun 2015–2019 tersebut dapat dilihat pada tampilan gambar berikut ini.



Sumber :Bireuen Dalam Angka 2020

Grafik 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 (Persen)

Dilihat lebih jauh perkembangan PDRB berdasarkan peran sektoral dalam pembentukan nilai PDRB ADHK, terlihat bahwa sektor pertanian selama ini masih dominan diantara sektor-sektor lain dalam struktur perekonomian daerah Kabupaten Bireuen. Secara absolut nilai tambah produksi sektor pertanian dalam PDRB ADHK terus meningkat selama kurun waktu tahun 2015-2019.

Jika dilihat dari sisi nilai tambah sektoral terhadap pembentukan PDRB ADHK Kabupaten Bireun periode 2015-2019, sektor pertanian masih menempati urutan pertama bagi perekonomian daerah Kabupaten Bireuen, selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga terdapat di urutan kedua perekonomian daerah ini.

Namun untuk pertumbuhan rata-ratanya Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang mengalami pertumbuhan positif yang sangat tinggi.

Gambaran tentang nilai dan kontribusi dari masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB ADHK Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir, lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9
Tren PDRB ADHK Kabupaten Bireuen
Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	2664293.95	2748478.93	2840759.02	2917977.13	3048425.28
Pertambangan dan penggalian	232737.77	237861.89	231635.34	227436.67	230443.25
Industri pengolahan	139116.50	140757.16	144587.16	150424.37	153590.94
Pengadaan listrik dan gas	6722.63	7279.27	7934.99	8691.38	9556.03
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3356.85	3670.50	4020.80	4335.06	5341.65
Konstruksi	724994.52	757994.52	799994.52	851449.15	909229.35
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2102472.51	2209566.88	2331093.59	2486090.21	2614664.14
Transportasi dan pergudangan	880292.54	887362.69	899623.77	907896.82	940251.76
Penyediaan akomodasi dan makan minum	87779.42	91688.64	97279.57	103454.02	110821.64
Informasi dan komunikasi	245230.85	251571.98	256575.19	261007.55	270877.97
Jasa keuangan dan asuransi	89474.79	93116.43	97240.59	98308.44	106733.78
Real estate	251416.71	266034.85	280357.33	295572.53	315484.20
Jasa perusahaan	24213.05	25022.46	26293	27671.41	29086.41
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	611477.59	658900.70	705356.08	752898.53	791111.48
Jasa pendidikan	135665.24	146633.97	156672.59	166319.01	178589.88
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	179300.57	189786.37	203293.04	217334.41	232852.88
Jasa Lainnya	103351.83	109208.65	115213.95	119214.88	129109.10
PDRB ADHK	8.481.897,32	8.824.935,88	9.197.930,54	9.596.081,56	10.076.169,74

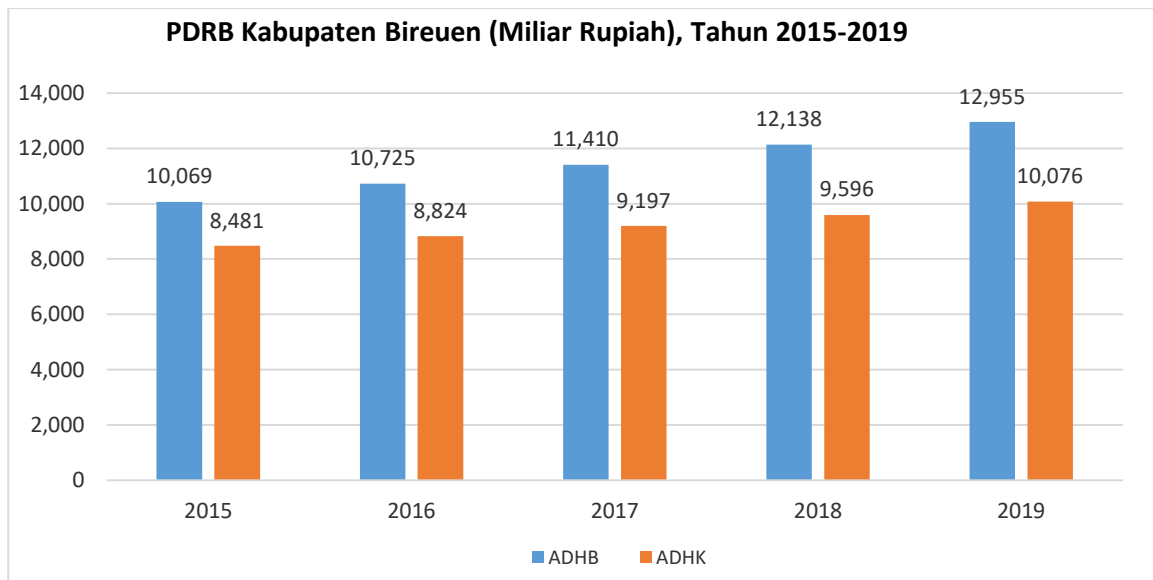
Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Tabel 2.10
Tren PDRB ADHB Kabupaten Bireuen
Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	2664293.95	2748478.93	2840759.02	2917977.13	3048425.28
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3446895.95	3637732.08	3831719.14	4015053.33	4274360.90
Pertambangan dan penggalian	269971.53	278363.80	271110.65	276115.25	286022.55
Industri pengolahan	171521.20	178449.30	191246.95	200309.44	201830.55
Pengadaan listrik dan gas	6013.36	6701.02	7838.07	8663.39	9598.83
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4800.52	5589.04	6392.51	6976.71	8669.04
Konstruksi	857204.52	938910.50	1001095.17	1102267.23	1210232.69
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2224504.20	2364716.93	2531045.19	2743192.90	2896957.68
Transportasi dan pergudangan	1000605.38	1008051	1023044.80	1005767.77	1034716.20
Penyediaan akomodasi dan makan minum	106145.99	116352.78	130331.43	143209.57	160007.99
Informasi dan komunikasi	260826.71	268098.85	275398.81	279331.23	292845.08
Jasa keuangan dan asuransi	118870.53	129597.62	139491.78	146183.66	161096.78
Real estate	291997.95	323287.65	356553.42	385166.59	420637.06
Jasa perusahaan	30588.18	32510.71	35823.03	39251.77	42800.06
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	754567.31	856682.33	967217.75	1086678.83	1171234.31
Jasa pendidikan	159577.07	177685.27	196448.13	217420.55	250302.37
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	238381.90	260907.92	285174.82	310891.48	345458.86
Jasa lainnya	126872.98	142088.12	160991.03	172046.94	188961.81
PDRB ADHB	10.069.345,3	10.725.724,9	11.410.922,7	12.138.526,6	12.955.732,8

Sumber : BPS, Buku PDRB Kab. Bireuen 2015-2019

Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 2.5 PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen

Tabel 2.11
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen
Tahun 2015-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan(ADHK)

SEKTOR	2015		2016		2017		2018*		2019*	
	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34,23	31,18	33,92	31,14	33,58	30,84	33,06	30,28	32,99	30,25
Pertambangan & Penggalian	2,68	2,74	2,60	2,70	2,38	2,52	2,27	2,37	2,21	2,29
Industri Pengolahan	1,70	1,64	1,66	1,59	1,68	1,57	1,65	1,57	1,56	1,52
Listrik, gas	0,06	0,08	0,06	0,08	0,07	0,09	0,07	0,09	0,07	0,09
Air, Sampah, Limbah dan	0,05	0,04	0,05	0,04	0,06	0,04	0,06	0,05	0,07	0,05
Konstruksi	8,51	8,55	8,75	8,59	8,77	8,70	9,08	8,89	9,34	9,02
Perdagangan, Reperasi Mobil & Sepeda motor	22,09	24,79	22,05	25,04	22,18	25,36	22,62	25,97	22,36	25,95
Transportasi dan Pergudangan	9,94	10,38	9,40	10,06	8,97	9,79	8,29	9,47	7,99	9,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,05	1,03	1,08	1,04	1,14	1,06	1,18	1,08	1,24	1,10
Informasi dan Komunikasi	2,59	2,89	2,50	2,85	2,41	2,79	2,30	2,72	2,26	2,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,18	1,05	1,21	1,06	1,22	1,06	1,20	1,03	1,24	1,06
Real Estate	2,90	2,96	3,01	3,01	3,12	3,05	3,17	3,08	3,25	3,13
Jasa Perusahaan	0,30	0,29	0,30	0,28	0,31	0,29	0,32	0,29	0,33	0,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,49	7,21	7,99	7,47	8,48	7,67	8,95	7,86	9,04	7,85
Jasa Pendidikan	1,58	1,60	1,66	1,66	1,72	1,70	1,79	1,74	1,93	1,77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,37	2,11	2,43	2,15	2,50	2,21	2,56	2,27	2,67	2,31
Jasa Lainnya	1,26	1,22	1,32	1,24	1,41	1,25	1,42	1,24	1,46	1,28
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

II.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu tahun tertentu. Seberapa besar tingkat inflasi yang terjadi selama ini di Kabupaten Bireuen dapat dicermati dari angka inflasi di

Kota Lhokseumawe. Dari situs resmi Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe menunjukkan, tingkat inflasi di daerah Lhokseumawe berada di atas rata-rata nasional, dan bahkan berada di atas Banda Aceh (pada tahun tertentu).

Perkembangan kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bireuen yang tergambar dari laju inflasi selama ini mulai menunjukkan kecenderungan dapat lebih terkendali dan terjaga dengan cukup baik. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kemajuan yang perlu tetap dipertahankan, agar daya beli masyarakat tetap dapat menjangkau upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Data Inflasi pada bulan Desember 2019 Kabupaten Bireuen mengacu pada Kota Lhokseumawe mengalami inflasi sebesar 1,20 persen. Inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan oleh peningkatan indeks harga konsumen kelompok bahan makanan sebesar 2,83 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,30 persen; kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,69 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan terbakau sebesar 0,01 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar yang inflasinya tidak terlalu signifikan. Sebaliknya, kelompok sandang mengalami deflasi sebesar 0,09 persen, sedangkan kelompok kesehatan tidak mengalami perubahan indeks. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional pada periode yang sama, yaitu sebesar 2,37 persen. Pada tahun-tahun sebelumnya dalam periode tahun 2015-2018, kecenderungan naiknya harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bireuen relatif cukup stabil kecuali pada tahun 2016 dimana angka inflasi sebesar 5,60 persen, hal ini disebabkan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) solar dan premium, cabai merah, bawang merah, tarif listrik, dan lain lain. Sampai pada tahun 2017, angka inflasi Bireuen menurun secara drastis, yaitu sebesar 2,87 persen dan kemudian terus mengalami penurunan lagi pada tahun 2018, sebesar 2,05 persen.

Berikutnya, tren perkembangan harga barang dan jasa yang sudah relatif lebih stabil saat ini kiranya perlu diupayakan agar dapat terus terjaga dengan baik. Inflasi yang cenderung tinggi dapat melemahkan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk dapat bertahan hidup, yang ikut melemahkan daya perputaran ekonomi daerah karena menurunnya permintaan atas produksi dan

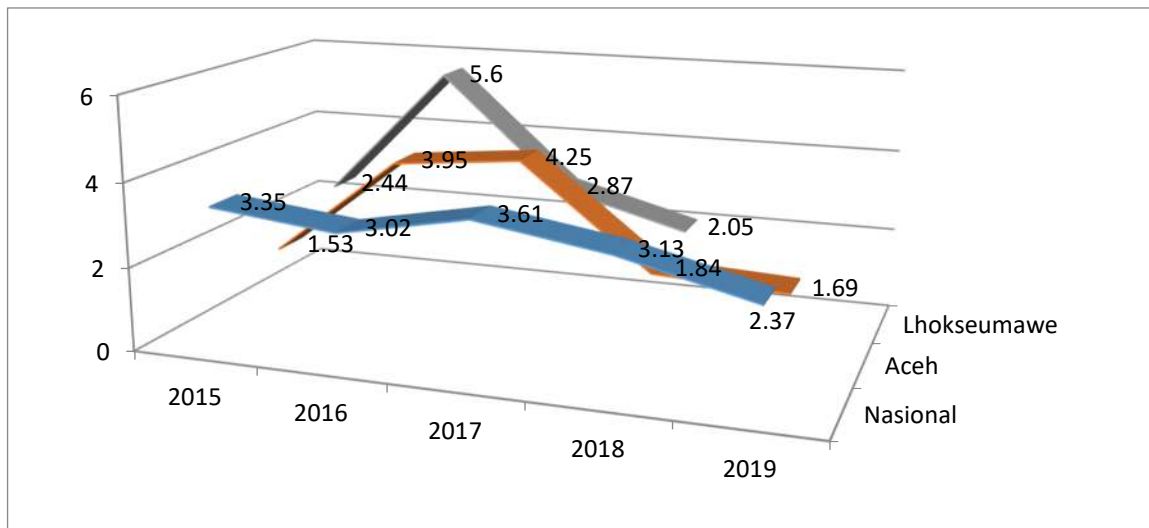
perdagangan barang dan jasa oleh masyarakat dalam mekanisme pasar. Namun inflasi yang terlalu rendah juga melemahkan petani, merugikan petani karena harga jual tidak dapat menutupi biaya produksi.

Oleh karena itu, kiranya dalam upaya pembangunan daerah ke depan, Pemerintah Kabupaten Bireuen diharapkan dapat terus mewaspadai dan melakukan pengawasan, bahkan ikut serta berupaya untuk mengendalikan dan melakukan intervensi, dengan menempuh langkah-langkah responsif dan inisiatif yang diperlukan apabila sewaktu-waktu ada kecenderungan peningkatan harga barang dan jasa secara terus menerus ataupun dengan besaran yang sudah dirasa mengkhawatirkan. Salah satu pedoman dan panduan bagi upaya pemantauan dan pengendalian laju inflasi tersebut dapat dilakukan melalui rekaman atau dokumentasi data terkait laju inflasi selama beberapa tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 2.12
Tingkat Inflasi Tahun 2015-2019 (persen)

Inflasi	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,37
Aceh	1,53	3,95	4,25	1,84	1,69
Lhokseumawe	2,44	5,60	2,87	2,05	1,20

Sumber : BPS, Tahun 2020



Sumber : BPS, Tahun 2020

Grafik 2.6. Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2015-2019 (persen)

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah kiranya perlu terus berupaya ikut berperan dalam menjaga serta mendorong terciptanya stabilitas harga-harga secara umum agar dimasa mendatang tidak menyebabkan inflasi yang tinggi, sehingga dapat menyulitkan kehidupan anggota masyarakat yang berpenghasilan tetap dan rendah. Salah satu

upaya penting yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menjamin distribusi barang-barang dan jasa dengan lancar, dan membuka peluang peningkatan produksi lokal, terutama barang-barang kebutuhan pokok yang mampu dihasilkan oleh daerah serta peningkatan peran dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

II.2.1.3 Pendapatan Perkapita

Kondisi taraf hidup dan kesejahteraan warga Kabupaten Bireuen salah satunya dapat dilihat dari besaran nilai pendapatan per-kapita penduduknya. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan per-kapita masyarakat penduduk Kabupaten Bireuen secara umum menunjukkan tren peningkatan secara persentase menurut ADHK, selama kurun waktu tahun 2015-2019, PDRB perkapita Bireuen menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

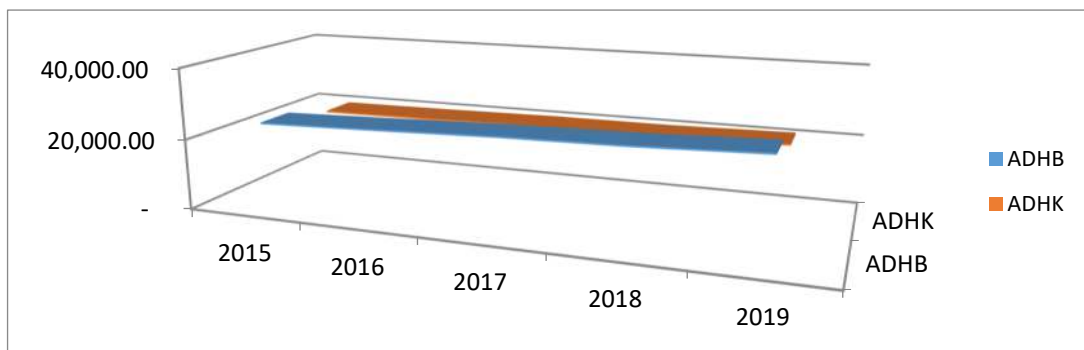
Pertumbuhan pendapatan per-kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3.73 persen per-tahun, dan meningkat dengan rata-rata sebesar 1.25 persen per-tahun untuk pendapatan per-kapita atas dasar harga konstan (ADHK). Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Bireuen rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar 23,13 juta rupiah di tahun 2015, kemudian meningkat terus hingga menjadi 27,47 juta rupiah di tahun 2019. Secara umum laju pertumbuhan PDRB perkapita pada periode 2015-2019 mengalami peningkatan dengan nilai yang cukup berfluktuasi. Namun laju Pertumbuhan PDRB Perkapita riil di 2019 hanya sebesar 2,80 persen

Gambaran lebih rinci terkait nilai pendapatan per-kapita ADHB dan ADHK penduduk Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
PDRB per Kapita Tahun 2015 – 2019 di Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Atas Dasar Harga Berlaku					
PDRB (Rp.000.000,-)	10.072.013,4	10.750.162,0	11.408.491,7	12.138.711,6	12.955.732,7
Jumlah Penduduk (jiwa)	423.397	435.300	443.627	461.726	471.635
PDRB per Kapita (Rp.000,-)	23.788.587	24.695.984	25.716.405	26.289.859	27.470.000
2. Atas Dasar Harga Konstan					
PDRB (Rp.000.000,-)	8,483.005,8	8,830.808,4	9.189.319,5	9.582.265,6	10.076.169,74
Jumlah Penduduk (jiwa)	423.397	435.300	443.627	461.726	471.635
PDRB per Kapita (Rp.000,-)	20.035.583	20.286.718	20.714.067	20.753.143	21.364.338

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen 2020 (data diolah)



Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2019

Grafik 2.7 Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)

Pada grafik diatas dapat kita perhatikan bahwa pendapatan perkapita baik yang dihitung berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan menunjukkan kondisi yang stabil dari tahun ke tahun, ini bukan kondisi yang buruk, namun juga bukan merupakan kondisi yang ideal atau baik, harapan kita tentunya pendapatan perkapita penduduk mengalami peningkatan yang berarti dari tahun ke tahun. Ini merupakan tanggung jawab bersama, bagaimana penduduk Kabupaten Bireuen semakin sejahtera dari tahun ke tahun.

II.2.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat, sehingga daerah dapat mempergunakan Indeks Gini untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi. Nilai rasio gini berkisar antara 0 dan 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan yang tidak sempurna, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna.

Data selama 3 (tiga) tahun indeks gini Kabupaten Bireuen dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Indeks Gini Tahun 2016 – 2019 di Kabupaten Bireuen

Uraian	Indeks Gini			
	2016	2017	2018	2019
Kabupaten	0,279	0,315	0,305	0,295
Aceh	0,341	0,329	0,325	0,319
Nasional	0,390	0,391	0,384	0,382

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Masa kurun waktu 2016-2019, indeks gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2017 sebesar 0,32 dan titik timpang terendah pada tahun 2016 sebesar 0,28. Bila dibandingkan dengan nasional, indeks gini Kabupaten Bireuen sudah lebih baik dengan selisih 0,086 poin dari gini ratio nasional. memiliki angka yang lebih tinggi yaitu 0,39. Pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,384. Angka ini menurun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,389. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391 turun sebesar 0,007 poin.

Dalam beberapa tahun terakhir angka Gini Ratio Provinsi Aceh cenderung menurun yang artinya kesenjangan pendapatan di wilayah Aceh semakin berkurang. Tahun 2019, angka Gini Ratio Aceh sebesar 0,319 yang menurut Michael Todaro angka ini masih menunjukkan pemerataan pendapatan yang relatif baik, atau kesenjangan pendapatan relatif rendah. Angka ini bahkan masih berada di bawah nasional yang berada di angka 0,382. Bahkan pada tahun 2018, angka Gini Ratio Aceh termasuk lima provinsi dengan angka Gini Ratio terendah

Sejumlah faktor mempengaruhi tingkat ketimpangan selama satu tahun ke belakang. Pertama, terjadinya peningkatan pengeluaran per kapita pada Maret-September 2018. BPS mencatat, 40 persen penduduk terbawah, 40 persen menengah, 20 persen teratas mengalami kenaikan pengeluaran masing-masing 3,55 persen, 3,40 persen dan 1,28 persen. Kedua, di perkotaan, kenaikan pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen menengah meningkat dibandingkan kelompok penduduk 20 persen teratas. Masing-masing secara berturut-turut tumbuh 4,49 persen, 3,94 persen dan 0,56 persen.

II.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat mengukur peringkat/level pembangunan suatu daerah, berdasarkan kualitas tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Indikator ini penting, karena melalui IPM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan. Pembangunan manusia adalah suatu proses manusia agar mampu memiliki lebih banyak pilihan (pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan fisik). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyiratkan kondisi kualitas hidup manusia di suatu wilayah yang terdiri dari komponen Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy at Age*), Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*), dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (*Purchasing Power Parity/PPP*). IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia dapat menjadi isyarat seberapa besarnya pembangunan yang telah dijalankan mampu memberi peluang penduduk untuk hidup secara layak, melalui hidup sehat, dan panjang untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, keterampilan yang lebih baik serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Bireuen dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 69,77 dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 72,27. Ini lebih tinggi dari pada IPM Aceh pada tahun 2019 sebesar 71,90. Jika dilihat dari proyeksi dalam RPJM

2017-2022 untuk tahun 2018 ditargetkan berada pada indeks 71,30 artinya IPM Kabupaten Bireuen telah mampu melakukan pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian IPM ini di dapat dari akselerasi peningkatan dari ketiga unsur IPM yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi sebagai bentuk pencapaian keberhasilan pembangunan.

Tabel 2.15
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2019
di Kabupaten Bireuen

No.	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia
1	2015	69.77
2	2016	70.21
3	2017	71.11
4	2018	71.37
5	2019	72.27

Sumber : Bappeda Kabupaten Bireuen (data diolah)

II.2.1.6 Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

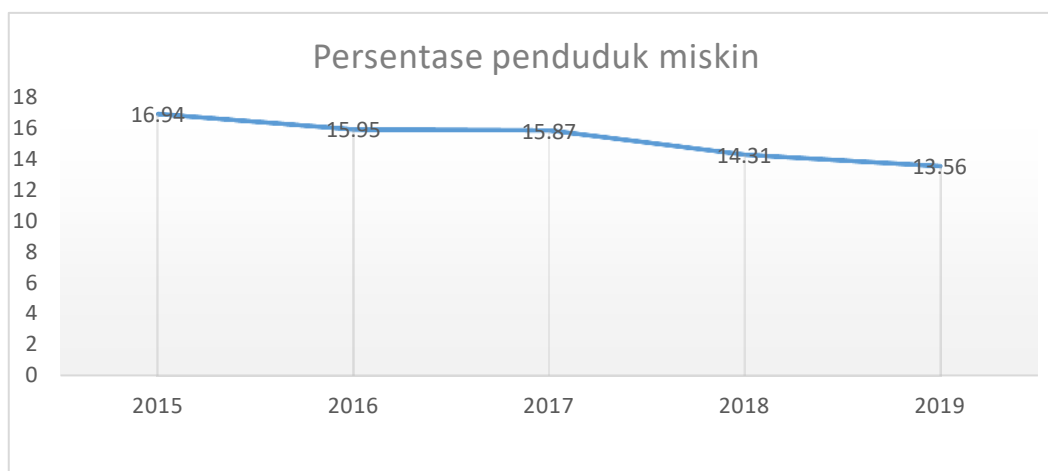
1. Persentase Penduduk Miskin

Pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini telah dan akan terus memberikan perhatian khusus dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam

kaitannya dengan penanggulangan masalah kemiskinan. Berbagai program pembangunan yang dapat mengurangi angka kemiskinan akan terus diprioritaskan dan diintensifkan pelaksanaannya. Sektor pembangunan terkait dalam hal ini seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Dalam konteks kewilayahan, prioritas program pembangunan yang mengarah pada upaya pengurangan angka kemiskinan di daerah ini nantinya akan langsung lebih diarahkan pada wilayah-wilayah yang selama ini dinilai menjadi kantong-kantong kemiskinan di wilayah perkotaan, dan sebagian diantaranya yang ada di wilayah pesisir.

Secara sederhana persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin disuatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan disuatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Badan pusat statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan Kabupaten Bireuen hingga tahun 2019 mencapai 63.600 orang (13,56 persen). Jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 2.144 orang dibandingkan dengan kondisi 2018 sebesar 65.744 orang (14,31) persen. Secara persentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara perhitungan jumlah penduduk mengalami penambahan. Penambahan jumlah penduduk semakin menegaskan bahwa tugas pemerintah semakin berat dan mengharuskan pemerintah untuk mempunyai kebijakan yang tepat sasaran sehingga persentase kemiskinan dapat semakin rendah dan diikuti dengan jumlah penduduk miskin yang semakin rendah.



Grafik 2.8 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

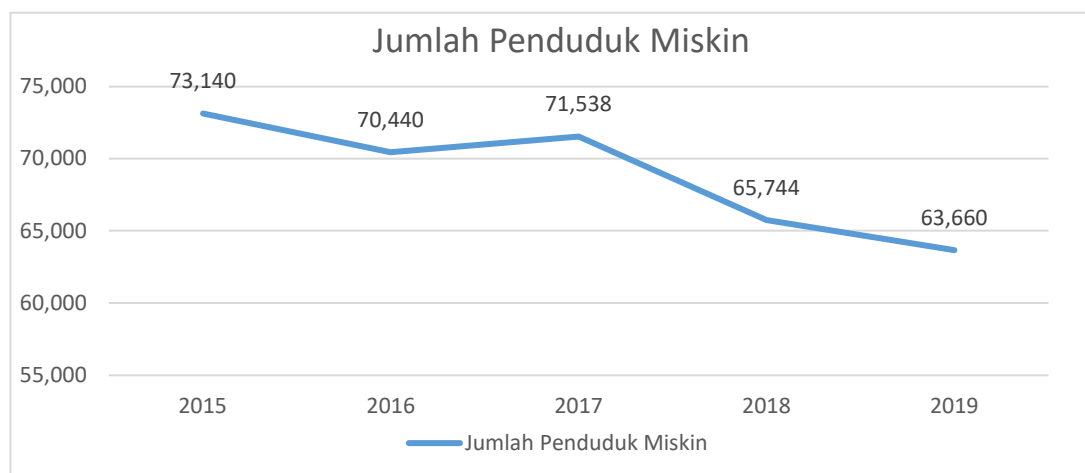
Grafik 2.8 menginformasikan tren capaian perkembangan tingkat kemiskinan (persen) Kabupaten Bireuen walaupun bersifat cenderung turun

akan tetapi hal ini dapat dikatakan masih bermasalah. Capaian pada tahun 2015 dan tahun 2019 menurun sebesar 3.38 persen sehingga menjadi 13,56 persen.

Berdasarkan data BPS rata-rata persentase penduduk miskin di Kabupaten Bireuen termasuk daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi di Provinsi Aceh. Salah satu faktor yang mungkin dapat menyebabkan masih belum maksimalnya dampak dari upaya keras Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam hal penanggulangan kemiskinan adalah, kenyataan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Bireuen selama kurun waktu tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berbagai kemungkinan penyebab, seperti dorongan inflasi dan naiknya harga-harga barang dan jasa yang cenderung ikut mendorong naiknya batas garis kemiskinan, dimana hal ini tentunya dapat mempengaruhi besaran jumlah penduduk miskin maupun angka kemiskinan itu sendiri.

2. Jumlah Penduduk Miskin

Tren capaian perkembangan jumlah penduduk miskin (jiwa) di Kabupaten Bireuen 2015-2019 cenderung bersifat fluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebanyak 73.140 jiwa, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.700 jiwa pada tahun 2016 menjadi 70.440 jiwa, akan tetapi naik kembali di tahun 2017 sebanyak 1.090 jiwa sehingga menjadi 71.538 jiwa, kemudian di tahun 2018 kembali turun cukup berarti sebanyak 5.794 jiwa, dan kembali turun sebanyak 2.084 jiwa menjadi 63.660 jiwa di tahun 2019



Grafik 2.9 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen Tahun 2015 – 2019

Tren Capaian perkembangan garis kemiskinan (persen) Kabupaten Bireuen tahun 2015-2019 ada kecenderungan membaik walaupun masih bermasalah. Ini terbukti dari adanya kecendrungan terjadi kenaikan untuk garis kemiskinannya. Selama periode tahun 2015-2019 dimana pada tahun 2015 garis kemiskinan sebesar Rp 301,027 terus meningkat sebesar Rp 92.171 sehingga menjadi Rp 393.198 pada tahun 2019. Namun untuk capaian posisi relative garis kemiskinan (Rp) di Kabupaten Bireuen tahun 2019 yang sebesar Rp 393.198 per kapita per bulan masih berada dibawah capaian Provinsi Aceh sebesar Rp 484.935 per kapita per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen belum berhasil dalam meningkatkan dan memperbaiki garis kemiskinan penduduk. Terkait angka kemiskinan dan garis kemiskinan di Kabupaten Bireuen beserta angka perbandingannya, dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Statistik Penduduk Miskin Tahun 2015 – 2019 Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln)	301,027	317,562	335,314	358.399	393,198
Persentase Penduduk Miskin (persen)	16.94	15,95	15,87	14.31	13,56
Jumlah Penduduk Miskin (orang)	73.140	70,440	71,538	65.744	63.600

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Tabel 2.17
Perbandingan Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019

Uraian	Tahun 2019		
	Kabupaten Bireuen	Provinsi Aceh	Nasional
Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln)	393.198	486.935	425.250
Persentase Penduduk Miskin (persen)	13,56	14,32	9,41
Jumlah Penduduk Miskin (orang)	63.600	819.440	25.140.000

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Mengingat persoalan kemiskinan yang bersifat kompleks dan multidimensi, upaya penanggulangan kemiskinan kiranya perlu terus diupayakan pelaksanaannya secara terpadu dan bersifat lintas sektoral, dengan melibatkan seluruh SKPK terkait dengan hal tersebut.

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan indeks yang mempresentasikan besarnya total uang yang harus disediakan untuk mengangkat seluruh individu dan rumah tangga miskin sampai pada garis kemiskinan (sebagai rasio terhadap total pendapatan seluruh penduduk pada tingkat garis kemiskinan).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dimana garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan berfungsi sebagai nilai agregat dari *poverty gap index* yang menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Pencapaian posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebesar 1,77 persen berada diatas capaian P1 Provinsi Aceh yang sebesar 2,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berupaya melakukan perbaikan/pengurangan terhadap P1 di Kabupaten Bireuen walau belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan, ini terlihat dari P1 Kabupaten Bireuen masih berada di atas capaian nasional 1,55 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebesar 13,56 persen, turun dari indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2018 yang sebesar 2,31 persen. Walaupun menurun jika dibanding dengan kondisi tahun 2015 yang sebesar 2,11 persen angka ini masih rendah penurunannya. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Bireuen di tahun 2019 merupakan penurunan terbaik selama program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan.

Kebijakan dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan, dimana penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Indeks Keparahan atau *Poverty Severity Index* (P2) adalah jumlah dari kuadrat selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin, sehingga semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

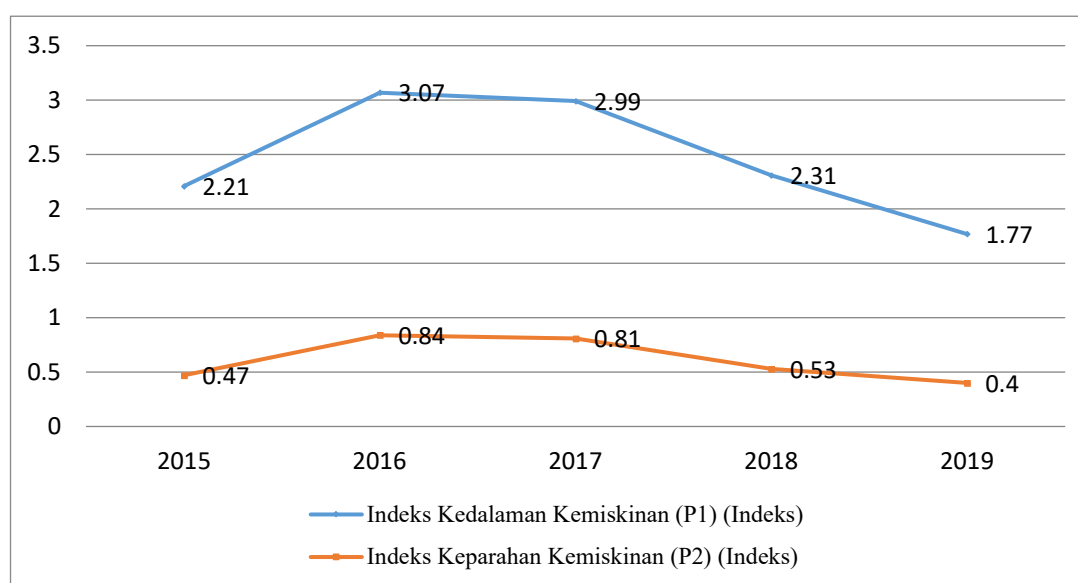
Untuk pencapaian posisi relatif indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebesar 0,40 persen. Capaian P2 Kabupaten Bireuen sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Capaian P2 Provinsi Aceh yang berada di angka 0,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berusaha melakukan upaya perbaikan dan melakukan pengurangan terhadap P2 di Kabupaten Bireuen walaupun capaiannya masih jauh berada di bawah capaian nasional yang sebesar 0,37 persen.

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebesar 0,40 persen, turun dari indeks keparahan kemiskinan tahun 2018 yang sebesar 0,53 persen. Walaupun turun dibanding tahun 2017 namun Indeks keparahan kemiskinan tahun 2018 masih sangat tinggi jika diperbandingkan dengan kondisi 2015 yang sebesar 0,47 persen. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan tahun 2019 sudah sangat signifikan penurunannya jika dibandingkan dengan angka indeks keparahan kemiskinan dalam lima tahun terakhir.

Ada beberapa asumsi yang menyebabkan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tidak terjadi penurunan secara signifikan. Pertama,

karena garis kemiskinan di desa yang lebih tinggi dari di perkotaan yang dipengaruhi oleh inflasi perdesaan lebih tinggi dari inflasi perkotaan. Kedua, karena distribusi makanan dari kota ke desa yang jaraknya cukup jauh. Hal tersebut menyebabkan adanya margin dalam perdagangan yang lebih besar. Apalagi berdasarkan pengamatan, banyak orang desa yang mengkonsumsi makanan yang berasal dari kota. Ketiga, karena masyarakat perdesaan membeli barang-barang yang dipasarkan di kota dalam eceran. Hal tersebut menyebabkan harga yang diterima masyarakat perdesaan lebih mahal yang semakin menyebabkan inflasi perdesaan lebih tinggi dari inflasi perkotaan.

Grafik dibawah memperlihatkan bahwa pada tahun 2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat cukup drastis. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat dari 2,21 pada tahun 2015 menjadi 3,07 pada tahun 2016. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) meningkat dari 0,47 menjadi 0,84 pada periode yang sama. Peningkatan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa ada penurunan pengeluaran penduduk miskin yang semakin mendekati garis kemiskinan. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017 dan 2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan.



Sumber : BPS Bireuen, 2020

Grafik 2.10 Indeks Kedalaman kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

Data kemiskinan dikelompokkan menjadi 2 jenis data, yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro berupa persentase dan perhitungan jumlah penduduk miskin suatu daerah yang dirilis oleh BPS. Sedangkan data kemiskinan mikro adalah data yang

diperoleh melalui mekanisme sensus (bersifat menyeluruh), bersifat kuantitatif, dapat memberikan informasi detail, dan dapat dipergunakan sebagai referensi intervensi kegiatan yang tersedia secara by name by address.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (2015) telah mengeluarkan jumlah rumah tangga miskin dengan status kesejahteraan 40 persen termasuk untuk Kabupaten Bireuen. Upaya Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mengatasi kemiskinan untuk kedepannya harus berdasarkan data BDT dikarenakan data ini merupakan sebuah sistem basis data mikro untuk perencanaan program perlindungan sosial yang berisi data dan calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun anggota rumah tangga/keluarga, dilengkapi dengan keterangan sosial-ekonomi.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bireuen sebanyak 53.221 Rumah Tangga dengan rumah tangga miskin terbanyak berada di Kecamatan Peusangan sebanyak 4.734 Rumah Tangga. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Peusangan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.18
Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Desil di Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Grand Total
1.	Gandapura	644	648	773	858	2.923
2.	Jangka	759	808	1.027	1.225	3.819
3.	Jeumpa	1.055	1,063	1.302	1.165	4.585
4.	Jeunieb	955	927	1.024	844	3.750
5.	Juli	1.121	1.075	1.195	1.111	4.502
6.	Kota Juang	450	630	847	1.004	2.931
7.	Kuala	408	541	578	658	2.185
8.	Kuta Blang	508	613	731	772	2.624
9.	Makmur	700	584	607	551	2.442
10.	Pandrah	338	359	441	372	1.510
11.	Peudada	1.069	975	1.100	937	4.081
12.	Peulimbang	572	455	427	349	1.803
13.	Peusangan	782	1.010	1.377	1.565	4.734
14.	Peusangan Selatan	592	610	681	671	2.554
15.	Peusangan Sibliah Krueng	491	425	527	487	1.930
16.	Samalanga	678	663	859	892	3.092
17.	Simpang Mamplam	1.093	907	953	803	3.756
	Total	12.215	12.293	14.449	14.264	53.221

Sumber : TNP2K, 2019

II.2.1.7 Pengangguran

Pengangguran, ketersediaan lapangan kerja, serta kualitas SDM tenaga kerja merupakan salah satu permasalahan klasik bidang ketenagakerjaan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bireuen. Analisis mengenai pengangguran dapat didekati dua indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Setengah Pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan.

Peran penting sumber daya manusia/tenaga kerja dalam proses produksi dan perekonomian secara lebih luas, menjadikannya harus dapat lebih kreatif dan inovatif agar mampu mengaktualisasikan potensi diri, adaptif terhadap teknologi baru, serta memanfaatkan peluang sumberdaya ekonomi lainnya secara lebih optimal. Semakin banyak tenaga kerja berkualitas tentu akan berkontribusi secara positif terhadap kinerja ekonomi daerah. Untuk itu, kualitas SDM suatu daerah perlu terus ditingkatkan agar nantinya daerah tersebut dapat memiliki SDM tenaga kerja yang berdaya saing tinggi dan mampu merespon perubahan.

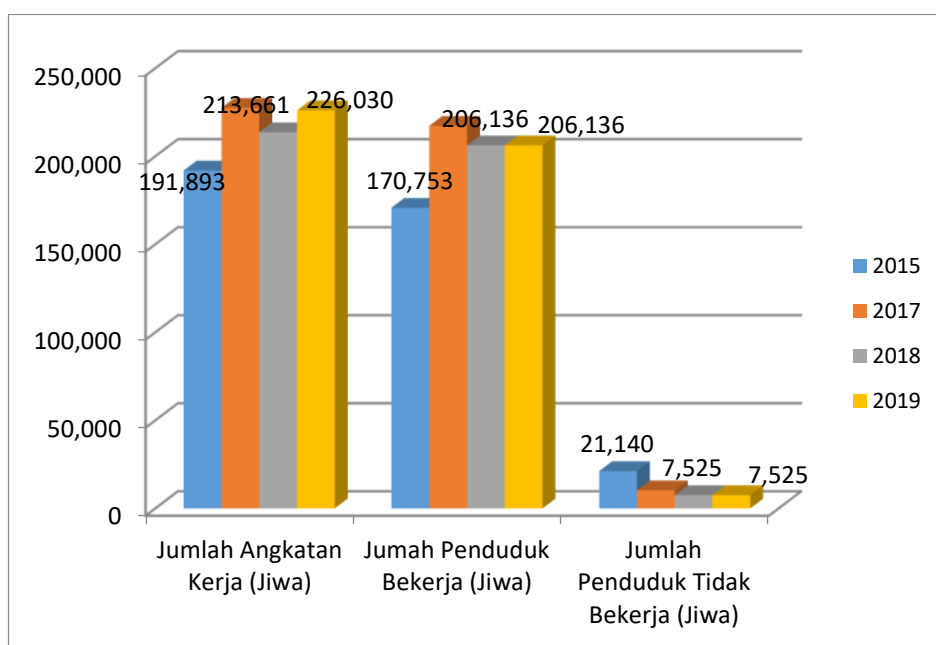
Jumlah pengangguran di Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 sebanyak 7.525 orang. TPT Kabupaten Bireuen sebesar 3,88 persen yang berarti dari 100 angkatan kerja, terdapat 3 sampai 4 orang angkatan kerja yang sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

Tabel 2.19
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

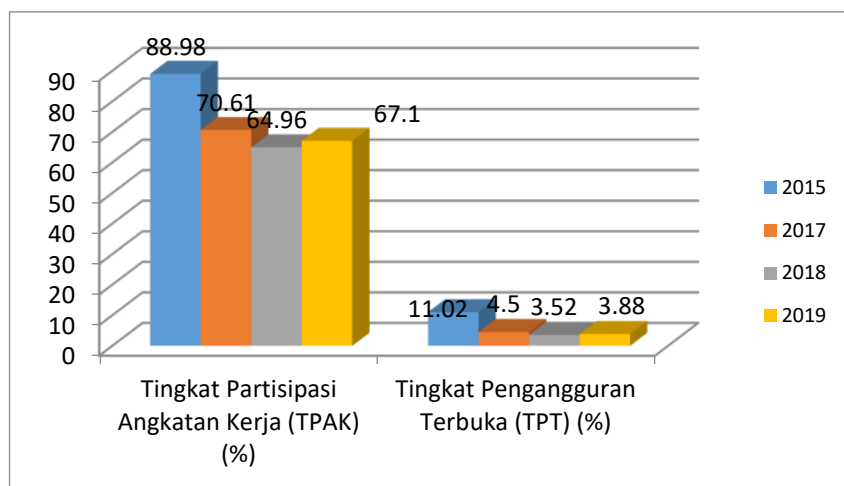
Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	88,98	Data Tidak Tersedia	95,50	96,48	96,12
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	191.893		227.483	213.661	226.030
Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	170.753		217.238	206.136	206.136
Jumlah Penduduk Tidak Bekerja	Orang	21.140		10.245	7.525	7.525
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	55,51		70,61	64,96	67,10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	11,02		4,50	3,52	3,88

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, data diolah

Begitu halnya juga jika dibandingkan tingkat pengangguran Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bireuen dalam kondisi yang cukup baik, kecuali pada tahun 2015, dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bireuen cukup tinggi diatas TPT Nasional dan provinsi Aceh, yaitu sebesar 11, 02 persen dari 191.893 orang angkatan kerja atau sebesar 21.140 orang angkatan kerja tidak bekerja. Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2018 dan 2019 cukup membanggakan dimana terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan masing-masing angka sebesar 3,52 persen dan 3.88 persen sebagaimana Tabel 2.20.



Grafik 2.11 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2018



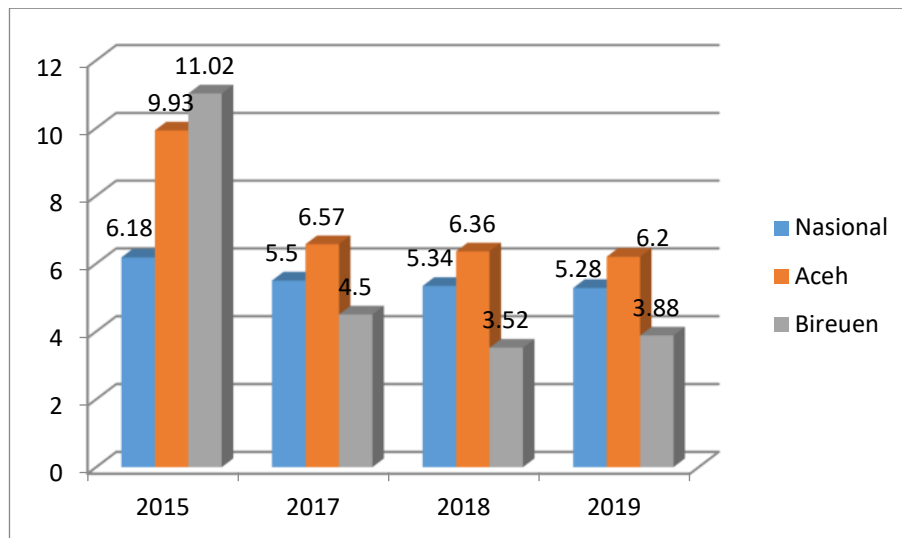
Sumber : BPS Bireuen, 2020

Grafik 2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2018

Tabel 2.20
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bireuen,
Aceh dan Nasional Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	6.18	Data	5.50	5.34	5.28
Aceh	9.93	Tidak	6.57	6.36	6.20
Bireuen	11.02	Tersedia	4.5	3.52	3.88

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Grafik 2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bireuen,
Aceh dan Nasional Tahun 2015-2019

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk angkatan kerja adalah setiap penduduk berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab, misalnya menunggu panen, sedang cuti, dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Di samping itu, penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan ataupun mengharapkan akan mendapat pekerjaan, juga termasuk dalam kategori angkatan kerja dimaksud dalam hal ini.

Berdasarkan data pada tabel diatas, pada tahun 2019 jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja di Kabupaten Bireuen adalah sebanyak 226.030 atau 47,92 persen dari total jumlah penduduk. Selama kurun waktu antara tahun 2015-2019 tersebut, sejalan dengan pertumbuhan penduduk, persentase jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bireuen berada di rentang 44,08 s.d 47,92 persen.

Hal ini cukup membanggakan, namun masih diperlukan perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Bireuen, dimana nantinya dalam konsep perencanaan program pembangunan jangka menengah perlu

mengakomodir bentuk-bentuk program yang mampu mendorong penciptaan dan perluasan lapangan kerja, yang nantinya diharapkan dapat menampung jumlah angkatan kerja serta memberi kesempatan kerja bagi masyarakat secara lebih luas, sekaligus mampu menurunkan angka pengangguran di daerah ini.

Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pada tahun 2015 tercatat sebesar 55,51 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan besaran yang cukup berarti, menjadi sebesar 64,96 persen di tahun 2018. Gambaran terkait dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bireun selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tampilan tabel 2.19 di atas.

Grafik diatas kiranya dapat memberikan gambaran kondisi ketenagakerjaan maupun tingkat pengangguran di daerah ini. Namun demikian bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi Aceh, angka pengangguran Kabupaten Bireuen tersebut masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, peran optimalisasi sumberdaya ekonomi guna mendorong peningkatan investasi di daerah ini ke depan merupakan suatu hal yang perlu terus dilakukan, sehingga dapat semakin meningkatkan daya serap tenaga kerja yang ada di daerah ini. Dari hal tersebut kiranya akan semakin meningkatkan daya serap tenaga kerja dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak. Kondisi tersebut tentunya akan berimplikasi secara positif terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dimasa mendatang.

II.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

II.2.2.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/ MYS*)

Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk berpengaruh positif terhadap tingkat pembangunan manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan dan berkualitas, maka semakin tinggi upah atau tingkat pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian, perlu ditingkatkan pendidikan (rata-rata lama sekolah), baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

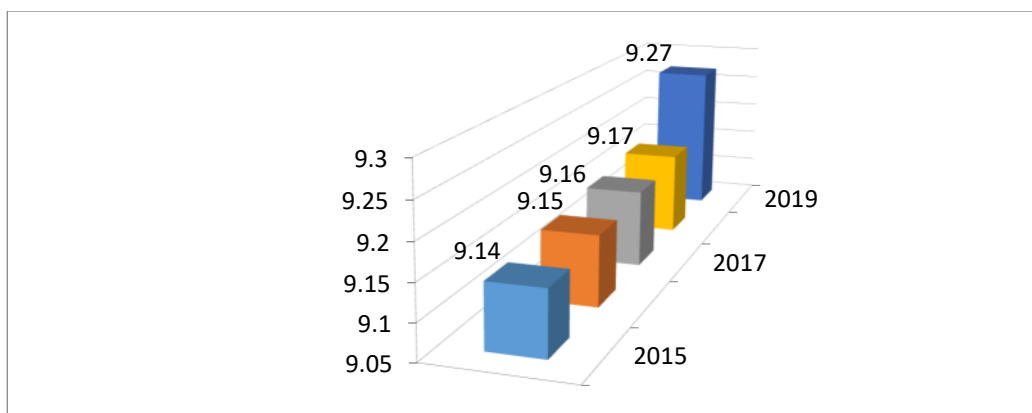
Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan

yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 18 tahun. Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah. Sebagai gambaran, seseorang yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat SD maka ia telah memiliki lama sekolah sebanyak 6 tahun. Rata-rata lama sekolah dapat juga digunakan untuk monitoring pelaksanaan Program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang dicanangkan. Artinya untuk melewati target program tersebut maka rata-rata lama sekolah harus sudah mencapai 9 tahun.

Penghitungan indikator MYS untuk tahun 2019 sudah berbeda konsep dengan tahun sebelumnya. Adanya perubahan konsep ini dikarenakan adanya perubahan metode penghitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Indikator rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menghitung angka IPM. Jika sebelumnya indikator ini dihitung untuk penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, akan tetapi untuk sekarang konsepnya sedikit berubah yaitu menghitung penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

Jika dilihat dari nilai indikator MYS, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 mencapai 9,27 tahun. Angka ini berarti bahwa pada tahun 2019 rata-rata penduduk Kabupaten Bireuen sudah bisa menyelesaikan pendidikan sampai taraf Sekolah Menengah Pertama/ sederajat (SMP) kelas 3 dikarenakan untuk menamatkannya diperlukan lama sekolah 9 tahun, angka ini terus mengalami peningkatan hingga 2019.

Pemerintah Kabupaten Bireuen benar-benar fokus untuk perbaikan pendidikan, peningkatan dalam bidang pendidikan ini perlu dipertahankan dan bahkan selalu dilakukan suatu pembaharuan dalam pendidikan agar seluruh penduduk Kabupaten Bireuen yang berusia sekolah bisa seluruhnya mengenyam pendidikan hingga jenjang lebih tinggi, dan pada akhirnya akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Berikut rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Grafik 2.14. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

II.2.2.2 Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*)

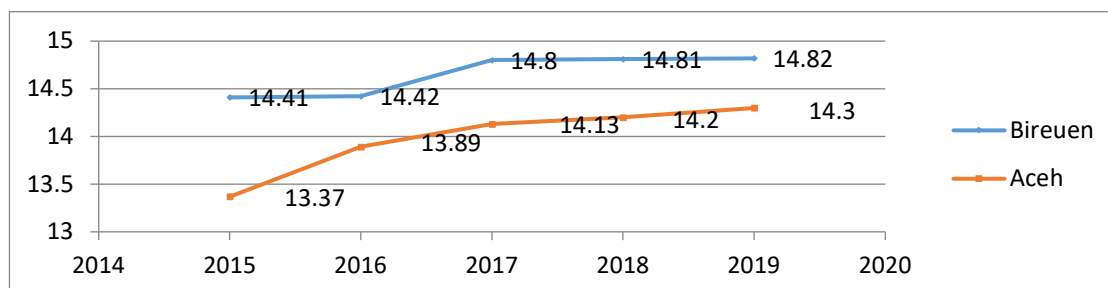
Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. EYS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dicapai oleh setiap anak. EYS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

EYS merupakan indikator baru yang diterapkan untuk penghitungan IPM dengan metode baru. EYS ini merupakan indikator pengganti dari angka melek huruf. Hal ini dikarenakan Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur Pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

Tabel 2.21
Harapan Lama Sekolah (EYS) di Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Wilayah	Harapan Lama Sekolah				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	13,73	13,89	14,13	14,20	14,30
Bireuen	14,41	14,42	14,80	14,81	14,82

Sumber : Susenas, BPS Aceh



Sumber: Susenas, BPS Aceh

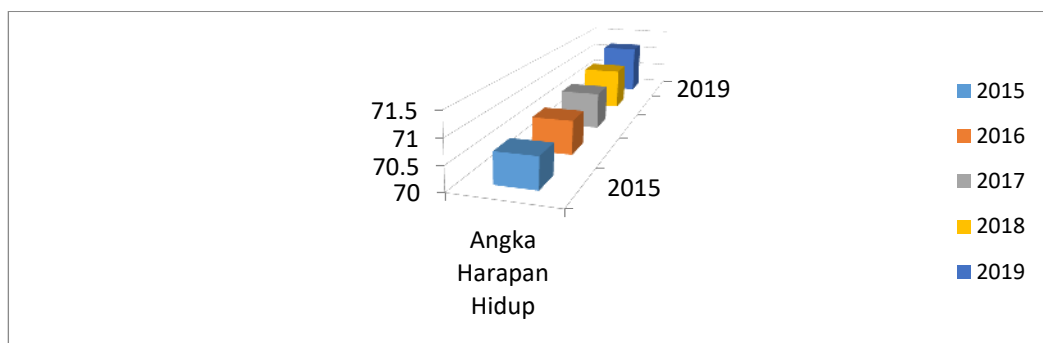
Grafik 2.15 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (EYS) Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Angka Harapan Lama Sekolah untuk Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 sebesar 14,82 tahun atau sekitar 14 hingga 15 tahun. Bisa dikatakan bahwa harapan suatu penduduk usia 7 tahun ke atas mengenyam pendidikan sebesar 14 hingga 15 tahun, yakni mencapai jenjang pendidikan program diploma D1/D2. Nilai EYS untuk Kabupaten Bireuen dari tahun 2015-2019 terus meningkat, walaupun sempat turun pada tahun 2015 namun kembali meningkat di tahun berikutnya. Selain itu, EYS ini selalu bergerak meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun peningkatan EYS dari tahun 2017 ke 2019 tidak cukup signifikan yaitu hanya meningkat sebesar 0.01 persen. Dengan capaian indikator ini Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat menggunakannya sebagai estimasi awal mengenai lamanya pendidikan yang mampu dicapai oleh penduduk usia sekolah di Kabupaten Bireuen.

II.2.2.3 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pengentasan kemiskinan.

Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka harapan hidup masyarakat kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat baik seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :



Sumber : BPS Kab. Bireuen, 2020

Grafik 2.16 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

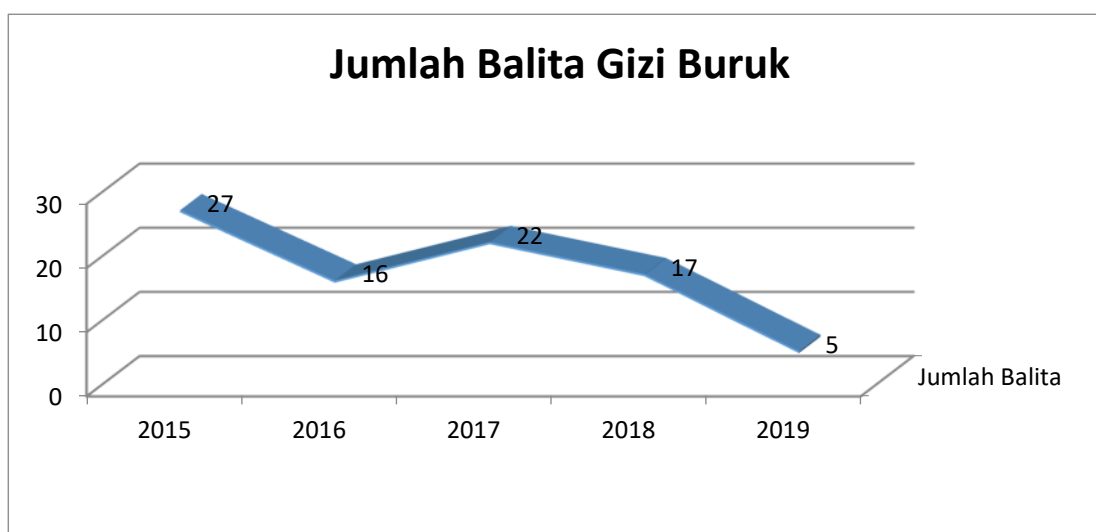
II.2.2.4 Persentase Balita Gizi Buruk

Perkembangan upaya penanganan gizi buruk di Kabupaten Bireuen cukup berhasil dimana persentase balita gizi buruk dari tahun ke tahun terus menurun, ini terlihat dari persentase balita gizi buruk tahun 2016 sebanyak 16 orang (0,04 persen) yang turun dari tahun sebelumnya sebanyak 11 orang atau sebesar 0.04 persen pada tahun 2015. Angka gizi buruk tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sebanyak 5 orang dari tahun sebelumnya sebanyak 17 orang sedikit meningkat menjadi 27 orang (0,01 persen).

Tabel 2.22
Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Bireuen
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Balita Gizi Buruk	27	16	22	17	5
Jumlah Anak Usia 0-4 th	44.363	44.519	44.719	44.733	44.802
Persentase Gizi Buruk	0,06	0,04	0,05	0,04	0,01

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020



Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Grafik 2.17. Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk
Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

II.2.2.5 Pelayanan Kesehatan Asuhan Mandiri

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu dilakukan berbagai upaya dan pelayanan kesehatan terutama melalui upaya promotif dan preventif dalam pendekatan keluarga, salah satunya adalah asuhan mandiri kesehatan mandiri tradisional sesuai Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 48

menyatakan bahwa salah satu dari 17 upaya kesehatan komprehensif adalah Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA) dan akupresure merupakan upaya kesehatan tradisional yang dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat/keluarga dalam mengatasi gangguan kesehatan ringan yang ada didalam keluarga, sehingga dengan asuhan mandiri kesehatan tradisional diharapkan dapat merubah paradigma pengobatan kuratif menjadi promotif dan preventif, yang bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas bagi keluarga dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga sehingga masyarakat dapat mewujudkan keluarga sehat secara mandiri.

Sampai dengan Desember 2019 jumlah Puskesmas yang sudah menyelenggarakan kesehatan tradisional sebanyak 19 Puskesmas dari total 20 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bireuen, atau sebesar 95 persen. Untuk Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional harus memenuhi 3 kriteria yakni (1) harus memiliki tenaga kesehatan yang telah dilatih pelayanan kesehatan tradisional; (2) mampu melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dan keterampilan; dan (3) mampu melaksanakan kegiatan pembinaan meliputi pengumpulan data kesehatan tradisional, fasilitas registrasi atau perizinan dan bimbingan teknis serta pemantauan pelayanan kesehatan tradisional.

II.2.2.6 Prevelensi *Stunting*

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

Prevalensi *stunting* selama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah *stunting* perlu ditangani segera. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi *stunting* Balita di tingkat nasional sebesar 6,4 persen selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2 persen di tahun 2013 menjadi 30,8 persen di tahun 2018 atau sekitar 7 juta balita menderita *stunting*. Sedangkan untuk balita normal terjadi peningkatan dari 48,6 persen (2013) menjadi 57,8 persen (2018). Masalah gizi lain terkait dengan *stunting* yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat

adalah anemia pada ibu hamil (48,9 persen), Berat Bayi Lahir Rendah atau BBLR (6,2 persen), balita kurus atau wasting (10,2 persen) dan anemia pada balita.

Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi *stunting* di Indonesia merupakan tertinggi kedua, setelah Kamboja.

Aceh menjadi salah satu provinsi yang angka *stunting*nya tinggi, dengan menduduki peringkat ke empat mencapai 37,1 persen, di bawah Nusa Tenggara Timur (42,6 persen), Sulawesi Barat (41,6 persen) dan Papua Barat (37,7 persen).

Prevalensi *stunting* di Kabupaten Bireuen juga menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan, dibuktikan dari hasil Riskesdas 2018 prevalensi *stunting* di Kabupaten Bireuen mencapai 41 persen dibandingkan tahun 2013 mencapai 34,4 persen dan berada di urutan ke tujuh di Provinsi Aceh dibawah Subulussalam (47,3 persen), Simeulue (47,3 persen), Bener Meriah (45,9 persen), Aceh Tenggara (45,3 persen), Gayo lues (44,4 persen) dan Aceh Timur (42,8 persen).

Angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Bireuen melampaui prevalensi *stunting* aceh dan nasional. sehingga Penurunan *stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Sejalan dengan inisiatif Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK. Selain itu, indikator dan target penurunan *stunting* telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019.

II.2.2.7 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Wabah virus Corona 2019 (*corona virus disease 2019*, disingkat Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis korona virus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi korona virus 2019–2020. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan

kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multi organ.

Infeksi virus Corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Penyebaran infeksi ini dimulai dari satu orang ke orang lain melalui percikan (*droplet*) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar antara 1–14 hari dengan rata-rata 5 hari. Metode standar diagnosis adalah uji reaksi berantai polimerase transkripsi-balik (rRT-PCR) dari usap nasofaring atau sampel dahak dengan hasil dalam beberapa jam hingga 2 hari. Pemeriksaan antibodi dari sampel serum darah juga dapat digunakan dengan hasil dalam beberapa hari. Infeksi juga dapat didiagnosis dari kombinasi gejala, faktor risiko, dan pemindaian tomografi terkomputasi pada dada yang menunjukkan gejala pneumonia.

Perkembangan kasus Covid-19 di kabupaten Bireuen cukup mengkhawatirkan, pada awal terjadinya wabah, Kabupaten Bireuen termasuk kabupaten dengan Zona Hijau, artinya tidak ada kasus positif di Kabupaten Bireuen. Seiring perkembangan kasus, hingga bulan Oktober 2020 Kabupaten Bireuen termasuk pada zona merah dengan jumlah kasus positif sebanyak 124 Orang yang terdiri dari berbagai kalangan termasuk diantaranya para pejabat dan Bupati Bireuen Sendiri. Data terbaru menunjukkan lima kecamatan masih bagus dan belum ada kasus yaitu Pandrah, Peulimbang, Jangka, Peusangan Siblah Krueng dan Makmur, sedangkan 12 kecamatan lainnya sudah terpapar covid-19.

Berbagai upaya telah dilakukan seperti dengan mengeluarkan Peraturan Bupati No. 35 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Rutin melakukan operasi yustisi pendisiplinan pemakaian masker, selain itu sejumlah permasalahan dalam menangani pasien covid-19 adalah ruang pelayanan pinere perlu ditambah lagi dan tenaga medis yang dapat

melakukan swab juga masing kurang. Upaya lainnya yang sedang dilakukan adalah dengan memperkuat sosialisasi dan mengajak pimpinan dayah untuk kemudian para ulama menyampaikan berbagai himbauan dalam rangka pencegahan Covid-19 ini serta meminta para camat untuk membentuk tim Satgas di kecamatan dan desa.

II.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

II.3.1 Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

II.3.1.1 Pendidikan Dayah

Pendidikan Islami merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar bagi masyarakat Aceh mengingat Aceh yang dijuluki sebagai Serambi Mekkah juga telah memproklamirkan diri sebagai daerah yang bersyari'at Islam sejak Penerapan Syari'at Islam di Aceh diberlakukan berdasarkan UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 18 tahun 2001. Namun jauh sebelum Undang-Undang tersebut itu dirancang dan diterapkan di Bumi Serambi Mekkah, Pendidikan Islami telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Anak-anak Aceh masa lalu, meskipun tidak mengenyam pendidikan formal seperti SD, SMP dan SMA, namun mereka tetap menjalani proses belajar pada dayah-dayah yang ada di lingkungan mereka terutama bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah formal.

Di dayah, santri merupakan peserta didik atau pelajar yang dipersiapkan oleh pengasuh dayah sebagai kader ulama, kader bangsa yang pada gilirannya akan menjadi tokoh masyarakat bangsa. Hal ini dimungkinkan karena kemampuan dayah bukan hanya dalam pembinaan pribadi muslim, tetapi juga mengadakan perubahan sosial dan masyarakat. Pengaruh dayah dapat terlihat pada kehidupan santri dan alumninya serta kehidupan masyarakat sekitarnya.

Bireuen sebagai salah satu kabupaten yang telah lama dikenal sebagai daerah yang banyak memiliki Dayah, saat ini terus mencoba membenahi dayah-dayah yang ada agar proses belajar mengajar di dayah dapat berjalan dengan lancar yang pada akhirnya dayah tersebut dapat menghasilkan santri-santri yang memiliki kompetensi yang baik dan tidak kalah bersaing dengan anak-anak lulusan pendidikan umum. Salah satu dayah tertua dan terbesar yang ada di Kabupaten Bireuen adalah dayah Madrasah Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI MESRA) Samalanga yang merupakan institusi pendidikan yang mengambil peran paling sakral dalam mencetak

generasi umat dan kader dayah. Data jumlah dayah tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Jumlah Dayah, Guru dan Santri di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Dayah	Jumlah Guru	Jumlah Santri
2015	55	3.444	33.148
2016	108	3.380	33.669
2017	126	3.943	23.403
2018	126	3.519	23.403
2019	145	3.509	34.303

Sumber : Kabupaten Bireuen Dalam angka 2020

Dari sejumlah dayah yang ada, tim akreditasi dayah provinsi telah mencoba melakukan penilaian terhadap dayah-dayah tersebut tiap 2 (dua) tahun yaitu tahun 2016 dan 2019, sehingga muncul beberapa katagori dayah di Kabupaten Bireuen. Tabel berikut menggambarkan kondisi dayah yang ada di Kabupaten Bireuen pada Tahun 2018.

Tabel 2.24
Tipe Dayah di Kabupaten Bireuen Tahun 2016 dan 2019

No.	Type Dayah	Jumlah	
		2016	2019
1	A+	NA	6
2	A	4	13
3	B	10	24
4	C	8	31
5	D/Non Type	13	43
Total		35	118

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa hanya 35 dayah yang sudah memperoleh akreditasi dengan jenis tipe A, B, C dan D. Sementara sisanya masih berupa dayah non tipe. Yang menjadi persoalan adalah belum ada standar yang baku terhadap penilaian akreditasi sebuah dayah, dimana tipe dayah di Bireuen berbeda indikatornya dengan tipe dayah yang ada di Provinsi Aceh. Untuk itu kiranya perlu dilakukan akreditasi kembali terhadap dayah-dayah yang ada di Kabupaten Bireuen sehingga dayah-dayah tersebut memiliki akreditasi yang baik.

Di tahun 2019, kembali tim Akreditasi turun untuk melakukan penilaian terhadap dayah yang ada di Kabupaten Bireuen, berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.44/770/2019 tentang penentuan Type dayah di Aceh Tahun 2019, maka Kabupaten Bireuen memiliki 118

Dayah dengan Type A, B, C, D/non type. Disamping itu, guna meningkatkan mutu lulusan dayah, kiranya perlu dilakukan peningkatan mutu terhadap tenaga pendidik dayah sehingga mutu lulusan dayah dapat bersaing dengan mutu lulusan sekolah-sekolah umum dan sekolah agama lainnya. Terhadap sarana dan prasarana dayah juga perlu mendapat perhatian dalam rangka kelancaran proses belajar dan mengajar serta keamanan dan kenyamanan santri, dimana dari sejumlah dayah yang ada hanya 40 persen dayah yang sudah memiliki kamar, ruang masak dan sanitasi layak.

II.3.1.2 Syari'at Islam

Syari'at Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan Umat Islam yang berlaku sepanjang masa dan dimanapun. Selain berisi hukum, aturan dan panduan peri kehidupan, Syari'at Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bireuen yaitu Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Bireuen yang adil, Makmur, Damai, dan Sejahtera berlandaskan Syari'at Islam, maka Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Keputusan Bupati Bireuen no. 553 Tahun 2020 tentang Penetapan Kabupaten Bireuen Sebagai Kota Santri melalui Dinas Syari'at Islam dengan tujuan sebagai :

- a. Pusat Pendidikan Islam (Education Islamic Central);
- b. Rule Model Pendidikan Dayah di Aceh;
- c. Pusat rujukan islam di Aceh;
- d. Menjadikan masyarakat Bireuen sebagai masyarakat yang berakhlakul karimah, religius dan cinta ilmu pengetahuan;
- e. Menjadikan Bireuen khususnya dan Aceh pada umumnya sebagai wilayah yang adil dan Makmur, dan
- f. Menyusun road map Bireuen sebagai Kota Santri di Aceh

Beberapa instruksi yang sudah dilaksanakan dalam mewujudkan Bireuen sebagai Kota Santri adalah :

- a. Untuk melaksanakan pengajian setiap hari Jum'at mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 10.00 WIB di masing-masing SKPK/Unit Kerja dan masing-masing Gampong waktu pelaksanaan menyesuaikan dengan mengundang Guru Pengajian dari Dayah/Pesantren dan para ahli lainnya.

- b. Melaksanakan bimbingan teknis tentang Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah di Dayah/Pesantren yang telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Kabupaten Bireuen
- c. Bagi seluruh PNS, Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti pada masing-masing SKPK/Unit Kerja setiap hari Juma'at wajib menggunakan pakaian:
 - Laki-laki : Baju koko warna putih, peci hitam dan memakai sarung.
 - Wanita : Baju kurung warna putih, jilbab putih dan memakai kain sarung

Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk suksesnya Kabupaten Bireuen sebagai Kota Santri:

- a. Melakukan sosialisasi Bireuen sebagai Kota Santri, baik berskala Sosial, Nasional dan Global
- b. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dayah yang memadai
- c. Pengembangan kurikulum dan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dayah
- d. Peningkatan kompetensi bagi pengelola santri dan guru dayah
- e. Peningkatan mutu pendidikan dayah
- f. Peningkatan kesejahteraan bagi teungku dan santri dayah secara profesional
- g. Peningkatan bantuan modal usaha lembaga dayah
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan para pimpinan dayah dalam mengisi bireuen sebagai kota santri agar terlaksana sesuai keinginan kita bersama.

Demikian juga dengan penerapan Syari'at Islam terhadap pelanggaran Qanun, beberapa kasus pelanggaran Syari'at Islam telah ditindaklanjuti sesuai dengan Qanun tentang Pelanggaran Syari'at, berikut adalah tabel jumlah pelanggaran Syari'at Islam di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.25
Jumlah Pelanggaran Syari'at Islam di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pelanggar Syari'at Islam	-	193	300	348	179

Sumber : Satpol PP dan WH, 2019

Dari tabel diatas terlihat jumlah pelanggaran Syari'at Islam di Kabupaten Bireuen mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2016 sebanyak 193 pelanggaran akan tetapi pada tahun 2019 menurun menjadi 179 dan pada tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu dari tahun 2018 yaitu sebesar 348. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Bireuen terus melakukan sosialisasi baik di tingkat gampong maupun kecamatan, untuk mengurangi pelanggaran Syari'at Islam yang terjadi meliputi, Khalwat, Maisir, Pelanggaran busana muslimah dan khamar.

II.3.1.3 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Majelis Permusyawaratan Ulama adalah sebuah lembaga yang anggotanya terdiri dari para ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Majelis Permusyawaratan Ulama berfungsi menetapkan Fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan. MPU mempunyai tugas dan wewenang:

1. Memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat; dan
2. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.
3. Serta mengkaji setiap rancangan qanun keagamaan yang dirancang oleh Pemerintah Daerah

Berbagai persoalan yang ada di dalam masyarakat saat ini, menuntut ulama dapat lebih berperan sehingga apapun persoalan yang ada dalam masyarakat dapat diminimalisir sehingga tidak terjadi benturan dan huru hara di dalam kehidupan, terutama yang menyangkut persoalan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Sejauh ini peran ulama masih terbatas karena dana yang dikucurkan untuk Sekretariat MPU masih rendah mengingat terbatasnya anggaran. Namun dalam rangka memperkuat Syari'at Islam di Kabupaten Bireuen dimana ulama sangat berperan dalam mewujudkan hal tersebut, maka program-program MPU perlu mendapat perhatian.

II.3.1.4 Majelis Pendidikan Aceh

Kabupaten Bireuen sebagai salah satu kabupaten dalam wilayah hukum provinsi Aceh mempunyai tanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berada dalam

wilayah kabupaten. Untuk provinsi Aceh dan didalamnya termasuk Kabupaten Bireuen dalam mencerdaskan putra putri selaku anak bangsa melalui lembaga pendidikan termasuk ke dalam komponen keistimewaan Aceh. Oleh karena itu pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah Kabupaten Bireuen mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam memproduksi sumber daya manusia yang berkualitas, dalam regulasi saat ini semenjak pendidikan dasar sampai pada pendidikan menengah tingkat pertama. Dengan demikian, disamping keberadaan lembaga-lembaga Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang telah dimasukkan dalam satuan organisasi tata kerja perangkat kabupaten yang bertanggung jawab dalam bidang peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan, juga perlu membentuk lembaga yang independen untuk membantu pemerintah kabupaten dalam bidang pembangunan pendidikan.

Selama ini yang sudah dikenal ditengah-tengah masyarakat adalah Majelis Pendidikan Daerah (MPD). Untuk Kabupaten Bireuen Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dibentuk dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya berubah lagi sebutannya menjadi Majelis Pendidikan Aceh sesuai Qanun Nomor 3 Tahun 2019. MPA merupakan sebuah lembaga yang setingkat dengan Musyawarah Pimpinan Daerah seperti lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bireuen, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bireuen dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bireuen. Lembaga ini hanya ada di Aceh sebagai sebuah kekhususan Aceh yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia.

Keberadaan lembaga Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen adalah lembaga yang mengkhususkan diri dalam urusan pendidikan, semenjak pendidikan dasar sampai pendidikan menengah tingkat pertama, dalam hal-hal tertentu juga pendidikan menengah atas sampai perguruan tinggi. Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen merupakan lembaga yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarki dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya.

Tugas pokok Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Kabupaten Bireuen adalah memberi pendapat dan pertimbangan mengenai pendidikan, penyusunan konsep-konsep pengembangan pendidikan yang islami, menampung aspirasi masyarakat mengenai pendidikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas

pendidikan di Kabupaten Bireuen. Sedangkan Kewenangan MPA Kabupaten Bireuen adalah mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan serta menjaga standar mutu pendidikan di Kabupaten Bireuen.

II.3.1.5 Majelis Adat Aceh

Aceh adalah salah satu provinsi dalam wilayah hukum Negara kesatuan republik Indonesia yang diberikan sebagai daerah keistimewaan, salah satu keistimewaan provinsi Aceh yaitu keistimewaan dalam bidang adat istiadat. Untuk mengembangkan, melestarikan dan memberdayakan adat, adat istiadat dan hukum adat dibentuk sebuah lembaga yang pada saat ini diberi nama Majelis Adat Aceh provinsi, Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota, Majelis Adat Aceh Kecamatan dan Majelis Adat Aceh Gampong. Adat, adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat Aceh sudah ada sejak zaman dahulu kala dan sudah melembaga semenjak zaman kesultanan Aceh yang dikenal dengan istilah “Adat Bak Po Teumeureuhom Hukum Bak Syiah Kuala”. Sehingga adat istiadat dan hukum adat sudah tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh baik sebagai alat pemersatu masyarakat Aceh, maupun sebagai pedoman hidup dan sebagai aturan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat Aceh. Setelah Indonesia Merdeka mulai zaman orde lama yang dilanjutkan dengan zaman orde baru dan saat ini dalam suasana zaman reformasi keberadaan adat istiadat dan hukum adat serta lembaga adat sangat eksis di tengah-tengah masyarakat Aceh, namun untuk kelembagaannya saat ini telah berubah nomenklaturnya. Sebelum lahirnya istilah “Majelis Adat Aceh” (MAA) dikenal dengan istilah Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) yang diberi tugas dan kewenangan untuk menggali, melestarikan, mengembangkan dan mempertahankan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Aceh.

Sebagai daerah yang istimewa antara lain dalam bidang adat, maka pengelolaan manajemen pemerintahan di Aceh baik secara konstitusi Negara Republik Indonesia, maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum organik, diwajibkan ada untuk menggali, melestarikan, memberdayakan, mengembangkan dan mempertahankan keberadaan adat istiadat dan hukum adat sebagai kekayaan budaya masyarakat dan sebagai karakteristik masyarakat Aceh yang menjadi kekayaan nasional haruslah dikelola dengan baik oleh Pemerintah Aceh dengan membentuk suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang tersebut. Oleh karena itu, keberadaan dan

kehadiran Majelis Adat Aceh sangatlah penting dalam manajemen dan struktur pemerintahan dalam Kabupaten Bireuen. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Bireuen telah membentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen berdasarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan qanun tersebut untuk melakukan penggalan, pelestarian, pemberdayaan, pengembangan adat istiadat dan hukum adat dipertanggungjawabkan kepada lembaga majelis adat Aceh Kabupaten Bireuen tersebut. Sampai saat ini keberadaan majelis adat aceh Kabupaten Bireuen telah menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk menggali, melestarikan, mengembangkan adat istidat dan hukum adat di wilayah Kabupaten Bireuen. Sehingga keberadaan Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen sudah menyatu dan sangat dikenal oleh masyarakat Bireuen.

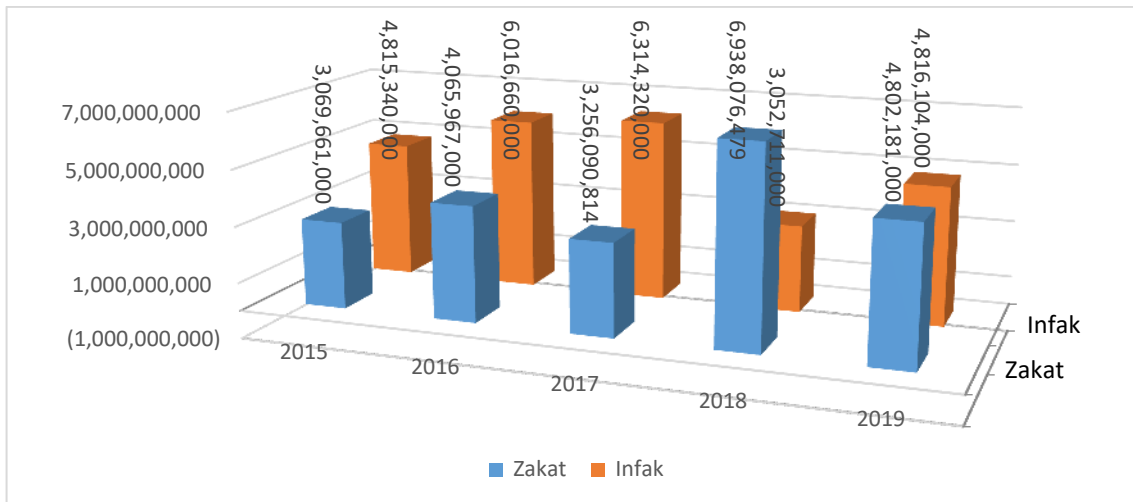
II.3.1.6 Baitul Mal

Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal menegaskan bahwa Pemerintah Aceh komit dalam merealisasikan Syari'at Islam di Bidang kesejahteraan dan pemberdayaan umat di Aceh. Menindaklanjuti Qanun tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama Lainnya. Disamping itu Kabupaten Bireuen juga harus mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dengan Qanun No 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

Saat ini, masyarakat Kabupaten Bireuen mulai mempercayakan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqahnya melalui Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Potensi dan zakat di Kabupaten Bireuen dinilai cukup strategis sebagai salah satu sumber dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Karena melalui penyaluran zakat, para mustahik dapat mengurangi beban dalam kesulitan ekonominya.

Potensi zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di Kabupaten Bireuen sebagian besar bersumber dari para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Untuk pegawai yang mempunyai penghasilan di atas 3,8 juta perbulan dikenakan zakat sebesar 2,5persen perbulan. Sedangkan bagi pegawai yang berpenghasilan di bawah 3,8 juta perbulan dikenakan infak sebesar 1persen perbulan. Dilihat dari penyajian

gambar bahwa potensi zakat dikabupaten ini sangat tinggi sehingga rata-rata kenaikannya selama 5 tahun mencapai 21 persen. Namun penerimaan zakat tersebut masih perlu dioptimalkan mengingat zakat merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi keluarga miskin melalui pembagian zakat berupa uang tunai, beasiswa sekolah bagi anak kurang mampu maupun dalam bantuan pembangunan rumah dan rehab rumah kaum dzuafa. Berikut adalah grafik penerimaan zakat dan infaq di Kabupaten Bireuen.



Sumber : Sekretariat Baitul Mal, 2020

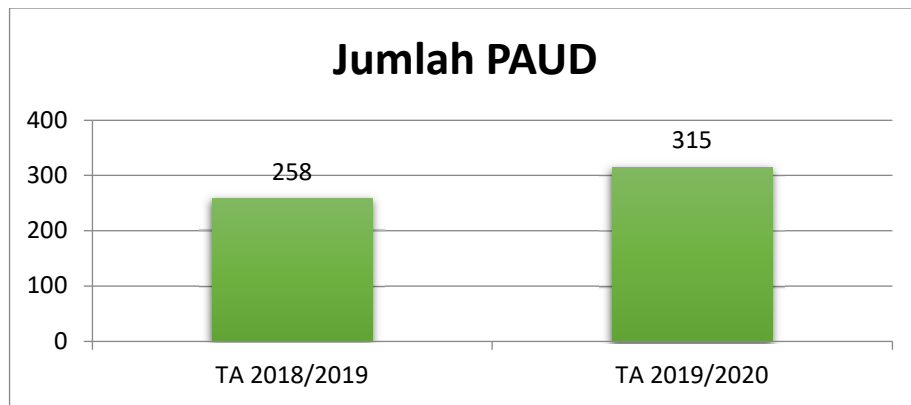
Grafik 2.18 Rekapitulasi Penerimaan Zakat dan Infaq di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

II.3.2 LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR

II.3.2.1 PENDIDIKAN

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan sebuah jenjang pendidikan dalam rangka mendukung dan merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak mengingat usia dini merupakan periode emas bagi pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Disamping itu Pendidikan Usia Dini juga dilaksanakan untuk membentuk karakter anak dan sekaligus dalam rangka mempersiapkan si anak memasuki Sekolah Dasar. Berikut gambaran perkembangan Jumlah lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) di kabupaten Bireuen Tahun Ajaran 2018/2019 dan 2019/2020:



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bireuen, 2020

Grafik 2.19 Jumlah PAUD TA 2018/2019 dan 2019/2020 Di Kabupaten Bireuen

Jika dilihat dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah PAUD di Kabupaten Bireuen meningkat sebanyak 57 sekolah dalam satu tahun. Hal ini dikarenakan semakin tingginya kesadaran orang tua memasukkan anaknya ke lembaga PAUD dengan harapan membentuk karakter anak yang baik dan sekaligus mempersiapkan si anak untuk memasuki Sekolah Dasar. Namun untuk memenuhi Target. 4.2 Goals 4 SDGs bahwa Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar, maka Pendidikan Usia Dini perlu mendapat perhatian mengingat jumlah bangunan dan sarana belajar mengajar PAUD masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah anak usia dini.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK SD merupakan jumlah persentase penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Dasar dan sederajat (SD) terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun. APK SMP merupakan jumlah persentase penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat (SMP) terhadap jumlah penduduk usia 13–15 tahun APK SMA/K merupakan jumlah persentase penduduk yang sedang bersekolah di Sekolah Menengah Umum/Kejuruan dan sederajat (SMU/K) terhadap jumlah penduduk usia 16–18 tahun. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA selama kurun waktu Tahun 2015 s/d 2019.

Tabel 2.26
Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
APK SD/MI	112,49	110,09	110,78	116,01	109,18
APK SMP/MTs	97,61	100,33	105,66	96,81	91,29
APK SMA/SMK/MA	85,93	84,93	80,77	81,54	94,72

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Perkembangan APK Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan yang fluktuatif, seperti tingkat SD/MI tahun 2018 sebesar 116,01 persen, meningkat menjadi 109,18 persen pada tahun 2019, angka ini melebihi 100 persen karena masih ada anak yang bersekolah sudah melewati usia sekolah. Tingkat APK SMP/MTs mengalami Penurunan yaitu sebesar 5,52 persen yaitu dari 96,81 persen pada tahun 2018, mengalami penurunan menjadi 91,29 persen pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena banyak usia sekolah tingkat SMP/MTs yang melanjutkan ke pendidikan dayah. Untuk tingkat SMA/SMK/MAN mengalami peningkatan dari 81,54 persen pada tahun 2018 menjadi 94,72 persen pada tahun 2019. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang miskin yang tidak dapat melanjutkan sekolah sampai ke tingkat atas. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan dengan beberapa hal diantaranya menambah fasilitas pendidikan juga meningkatkan kemampuan pendidik.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan :

- APM SD merupakan jumlah persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di Sekolah Dasar dan sederajat (SD) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 7-12 tahun.
- APM SMP merupakan jumlah persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan sederajat (SMP) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 13-15 tahun.

- APM SMA merupakan jumlah persentase jumlah penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan sederajat (SMA/K) terhadap jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia 16-18 tahun. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Bireuen selama kurun waktu Tahun 2015 s.d 2019.

Tabel 2.27
Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
APM SD/MI	97,99	97,38	98,62	96,27	97.40
APM SMP/MTs	85,55	83,85	86,14	83,37	82.92
APM SMA/MA/SMK	69,82	66.54	69,58	72,82	72.84

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020 (data diolah)

Tabel di atas menunjukkan APM Kabupaten Bireuen Tahun 2019 mengalami kecenderungan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bireuen sudah dapat merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan baik. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI), yaitu dari 97,99 persen di tahun 2015 menjadi 98,62 persen di tahun 2017 atau meningkat sebesar 0,63 persen. Akan tetapi pada tahun 2019 sedikit menurun yaitu sebesar 97,40 persen. Demikian pula untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs), dimana tahun 2015 APM pada jenjang pendidikan ini adalah 85,55 persen, meningkat menjadi 82.92 persen pada tahun 2019. Untuk tingkat pendidikan SMA/MA/SMK menurun dari 69,82 persen di tahun 2015, akan tetapi pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 72,84 persen. Kondisi ini dapat memberikan gambaran bahwa meskipun terkadang mengalami penurunan dan peningkatan yang fluktuatif, tetapi dapat dikatakan terdapat peningkatan minat maupun kesadaran di kalangan masyarakat daerah ini akan arti penting pendidikan bagi diri pribadi maupun seluruh anggota keluarganya di tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK.

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan

indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai perkembangan APS Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun di Kabupaten Bireuen selama kurun waktu Tahun 2015 s.d 2019.

Tabel 2.28
Perkembangan APS 7-12 Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun
Di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

NO	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 tahun **)	48.896	49.193	49.886	48.719	50.211
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun*)	51.712	52.663	53.752	54.703	55.803
1.3.	APS SD/MI	986	945	928	891	899
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah murid usia 13-15 tahun**)	25.999	25.020	24.292	23.467	25.470
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun*)	24.793	25.996	25.566	26.017	26.649
2.3.	APS SMP/MTs	1048	996	950	902	955

*) Sumber: BPS Kabupaten Bireuen

**) Sumber: BPS Kabupaten Bireuen (diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa APS Kabupaten Bireuen terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, ini menandakan bahwa semakin banyak penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Akan tetapi tahun 2018 angka partisipasi sekolah mengalami penurunan, ini disebabkan karena banyak yang meneruskan ke jenjang pendidikan pesantren. Dapat dilihat bahwa kondisi APS jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2019 yaitu sebesar 899 artinya bahwa sebanyak 50,211 murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dari 1.000 jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sedangkan APS untuk jenjang SMP/MTs yaitu sebesar 955, artinya bahwa sebanyak 25.470 murid kelompok usia pendidikan dasar (13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dari 1.000 jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

5. Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah adalah Proporsi penduduk menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun.

APtS digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15, 16-18 dan 19-24 tahun). Semakin tinggi Angka Putus Sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Sebaliknya jika Angka Putus Sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2018 menunjukkan bahwa masih tingginya Angka Putus Sekolah untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Bireuen : Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah anak putus sekolah Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun dan 16-18 Tahun di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2018

Tabel 2.29
Jumlah Angka Putus Sekolah
Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2018

Usia	7-12	13-15	16-18
Jumlah Anak Putus Sekolah	704	1.555	6.023

Sumber : Hasil PBDT 2019

Dari hasil Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2019 tersebut dapat disimpulkan bahwa data ini sangat perlu, mengingat saat ini biaya pendidikan yang selama ini menjadi persolan sudah tertangani dengan Program Indonesia Pintar (PIP), PKH dan beasiswa anak yatim. Hasil pantauan di lapangan bahwa perilaku dari siswa dan keluarga yang harus dirubah.

6. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan adalah proporsi jumlah siswa yang lulus jenjang sekolah tertentu terhadap jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang sekolah tertentu pada tahun sebelumnya.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai perkembangan Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Bireuen selama kurun waktu Tahun 2014 s/d 2018.

Tabel 2.30
Perkembangan Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Angka Kelulusan	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kelulusan SD/MI	99,95	99,96	99,97	99,98	100
Angka Kelulusan SMP/MTs	100.00	98,75	98,76	98,89	100
Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	99,44	98,87	98,88	98,90	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

7. Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan adalah proporsi jumlah siswa baru tingkat 1 pada jenjang Pendidikan di atasnya terhadap jumlah lulusan pada jenjang pendidikan dibawahnya pada tahun ajaran sebelumnya. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai perkembangan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Bireuen selama kurun waktu Tahun 2013 s/d 2018.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	99,85	99,98	99,98	99,98	99,98
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA	98,7	99,2	99,3	99,4	99,45

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

8. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan adalah semua sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Fasilitas pendidikan yang baik akan sangat mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah.

Tabel 2.32
Perkembangan Fasilitas Pendidikan Di Kabupaten Bireuen
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Fasilitas Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	88,84	91.81	91.84	91.89	91,90
2	Fasilitas Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Bangunan Kondisi Baik	84,54	89,29	89,39	89,45	89,46
3	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	52,98	53,53	53,67	53,83	58,84
4	Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	53,20	53,24	53,26	53,29	53,30
5	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar	1 : 15	1 : 17	1 : 17	1 : 18	1 : 18

6	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	1 : 10	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9
7	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah dasar	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8
8	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata sekolah menengah pertama	1 : 7	1 : 8	1 : 8	1 : 8	1 : 8
9	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	95,4	94,6	95,4	95,8	95,9
10	Angka Melek Huruf >15 Tahun	96,2	96,67	96,69	96,70	96,71
11	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan dan Laki-laki	96,84	97,5	97,53	97,58	95,59
12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	2.186	2.244	2.283	2.321	2.541

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Tabel di atas memperlihatkan bahwa dari sisi kuantitas jumlah fasilitas pendidikan sudah sangat memadai, namun jika dilihat dari segi kualitas, masih perlu mendapat perhatian mengingat fasilitas belajar belum memenuhi standar. Disamping itu fasilitas pendidikan setiap tahun butuh perawatan dan penambahan untuk menggantikan mobiler yang rusak dan rehabilitasi gedung dalam rangka keamanan dan kenyamanan siswa.

Mengingat sampai saat ini Kabupaten Bireuen belum memiliki sekolah unggul (boarding school), maka sudah saatnya Kabupaten Bireuen memiliki sekolah unggul sehingga sekolah benar-benar berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), transfer nilai (*value transfer*) dan berfungsi sebagai tempat mempertahankan dan mengembangkan tradisi dan budaya-budaya luhur dalam suatu masyarakat melalui proses pembentukan kepribadian (*in the making personality processes*) sehingga nantinya para siswa dapat menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri di dalam kebudayaan dan masyarakat sekitarnya dengan kemampuan lebih dan berkarakter Islami.

9. Rendahnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral dan memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Semakin tinggi kompetensi seorang guru, maka dapat dipastikan mutu lulusan juga akan semakin baik. Hasil Uji Kompetensi Guru di kabupaten Bireuen menunjukkan angka yang masih sangat rendah, dimana nilai rata-rata hasil uji kompetensi guru TK sebesar : 43,07; SD : 38,28 dan SMP : 28,67. Jika dibandingkan dengan hasil Uji Kompetensi Guru Provinsi Aceh, maka kompetensi guru Kabupaten Bireuen masih berada di bawah mutu guru provinsi dan di bawah UKG nasional, dimana

hasil Uji Kompetensi Guru Provinsi Aceh sebesar 48,33 dan hasil Uji Kompetensi Guru Nasional sebesar 56,69. Mengingat mutu guru sangat berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan, maka peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan sangat diperlukan dan menjadi program prioritas bidang pendidikan untuk 5 tahun kedepan.

II.3.2.2 KESEHATAN

1. Angka Kematian Bayi (AKB), Balita, Neo Natal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

AKB merujuk pada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hidup hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Saat ini angka kematian bayi (AKB) di kabupaten Bireuen dari hasil perhitungan AKB adalah 12 per 1.000 kelahiran dengan referensi waktu Bulan Desember tahun 2016. Artinya di Kabupaten Bireuen pada tahun 2016 diantara 1000 kelahiran hidup ada 12 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun.

Angka Kematian Bayi pada tahun 2018 ini tidak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017, dimana angka kematian bayi pada tahun 2017 adalah 12 per 1.000 kelahiran, dan bahkan untuk tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 2 orang per 1.000 kelahiran hidup, sehingga dengan belum menurunnya angka kematian bayi ini perlu dikaji gambaran tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Untuk tingkat Kematian bayi di Kabupaten Bireuen masih tergolong rendah dimana angka kematian bayi berkisar pada 14 per 1.000 kelahiran dimana angka kematian bayi diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu :

1. Rendah jika AKB kurang dari 20.
2. Sedang jika AKB antara 20 – 49.
3. Tinggi jika AKB antara 50 – 99.
4. Sangat Tinggi AKB lebih dari 100.

Tabel 2.33
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
di Kabupaten Bireuen

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	11	12	12	12	14

Sumber : Dinas Kesehatan. 2020

Berbicara tentang jumlah kematian dan angka kematian, tentunya angka-angka ini akan berbeda jumlahnya. Untuk jumlah kematian adalah jumlah kematian yang dilaporkan oleh BPS yang didasarkan pada hasil survey karena angka dalam profil adalah jumlah kejadian kasus kematian yang tercatat dan dilaporkan oleh puskesmas dan jaringannya termasuk swasta.

Imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dasar dari segi preventif yang memegang peranan dalam menurunkan angka kematian bayi. Upaya pelayanan imunisasi dilakukan melalui kegiatan imunisasi rutin dan tambahan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selain itu perbaikan gizi merupakan syarat utama dalam perbaikan kesehatan ibu hamil, menurunkan angka kematian bayi dan balita. Di samping itu untuk dapat menurunkan angka kematian bayi akan lebih mudah tercapai apabila ditunjang dengan sumber daya kesehatan yang berkualitas dan ketersediaan standar, pedoman, sistem pencatatan pelaporan serta logistik yang memadai dan bermutu.

Indikator untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah UCI (Universal Child Immunization). Desa UCI adalah gambaran suatu desa dimana harus diatas 80 persen dari jumlah bayi berusia 0 – 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap. Berbagai faktor yang menyebabkan makin turunnya angka cakupan imunisasi tersebut dan menjadi tantangan bagi program imunisasi di Kabupaten Bireuen adalah adanya penolakan dari masyarakat terhadap upaya imunisasi anak. Baik yang disebabkan karena ketakutan akan efek demam yang timbul pasca imunisasi ataupun efek lain yang dikhawatirkan terjadi. Para orang tua yang tidak membawa anaknya

imunisasi karena sedang sakit di saat jadwal imunisasinya tiba, kemudian terlupa sehingga akhirnya tanpa imunisasi sama sekali. Demikian pula berbagai info yang tidak bertanggung jawab sudah banyak menyebar ke masyarakat baik itu melalui media sosial ataupun selebaran atau bahkan berupa buku dan tabloid sehingga menyebabkan gerakan anti vaksin semakin menunjukkan eksistensinya di Kabupaten Bireuen.

2. Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka kematian balita mempunyai arti bahwa suatu kejadian atau kematian anak berusia antara 0-4 tahun, dimana yang dihitung adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Dimana AKABA adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun. Kematian yang terjadi pada balita sendiri sebenarnya memiliki banyak faktor penyebab, diantaranya:

- kurangnya gizi
- sanitasi yang tidak sehat
- penyakit menular
- kecelakaan dan lain sebagainya

Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi serta lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk. Hasil perhitungan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen mendapatkan perkiraan Angka Kematian Balita sebesar 12 per 1.000 balita, dengan referensi waktu sampai Desember 2019. Artinya, pada tahun 2019 setiap 1.000 balita (umur 0 sampai 4 tahun 11 bulan 29 hari) pada tahun 2019, 12 anak diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun. Angka Kematian Balita di Kabupaten Bireuen termasuk dalam kategori rendah, dimana nilai normatif AKABA ≥ 140 sangat tinggi, antara 71 – 140 sedang dan ≤ 20 rendah.

Tabel 2.34
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
di Kabupaten Bireuen

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	11	13	13	12	12

Sumber : Dinas Kesehatan. 2020

3. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neo-Natal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka Kematian Neonatal = Neonatal Mortality Rate: Jumlah kematian bayi di bawah usia 28 hari per 1000 kelahiran hidup pada masa tertentu (biasanya 1 tahun).

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan perseribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Oleh karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil.

Dalam profil kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2019 dilaporkan 96 orang kematian neonatal (AKN = 11 per 1000 kelahiran hidup), artinya pada tahun 2019 setiap 1.000 balita 11 anak diantaranya meninggal sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari. Penyebabnya adalah Asfiksia 36 kasus (38 persen), Berat Badan Lahir Rendah 22 kasus (23 persen), kelainan bawaan 11 kasus (11 persen) dan penyebab lainnya 27 kasus (28 persen). Angka kematian neonatal di Kabupaten Bireuen dari tahun 2015 menunjukkan angka yang masih stabil dan wajar, namun pelayanan kesehatan Neonatal esential masih tetap harus ditingkatkan sesuai dengan Permenkes No 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak yang dilakukan oleh dokter, bidan, dan perawat.

Tabel 2.35
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
di Kabupaten Bireuen

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	9	9	13	10	11

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Bireuen Tahun 2019

4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan,

yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain sebagainya.

Informasi mengenai tingginya *Mortality Maternal Ratio* akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Tabel 2.36
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
di Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	71	125	113	152	187

Sumber : Dinas Kesehatan. 2020

Perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu lima tahun ini masih bersifat fluktuatif. Ini terlihat dari angka kematian ibu per 100.000 KH pada tahun 2015 angka kematian ibu menunjukkan penurunan yang sangat berarti yaitu sebanyak 71 per 100.000 KH. Namun untuk tahun 2016 angka kematian ibu kembali meningkat mencapai 125 per 100.000 KH dan angka ini terus meningkat mencapai 152 per 100.000 KH di tahun 2018 yang menjadikan Kabupaten Bireuen sebagai Kabupaten dengan angka kematian ibu tertinggi di Provinsi Aceh. Untuk Tahun 2019 angka kematian ibu kembali meningkat mencapai 187 per 100.000 KH dengan 16 kasus kematian.

Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status gizi, anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja rumah tangga. Terdapat dua penyebab ibu meninggal saat meninggal yakni infeksi dan perdarahan. Untuk yang penyebabnya infeksi sudah dapat ditekan karena sebagian besar kelahiran dilakukan di pusat layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik dan sebagainya.

Upaya percepatan penurunan angka kematian ibu telah banyak dilakukan, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas serta kualitas pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui paket penempatan tenaga bidan dan polindes di berbagai pelosok pedesaan serta tenaga dokter di daerah tertinggal atau sangat tertinggal. Sedangkan dari aspek kualitas pelayanan, dilakukan pelayanan melalui upaya peningkatan kemampuan/kompetensi tenaga Kesehatan dan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan (PONED), serta berbagai program intervensi lain, namun upaya tersebut belum mampu menurunkan kasus kematian dan menekan angka kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Bireuen.

5. Persentase Posyandu Aktif

Jenis Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang paling memasyarakat adalah posyandu dengan kegiatan program prioritasnya yaitu perbaikan gizi, imunisasi, penanganan diare, dan KB. Di Kabupaten Bireuen, hampir semua desa mempunyai posyandu yaitu sebanyak 609 posyandu dan proposional dengan jumlah desa di Kabupaten Bireuen. Bahkan dari tahun 2014 sampai 2018 terdapat penambahan posyandu sebanyak 18 posyandu. Persentase jumlah posyandu aktif dalam Kabupaten Bireuen dapat di lihat pada tabel 2.37:

Tabel 2.37
Persentase Posyandu Aktif

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Posyandu	620	627	633	623	626
Jumlah desa	609	609	609	609	609
Persentase Posyandu Aktif	101,8	103,0	103,9	102,3	102,7

Sumber : DPMGPKB, 2020

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa di Kabupaten Bireuen sudah terbentuk 633 unit Posyandu aktif (103,9 persen) pada tahun 2017 yang tersebar di 17 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen, namun pada tahun 2018 Posyandu aktif menurun hingga 623 unit (102,3 persen), Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui DPMGPKB dan Pihak Kecamatan serta instansi terkait terus melakukan Pembinaan agar pemanfaatan posyandu oleh masyarakat dapat ditingkatkan kembali, hal ini terbukti bahwa pada tahun 2019 jumlah Posyandu aktif bertambah 3 Unit sehingga menjadi 626 Unit (102,7 persen).

6. Rasio Puskesmas dan Polindes

Puskesmas, Polindes dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama saat ini dimana Puskesmas menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Adapun rasio puskesmas di Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 adalah 1:23.581 berarti satu puskesmas melayani 24.301 penduduk. Rasio ideal puskesmas adalah 1:100.000 penduduk, artinya Kabupaten Bireuen telah melewati batas ideal fasilitas puskesmas sehingga tidak diperlukan lagi pembangunan puskesmas baru kecuali terjadi lonjakan jumlah penduduk yang drastis.

Di samping itu, Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan adanya pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, diperlukan adanya penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan, yaitu melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi Puskesmas adalah proses penilaian eksternal oleh komisi akreditasi dan/atau perwakilan di provinsi terhadap puskesmas untuk menilai apakah sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko. Tentu saja akreditasi ini bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi

Tabel 2.38
Status Akreditasi Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Bireuen

NO	PUSKESMAS	STATUS AKREDITASI
1	Puskesmas Samalanga	Madya
2	Puskesmas Simpang Mamplam	Madya
3	Puskesmas Pandrah	Dasar

NO	PUSKESMAS	STATUS AKREDITASI
4	Puskesmas Jeunieb	Madya
5	Puskesmas Peulimbang	Madya
6	Puskesmas Peudada	Madya
7	Puskesmas Jeumpa	Madya
8	Puskesmas Kota Juang	Madya
9	Puskesmas Juli	Madya
10	Puskesmas Juli-2	Utama
11	Puskesmas Kuala	Madya
12	Puskesmas Peusangan	Madya
13	Puskesmas Peusangan Selatan	Utama
14	Puskesmas Peusangan Siblah Krueng	Dasar
15	Puskesmas Jangka	Madya
16	Puskesmas Kuta Blang	Madya
17	Puskesmas Makmur	Madya
18	Puskesmas Gandapura	Madya
19	Puskesmas Cot Ijue	Madya
20	Puskesmas Mon Kelayu	Madya

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

7. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Secara kuantitas, pada tahun 2016 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit.

Rasio rumah sakit persatuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per satuan penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Secara kuantitas, pada tahun 2017 tidak terjadi penambahan jumlah rumah sakit, sama halnya di tahun 2018 dan 2019.

Berikut adalah tabel jumlah dan rasio rumah sakit per satuan penduduk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.39
Rasio Rumah Sakit, Puskesmas, dan Pustu per Satuan Penduduk di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Rumah Sakit	6	6	6	6	6
	Rasio per satuan penduduk*	1:72.550	1:73.938	1:75.537	1:76954	1:78.606

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
2.	Jumlah Puskesmas	18	18	18	19	20
	Rasio per satuan penduduk*	1:24.183	1:24.646	1:25.179	1;24.301	1:23.581
3.	Jumlah Pustu	47	47	47	50	50
	Rasio per satuan penduduk*	1:9.626	1:9.439	1:9.643	1;9.234	1:9.4328
4.	Jumlah Penduduk	435.300	443.627	453.224	461.726	471.635

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020(data diolah)

8. Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Jumlah dokter spesialis di Kabupaten Bireuen tahun 2019 adalah 69 orang, rasio 14,6 per 100.000 penduduk, dokter umum berjumlah 187 orang dengan rasio 39,7 per 100.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan standar 45 per 100.000 penduduk dan jumlah dokter gigi adalah 49 orang dengan rasio 10,4 per 100.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan standar yaitu 13 per 100.000 penduduk. Rasio kelompok tenaga kesehatan ini cukup berfluktuatif dari tahun ke tahun seiring dengan dinamika perkembangan di lapangan.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Bireuen selama kurun waktu tahun 2015-2019.

Tabel 2.40
Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Dokter Umum	64	55	55	205	187
Jumlah Dokter Spesialis	30	31	35	42	69
Jumlah Dokter Gigi	18	10	18	26	49
Jumlah Penduduk	435.300	443.627	453.224	461.726	471.635
Rasio Dokter Umum per 100.000 *	14,70	12,40	12,14	44,40	39,7
Rasio Dokter Spesialis per 100.000*	6,89	6,99	7,72	9,10	14,6
Rasio Dokter Gigi per 100.000 *	4,14	2,25	3,97	5,63	10,4

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen (*data Dioalah)

9. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan berkompeten kepada ibu dengan tujuan untuk memperoleh penanganan definitive sesuai standar pada tingkat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalisasi jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Bireuen tahun 2019 dari sasaran 2.003 ibu hamil adalah 1.850 (82,4 persen). Persentase ini merupakan penurunan bila dibandingkan dengan persentase selama lima tahun terakhir.

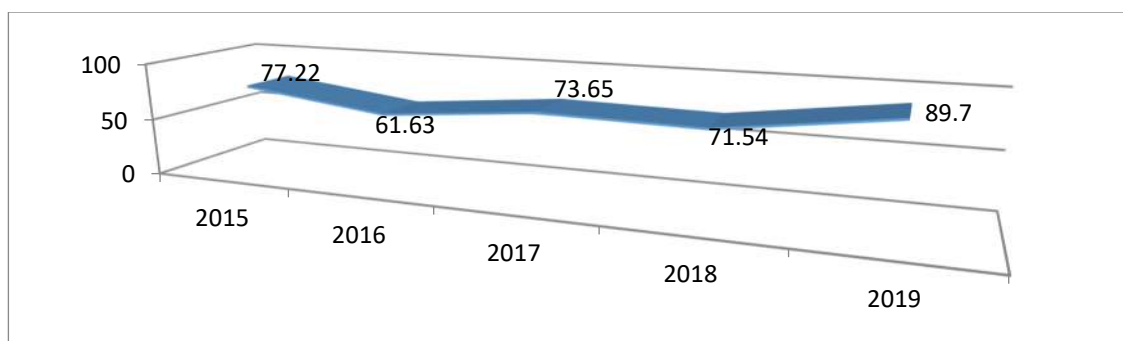
Tabel 2.41
Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	77,24 persen	68,64 persen	79,84 persen	71,54 persen	82,4 persen

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Bireuen. 2019

10. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan bertujuan untuk menurunkan resiko kematian ibu, dengan penanganan komplikasi yang mungkin terjadi pada saat proses persalinan yang bisa membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 cakupan dari jumlah 9.562 ibu bersalin sebanyak 8.573 (89,7 persen) persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan, yang jika dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan yang signifikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber : Dinas Kesehatan. 2019

Grafik 2.20 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Bireuen

11. Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan Desa atau Kelurahan (UCI) adalah desa/kelurahan dimana \geq 80persen dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. UCI (*Universal Child immunization*) adalah kondisi tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0.11 bulan), ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS), dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 Dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis IT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis IT.

Pada tahun 2019, dari 609 desa yang ada di Kabupaten Bireuen hanya 113 desa UCI (18,6 persen), kondisi ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Cakupan desa UCI yang tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 70 persen sedangkan yang terendah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 18,6 persen. Tabel berikut menggambarkan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2.42
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
di Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Desa/Kelurahan (UCI)	69 persen	70 persen	59,1 persen	40 persen	18,6 persen

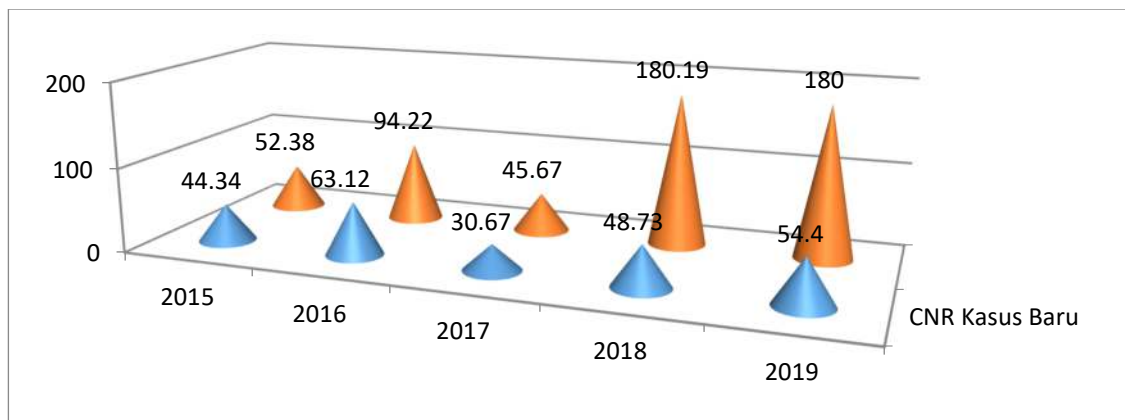
Sumber : Profil Kesehatan Kab. Bireuen tahun. 2019

12. Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru BTA (+) dan CNR seluruh Kasus TB

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA adalah Penemuan pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Beban penyakit yang disebabkan oleh Tuberkulosis ini dapat diukur dengan Case Notification Rate (CNR) dan prevalansi yaitu jumlah kasus pada satu titik tertentu sedangkan kematian jumlah penderita yang meninggal karena tuberkulosisi dalam jangka waktu tertentu.

Diantara 23 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, Kabupaten Bireuen menempati peringkat ke-9 dengan angka penurunan kasus TB terendah dan merupakan salah satu kabupaten yang menyumbang terhadap rendahnya angka penemuan kasus TB di Provinsi Aceh. Berdasarkan grafik dibawah, dapat diketahui angka notifikasi semua kasus tuberkulosis (CNR)

kasus baru TB yang tertinggi tahun 2016 sebanyak 63,12 per 100.000 penduduk. Sedangkan CNR seluruh kasus TB yang terbanyak pada tahun 2018 sebanyak 180,19 per 100.000 penduduk dan yang terendah tahun 2017 sebanyak 45,67 per 100.000 penduduk.



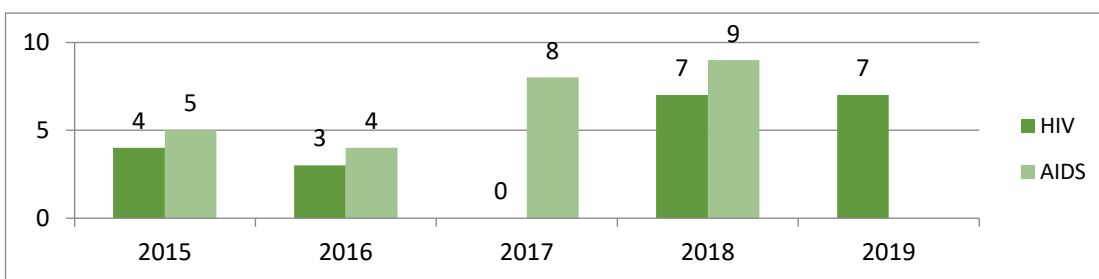
Sumber : Profil Kesehatan Kab. Bireuen Tahun. 2019

Grafik 2.21 Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru TB dan CNR Seluruh Kasus TB di Kabupaten Bireuen

13. Jumlah Kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS

AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistim kekebalan tubuh karena diserang virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Kajian Sub Direktorat HIV-AIDS dan STD tahun 2016 menunjukkan epidemi HIV di Indonesia terkonsentrasi populasi kunci yaitu Wanita Pekerja Seks (WPS), Gay, waria, dan pengguna narkoba suntik (penasun).

Kasus HIV-AIDS ditemukan pertama kali tahun 2004 kemudian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah kumulatif kasus HIV-AIDS dengan kasus yang tertinggi terjadi pada kelompok umur 30-39 tahun pada jenis kelamin laki laki sebanyak 33 kasus. Sedangkan tren penemuan kasus HIV-AIDS dalam tahun 2015-2019 kasus dapat dilihat pada gambar di bawah ini dengan jumlah tertinggi tahun 2018 yaitu sebanyak 16 kasus dengan rincian untuk HIV 7 kasus dan 9 kasus untuk AIDS.



Sumber : Profil Kesehatan Kab. Bireuen Tahun. 2019

Grafik 2.22 Jumlah Penemuan Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Bireuen

14. Cakupan Pelayanan Ibu Nifas

Adalah Pelayanan nifas sesuai standar dimana diberikan pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, (kunjungan nifas ke1) pada 6 jam pasca persalinan s.d 3 hari; kunjungan nifas ke 2 hari ke 4 s/d hari ke 28 setelah persalinan, kunjungan nifas ke 3 hari ke 29 s/d hari ke 42 setelah persalinan termasuk pemberian vitamin A 2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB pasca persalinan.

Data dari bidang kesehatan masyarakat, untuk tahun 2019 cakupan kunjungan pelayan nifas adalah sebesar 80,4 persen, naik dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya 75,8 persen. Cakupan pelayanan nifas di kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan antara tahun 2015-2019. Namun angka turun signifikan pada tahun 2018 menjadi 75,8 persen. Kondisi ini telah memberikan sinyal adanya penurunan partisipasi ibu nifas dalam mengakses pelayanan kesehatan, sehingga ini menjadi catatan penting untuk menelusuri segala kemungkinan yang mencetus munculnya penurunan partisipasi tersebut. Berikut adalah gambaran secara lengkap Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Bireuen selama kurun waktu 2015-2019

Tabel 2.43
Cakupan Pelayanan Nifas di Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Pelayanan Nifas	89,7 5persen	91,46 persen	91,95 persen	75,8 persen	80,4 persen

Sumber : Profil Kesehatan Kab. Bireuen Tahun. 2019

Kajian Epidemiologi Ancaman KLB

Untuk mengetahui adanya ancaman KLB, maka dilakukan kajian secara terus menerus dan sistematis terhadap berbagai jenis penyakit berpotensi KLB dengan menggunakan bahan kajian:

- Data surveilans epidemiologi penyakit berpotensi KLB,
- Kerentanan masyarakat, antara lain status gizi dan imunisasi,
- Kerentanan lingkungan, dan kerentanan pelayanan kesehatan,
- Ancaman penyebaran penyakit berpotensi KLB dari daerah atau negara lain, serta
- Sumber data lain dalam jejaring surveilans epidemiologi.

1) Peringatan Kewaspadaan Dini KLB

Peringatan kewaspadaan dini KLB dan atau terjadinya peningkatan KLB pada daerah tertentu dibuat untuk jangka pendek (periode 3-6 bulan

yang akan datang) dan disampaikan kepada semua unit terkait di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Propinsi, Departemen Kesehatan, sektor terkait dan anggota masyarakat, sehingga mendorong peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap KLB di Unit Pelayanan Kesehatan dan program terkait serta peningkatan kewaspadaan masyarakat perorangan dan kelompok. Peringatan kewaspadaan dini KLB dapat juga dilakukan terhadap penyakit berpotensi KLB dalam jangka panjang (periode 5 tahun yang akan datang), agar terjadi kesiapsiagaan yang lebih baik serta dapat menjadi acuan perumusan perencanaan strategis program penanggulangan KLB.

2) Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap KLB

Kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap KLB meliputi peningkatan kegiatan surveilans untuk deteksi dini kondisi rentan KLB; peningkatan kegiatan surveilans untuk deteksi dini KLB; penyelidikan epidemiologi adanya dugaan KLB; kesiapsiagaan menghadapi KLB dan mendorong segera dilaksanakan tindakan penanggulangan KLB.

15. Stunting

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Stunting merupakan bentuk lain dari kegagalan pertumbuhan. Gagalnya pertumbuhan anak dapat disebabkan oleh banyak faktor baik itu faktor dari dalam maupun dari luar. Bila dilihat dari status gizi, stunting merupakan indek perbandingan antara TB dengan Usia. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan balita ataupun faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stunting berupa asupan makanan, berat lahir, ASI eksklusif, usia balita, jenis kelamin, pendidikan orang tua dan besarnya keluarga.

Prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah stunting perlu ditangani segera. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi *stunting* Balita di tingkat nasional sebesar 6,4 persen selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2 persen di tahun 2013 menjadi 30,8 persen di tahun 2018 atau sekitar 7 juta balita

menderita stunting. Sedangkan untuk balita normal terjadi peningkatan dari 48,6 persen (2013) menjadi 57,8persen (2018). Masalah gizi lain terkait dengan stunting yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah anemia pada ibu hamil (48,9persen), Berat Bayi Lahir Rendah atau BBLR (6,2persen), balita kurus atau wasting (10,2 persen) dan anemia pada balita.

Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi *stunting* di Indonesia merupakan tertinggi kedua, setelah Kamboja.

Aceh menjadi salah satu provinsi yang angka stuntingnya tinggi, dengan menduduki peringkat ke empat mencapai 37,1 persen, di bawah Nusa Tenggara Timur (42,6 persen), Sulawesi Barat (41,6 persen) dan Papua Barat (37,7 persen).

Prevalensi stunting di Kabupaten Bireuen masih sangat tinggi berkisar pada 351 balita dari 1.001 balita pada tahun 2018, ini menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah balita yang ada di Kabupaten Bireuen, ada sekitar 35 persen anak yang mengalami stunting. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan Provinsi Aceh yang mencapai 37,3 persen pada tahun 2018. Namun, jauh diatas angka nasional sebesar 30,8 persen. Sementara WHO menetapkan ambang batas untuk stunting sebesar 20 persen. Prevalensi stunting di Kabupaten Bireuen juga menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan, dibuktikan dari hasil Riskesdas 2018 prevalensi *stunting* di Kabupaten Bireuen mencapai 41 persen dibandingkan tahun 2013 yang hanya 34,4 persen dan berada di urutan ke tujuh di Provinsi Aceh dibawah Subulussalam (49,6 persen), Simeulue (47,3 persen), Bener Meriah (45,9 persen), Aceh Tenggara (45,3 persen), Gayo lues (44,4 persen) dan Aceh Timur (42,8 persen).

Angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Bireuen melampaui prevalensi stunting aceh dan nasional. Sehingga Penurunan *stunting* memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Sejalan dengan inisiatif Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 HPK. Selain itu, indikator dan target

penurunan stunting telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2019.

16. Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan perizinan rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pengelompokan rumah sakit berdasarkan kepemilikan yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola pemerintah, pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit.

Tabel 2.44
Rumah Sakit di Kabupaten Bireuen Tahun 2019

No	Rumah Sakit	Akreditasi	Kelas	Kepemilikan
1	RS. Dr. Fauziah	B	Paripurna	Pemerintah Daerah
2	RS. Bireuen Medical Center	D	Paripurna	Swasta
3	RS. Telaga Bunda	D	Perdana	Swasta
4	RS. Malahayati	D	Perdana	Swasta
5	RS. Avicenna	D	Perdana	Swasta
6	RS. Jeumpa Hospital	C	Perdana	Swasta

Sumber : Badan Pusat Statistik Bireuen 2020

Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dibagi dua kategori yaitu puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 449 Tahun 2019 tentang perubahan atas keputusan bupati Bireuen Nomor 174 Tahun 2016 tentang penetapan kategori kawasan dan status puskesmas dalam kabupaten Bireuen menyebutkan Bireuen memiliki 20 Puskesmas yang terdiri 16 puskesmas Rawat Inap dan 4 yang Non Rawat Inap.

Tabel 2.45
Karakteristik Puskesmas di Kabupaten Bireuen

No	Kode	Puskesmas	Akreditasi	Kemampuan	Kawasan
1	1010171	Samalanga	Madya	Rawat inap	Pendesaan
2	1010172	Sp mamplam	Madya	Rawat inap	Pendesaan
3	1010173	Pandrah	Dasar	Rawat inap	Pendesaan

4	1010174	Jeunieb	Madya	Rawat inap	Pendesaan
5	1010175	Peulimbang	Madya	Rawat inap	Pendesaan
6	1010176	Peudada	Utama	Rawat inap	Pendesaan
7	1010179	Jeumpa	Utama	Rawat inap	Pendesaan
8	1010180	Kota jang	Madya	Non Rawat inap	Perkotaan
9	1010181	Kuala	Madya	Non Rawat inap	Pendesaan
10	1010177	Juli	Madya	Rawat inap	Pendesaan
11	1010178	Juli - 2	Utama	Non Rawat inap	Pendesaan
12	1010182	Jangka	Madya	Rawat inap	Pendesaan
13	1010183	Peusangan	Madya	Rawat inap	Pendesaan
14	1012636	Cot ijue	Belum Akreditasi	Non Rawat inap	Pendesaan
15	1010184	Peusangan selatan	Utama	Rawat inap	Pendesaan
16	1010185	Peusangan siblah krueng	Dasar	Rawat inap	Pendesaan
17	1010188	Kutablang	Madya	Rawat inap	Pendesaan
18	1010186	Makmur	Madya	Rawat inap	Pendesaan
19	1010187	Gandapura	Madya	Rawat inap	Pendesaan
20	1012635	Mon keulayu	Belum Akreditasi	Rawat inap	Pendesaan

Akreditasi dimaksudkan untuk memacu puskesmas agar memenuhi standar yang ditetapkan sehingga akreditasi diharapkan mampu memunculkan puskesmas dan rumah sakit yang mampu memenuhi standar yang ditentukan baik dari segi mutu layanan, kinerja pegawai maupun infrastruktur pendukung yang memenuhi standar. Banyak manfaat yang bisa didapat dari akreditasi. Bagi puskesmas, manfaat itu diantaranya meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja, memberikan keunggulan kompetitif, menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas dan meningkatkan pendidikan pada staf.

17. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Situasi saat ini terjadi pergeseran pola penyakit dari penyakit menular ke Penyakit Tidak Menular. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).

Pengendalian faktor risiko PTM merupakan upaya mencegah PTM, bagi masyarakat sehat, yang mempunyai faktor risiko dan bagi penyandang PTM, dengan tujuan bagi yang belum memiliki faktor risiko agar tidak

timbul faktor risiko PTM, kemudian bagi yang mempunyai faktor risiko diupayakan agar kondisi faktor risiko PTM menjadi normal kembali atau mencegah terjadinya PTM, dan bagi yang sudah menyandang PTM, untuk mencegah komplikasi, kecacatan dan kematian dini serta meningkatkan kualitas hidup. Salah satu strategi pengendalian PTM yang efisien dan efektif adalah pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dengan membentuk dan mengembangkan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM.

Pelayanan kesehatan pada usia produktif sarannya untuk penanggulangan PTM. Penanggulangan PTM adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Setiap penduduk Kabupaten Bireuen usia 15–59 tahun sejumlah 278.649 jiwa wajib mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard, dimana Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Kesehatan wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

18. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Makin bertambah usia, makin besar kemungkinan seseorang mengalami permasalahan fisik, jiwa, spiritual, ekonomi dan sosial. Salah satu permasalahan yang sangat mendasar pada lanjut usia adalah masalah kesehatan akibat proses degeneratif, hal ini ditunjukkan oleh data pola penyakit pada lanjut usia.

Masalah utama bagi para lanjut usia adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, oleh karena itu perlu dikembangkan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, dan pemeliharaan kesehatan di samping upaya penyembuhan dan pemulihan.

Lanjut usia merupakan seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Adapun kategori lansia menurut usianya yaitu usia 45-59 tahun merupakan pra lansia, usia 60-69 tahun merupakan lansia muda, usia 70-79 tahun merupakan lansia madya, dan 80-89 tahun merupakan lansia tua. Proses penuaan pada lansia terjadi seiring bertambahnya umur lansia, yang akan menimbulkan permasalahan terkait aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu perlunya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap lanjut usia sehingga lansia dapat meningkatkan kualitas

hidupnya. Setiap penduduk Kabupaten Bireuen yang berusia 60 tahun ke atas harus mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Bireuen yang berusia 60 tahun keatas sebanyak 34.412 Jiwa, minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan aspek kesehatan, lansia akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan penurunan pada daya tahan fisik sehingga rentan terhadap penyakit. Penurunan fungsi fisik yang terjadi pada lansia yakni penurunan sistem tubuh seperti sistem saraf, perut, limpa, dan hati, penurunan kemampuan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasa, serta penurunan kemampuan motorik seperti kekuatan dan kecepatan. Berbagai penurunan ini berpengaruh terhadap kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan terhadap status kesehatannya.

Data dari Riskesdas 2013 menyebutkan bahwa penyakit yang banyak terjadi pada lansia yaitu Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti hipertensi, artritis, stroke, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) dan Diabetes Mellitus (DM). Selain berdampak pada kondisi fisik lansia, proses penuaan juga berdampak pada kondisi psikologisnya.

Secara ekonomi, umumnya lansia dipandang sebagai beban daripada sumber daya. Sedangkan secara sosial, kehidupan lansia dipersepsikan negatif yaitu dianggap tidak banyak memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Stigma yang berkembang di masyarakat tersebut membuat lansia mengalami penolakan terhadap kondisinya dan tidak bisa beradaptasi di masa tuanya, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan hidup lansia.

Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap lanjut usia diperlukan untuk mewujudkan lansia yang sehat, berkualitas, dan produktif di masa tuanya. Pelayanan kesehatan pada lansia harus diberikan sejak dini yaitu pada usia pra lansia (45-59 tahun). Pembinaan kesehatan yang dilakukan pada lansia yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor risiko yang harus dihindari untuk mencegah berbagai penyakit yang mungkin terjadi. Kemudian perlu juga memperhatikan faktor-faktor protektif yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan lansia.

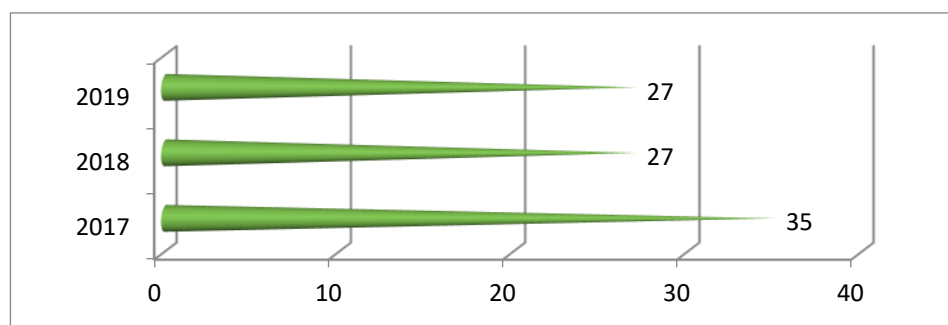
Upaya yang telah dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada lansia antara lain pelayanan geriatri di rumah sakit, pelayanan kesehatan di puskesmas, pendirian *home care* bagi lansia

yang berkebutuhan khusus, dan adanya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lanjut Usia atau Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu). Pelayanan kesehatan ini tidak hanya memberikan pelayanan pada upaya kuratif, melainkan juga menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif. Berbagai pelayanan kesehatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup lansia.

19. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten Bireuen mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Hipertensi adalah penyakit yang memerlukan pengobatan seumur hidup sehingga pasien hipertensi dapat berkunjung ke pelayanan kesehatan puskesmas maupun lainya secara terus menerus untuk memantau tekanan darah ataupun berobat sehingga tidak menimbulkan komplikasi.

Capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi di puskesmas yang dilakukan pengolahan data selama 5 tahun terakhir, capaian tertinggi ditemukan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 35 persen dan capaian pelayanan tahun 2018, 2019 masing-masing 27 persen sebagaimana diperlihatkan pada grafik berikut;



Sumber : Profil Kesehatan Kab. Bireuen Tahun 2019

Grafik 2.23 Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Puskesmas Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2019

II.3.2.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. Pekerjaan Umum

1. Prasarana dan Transportasi Jalan

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan. Dengan pemerataan pembangunan jalan diharapkan akan tercapainya keseimbangan pembangunan antar daerah dan mendukung

kelancaran distribusi barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Sehingga perekonomian nasional dapat berjalan stabil sepanjang waktu.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini diantaranya adalah dengan terus berupaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana transportasi sebagai urat nadi roda perekonomian yang menunjang aktifitas sektor lainnya. Gambaran keadaan jalan berdasarkan status, kondisi dan jenis permukaan di Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi
Tahun 2015 -2019 Kabupaten Bireuen

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Status/Kelas Jalan							
1	Jalan Nasional	Km	105,80	105,80	105,8	105,8	105,8
2	Jalan Provinsi	Km	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
3	Jalan Kabupaten	Km	891,9	936,63	1.207,67	1.207,67	1.207,67
Jenis Permukaan Jalan Kabupaten							
1	Aspal	Km	503,16	534,74	642,35	651,72	649,58
2	Kerikil/Pengerasan	Km	241,69	259,81	450,35	440,85	410,25
3	Tanah	Km	145,06	142,08	115,1	102,84	102,84
Kondisi Jalan Kabupaten							
1	Baik	Km	384,92	365,79	413,24	440,81	503,64
2	Sedang	Km	233,51	91,08	55,63	55,53	54,23
3	Rusak Ringan	Km	119,7	312,27	117,75	109,8	93,48
4	Rusak Berat	Km	153,78	167,49	621,05	601,53	556,33

Sumber : BPS Kab Bireuen 2019&Dinas BMCK Kab.Bireuen, 2020

Berdasarkan status/kelas jalan, selama 5 (lima) tahun terakhir kondisi kelas jalan nasional maupun provinsi tidak mengalami perubahan. Kondisi ini tidak berlaku terhadap panjang jalan kabupaten yang mengalami peningkatan pada tahun 2017 sepanjang 271,04 km, akan tetapi penambahan panjang ruas jalan tidak berlaku pada tahun 2018-2019. Jenis permukaan jalan kabupaten dengan kondisi beraspal meningkat pada tahun 2019, yakni sepanjang 42,86 km. Secara garis besar, pemerintah kabupaten terus melakukan pembenahan terhadap kondisi jalan beraspal. Akan tetapi, kondisi permukaan jalan kabupaten dengan kerikil/pengerasan serta tanah terus mengalami penurunan setiap tahunnya.

Dalam kurun lima tahun, panjang ruas jalan untuk jalan kabupaten mencapai 1.207,67 Km. Artinya terdapat penambahan ruas jalan sepanjang 329,67 km dari tahun 2014 hingga 2018. Kondisi jalan kabupaten dengan status baik mengalami peningkatan maupun perbaikan dalam pembangunan jalan di Kabupaten Bireuen dengan pencapaian pada tahun 2019 sepanjang 503,64 Km.

Jenis permukaan jalan di Kabupaten Bireuen memberikan peningkatan setiap tahunnya. Tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan penambahan dengan ruas jalan beraspal mencapai 651,72 Km, dimana terjadi peningkatan sepanjang 154,62 Km dari tahun 2015. Hal ini tentu memberikan dampak terhadap pengurangan kondisi permukaan jalan tanah yang terdapat di Kabupaten Bireuen. Selain peningkatan jalan beraspal, pemerintah kabupaten juga mengupayakan perbaikan jalan melalui pembangunan jalan kerikil/perkerasan. Kondisi ini dapat dilihat dari adanya penambahan ruas jalan dengan kondisi kerikil/perkerasan yang terjadi dalam kurun lima tahun, yaitu mencapai 211,95 Km.

Perlunya perhatian pemerintah daerah dalam hal pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di daerah ini diharapkan mampu menumbuhkembangkan peran dan fungsi prasarana transportasi tersebut dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya, terutama dalam mendorong perekonomian masyarakat yang nantinya turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

2. Irigasi

Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian khususnya untuk pertanian lahan basah. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Jaringan Irigasi di Kabupaten Bireuen tersebar diseluruh kecamatan, Kecamatan Juli dan Gandapura menjadi kecamatan yang memiliki jaringan

irigasi yang lebih panjang dibandingkan kecamatan lainnya dengan panjang mencapai 157,835 dan 129,120. Kecamatan Peusangan dan Peulimbang merupakan kecamatan dengan panjang irigasi paling rendah dibandingkan dengan lainnya yakni sebesar 18,801 dan 22,005. Berikut ini adalah jaringan irigasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.47
Jaringan Irigasi menurut Kecamatan Tahun 2019 Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Budidaya
		Primer	Sekunder	Tersier		
1	Samalanga	7,260	20,608	41,852	69,720	2,159
2	Simpang Mamplam	11,025	33,300	33,297	77,622	1,351
3	Pandrah	5,946	30,970	34,910	71,826	1,528
4	Jeunieb	6,525	28,385	37,355	72,265	2,709
5	Peulimbang	2,675	8,510	10,820	22,005	310
6	Peudada	7,686	29,350	48,750	85,786	2,530
7	Jeumpa	3,030	17,931	16,250	37,211	369
8	Juli	9,233	97,652	50,950	157,835	6,862
9	Peusangan	5,090	7,411	6,300	18,801	304
10	Peusangan Selatan	3,465	14,439	15,175	33,079	625
11	Peusangan Sb. Krueng	10,785	29,712	43,460	83,957	2,785
12	Makmur	11,425	21,220	21,935	54,580	1,318
13	Gandapura	15,416	63,814	47,190	126,420	2,697

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen , 2020

3. Cakupan Layanan Sanitasi Layak

Upaya peningkatan kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang bersih dan teratur, sementara itu kebersihan dan keteraturan lingkungan tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai, salah satunya adalah fasilitas sanitasi yang layak. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Salah satu indikator dalam melihat kondisi kesehatan lingkungan adalah ketersediaan tempat buang air besar dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah tangga.

Sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Bireuen dikelola oleh Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Air limbah yang ada berasal dari air limbah rumah tangga, air limbah industri, dan air limbah medis. Kondisi umum penanganan limbah cair rumah tangga di Kabupaten Bireuen adalah mempergunakan system setempat (*onsitesystem*)

berupa *septictank*, namun juga di jumpai penggunaan cubluk di beberapa tempat. Sampai saat ini Kabupaten Bireuen belum memiliki sistem pengolahan air limbah terpusat berupa Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) maupun Instalansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Sementara itu, limbah industri yang ada di Kabupaten Bireuen berasal dari jumlah industry sebanyak 337 unit usaha dengan kategori jenis usaha antara lain bangunan konstruksi, pengangkutan, pertambangan, pertanian, hotel dan restoran (warung kopi). Limbah industry yang di hasilkan oleh jenis industry tersebut memiliki kadar BOD (*Biochemical Oxygen Demand*), COD (*Chemical Oxygen Demand*) dan TSS (*Total SuspendedSolid*) yang tinggi. Sampai saat ini KLHKP belum sepenuhnya dapat melakukan pemeriksaan kualitas air buang dari industry-industri tersebut. Dari hasil pantauan di lapangan hampir semua industri tersebut membuang secara langsung air buangan keselokan atau saluran irigasi terdekat.

Untuk limbah industri medis, berasal dari 4 (empat) rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Fauziah, RS. Telaga Bunda, RS. BMC dan RS. Malahayati. Selain itu juga terdapat 18 Puskesmas, dan 43 Puskesmas Pembantu. Dari sejumlah sarana kesehatan tersebut dipastikan menghasilkan limbah medis yang mengandung bahan kimia maupun limbah infeksius yang berbahaya bagi lingkungan. Untuk dapat mencegah dan mengurangi pengaruh limbah medis tersebut, maka setiap Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Bireuen telah membangun IPAL medis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mengurangi kemungkinan pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan dan aktifitas rumah sakit.

Untuk pengolahan limbah padat rumah sakit menggunakan *Mesin Incenerator* sebanyak 1 (satu) unit yang terletak di RSUD dr. Fauziah. Mesin ini mampu membakar sampah infeksius sebanyak 20 kg sekali pemusnahan. Tetapi dana operasional dan maintenance incenerator masih sangat terbatas. Selain RSUD dr. Fauziah Bireuen, ada 4 (empat) Puskesmas lain yang memiliki mesin *incenerator*. Bagi rumah sakit, puskesmas dan sarana pengobatan yang belum mempunyai *incenerator* maka diadakan kerjasama dengan RSUD dr. Fauziah atau Puskesmas lain untuk pemusnahan limbah infeksius. Dari kondisi diatas, maka masih sangat membutuhkan pengadaan sarana mesin *incinerator* bagi Puskesmas yang lain yang belum memiliki mesin *incenerator*.

1. Air Minum

Air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh makhluk hidup. Kebutuhan akan ketersediaan air tentunya harus dipenuhi dengan memperbaiki sarana prasarana penunjang mulai dari pengolahan sampai pendistribusian air bersih kepada penduduk. Sumber air yang digunakan oleh warga Kabupaten Bireuen masih bervariasi, yaitu bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), air sumur dan air sungai. Sebagai salah satu upaya peningkatan air bersih yaitu melalui pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) melalui program Pemberdayaan Masyarakat yang menggunakan sumber air terdekat, serta peningkatan pelayanan PDAM Tirta Krueng Peusangan.

Secara konsisten, jumlah pelanggan air minum PDAM Tirta Krueng Peusangan dari Tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Kategori pelanggan berasal dari rumah tangga, niaga, sosial, instansi pemerintah dan industri. Data terakhir pada tahun 2019, jumlah pelanggan air minum PDAM Tirta Krueng Peusangan mencapai 23.195. Jumlah terbanyak dimiliki oleh kategori rumah tangga dan niaga. Porsi terkecil diberikan oleh industri, baik yang aktif maupun non aktif.

Tabel 2.48
Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Tirta Krueng Peusangan
menurut Kategori Pelanggan Tahun 2019

No.	Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan	
		Aktif	Non Aktif
1.	Rumah Tangga	20.544	1.295
2.	Niaga	1.596	292
3.	Sosial	441	58
4.	Instansi Pemerintah	447	66
5.	Industri	137	7
Jumlah / Total		23.195	1.718
Tahun 2018		20.950	1.724
Tahun 2017		18.709	1.677
Tahun 2016		17.214	1.644
Tahun 2015		15.231	1.598

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen Tahun, 2020

Secara konsisten, jumlah pelanggan air minum PDAM Tirta Krueng Peusangan dari Tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Kategori pelanggan berasal dari rumah tangga, niaga, sosial, instansi pemerintah dan industri. Data terakhir pada tahun 2019, jumlah pelanggan air minum PDAM Tirta Krueng Peusangan mencapai 23.195. Jumlah terbanyak dimiliki oleh kategori rumah tangga dan niaga. Porsi terkecil diberikan oleh industri, baik yang aktif maupun non aktif.

B. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut kebijakan tersebut, perencanaan tata ruang di Indonesia memiliki tiga tingkatan rencana tata ruang yaitu nasional, provinsi dan kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten merupakan penjabaran RTRW nasional dan provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah secara keseluruhan, dimana strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub blok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.

Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen dilakukan pada Tahun 2019 setelah sebelumnya telah dilaksanakan Peninjauan Kembali (PK) yang menjadi persyaratan dalam melakukan kegiatan revisi. Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Bireuen Nomor 143 Tahun 2019 dan memberikan rekomendasai REVISI terhadap RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032. Kegiatan PK RTRW Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan pada Tahun 2018 menghasilkan beberapa poin, diantaranya:

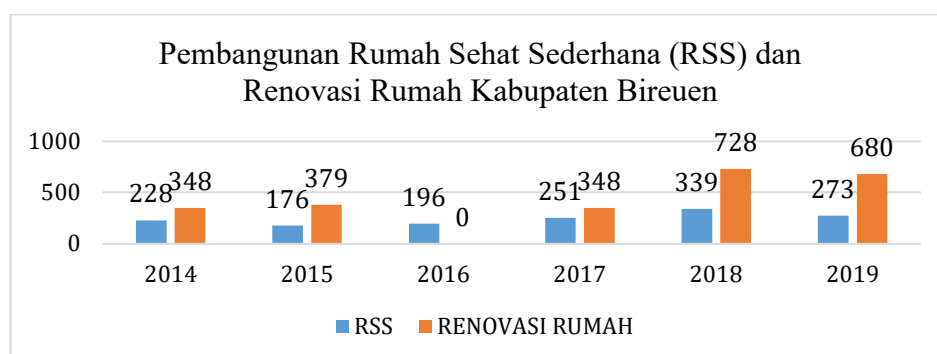
- 1) Tingkat kualitas RTRW yang kurang baik
- 2) Tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai; dan
- 3) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang rendah.

Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun diantaranya RDTR Kawasan Perkotaan Bireuen, RDTR Kawasan Perkotaan

Jeunieb, RDTR Kawasan Perkotaan Kuta Blang, RDTR Kawasan Perkotaan Samalanga dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkotaan Matangglumpang Dua. Hingga saat ini, dokumen tersebut masih belum dapat diaplikasikan menjadi sebuah peraturan daerah (qanun) dikarenakan proses asistensi yang belum selesai dilakukan. Proses asistensi untuk data spasial dilakukan di Badan Informasi Geospasial (BIG), sedangkan subtansi dokumen perencanaan di Kementerian Agraria Tata Ruang / Kepala BPN.

II.3.2.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen Tahun 2020, maka pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 sejumlah 339 unit melalui APBK. Pembangunan RSS di Kabupaten Bireuen merupakan akumulasi dari penganggaran yang didapatkan melalui APBK dan APBA, selain itu penyediaan kebutuhan papan bagi kaum marjinal terendah didapatkan pada tahun 2015 sejumlah 176 unit. Renovasi rumah bagi kaum dhuafa menjadi salah satu dari beberapa alternatif program pengadaan rumah selain pembangunan rumah sehat sederhana. Renovasi rumah pada tahun 2019 berjumlah 680 unit, sehingga secara keseluruhan jumlah rumah yang telah direnovasi yaitu 2.483 unit. Sedangkan pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen hingga tahun 2019 mencapai 1.463 unit. Secara keseluruhan jumlah rumah yang telah direnovasi oleh pemerintah kabupaten adalah 1.803 unit, akan tetapi jumlah unit terbanyak terjadi pada tahun 2018 (728 unit).



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen, 2020

Grafik 2.24 Jumlah rumah sehat dan rumah layak huni Kabupaten Bireuen Tahun 2014-2019

Melihat kondisi permukiman dan perumahan di Kabupaten Bireuen menurut tabel di bawah rasio permukiman layak huni tidak ada peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2018 hanya sebesar 0.19. Pemerintah Kabupaten perlu penanganan yang komprehensif terhadap angka Cakupan Layanan Rumah Layak Huni terjangkau yang turun sangat drastis dari 4.42 persen pada tahun 2013 menjadi 3.90 persen pada tahun 2018.

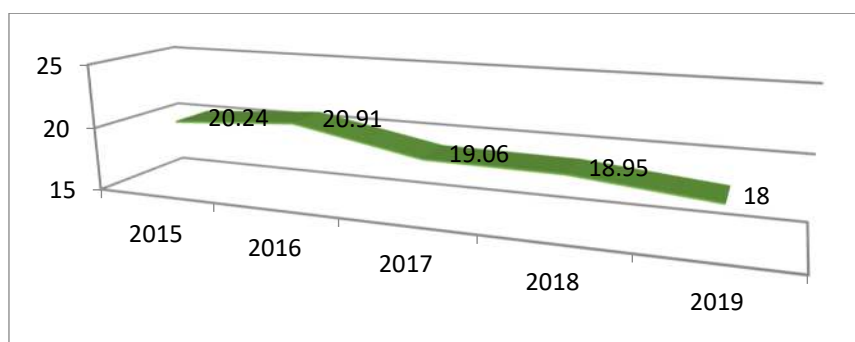
Tabel 2.49
Kondisi Permukiman dan Perumahan di Kabupaten Bireuen

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio Permukiman Layak Huni	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
2.	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau	4.07persen	3.90persen	3.75persen	3.70persen	3,6
3.	Persentase Permukiman yang bertata	0.78persen	0.85persen	0.90persen	0.92persen	0.92persen
4.	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0.57persen	0.57persen	0.57persen	0.57persen	0.57persen
5.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh dikawasan perkotaan	1.36persen	1.31persen	1.25persen	1.22persen	1.22persen
6.	Proporsi Rumah tangga kumuh perkotaan	20.24persen	20.91persen	19.06persen	18.95 persen	18persen

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, 2020

Kondisi Indikator permukiman yang bertata berfluktuasi dari angka 0,78 persen pada tahun 2015 mengalami peningkatan 2019 sebesar 0,92. Persentase lingkungan permukiman kumuh tetap stagnan pada angka 0.57 persen dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, hal ini menandakan belum ada penanganan yang serius oleh pemerintah daerah terhadap permukiman kumuh tersebut dan begitu juga dengan persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan hanya sedikit menurun dari tahun

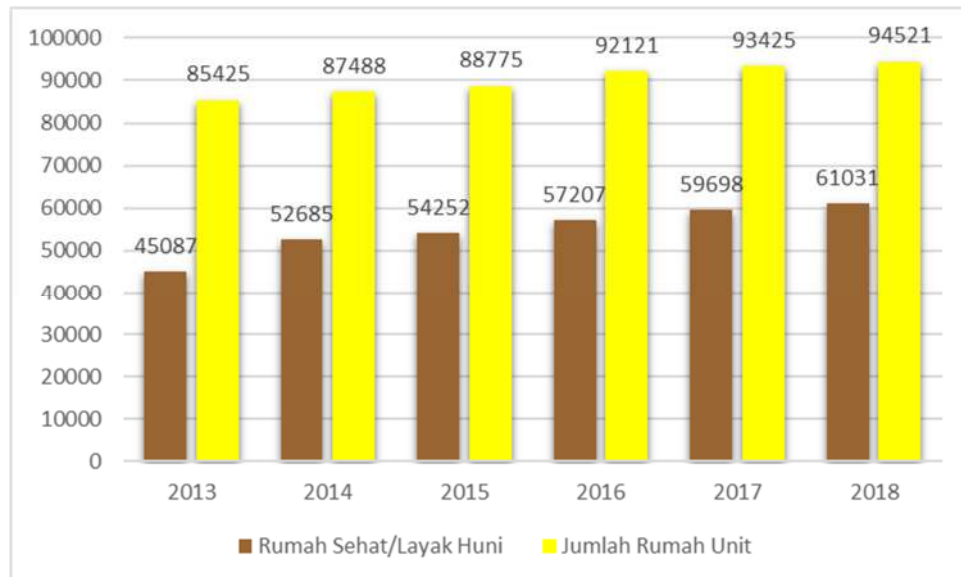
2014 sebesar 1,36 persen menjadi 1,25 persen pada tahun 2017 angka ini juga kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 1,22 persen. Namun selanjutnya sampai dengan tahun 2019 proporsi rumah tangga kumuh di perkotaan cukup berfluktuasi namun dengan rentang yang tidak jauh masing-masing menjadi 20,24 pada tahun 2015, 19,06 persen untuk tahun 2017 dan 18 persen untuk tahun 2019. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan secara garis besar ada mengalami penurunan namun perlu diawasi secara serius oleh pemerintah sehingga terus dapat menurunkan proporsi rumah tangga kumuh di perkotaan wilayah Kabupaten Bireuen.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen

Grafik 2.25 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten Bireuen

Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah rumah layak huni di Kabupaten Bireuen meningkat setiap tahunnya. Pencapaian rumah layak huni pada tahun 2013 sejumlah 45.087 unit memiliki selisih sebesar 40.338 unit dengan jumlah keseluruhan unit rumah yang tersedia pada tahun tersebut. Peningkatan terbesar rumah layak huni/sehat terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah 52.685 unit, dimana pertambahan mencapai 7.598 unit dari tahun sebelumnya. Grafik dibawah juga menunjukkan kondisi yang sama terhadap peningkatan rumah sehat/layak huni di Kabupaten Bireuen. Data terakhir yang didapatkan pada tahun 2018, rumah layak huni berjumlah 61.031 dibandingkan dengan keseluruhan unit rumah di Kabupaten Bireuen (94.521 unit).



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen

Grafik 2.26 Perbandingan jumlah rumah sehat/layak huni dengan jumlah rumah tahun 2013-2018

II.3.2.5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai peyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah atau Qanun.

Satuan Polisi Pamong Praja pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat terwujud rasa tenteram dan tertib ditengah-tengah masyarakat. Berikut adalah tabel data mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2.50
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

N O	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	1.83	1.69	1.85	2.64	1.21
2	Jumlah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	3	6	0	8	8
2	Jumlah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	210	120	125	120	180
3	Persentase Penegakan PERDA	13	22	80	85	95
4	Penyelesaian Kasus Pelanggar Syari'at Islam	40	25	240	280	186
5	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk	21	18	21	25	3

Sumber : Satpol dan WH, 2020

Tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah pelanggaran K3 dari tahun 2015 sampai dengan 2016, 2017 masing masing meningkat sebesar 10 kasus menjadi 125 kasus pada tahun 2017, namun pada tahun 2019 meningkat cukup signifikan menjadi 180 kasus. Jika dilihat dari penyelesaian kasus pelanggaran Syari'at Islam mulai tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan angka yang cukup berfluktuatif, angka penyelesaian kasus tergantung terhadap jumlah kasus yang masuk, angka penyelesaian kasus tertinggi terjadi pada tahun 2018 menjadi 280 kasus. Diharapkan dengan ditegakkannya sanksi atas pelanggaran dapat memberikan efek jera sehingga dapat menurunkan tingkat pelanggaran Syari'at Islam.

II.3.2.6 SOSIAL

1. Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial di Kabupaten Bireuen adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bireuen disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial selama ini ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, dimana bantuan sosial diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat yang meliputi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Penerima bantuan sosial di tahun 2017 lebih difokuskan kepada pemberdayaan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE), korban tindak kekerasan dan pekerja migran dan telah disalurkan kepada 140 orang penerima manfaat atau sebesar 0,038 persen dengan jenis usaha penerima berupa jenis usaha jual nasi sebanyak 35 orang, jenis usaha menjahit 35 orang, jenis usaha jual kue 35 orang dan jenis usaha ternak kambing 35 orang.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar sehingga perlu memperoleh bantuan sosial. Untuk kedepan Kabupaten Bireuen perlu menyediakan data base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga pemberian bantuan akan lebih tepat sasaran.

Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial ekonomi sejenis lainnya, dalam SPM target ditetapkan 80 persen dan terealisasi 100 persen. SPM mengamanatkan bahwa minimal 80 persen KUBE yang tumbuh harus difasilitasi dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan realisasi anggaran tahun 2017 tercatat Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Sosial hanya mampu memfasilitasi 1 KUBE dari seluruh KUBE yang tumbuh. Dari 500 KUBE yang ada hanya 1 KUBE yang mampu difasilitasi berarti pencapaian target tahunan hanya sebesar 0,079 persen KUBE (APBA) dan KUBE (APBN) sebesar 0,47 persen. Untuk tahun 2019 PMKS yang mendapatkan bantuan hanya untuk kelompok wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yaitu sebesar 0,032 persen saja.

Tabel 2.51

Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
WRSE (APBK)	0,188	-	0,038	0,038	0,032
KUBE (APBA)	-	-	0,079	0,079	-
KUBE (APBN)	-	-	0,47	0,47	-

Sumber : Dinas Sosial, 2020

Persentase (persen) PMKS yang tertangani di Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun berfluktuatif, ini terlihat pada tabel di bawah ini. Untuk tahun 2017 persentase PMKS yang tertangani masih sangat rendah hanya sebesar 0,58 persen. Dan menjadi 0,71 persen ditahun 2019.

Tabel 2.52
Persentase PMKS yang Tertangani di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase PMKS Yang Tertangani (APBK)	11,94	9,46	0,58	0,58	0,71

Sumber : Dinas Sosial, 2020

Persentase PMKS skala Kabupaten Bireuen yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dari tahun ke tahun berfluktuatif, ini terlihat pada tabel di bawah ini. Untuk tahun 2019 persentase PMKS yang tertangani masih sangat rendah hanya sebesar 0,71 persen.

Tabel 2.53
Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar (APBK)	11,93	8,49	0,58	0,58	0,71

Sumber : Dinas Sosial, 2020

Untuk Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dalam Target capaian SPM sampai dengan tahun 2017 adalah 30 persen, yang berarti dari seluruh wahana yang ada 30 persennya harus menyiapkan sarana prasarana pelayanan sosial, tetapi di Kabupaten Bireuen belum seluruh wahana yang ada mempunyai sarana prasarana yang memadai. Terdapat 12 Panti Sosial yang ada namun hanya 1 Panti Sosial yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial atau sekitar 8,33 persen seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 2.54
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial (APBK)	1,10	9,09	8,33	8,33	8,33

Sumber : Dinas Sosial, 2020

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat di Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun berfluktuatif, ini terlihat pada tabel di bawah ini. Untuk tahun 2018

persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat masih sangat rendah hanya sebesar 17 persen.

Tabel 2.55
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat (APBK)	25	22,22	15	17	30

Sumber : Dinas Sosial, 2020

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana di Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun berfluktuatif, ini terlihat pada tabel di bawah ini. Untuk tahun 2019 persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana masih sangat rendah hanya sebesar 35,04 persen.

Tabel 2.56
Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap (APBK)	22,22	15	33,33	35,02	35,04

Sumber : Dinas Sosial, 2019

Persentase (persen) penyandang cacat fisik dan mental, serta usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial di Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun berfluktuatif, ini terlihat pada tabel di bawah ini. Untuk tahun 2019 persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya 2,56 persen.

Tabel 2.57
Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial (APBN)	-	0,39	0,39	0,39	2,56

Sumber : Dinas Sosial, 2020

2. Disabilitas

Disabilitas adalah seseorang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau normal. Di Kabupaten Bireuen bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk penyandang disabilitas selama ini masih belum menyeluruh walaupun selama ini pemerintah telah berupaya membantu melalui program-program yang dirancang untuk penyandang disabilitas. Upaya pemberian bantuan sosial perlu terus diupayakan mengingat masih tingginya angka disabilitas di Kabupaten Bireuen seperti data yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.58
Jumlah Penderita Cacat di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tuna Netra	332	400	407	289	403
Bisu/Tuli	196	216	368	70	630
Cacat Tubuh	965	1.339	1.404	405	1.147
Cacat Mental	189	1.006	598	218	2.142
Bibir Sumbing	52	19	63	31	31

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

3. Rumah Aman

Dalam upaya untuk Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bireuen telah menyediakan rumah aman yang dibangun dengan dana OTSUS pada tahun 2016. Dalam skema perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, rumah aman menjadi salah satu hal yang penting untuk diadakan, karena seperti diketahui, pelaku kekerasan berbasis gender paling banyak adalah orang yang dikenal dekat oleh korban sehingga tempat aman sementara bagi korban kekerasan sangat diperlukan baik karena memerlukan tempat singgah sementara atau karena keamanannya terancam sehingga keamanan korban paska kekerasan menjadi hal yang utama dilakukan.

Rumah aman Kabupaten Bireuen selama ini telah memberikan pendampingan baik secara pribadi melalui konseling, pendampingan spiritual, reunifikasi keluarga maupun pendampingan dalam merencanakan kehidupan setelah keluar dari rumah aman. Selain itu pendampingan dalam pelayanan kesehatan, pendampingan kelompok, advokasi kasus dan

pendidikan masyarakat juga menjadi bagian dari kerja rumah aman tersebut.

II.3.3 LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR

II.3.3.1 TENAGA KERJA

Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen usia 15 tahun keatas sebagian besar tergolong ke dalam angkatan kerja, yaitu sekitar 231.661 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sekitar 96,48 persen tergolong ke dalam penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten pada Tahun 2018 sebesar 180 pekerja dengan penurunan 77,09 persen. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar berpendidikan terakhir yaitu sarjana sebesar 62,22 persen (112 pekerja) dan yang ditempatkan sebanyak 32 pekerja di tahun 2018.

Tabel 2.59
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2015-2019
di Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angkatan Kerja 15 tahun ke atas	191.893	191.893	227.483	213.661	226.030
2	Usia penduduk 15 tahun ke atas	306.442	313.061	320.673	327.589	335.609
3	Rasio angkatan kerja	0.62	0.61	0.71	0.65	0.67

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2020

II.3.3.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan terhadap perempuan muncul dan telah melanggar UU No 39 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai aturan hukum yang sudah ada dan ditujukan bagi perempuan dan anak belum memadai. Berbagai kendala yang harus dihadapi sangat kompleks terutama ketika korban harus berhadapan di muka hukum. Bahkan ada kecenderungan tidak berpihak pada perempuan maupun anak sebagai korban. Berikut tabel data gambaran umum kondisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Wilayah Kabupaten Bireuen dari Tahun 2015 – 2019:

Tabel 2.60
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga
di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah Tangga	100.505	102.428	104.643	106.606	108.833
Kasus KDRT	7	23	62	72	89
Rasio KDRT/100.000 RT	1,39	0,95	1,34	1,09	1,01

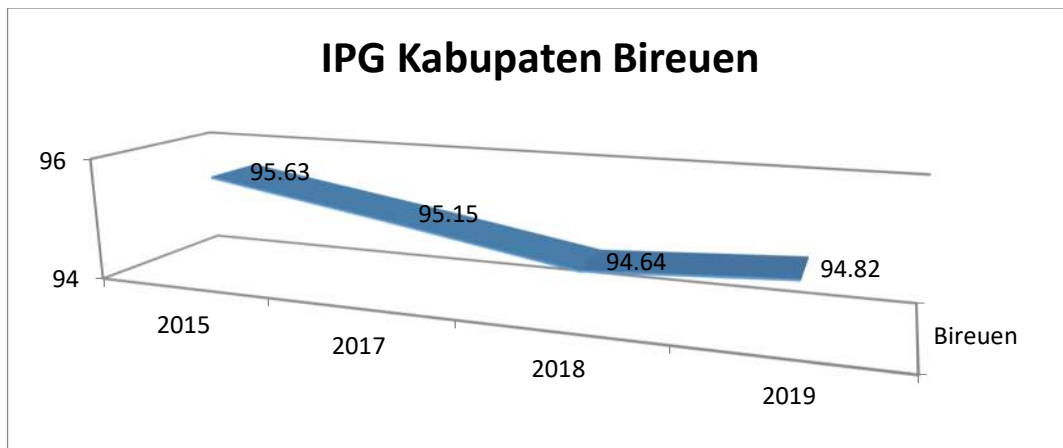
Sumber : DPMGPKB dan BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Dari data tabel diatas dapat kita lihat bahwa rasio KDRT di Kabupaten Bireuen menunjukkan angka yang stagnan, di tahun 2015 rasio KDRT per 100.000 rumah tangga sebesar 1.39 persen, artinya terdapat 1 kasus KDRT tiap 100.000 rumah tangga, begitu juga halnya di tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 dimana rasio KDRT di kisaran 1 persen.

2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Perempuan memiliki potensi tinggi untuk berperan pada upaya-upaya pembangunan daerah. Meskipun demikian, pemberdayaan dan pengembangan perempuan masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan, terkait dengan kemampuan perempuan untuk menikmati dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Gambaran pembangunan manusia berbasis gender dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Berdasarkan indeks tersebut, dapat dilihat seberapa besar perkembangan pembangunan gender berdasarkan pencapaian perempuan dalam mengakses pembangunan gender dan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan Gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan persentasi IPG di Kabupaten Bireuen selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.27 Perkembangan IPG Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Berdasarkan grafik di atas, perkembangan IPG di Kabupaten Bireuen dalam 5 tahun (2015-2019) menunjukkan tren yang menurun, hingga pada Tahun 2019 nilai IPG Kabupaten Bireuen mencapai 94,82 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Bireuen masih tinggi, salah satunya dipengaruhi oleh masih kentalnya budaya dan agama di Kabupaten Bireuen. Dalam persepektif gender, hasil pembangunan di Kabupaten Bireuen masih belum bisa dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat.

Menyangkut dengan keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah jumlah perempuan yang bekerja dilembaga pemerintahan. Hingga saat ini, peran perempuan dan representasi politiknya di parlemen serta pada pemerintahan, baik secara global maupun nasional masih sangat rendah. Begitu juga dalam Kabupaten Bireuen partisipasi perempuan masih kurang dimana saat ini terdapat satu orang anggota legislatif perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tidak ada pendidikan politik, tidak adanya pelatihan dan penguatan ketrampilan politik perempuan untuk memperkuat ketrampilan politiknya, kurang adanya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik terutama untuk berpartisipasi dalam institusi politik formal seperti lembaga legislatif dan partai politik, dan masih adanya sistem perundang-undangan politik yang membatasi aksesibilitas dan partisipasi perempuan dalam pemilu, parlemen dan dalam pemerintahan.

Terkait Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bireuen, pada tahun 2015 terdapat sebanyak 87.76 persen dari

jumlah total pekerja perempuan 7.334 orang, akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan 83,11 persen, hal ini menunjukkan bahwa adanya kesetaraan Gender dalam Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Diharapkan Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan bekerja semakin kecil.

Tabel 2.61
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen

URAIAN	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pekerja Perempuan	7.334	7.309	6.786	6.568	8.791
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	87.76	85.65	83.69	83.11	66
Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPRK	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2020 (data diolah)

3. Ruang Bermain Ramah Anak

Kabupaten Bireuen adalah salah satu Kabupaten yang mendapat prioritas pengembangan dari Kementerian Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) dimana salah satu Indikatornya yaitu Pembangunan dan Pengembangan RBRA yang terstandarisasi dan tersertifikasi sebagai Ruang Bermain Ramah Anak. Penilaian standarisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) telah dilaksanakan oleh Tim Kementerian PPPA Republik Indonesia sesuai dengan suratnya nomor: B-1036/KPP-PA/D.IV/A2/PA.02.02/08/2019 selama 4 hari dari tanggal 29 September 2019 s.d tanggal 02 Oktober 2019.

Bermain memiliki manfaat sangat penting bagi anak, diantaranya adalah sebagai terapi, mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa, kesadaran diri, kreativitas, sensorik dan motorik, kognitif, moral dan etika dan karakter anak. Meskipun masih banyaknya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam mewujudkan RBRA yang memiliki persyaratan standar yang harus dipenuhi yaitu diantaranya :

- Persyaratan lokasi;
- Pemanfaatan;
- Kemudahan;
- Material;
- Vegetasi;
- Keselamatan;
- Keamanan;
- Kesehatan;
- Kenyamanan;
- Pencahayaan;
- Tempat dan peralatan/pera bot bermain;
- Udara/ penghawaan;
- Pengelolaan.

Persyaratan ini tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip gratis, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, sehat, menghargai pandangan anak, aman dan selamat kreatif dan inovatif, dan hak hidupnya. Hadirnya Ruang Bermain Ramah Anak akan menumbuhkan pengembangan baik fisik, mental, moral dan sosial.

4. Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Kebijakan PPPA Bireuen dalam mendorong pencapaian konsep sekolah ramah anak, pada level SKPK

1. Penguatan Lembaga KLA
2. Inisiatif pembentukan Gugus tugas KLA dengan diawali rapat lintas sektoral
3. Penglibatan Tim Penggerak PKK dan berbagai kalangan ibu-ibu untuk kelompok pendukung
4. Sinergi dan sinkronisasi dengan dinas Pendidikan dan Kemenag
5. Mendorong implementasi pelaksanaan pilot dengan akses dana sekolah dan menyamakan persepsi dengan komite sekolah dan orang tua murid
6. Fungsi advokasi lanjutan dan komitmen Perbub KLA
7. Memperluas KIE sehingga masyarakat merasa ini adalah kebutuhan bersama yang strategis.

Forum Anak merupakan organisasi anak yang dibina oleh pemerintah baik di tingkat kelurahan, desa, kawasan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. melalui PPPA untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak atau dapat juga diartikan sebagai pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal.

Pada tahun 2019, Kabupaten Bireuen mendapatkan penghargaan dari Kementrian sebagai Kabupaten Layak Anak mendapatkan penghargaan sebagai peringkat Pratama. Kedepannya akan lebih diupayakan untuk dapat peringkat Madya dengan syarat 30 persen dari total gampong di Bireuen sudah layak anak. Kegiatan KLA ini juga mempengaruhi besaran transferan

dana intensif daerah (DID). Dasar hukum GLA yaitu pemerintah telah menerbitkan dan mengundang Undang-Undang atas hak anak seperti Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konveksi Hak-hak Anak.

Mengingat desa pada saat ini dihadapkan pada permasalahan yang kompleks terkait perlindungan anak. Sebagai entitas lembaga pelayanan publik yang langsung berhadapan dengan masyarakat, desa menjadi garda terdepan menangani kasus-kasus perlindungan anak. Saat ini sudah ada Gampong Layak Anak (GLA) dan akan terus dilakukan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan peringkat MADYA.

Kabupaten Bireuen memiliki nama organisasi anak dengan nama Forum Anak Kota Juang. Harapannya dengan adanya forum anak ini dapat membangun aspirasi anak sehingga kebutuhan anak dapat dipenuhi di setiap sektor pembangunan di kabupaten Bireuen.

II.3.3.3 PANGAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

Pangan juga dapat diartikan sebagai bahan sumber gizi. Kehidupan manusia tidak mungkin tanpa adanya ketersediaan bahan pangan. Dalam mempertahankan kehidupannya manusia harus makan secukupnya dan memenuhi gizi. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi atau kebutuhan pokok (basic need). Pangan sebagai sumber bahan (zat) gizi merupakan sektor yang strategis karena:

- a. Produk pangan (terutama sektor pertanian) merupakan industri massal yang melibatkan banyak orang, baik di bidang produksi, pengolahan, dan distribusi.

- b. Pangan dikonsumsi oleh semua golongan/lapisan masyarakat, semakin besar jumlah anggota suatu keluarga akan semakin banyak pula mengkonsumsi bahan pangan untuk makanannya.

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM sebagai aset pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena: (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu dicari konsep penanganannya yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

Tabel 2.62
Data Desa Rawan Pangan Tahun 2019 Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Jumlah Desa						Jumlah Desa
		sangat rentan pangan	rentan pangan	kurang rentan pangan	kurang tahan pangan	Tahan pangan	Sangat tahan pangan	
1	Samalanga	0	0	6	13	11	16	46
2	Sp.Mamplam	0	2	10	14	13	2	41
3	Pandrah	0	2	4	6	6	1	19
4	Jeunieb	2	0	6	14	13	8	43
5	Peulimbang	0	2	5	10	5	0	22
6	Peudada	0	6	12	19	8	7	52
7	Juli	3	4	4	17	6	2	36
8	Jeumpa	0	1	5	15	16	5	42
9	Kota Juang	0	3	0	2	15	3	23

No	Kecamatan	Jumlah Desa						Jumlah Desa
10	Kuala	0	0	1	2	8	9	20
11	Jangka	0	0	2	15	22	7	46
12	Peusangan	0	0	4	20	24	21	69
13	Peusangan Selatan	1	4	7	8	1	0	21
14	Psg Siblah Krueng	0	4	7	8	2	0	21
15	Makmur	0	5	11	9	2	0	27
16	Gandapura	0	1	5	13	17	4	40
17	Kuta Blang	0	1	7	19	8	6	41
	Jumlah/Total	6	35	96	204	177	91	609

Salah satu penanganan untuk daerah rawan pangan adalah dengan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

Ketahanan pangan adalah kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Ketahanan Pangan rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor agro ekosistem dan iklim, perubahan orientasi dan manajemen usaha tani. Ketahanan pangan merupakan isu yang penting dan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional.

1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pangan utama adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Pilar ketahanan pangan pada prinsipnya adalah menjaga produktifitas pangan, mempertahankan stabilitas harga pangan dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan pangan, serta melindungi masyarakat yang rentan terhadap krisis pangan. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya

pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Rata-rata tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia, terlebih Aceh tergolong tinggi, bahkan menduduki peringkat atas dunia. Situasi Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bireuen secara keseluruhan sudah tergolong cukup untuk semua komoditas pangan.

Tabel 2.63
Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2015-2019 di Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Produksi Gabah (Ton)	269.924,00	232.094,00	224.510	261.812	252.927
Ketersediaan Beras (Ton)	161.954,40	139.256,40	134.706	141.231	146.245,43
Jumlah Penduduk (Jiwa)	435.300	443.627	453.224	461.726	471.635
Total Konsumsi Beras (ton/Jiwa/Tahun)	49.284,20	50.573,48	51.668,56	52.636,76	53.766,39
Surplus/ Cadangan Pangan (Ton)	101.549,16	79.399,41	74.052,61	93.985,74	88.731,50

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2020

Dari Tabel 2.63 dapat dilihat bahwa ketersediaan beras di Kabupaten Bireuen pada tahun 2018 sebesar 141.231 Ton/Tahun, ini lebih tinggi dari total konsumsi beras penduduk tahun 2018 yaitu sebesar 52.636,76 Ton/Jiwa/Tahun. Begitu juga dengan produksi gabah tahun 2018 sebesar 261.812 lebih dibandingkan tahun 2016 dan 2017. Namun dari segi keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh pangan dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Tingginya angka kemiskinan suatu daerah menyebabkan kerentangan terhadap kerawanan pangan.

Sekalipun Kabupaten Bireuen termasuk dalam daerah yang surplus pangan, namun kabupaten ini belum tahan pangan, karena setiap panen raya produksinya langsung dipasarkan keluar daerah, untuk ini perlu penanganan serius dari semua pihak.

Dari segi keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh pangan sangat dipengaruhi pendapatan masyarakat. Tingginya angka kemiskinan

suatu daerah menyebabkan kerentanan terhadap kerawanan pangan. Kerawanan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan.

Program pemberdayaan masyarakat miskin dengan membangun ekonomi berbasis pertanian pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan dilaksanakan melalui :

- Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan

Kawasan yang dibangun dengan melibatkan keterwakilan masyarakat yang berasal dari 5 desa yang saling berdekatan untuk menegakkan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri/tahan pangan. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi kaum mandiri untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Pelaksanaan Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan di Kabupaten Bireuen dilakukan dalam 5 (lima) tahap selama 5 (lima) tahun : Tahap Persiapan (tahun I), Tahap Penumbuhan (tahun II), Tahap Pengembangan (tahun III), Tahap Kemandirian (tahun IV), dan Strategi Keberlanjutan Kegiatan (tahun V)

- Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat.

Menumbuh kembangkan sekaligus memelihara tradisi masyarakat secara perorangan maupun kelompok untuk menyisihkan sebagian hasil panen sebagai cadangan pangan dengan membangun lumbung pangan. Lumbung pangan masyarakat dalam bentuk bantuan langsung pemerintah kepada kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat. Cadangan pangan ini yang dikuasai oleh rumah tangga, baik individu maupun secara kolektif, berfungsi untuk; mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik, mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, anomali iklim dan banjir

- Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Kelembagaan gabungan kelompok tani yang berfungsi menjaga volatilitas harga bahan pangan di tingkat petani, mengolah dan memasarkan. Kegiatan Pengembangan LDPM dilaksanakan melalui dukungan dana Bantuan Pemerintah (Banper) dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani/kelompok tani/Gapoktan padi dan jagung terhadap

- jatuhnya harga di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan di saat paceklik. Kegiatan Pengembangan LDPM dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu : tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Dukungan dana banper yang bersumber dari APBN atau APBA ataupun APBK pada kegiatan Penguatan-LDPM hanya diberikan kepada Gapoktan Tahap Penumbuhan dan Pengembangan, yaitu pada tahun pertama dan tahun kedua. Sementara itu pada tahun ketiga, Gapoktan hanya akan menerima pembinaan dan/atau bimbingan dari pendamping, Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi
- Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia (PUPM/TTI)

Harga komoditas pangan yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani sebagai produsen, pengolah pangan, pedagang hingga konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Fluktuasi pasokan dan harga pangan yang tidak menentu, tidak hanya akan menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga akan mempengaruhi pengendalian inflasi dengan cara menjual hasil pangan petani sesuai dengan harga yang wajar kepada konsumen yang dipasok oleh Gapoktan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat. Kegiatan PUPM secara tidak langsung berperan dalam mengatasi anjloknya harga pada masa panen raya dan tingginya harga pada saat paceklik dan menjadi instrumen yang dibuat pemerintah untuk menahan gejolak harga dalam situasi tertentu, merupakan mekanisme yang berkelanjutan baik pada saat situasi suplai melimpah dan kurang atau sebagai stabilisator, dalam menjaga pasokan pangan pemerintah bersama masyarakat.

- Sistem Keamanan Pangan dan Gizi

Salah satu instrumen/alat deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah dengan tujuan mendukung ketahanan pangan dan gizi. SKPG merupakan kegiatan surveilens yang menjadi kewenangan pemerintah dan daerah dalam bidang pertanian dan kesehatan (UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000). Kegiatan SKPG terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan serta penyebaran informasi. Data bulanan dan tahunan tersebut menginformasikan tentang 3 (tiga) aspek utama yaitu ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang menjadi dasar untuk menganalisis situasi pangan dan gizi di suatu daerah. Hasil SKPG ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan investigasi untuk menentukan tingkat

kedalaman kejadian kerawanan pangan dan gizi di lapangan serta intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

II.3.3.4 LINGKUNGAN HIDUP

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dengan tujuan menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20persen publik dan 10persen privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. RTH publik di Kabupaten Bireuen masih sangat minim bisa dikatakan tidak ada, hanya tersedia di median jalan, perkantoran dan beberapa tempat lainnya dengan skala kecil sedangkan taman bermain dan alun-alun kota belum tersedia. Untuk RTH privat sudah memenuhi syarat 10 persen malahan melebihi dikarenakan kebun dan pekarangan rumah penduduk kota masih luas.

Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ketidaksiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan akibat timbunan sampah. Kondisi yang tidak menyenangkan ini akan memunculkan bau tidak sedap, lalat berterbangan, dan gangguan berbagai penyakit siap menghadang di depan mata dan peluang pencemaran lingkungan disertai penurunan kualitas estetika pun akan menjadi persoalan yang besar.

Tabel 2.64
Indikator Lingkungan Hidup di Kabupaten Bireuen

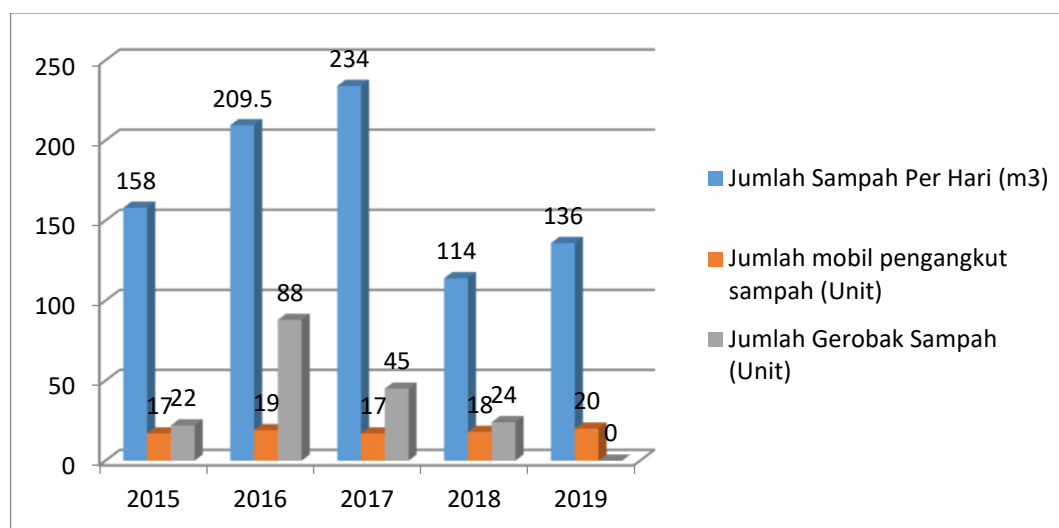
Indikator	2019
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	1,142 (Cemar Ringan)
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	70 persen
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	80 persen
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0,75 persen perhari
Persentase cakupan area pelayanan	40 persen
Persentase jumlah sampah yang tertangani	80 persen perhari

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2019

Perilaku membuang sampah sembarangan ini, tidak mengenal tingkat pendidikan maupun status sosial. Keberadaan sampah tak lepas dari tangan manusia yang membuang sampah sembarangan, mereka menganggap barang yang telah dipakai tidak memiliki kegunaan lagi dan membuang dimana saja.

Kurang kesadaran akan pentingnya kebersihan menjadi faktor yang paling dominan, di samping itu kepekaan masyarakat terhadap lingkungan harus dipertanyakan. Masyarakat masih tidak mengetahui ataupun tidak mau tahu bahaya yang akan terjadi apabila tidak dapat menjaga lingkungan sekitar. Salah satu bentuk perilaku membuang sampah pada masyarakat adalah dengan membuang sampah di sungai. Kondisi ini menyebabkan lingkungan di sekitar tepi sungai terlihat sangat kotor akibat tumpukan sampah, dan menyebarkan aroma yang tidak sedap bahkan menyebabkan estetika yang sangat buruk.

Untuk saat ini pengelolaan masalah sampah secara umum baru teratasi sebesar 77,11 persen, pemerintah kabupaten perlu memberikan kebijakan khusus dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan sampah agar persoalan sampah bisa terselesaikan secara tuntas dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2019

Grafik 2.28 Kondisi Persampahan Kabupaten Bireuen

Mengenai tingkat pencemaran lingkungan seperti pengujian kualitas air dan udara belum dilaksanakan secara maksimal mengingat Pemerintah Kabupaten Bireuen belum memiliki laboratorium lingkungan yang representatif dan sumber daya manusia yang handal, sehingga dalam melaksanakan pengujian tingkat pencemaran lingkungan masih bergantung kepada provinsi. Pengukuran yang dilaksanakan pada tahun 2018 terhadap kualitas air mendapatkan hasil indeks sebesar 1,142 yang berarti terdapat sedikit pencemaran. Untuk menghindari tingkat pencemaran yang lebih parah lagi, pemerintah kabupaten harus memulai tindakan pencegahan dengan melaksanakan program yang mendukung pelestarian lingkungan.

Kondisi pencemaran lingkungan juga dipengaruhi oleh penggunaan pestisida dan insektisida yang tidak terkendali dalam kegiatan peningkatan produktifitas perekonomian masyarakat seperti pertanian, perkebunan dan perikanan. Pestisida secara umum diartikan sebagai bahan kimia beracun yang digunakan untuk mengendalikan jasad pengganggu yang merugikan kepentingan manusia. Disamping bermanfaat untuk meningkatkan hasil pertanian, pestisida juga menghasilkan dampak buruk baik bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Lebih dari 98 persen insektisida dan 95 persen herbisida menjangkau tempat selain yang seharusnya menjadi target, termasuk spesies non-target, perairan, udara, makanan, dan sedimen. Pestisida dapat menjangkau dan mengkontaminasi lahan dan perairan ketika disemprot secara aerial, dibiarkan mengalir dari permukaan ladang, atau dibiarkan menguap dari lokasi produksi dan penyimpanan. Sedangkan penggunaan pestisida belum terdata pada saat ini, mengingat tingkat bahaya terhadap penggunaannya pemerintah diharapkan dapat melakukan pendataan yang akurat terhadap masyarakat pengguna pestisida dan dapat

dilaksanakan penyuluhan-penyuluhan demi pengendalian penggunaan pestisida yang nantinya bisa menghindari kerusakan lingkungan.

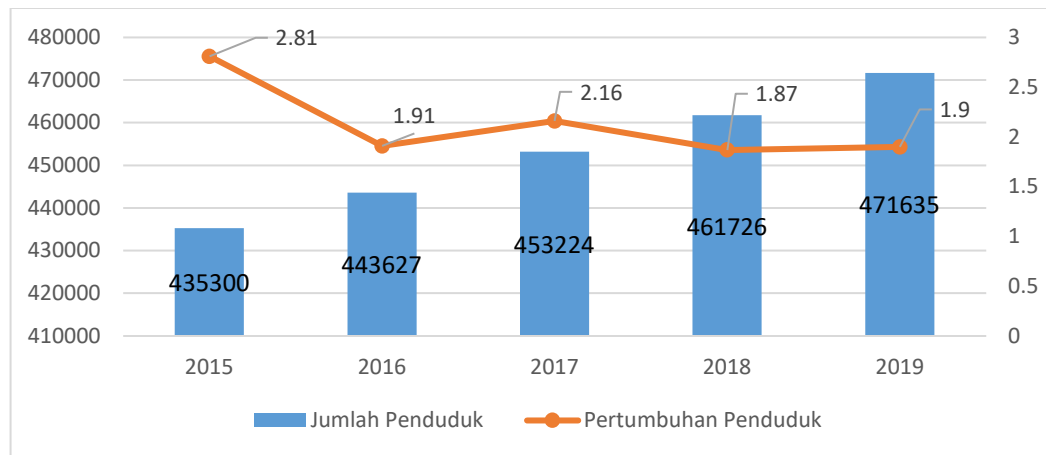
II.3.3.5 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Jumlah Penduduk

Kualitas dan produktifitas masyarakat merupakan sasaran dan tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah dari proses pembangunan yang dilaksanakannya, termasuk dalam hal ini yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen. Kualitas penduduk yang meningkat serta memiliki daya saing yang tinggi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi ataupun sumber daya alam yang dimiliki secara lebih optimal dengan tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang pada akhirnya dapat mewujudkan pencapaian taraf hidup masyarakat yang lebih sejahtera.

Karena itu, potensi sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Bireuen diharapkan dapat memainkan peran dan fungsi secara lebih maksimal dengan terlibat secara aktif sebagai bagian ataupun pelaku dari proses pembangunan daerah itu sendiri. Apabila hal ini tidak dapat dilakukan, maka keberadaan SDM di daerah dikhawatirkan justru dapat menjadi beban bahkan dapat menjadi penghambat dari pembangunan itu sendiri di masa mendatang.

Perkembangan aktivitas ekonomi yang menunjukkan *trend* yang terus membaik di Kabupaten Bireuen selama ini dinilai ikut memiliki implikasi terhadap kecenderungan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 tercatat angka jumlah penduduk Kabupaten Bireuen adalah sebanyak 435.300 jiwa. Angka jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,81 persen dari jumlah penduduk tahun 2014 yaitu sebanyak 423.397 jiwa. Selanjutnya, jumlah penduduk Kabupaten Bireuen terus meningkat hingga mencapai jumlah sebanyak 471.635 jiwa pada tahun 2019. Hal tersebut kiranya menggambarkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2019) terjadi peningkatan atau pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bireuen rata-rata sebesar 2.18 persen.



Sumber : BPS Kab. Bireuen, 2020

Grafik 2.29 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Pada sisi lain, besaran jumlah/angka pertambahan penduduk tersebut tentunya juga perlu diikuti dengan berbagai langkah dan upaya, maupun kebijakan yang mendorong perluasan dan penyediaan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat/penduduk yang tergolong dalam usia angkatan kerja di daerah ini. Selain itu, bagi penduduk usia sekolah juga harus dipastikan mendapat akses kepada fasilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas, sesuai dengan jenjang pendidikan dan usia penduduk tersebut. Hal ini sekaligus menjadi wujud investasi sumber daya manusia, yang nantinya akan menghasilkan SDM daerah ini yang lebih berkualitas dalam menyongsong dan mengisi pembangunan daerah yang lebih baik dimasa mendatang.

Jika dilihat berdasarkan distribusi sebaran penduduk di wilayah Kabupaten Bireuen, selama ini terlihat kecenderungan sebaran jumlah penduduk yang relatif belum cukup merata. Terdapat sebagian wilayah kecamatan di daerah ini yang memiliki penduduk dengan jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan sejumlah kecamatan lainnya. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 57.322 jiwa atau 12,15 persen penduduk Kabupaten Bireuen berdomisili di Kecamatan Peusangan, yang merupakan daerah kecamatan daerah pusat perdagangan Kabupaten Bireuen. Disusul kemudian oleh kecamatan Kota Juang yang merupakan wilayah ibukota kabupaten dengan jumlah penduduk sebanyak 53.913 jiwa atau 11,43 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bireuen secara keseluruhan. Sementara kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Pandrah, dengan jumlah penduduk 9.241 jiwa atau sebesar 1,96 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bireuen secara keseluruhan. Kondisi terkait sebaran/distribusi jumlah dan kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Bireuen dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Distribusi dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bireuen Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jlh. Penduduk (Jiwa)	Jlh. RT (KK)	Kepadatan per-Km ²
1	Samalanga	141,42	33.172	6.848	235
2	Simp. Mamplam	155,5	29.865	7.090	189
3	Pandrah	114,01	9.241	2.509	81
4	Jeunieb	112,51	27.220	6.885	242
5	Peulimbang	127,89	12.504	2.975	98
6	Peudada	312,81	29.011	6.841	93
7	Jeumpa	109,14	34.207	8.416	360
8	Kota Juang	16,91	53.913	12.008	3.188
9	Juli	231,18	54.969	8.439	151
10	Kuala	17,11	19.469	4.393	1.129
11	Peusangan	59,08	57.322	13.133	970
12	Jangka	37,58	30.920	6.975	825
13	Peusangan Selatan	94,15	15.914	3.889	169
14	Peusangan Sb.	111,57	12.693	3.104	113
15	Kuta Blang	38,70	24.324	5.520	629
16	Makmur	71,74	16.739	3.929	244
17	Gandapura	46,95	25.324	5.879	540
	Kab. Bireuen	1.798,25	471.635	108.833	263

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Data pada tabel tersebut juga memberikan gambaran bahwa tingkat kepadatan penduduk pada masing-masing wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bireuen selama ini juga masih belum cukup merata. Terdapat sejumlah kecamatan dengan wilayah yang relatif luas, namun tidak diimbangi dengan kuantitas ataupun jumlah penduduk di kecamatan tersebut. Kondisi demikian antara lain terlihat di Kecamatan Pandrah, dengan luas wilayah 114,01 Km² serta jumlah penduduk pada tahun 2019 tercatat sebanyak 9.241 jiwa, maka rata-rata kepadatan penduduk di kecamatan Peudada adalah 79 jiwa/km². Fenomena luas wilayah yang tidak diimbangi dengan jumlah penduduk ini, juga dinilai dapat berakibat tidak optimalnya pemanfaatan dan pemberdayaan potensi sumber daya ekonomi lokal, seperti sumber daya lahan yang ada di wilayah tersebut.

Kondisi sebaliknya justru terlihat di Kecamatan Kota Juang dengan luas wilayah 16,91 Km² dan jumlah penduduk tahun 2019 tercatat sebanyak 53.915 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Kota Juang mencapai 3.121 jiwa/km². Gambaran tingkat kepadatan penduduk dengan jumlah yang cukup tinggi juga dinilai berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kelestarian lingkungan maupun berbagai permasalahan sosial ekonomi lainnya. Apabila

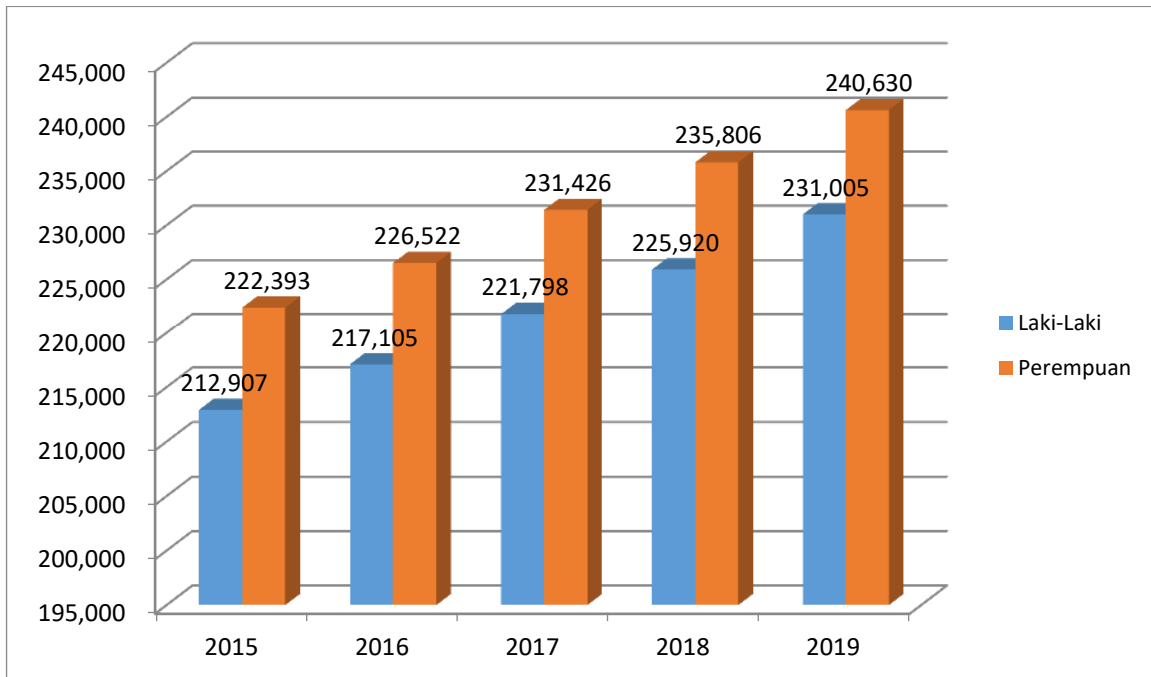
dilihat secara menyeluruh, rata-rata tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Bireuen tahun 2019 tercatat 263 jiwa/km².

2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Sebagaimana kondisi yang dirasakan di daerah lain pada umumnya, dominasi jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan dalam struktur kependudukan Kabupaten Bireuen selama ini juga merupakan suatu bentuk tantangan, yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai suatu wujud peluang tersendiri bagi upaya pembangunan daerah yang dijalankan dimasa mendatang. Hal tersebut disebabkan karena pada hakikatnya kaum perempuan sehari-hari lebih memiliki keluangan waktu setelah menjalankan tugas dan kewajiban utamanya mengurus rumah tangga, sebagaimana yang menjadi kelaziman dalam kehidupan masyarakat Aceh selama ini. Waktu luang tersebut tentunya dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan yang bersifat produktif yang dapat membantu perekonomian keluarganya. Karena itu, kebijakan pembangunan daerah yang terkait dengan upaya pemberdayaan peran kaum perempuan dalam menggerakkan perekonomian keluarga di daerah ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Selain mengantisipasi dampak dari pada *disparitas gender* secara umum, upaya pemberdayaan kaum perempuan tersebut perlu lebih diarahkan pada upaya-upaya untuk dapat lebih memberdayakan peran kaum perempuan agar lebih produktif, berkualitas dan memiliki daya saing yang lebih tinggi, baik dalam wujud aktifitas maupun kegiatan-kegiatan ekonomi, pemerintahan, politik, dan sosial kemasyarakatan lainnya.

Selama kurun waktu antara tahun 2015–2019, struktur penduduk Kabupaten Bireuen berdasarkan jenis kelamin masih didominasi oleh kaum perempuan. Pada tahun 2015 tercatat jumlah penduduk laki-laki sebanyak mencapai 212.907 jiwa atau 48,91 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Bireuen, sedangkan jumlah penduduk perempuan tercatat sebanyak 222.393 jiwa atau 51,09 persen. Berikutnya pada tahun 2016, tercatat jumlah penduduk perempuan sebanyak 226.522 jiwa (51.06 persen), sedangkan laki-laki berjumlah sebanyak 217.105 jiwa (48.94 persen). Pada tahun-tahun berikutnya komposisi jumlah penduduk perempuan masih terus mendominasi meskipun dengan besaran perbandingan yang mengalami peningkatan sangat kecil dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 tercatat jumlah penduduk perempuan di

Kabupaten Bireuen sebanyak 240.630 jiwa (51.02 persen), sedangkan laki-laki berjumlah 231.005 (48.98 persen)



Sumber : BPS Kab. Bireuen, 2020

Grafik 2.30 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Gambaran data pada grafik tersebut kiranya dapat menunjukkan bahwa selama kurun waktu antara tahun 2015–2019, terlihat pertumbuhan jumlah penduduk perempuan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki. Rata-rata angka pertumbuhan penduduk perempuan secara keseluruhan dalam kurun waktu tersebut adalah 2,24 persen, sementara rata-rata angka pertumbuhan penduduk laki-laki dalam periode waktu yang sama tercatat sebesar 2,13 persen.

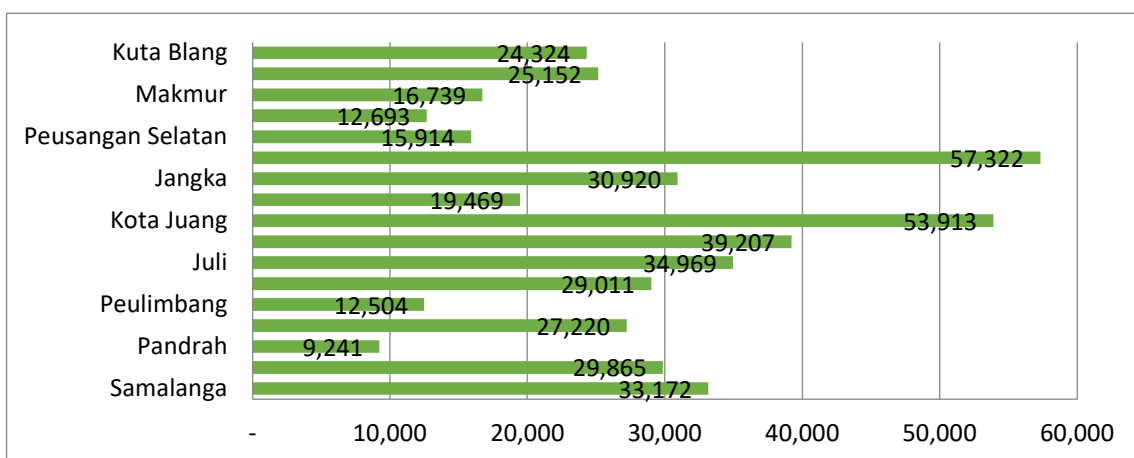
3. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan struktur usia penduduk, tantangan yang dihadapi dalam hal ini adalah masih relatif tingginya angka ketergantungan (*dependency ratio*) antara penduduk kelompok usia produktif, dengan penduduk kelompok usia belum/tidak produktif. Selama kurun waktu tahun 2015–2019 rasio angka ketergantungan ini di Kabupaten Bireuen dinilai masih cukup tinggi, meskipun sudah terlihat tren penurunan dalam hal ini. Tingginya angka ketergantungan dalam struktur kependudukan suatu daerah dinilai dapat berimplikasi pada pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi lokal yang kurang optimal, mengingat sebagian sumber daya yang ada lebih tersita pemanfaatannya bagi pemenuhan tuntutan kebutuhan

hidup penduduk kategori usia belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk usia non produktif (65+ tahun).

Pada tahun 2019 komposisi penduduk menurut kelompok umur, jumlah penduduk berusia muda (umur 0-4 tahun hingga 20-24 tahun) lebih dominan, yaitu mencapai 44.802 jiwa (0-4 tahun) 40.936 jiwa (20-24 tahun). Sementara penduduk yang berusia 60 tahun keatas terlihat relatif sedikit, yakni berjumlah 39.889 jiwa. Dengan komposisi penduduk berumur muda dan produktif yang lebih banyak, maka pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki beban yang berat pada masa yang akan datang, baik dalam menyediakan akses pendidikan bagi mereka yang masuk dalam kategori usia belajar, maupun dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang termasuk angkatan kerja produktif.

Jumlah penduduk usia produktif semestinya perlu disikapi dengan menempuh kebijakan yang mengarah pada upaya untuk dapat membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi, terlibat dan berperan aktif di semua sektor pembangunan. Penduduk usia produktif merupakan komponen angkatan kerja yang membutuhkan ketersediaan lapangan kerja maupun kesempatan dan akses untuk berusaha. Apabila penduduk usia produktif yang ada tidak terserap sepenuhnya pada lapangan kerja yang tersedia, maka akan menimbulkan masalah pada jumlah pengangguran beserta sejumlah penyakit sosial. Bahkan terbatasnya kesempatan kerja tersebut dapat menyebabkan pengalihan potensi sumberdaya manusia yang ada ke daerah lain, karena pada hakikatnya manusia butuh pekerjaan untuk memperoleh pendapatan (*income*) yang dapat mereka gunakan untuk bertahan hidup (*survive*). Gambaran terkait hal tersebut dapat dilihat pada tampilan grafik berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Grafik 2.31 Jumlah Penduduk Kabupaten Bireuen Menurut Kelompok Umur Tahun 2019

II.3.3.6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

LPM merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk membantu masyarakat dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya di Kabupaten Bireuen rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dari tahun ke tahun terus meningkat berikut data dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 2.66
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah LPM	18	71	609	609	609
Jumlah desa	609	609	609	609	609
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan (LPM)	2,96	3,45	100	100	100

Sumber : DPMGPKB, 2020

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 di Kabupaten Bireuen tahun 2015 dari 609 desa terdapat 18 kelompok LPM yang telah dibina (2,96 persen), tahun 2016 terdapat 71 kelompok LPM yang telah dibina dari total 609 desa (3,45 persen), hal ini terus dilakukan peningkatan hingga pada tahun 2017 dan 2018 telah mencapai 609 kelompok Binaan LPM dari 609 desa (100 persen), data ini menunjukkan bawah kelompok LPM sudah 100 persen begitu juga pada tahun 2019 jumlah kelompok LPM tersebut masih berada pada posisi 100 persen, tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pembinaan Lembaga Permasayarakatan di desa dalam wilayah Kabupaten Bireuen.

2. Persentase PKK Aktif

PKK merupakan organisasi yang memberdayakan perempuan dalam program kegiatannya dimana dibentuknya kelompok binaan pada gampong yang terdapat di tiap kecamatannya yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar lebih terampil lagi. Berikut cakupan PKK Aktif di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.67
Persentase PKK Aktif di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PKK Aktif	172	281	377	609	609
Jumlah Kelompok PKK	609	609	609	609	609
Persentase PKK Aktif	28,24	46,14	61,94	100	100

Sumber : DPMGPKB, 2018

Dari Tabel tersebut diatas terlihat bahwa dari tahun 2016 sampai dengan 2017 masih terdapat PKK yang tidak aktif, persentase terendah pada tahun 2015 yaitu hanya sebesar 28,24 persen dari 609 kelompok, namun sejak tahun 2018 sampai sekarang persentase PKK aktif sudah 100 persen, hal ini karena berbagai upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali aktifitas di kelompok PKK salah satunya dengan mengadakan berbagai lomba sehingga masyarakat jadi lebih tertarik.

3. Persentase Posyandu Aktif

Jenis Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang paling memasyarakat adalah posyandu dengan kegiatan program prioritasnya yaitu perbaikan gizi, imunisasi, penanganan diare, dan KB. Di Kabupaten Bireuen, hampir semua desa mempunyai posyandu yaitu sebanyak 609 posyandu dan proposional dengan jumlah desa di Kabupaten Bireuen. Bahkan dari tahun 2014 sampai 2018 terdapat penambahan posyandu sebanyak 18 posyandu. Persentase jumlah posyandu aktif dalam Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.68
Persentase Posyandu Aktif

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Posyandu	620	627	633	623	626
Jumlah desa	609	609	609	609	609
Persentase Posyandu Aktif	101,8	103,0	103,9	102,3	102,7

Sumber : DPMGPKB, 2020

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa di Kabupaten Bireuen sudah terbentuk mencapai 633 unit Posyandu aktif (103,9 persen) pada tahun 2017 yang tersebar di 17 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen, namun pada tahun 2018 Posyandu aktif menurun hingga 623 unit (102,3 persen), Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui DPMG PKB dan Pihak Kecamatan serta instansi terkait terus melakukan Pembinaan terus agar pemanfaatan posyandu oleh masyarakat dapat ditingkatkan kembali,

hal terbukti bahwa pada tahun 2019 jumlah Posyandu aktif bertambah 3 Unit sehingga menjadi 626 Unit (102,7 persen).

II.3.3.7 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Pengertian lainnya adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

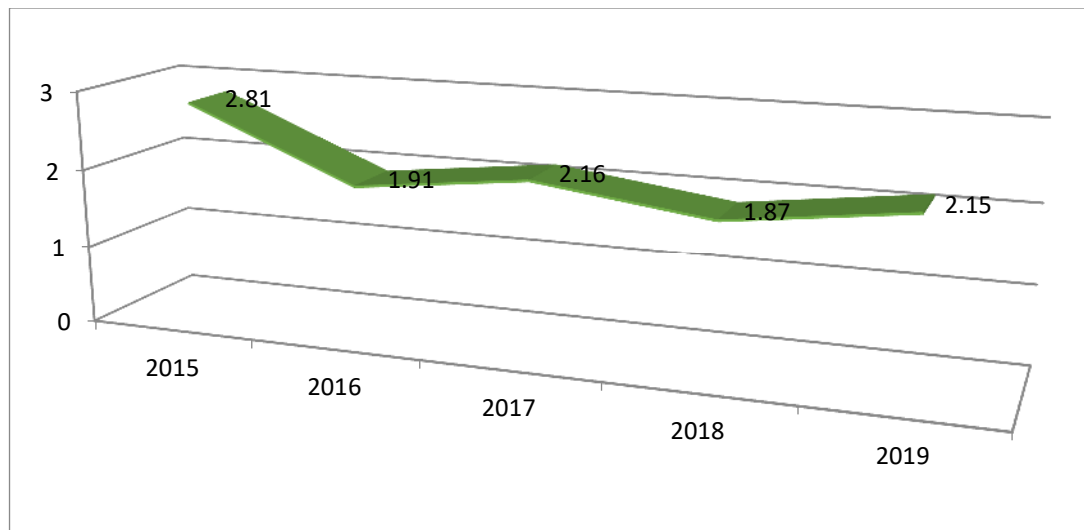
Jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak dari tahun ke tahun tentunya menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi Indonesia. Beberapa dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari banyaknya jumlah penduduk, antara lain:

1. Meningkatnya kebutuhan akan berbagai fasilitas sosial;
2. Meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja;
3. Meningkatnya angka pengangguran (bagi mereka yang tidak mampu bersaing)

Adapun usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain meliputi hal-hal berikut ini.

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjadi akseptor Keluarga Berencana.
2. Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat dihambat.
3. Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat, dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bireuen sangat tergantung terhadap kesadaran masyarakat dalam mengikuti Program Keluarga Berencana. Dalam hal ini bisa kita lihat persentase laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bireuen sebagai berikut:



Sumber : BPS Kab. Bireuen, 2020

Grafik 2.32 Laju Pertumbuhan Penduduk

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Tabel 2.69
Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Akseptor	57.969	65.303	62.912	70.981	61.867
2.	Jumlah PUS	70.689	75.792	78.802	83.348	78 803
3.	Jumlah Peserta KB Aktif	55.932	65.303	62.912	70.981	61.867
4.	Rasio Aseptor terhadap PUS	82.02	86.16	79.84	85.16	78,58

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen , 2020

Pada tahun 2019 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Bireuen tercatat sebanyak 78.803 orang dan yang menjadi peserta aktif KB sebanyak 61.867 orang (78,51 persen dari jumlah PUS). Sebagian besar peserta KB masih memilih alat kontrasepsi berupa suntik dan pil dengan jumlah peserta masing-masing sebanyak 33.975 dan 19.352 peserta. Sedangkan yang menggunakan alat kontrasepsi IUD sebanyak 1.817 peserta, implant sebanyak 1.923 peserta, MOP sebanyak 1 peserta, MOW sebanyak 813 peserta, dan kondom sebanyak 3.986 peserta.

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Data rasio akseptor KB merupakan jumlah akseptor KB yang terdiri dari akseptor KB laki - laki dan akseptor KB perempuan.

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 – 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; dibawah usia 20 tahun, antara 20-35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20-35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun.

II.3.3.8 PERHUBUNGAN

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi dinilai cukup penting dalam menunjang berbagai aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Gambaran kondisi dan keadaan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Arus Penumpang Angkutan Umum & Prasarana Transportasi
Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penumpang Angkutan Darat	Orang	44.550	45.268	28,135	29.670	30.820
Jumlah Angkutan Darat	Unit	1,406	1,430	1,295	1.302	1.340
Rasio	Persen	1 : 63	1 : 48	1 : 41	1:41	1 : 43
Jumlah Terminal Bis	Unit	5	5	5	5	4
Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas perhubungan Kab. Bireuen, 2020

Penurunan jumlah penumpang angkutan darat terjadi hampir setiap tahun. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang lebih dipilih oleh masyarakat untuk bermobilisasi. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2017 dengan nilai mencapai 17.133 dari tahun 2016. Terminal bis yang tersedia di seluruh penjuru Kabupaten Bireuen hanya berjumlah 4 unit hingga tahun 2019, dimana terdapat terminal Tipe B dengan kewewenangan provinsi yang masih belum dialihkan kepada pemerintah kabupaten sehingga belum dapat difungsikan secara optimal.

Secara keseluruhan ketersediaan sarana dan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen selama ini dinilai sudah cukup memadai. Keberadaan fasilitas transportasi angkutan umum tersebut

tentunya bersinergi serta saling mendukung dengan posisi dan letak geografis wilayah Kabupaten Bireuen yang berada di jalur perlintasan jalan negara Lintas Sumatera, dimana terdapat sejumlah angkutan penumpang umum, yang meskipun bukan tercatat sebagai armada/kendaraan yang berbasis di daerah ini, namun lintasan trayek yang mereka lalui melewati wilayah Kabupaten Bireuen, sehingga tentu dapat senantiasa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi. Terminal bis yang tersedia di seluruh penjuru Kabupaten Bireuen hanya berjumlah 5 unit, jumlah ini bertambah 1 unit pada tahun 2015.

Secara keseluruhan ketersediaan sarana dan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen selama ini dinilai sudah cukup memadai. Keberadaan fasilitas transportasi angkutan umum tersebut tentunya bersinergi serta saling mendukung dengan posisi dan letak geografis wilayah Kabupaten Bireuen yang berada di jalur perlintasan jalan negara Lintas Sumatera, dimana terdapat sejumlah angkutan penumpang umum, yang meskipun bukan tercatat sebagai armada/kendaraan yang berbasis di daerah ini, namun lintasan trayek yang mereka lalui melewati wilayah Kabupaten Bireuen, sehingga tentu dapat senantiasa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi.

II.3.3.9 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Untuk saat ini cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan baru berjalan di Kecamatan Peulimbang yang dibina oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen dengan tujuan sebagai wahana informasi dan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik dan sebagai sarana peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi.

Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Bireuen untuk wilayah permukiman masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan sudah seluruhnya terlayani. Sedangkan di beberapa wilayah perkebunan, pegunungan/dataran tinggi dan hutan yang berada jauh dari permukiman, jangkauan layanan masih minim, mengingat tidak banyak penggunaan layanan telekomunikasi ditempat-tempat tersebut. Jumlah tower komunikasi sebanyak 161 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen. Berikut adalah jumlah dan letak lokasi unit tower telekomunikasi di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.71
Jumlah dan Lokasi Unit Tower Telekomunikasi di Kabupaten Bireuen

NO	LOKASI	TOWER	NO.	LOKASI	TOWER
1	Kecamatan Kota Juang	21	10	Kecamatan Makmur	5
2	Kecamatan Jeumpa	12	11	Kecamatan Gandapura	11
3	Kecamatan Juli	14	12	Kecamatan Peudada	13
4	Kecamatan Kuala	6	13	Kecamatan Peulimbang	5
5	Kecamatan Jangka	7	14	Kecamatan Jeunieb	10
6	Kecamatan Peusangan	16	15	Kecamatan Pandrah	3
7	Kecamatan Psg. Selatan	5	16	Kecamatan Simpang Mamplam	7
8	Kecamatan Psg. Siblah Krueng	4	17	Kecamatan Samalanga	13
9	Kecamatan Kuta Blang	10	JUMLAH		161

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Bireuen, 2019

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/per/m.kominfo/12/2011 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota, pengembangan dan pemberdayaan KIM adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka memberikan penguatan terhadap kelembagan, SDM, dan aktivitas KIM sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya secara mandiri dan kreatif dalam rangka pengelolaan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan nilai tambah. Target pengembangan dan pemberdayaan KIM adalah 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada dalam Kabupaten/Kota.

Perkembangan kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau disebut dengan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 yaitu pada tahun pertama terbentuknya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bireuen. Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan KIG di tingkat Kecamatan dalam kabupaten Bireuen sampai sekarang sekitar 6 persen atau baru terlaksana di 1 kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada. Untuk mencapai target 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada, maka diperlukan adanya pengembangan dan pemberdayaan KIM lebih lanjut di 8 Kecamatan lagi (47 persen).

II.3.3.10 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Peran masyarakat pelaku dunia usaha atau swasta, khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai penggerak roda perekonomian di Indonesia secara keseluruhan haruslah diakui masih cukup tangguh, terutama dalam menghadapi terpaan berbagai krisis yang melanda selama ini. Kondisi tersebut pula yang mendorong pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Bireuen dalam hal ini, perlu terus memberikan perhatian bagi pengembangan sektor UMKM yang ada di daerah ini, termasuk dalam kaitannya dengan upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat daerah ini sendiri. Namun demikian tentunya upaya tersebut tidaklah senantiasa dapat berjalan dengan mudah tanpa hambatan apapun. Gambaran terkait keberadaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Bireuen selama ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72

Jumlah Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019						
Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	180	189	195	205	169
Jumlah Koperasi	Unit	300	308	228	234	238
Persentase Koperasi Aktif	Persen	44,8	62,2	62,03	86,91	71
Jumlah Usaha Mikro & Kecil	Unit	1019	6400	7134	7.301	7.193

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2020

Tabel di atas menggambarkan bahwa secara umum keberadaan koperasi di Kabupaten Bireuen selama ini masih perlu mendapat perhatian serius semua pihak, terutama instansi pemerintah daerah terkait dalam hal ini. Pada tahun 2015, jumlah koperasi yang terdapat di Kabupaten Bireuen sebanyak 300 koperasi, sampai dengan 2017, jumlah koperasi ini berkurang menjadi 228 unit koperasi. Dilihat dari jumlahnya, koperasi yang terdapat di Kabupaten Bireuen menurun jumlahnya, tetapi jumlah koperasi yang aktif semakin bertambah, walaupun mengalami penurunan di tahun 2019

menjadi 169 koperasi, hal ini disebabkan banyak koperasi yang tidak membuat laporan setiap tahun.

Namun tidak demikian halnya dengan gambaran perkembangan jumlah usaha mikro dan kecil yang terdapat di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Terlihat peningkatan jumlah usaha mikro dan kecil yang cukup tajam di Kabupaten Bireuen, dari 1.019 unit di tahun 2015 menjadi sebanyak 7.193 unit usaha mikro dan kecil di tahun 2019. Fenomena tersebut kiranya dinilai sejalan dengan tren peningkatan dominasi kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bireun dalam beberapa tahun terakhir, dimana komposisi usaha perdagangan pada kelompok skala usaha mikro dan kecil memang cukup mendominasi. Untuk itu diperlukan perhatian dan upaya yang lebih fokus dan terarah dalam melakukan pembinaan terkait pengembangan usaha mikro dan kecil, karena kontribusi kelompok usaha mikro dan kecil selama ini memang telah teruji cukup tangguh dalam menghadapi terpaan krisis, sehingga terus dapat menjadi pilar utama yang menyangga perekonomian daerah di masa mendatang.

II.3.3.11 PENANAMAN MODAL

Peran keberadaan modal dalam negeri maupun modal asing merupakan dimensi atau bagian penting dari pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Kehadiran investor kiranya memang akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi internal daerah tersebut, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum maupun sejumlah aspek lingkungan lainnya. Investasi dimaksud tentunya diharapkan dapat berdampak positif bagi perkembangan perekonomian daerah, terutama dalam mendorong daya beli masyarakat sebagai dampak dari peningkatan jumlah serapan tenaga kerja di sejumlah investasi usaha tersebut. Data yang berupaya dikumpulkan terkait jumlah investasi yang ada di Kabupaten Bireuen dalam beberapa tahun terakhir, kiranya belum dapat memberikan gambaran yang cukup menggembirakan bagi semua pihak. Kedepan, kiranya perlu dipikirkan langkah-langkah maupun kebijakan terkait dengan upaya untuk mendorong peningkatan jumlah dan besaran nilai investasi di Kabupaten Bireuen, terutama bagi investasi yang berasal dari luar daerah bahkan luar negeri, agar dari semua itu nantinya akan lebih memperluas kesempatan dan peluang kerja bagi masyarakat daerah ini, yang pada akhirnya juga akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

Tabel 2.73
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Pada Tahun 2016
di Kabupaten Bireuen

No	Uraian	Jumlah investor
1	Jumlah Investor Berkala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Investor Berkala Nasional (PMDN/5)
		1 PT. Suryawindu Pertiwi
		2 PT. Takabeya Perkasa Group
		4 Blang Keutumba
		5 Buana Aceh Sejahtera (BAS)
		6 PT. Akmal Abadi
		7 PT. Alif Putra Mandiri
		8 MITANA
		9 PT. Cipta Karya Aceh
		10 PT. Nahla Sampurna
		10 PT. Kreung Meuh
2	Jumlah Nilai Investasi Berkala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Nilai Investasi Berkala Nasional (PMDN/PMA) RP .70.964.363.798,-
3	Rasio Daya Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja bekerja pada perusahaan 938 orang
4	Menaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Miliar Rupiah)	Realisasi PMDN tahun evaluasi tahun evaluasi - realisasi PMDN tahun sebelumnya realisasi Rp. 70.964.363.798,-

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi, dan UKM, Tahun 2017

II.3.3.12 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a. Kepemudaan

Pemuda adalah generasi penerus bangsa, dimana sosok pemuda diharapkan dapat melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan yang besar agar pada masa yang akan datang para pemuda dapat menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang lebih maju.

Tabel 2.74
Kepemudaan Kabupaten Bireuen Tahun 2015 – 2019

Organisasi Pemuda	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah organisasi pemuda	22	23	23	26	26
Jumlah Pemuda	156.426	162.801	160.205	162.400	165.865
Jumlah pemuda berprestasi	1	2	2	1	2

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen, 2020

b. Olahraga

Di bidang olahraga, Kabupaten Bireuen mengalami cukup banyak kemajuan, terutama di cabang sepak bola yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat daerah ini sehari-hari. Beberapa permasalahan yang penting dan perlu diatasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga di masa mendatang adalah masih terbatasnya keberadaan sarana dan prasarana olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu rendahnya partisipasi masyarakat di bidang olahraga, upaya pembinaan dan penjurangan bibit atlet cabang olahraga prestasi yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, serta masih rendahnya bentuk pengakuan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.

Tabel 2.75
Sarana Olahraga Tahun 2015 – 2019 di Kabupaten Bireuen

CAPAIAN PEMBANGUNAN	2015	2016	2017	2018	2019
Sarana Olahraga	817	817	623	624	625
Jumlah Penduduk	435.400	443.627	453.224	461.726	471.635
Rasio Sarana Olahraga	1:533	1:543	1:727	1:740	1:754

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020

Dari tabel di atas bisa kita lihat jumlah sarana olahraga pada tahun 2019 sebanyak 625 unit yang terdiri dari 285 lapangan bola kaki, 231 lapangan volley, 100 lapangan bulu tangkis, 4 lapangan basket dan 5 lapangan tenis. Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai bagi pelaku olahraga. Prasarana olahraga bersifat terbuka (*outdoor*) maupun tertutup (*indoor*) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen.

II.3.3.13 PERSANDIAN

Persandian merupakan bidang urusan pengamanan informasi rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, dan ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Dalam Pemerintahan Kabupaten Bireuen, persandian berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, tetapi hingga saat ini bidang urusan persandian belum melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan persandian mengingat tingkat kepentingan dan kebijakan anggaran sehingga urusan bidang persandian ini terkesan tidak aktif.

II.3.3.14 KEBUDAYAAN

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya serta potensi alam yang subur dan indah. Penduduknya yang relatif heterogen telah melahirkan budaya yang beraneka ragam. Penguatan budaya daerah yang dilandasi nilai-nilai ajaran Islam perlu terus didorong dan dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen. Untuk kedepannya masih diperlukan upaya untuk menggali dan melestarikan serta mengembangkan adat, budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan Syari'at Islam.

Tabel 2.76
Perkembangan Seni, Budaya Tahun 2015 - 2019 Kabupaten Bireuen

CAPAIAN PEMBANGUNAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Grup Kesenian	30	50	89	122	142
Jumlah Gedung Kesenian			-	-	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

II.3.3.15 PERPUSTAKAAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa; ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan pusat sumber belajar bagi masyarakat.

Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat akan lebih dirasakan manfaatnya bila pelayanan yang diberikan optimal sehingga memberikan kepuasan kepada pemustaka. Sebagaimana terdapat dalam Keputusan MENPAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan

publik dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai kewenangannya dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan, baik pemberi maupun penerima pelayanan. Sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M/AN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik menjelaskan bahwa standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Atas dasar peraturan pemerintah tersebut maka pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2012 telah membentuk bagian perpustakaan sebagai wahana pelestarian kebudayaan, mendukung pelayanan pendidikan dan menyampaikan informasi melalui perpustakaan. Menyingkapi perkembangan informasi dan budaya pelestarian budaya maka pemerintah Kabupaten Bireuen meningkatkan status bagian perpustakaan menjadi kantor pada tahun 2015 dan menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip pada tahun 2017. Peningkatan status organisasi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya budaya baca dalam masyarakat dan kepentingan arsip daerah yang harus di dokumentasikan.

Sejak ditetapkan Bireuen sebagai kabupaten Literasi membuat budaya baca di kalangan masyarakat terutama pelajar menjadi semakin meningkat. Hal yang dinilai sangat baik dan akan berdampak positif kedepannya telah menjadikan kabupaten Bireuen sebagai salah satu Kabupaten Literasi dengan Katagori terbaik. Atas prestasi tersebut, pada tanggal 20 Maret 2017, kabupaten Bireuen berhasil memperoleh Anugerah Literasi Prioritas bersama 18 kabupaten lainnya dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prestasi ini harus tetap dipertahankan dengan cara pembiasaan, pengembangan dan pembelajaran baik di sekolah-sekolah maupun gedung perpustakaan umum yang selama ini telah menjadi pusat informasi bagi semua kalangan mulai dari anak-anak, pelajar, mahasiswa hingga orang dewasa yang membutuhkan informasi. Budaya baca juga akan dapat menjadi salah satu penentu kualitas dari Sumber Daya Manusia.

Mengingat besarnya peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip kabupaten Bireuen terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada masyarakat. Yang menjadi

persoalan saat ini Sarana dan prasarana di bidang perpustakaan yang belum representatif untuk memfasilitasi pengunjung perpustakaan menurut katagori umur maupun sumber bacaan. Seperti ruang anak yang tidak mampu menampung jumlah kunjungan lebih dari 20 orang. Sementara minat dan jumlah kunjungan terbanyak berada di ruang anak. Buku-buku anak juga masih perlu penambahan mengingatnya besarnya minat anak untuk mendapatkan sesuatu yang baru terutama yang berkaitan dengan budaya. Begitu juga sara dan prasarana ruang baca anak. Begitu juga ruang pengolahan yang belum memenuhi standar kelayakan pengolahan.

Pengunjung perpustakaan didominasi oleh pelajar, mahasiswa dan anak-anak yang berada di sekitar ibu Kota Kabupaten, dengan jumlah anggota perpustakaan 466 anggota. Minat baca masyarakat terlihat bertambah dari data kunjungan perpustakaan. Untuk pengunjung anak-anak terkadang melebihi daya tampung ruangan sehingga untuk memfasilitasi kunjungan bidang perpustakaan terus mengelola kesiapan ruangan dan petugas pendamping.

Adapun jumlah pengunjung perhari rata-rata 76 orang dan setahun yang meminjam dan membaca buku di perpustakaan kabupaten sebagaimana terlihat dalam tabel berikut berikut:

Tabel 2.77
Jumlah Pengunjung dan Kartu/Anggota Perpustakaan
Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung	Jumlah Anggota
2.	2015	10.052 orang	103 orang
3.	2016	11.225 orang	516 orang
4.	2017	12.635 orang	566 orang
5.	2018	7067 orang	527 orang
6.	2019	5022 orang	451 orang

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

Untuk memotivasi minat baca penataan ruangan dan jumlah koleksi buku perlu terus ditingkatkan. Sehingga target kunjungan yang ingin dipacu pada usia anak-anak dan orang tua dapat tercapai.

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan perpustakaan di lokasi terpencil pemerintah Kabupaten Bireuen memberikan layanan perpustakaan bergerak melalui motor dan mobil perpustakaan keliling. Mobil pustaka tersebut mengunjungi sekolah, dayah dan gampong-gampong yang untuk memacu minat baca masyarakat dengan beragam koleksi buku. Lokasi tersebut tersebar dalam 14 kecamatan, sedangkan 3 kecamatan lainnya

yaitu Kota Juang, Kecamatan Kuala dan Kecamatan Jeumpa dikunjungi oleh motor pintar. Sedangkan Motor pintar melakukan kunjungan ke SD/MI dengan jumlah yang sama pula yaitu 75 lokasi, total keseluruhan 174 lokasi. Dengan Jumlah koleksi buku di Mobil Pustaka Keliling terdiri dari 368 Eksemplar dan motor pintar 312 Eksemplar.

II.3.3.16 KEARSIPAN

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengertian mengenai arsip atau kintaka adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip sangat berbeda dengan bahan pustaka yang terdapat dalam perpustakaan. Arsip mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan bahan pustaka diantaranya adalah arsip harus autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, informasinya utuh, dan berdasarkan asas asal usul (*principle of provenance*) dan aturan asli (*principle of original order*). Arsip terdiri dari 2 jenis, antara lain:

- a. Arsip Konvensional; contoh: arsip kertas
- b. Arsip Media Baru; contoh: arsip micro film, kaset dll.

Arsip pemerintah di Kabupaten Bireuen selama ini sudah mulai dikelola secara lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari pembinaan dan arahan yang dilakukan oleh bagaian arsip yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Namun peningkatan masih sangat dibutuhkan dimana dinas yang telah mengelola arsip secara benar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal masih sangat minim, hanya sekitar 10 persen. Disamping itu petugas yang menguasai cara pengelolaan arsip sesuai standar juga masih sangat kurang dan perlu mendapat keahlian khusus tentang kearsipan. Berangkat dari persoalan yang ada saat ini, dibutuhkan perhatian terhadap pembinaan terhadap pengelolaan arsip di dinas-dinas dan peningkatan kualifikasi arsiparis serta peningkatan sarana dan prasaran kearsipan guna peningkatan pelayanan terhadap kearsipan.

II.3.4 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

II.3.4.1 PARIWISATA

Sektor pariwisata juga merupakan salah satu potensi sumber daya yang terdapat di daerah Kabupaten Bireuen. Terdapat sejumlah obyek wisata yang jika dikembangkan dan dikelola dengan baik, secara ekonomis juga dapat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun sebagai sumber pemasukan bagi pendapatan daerah.

Pariwisata Aceh semakin bergeliat setelah Aceh dideklarasikan sebagai daerah Wisata Halal Unggulan Oleh Menteri Pariwisata Pada Tanggal 19 September 2016. Pariwisata aceh juga semakin dilirik oleh wisatawan baik lokal maupun manca negara. Dengan semakin besarnya peluang di dunia pariwisata, Bireuen sebagai salah satu Kabupaten yang ada di aceh mencoba mengemas pariwisata untuk daerah-daerah yang selama ini mulai dikenal dan ramai dikunjungi oleh masyarakat terutama wisata pantai.

Kabupaten Bireuen memiliki berbagai macam objek wisata, mulai dari pantai, sungai/krueng, air terjun, hingga wisata sejarah dan budaya seperti Makam Raja Jeumpa, Makam Tun Sri Lanang, dan Rumah Tgk Awe Geutah. Namun, wisata bahari masih menjadi wisata utama di Kabupaten Bireuen mengingat kabupaten ini berada di daerah pesisir dengan garis pantai sepanjang 80 km.

Perkembangan pariwisata tidak hanya didukung oleh alam dan budayanya, tetapi juga sarana akomodasi yang disediakan untuk wisatawan, baik berupa hotel maupun penginapan. Selain sarana akomodasi, terdapat juga fasilitas tambahan seperti restoran, rumah makan, fasilitas olahraga dan fasilitas lainnya yang dapat menarik minat wisatawan. Beberapa tempat wisata yang sedang berkembang di wilayah Kabupaten Bireuen antara lain:

- a) Wisata Alam meliputi : Cot Panglima, Krueng Simpo, Pantai Krueng Juli Barat, Pantai Kuala Jangka, Pantai Kuala Jangka, Pantai Kuala Jeumpa, Pantai Kuala Raja, Pantai Peuneulot Baroh, Pantai Ulee Kareng, Batee Iliek, waduk Paya Laot, Pantai Ujong Blang, Air Terjun Ceureucok, Bendungan Krueng Nalan, Pantai Reuleng Manyang.
- b) Wisata Budaya meliputi : Makam Raja Jeumpa, Makam Tun Sri Lanang, Rumah Tengku Awe Geutah, Syuhada 44, Syuhada 8.
- c) Wisata Minat Khusus: PPI Peudada, Rest Area (Pemerasan Air Tebu).

Dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Bireuen diharapkan akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja yang akan

meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat sekitar daerah wisata dan secara tidak langsung juga akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah lokasi obyek wisata di wilayah Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.78
Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Bireuen

Lokasi/Kecamatan	Nama Obyek Wisata
Samalanga	1. Pemandian Kr. Batee Iliek 2. Makam Pocut Di Tanjung 3. Makam Tun Sri Lanang
Sp. Mamplam	1. Makam Syuhada 8 2. Pemandian Peueneuleut Baroh 3. Pantai Ujong Kareung
Jeunib	Makam Syuhada 44
Jeumpa	1. Makam Raja Jeumpa 2. Paya Jagat 3. Pantai Kuala Jeumpa
Kuala	1. Pantai Ujong Blang 2. Pantai Krueng Juli Timu 3. Pantai Kuala Raja 4. Pantai Krueng Juli Barat
Pandrah	Pantai Ujong Bate
Juli	1. Pemandian Krueng Simpo 2. Cot Panglima
Peusangan Sb. Krueng	Pemandian Pante Lhong
Gandapura	Pemandian Blang Rhee
Kuta Blang	1. Makam Tgk. Chik Di Manyang 2. Makam Tgk. Chik Malem 3. Tugu Kuta Hom
Kota Juang	Tugu Kota Juang

Sumber : RTRW Kab. Bireuen

Untuk urusan pariwisata belum terkelola dengan baik sehingga lemahnya data yang dimiliki baik data kunjungan wisata, lamanya kunjungan wisata maupun PAD sektor pariwisata belum dapat tersajikan agar menjadi perhatian penataan dan pengelolaan sektor pariwisata pada tahun-tahun mendatang.

II.3.4.2 PERTANIAN

Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan Kabupaten Bireuen. Hal ini didukung dengan kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah agraris. Lapangan usaha ini pada tahun 2019 mampu menyerap 90.767 orang tenaga kerja dan dapat menyumbang 32,99 persen PDRB Kabupaten

Bireuen atau sekitar 4,27 trilyun. Nominal ini disumbang oleh sub sektor; tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu, serta perikanan.

1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bireuen dari tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan sejalan dengan upaya pemerintah dan masyarakat terus bahu membahu membenahi pembangunan di kabupaten ini. Berikut ini peranan subkategori terhadap nilai kategori pertanian di Kabupaten Bireuen:

Tabel 2.79
Peranan Subkategori terhadap nilai tambah kategori Sektor Pertanian di Kabupaten Bireuen (Persen) Tahun 2015-2019

Lapangan Usaha	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian	34,23	33,92	33,58	33,08	32,99
1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Jasa Pertanian	77,99	71,27	70,99	70,80	70,55
- Tanaman Pangan	33,46	32,64	32,67	32,30	31,67
- Tanaman Hortikultura	23,26	23,44	23,50	23,69	23,93
- Tanaman Perkebunan	15,84	16,29	16,47	16,88	16,71
- Peternakan	21,69	21,90	21,60	21,31	21,87
- Jasa Pertanian dan Perburuan	5,75	5,74	5,57	5,82	5,82
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,79	2,63	2,57	2,54	2,41
3. Perikanan	26,22	26,10	26,42	26,67	27,03

Sumber : PDRBKab. Bireuen menurut lapangan usaha 2015-2019

Capaian PDRB sektor perkebunan tanaman keras relatif kecil karena dari 4 komoditas utama, yaitu: Kelapa, Kakao, Karet, dan pinang, peningkatannya belum signifikan. Di sisi lain harga komoditas perkebunan tanaman keras dipengaruhi harga di pasaran dunia yang fluktuatif, sehingga mempengaruhi budidaya perkebunan tanaman keras di tingkat domestik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih menanam tanaman semusim seperti pepaya, tebu, dan pisang yang lebih prospektif dan lebih elastis di pasaran domestik. Kondisi tanaman keras pada perkebunan masih didominasi tanaman yang rusak/tua (TT/TR) dan Tanaman belum menghasilkan (TBM). Upaya peremajaan sebagian telah dilakukan namun belum maksimal produksinya. Pola tanam yang dilakukan para pekebun

belum sepenuhnya intensif, masih bersifat usaha sampingan akibat dihadapkan pada keterbatasan modal dan peralatan usaha tani. Kesemua ini berimplikasi pada rendahnya produktivitas yang dicapai pada saat panen.

Tabel 2.80
Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama
di Kabupaten Bireuen

Tahun	Kelapa		Kakao		Karet		Pinang	
	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
2015	13.411,3	1.099,8	2.685,4	656	969	913	11.136,8	1.606
2016	13.837,2	1.120,3	2.970,4	652	1.202	914	11.225,7	1.605
2017	15.283,9	1.104,8	2.730,8	648	1.213	908	9.072	1.290
2018	15.682,1	1.132,0	2.715,2	641	1.204	909	9.363,3	1.341
2019	15.720,1	1.132,0	2.677,2	630	1.203	900	5.498	787

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen, 2020

Sub sektor peternakan juga memiliki andil dalam meningkatkan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Bireuen dengan rata-rata kontribusinya 21,87 persen atau sekitar empat ratusan milyar yang diperoleh melalui usaha peternakan ternak besar, ternak kecil dan unggas, walau masih sebagai usaha sampingan. Potensi peternakan Kabupaten Bireuen sangat prospektif karena didukung oleh sumber daya alam, sumber daya lahan dan sumber daya manusia yang sangat menjanjikan. Perkembangannya sudah mulai maju, dalam peningkatan populasi telah menggunakan teknologi Inseminasi Buatan (IB), untuk intensifikasi telah dilaksanakan sistem integrasi ternak – tanaman, pemanfaatan bio gas juga telah mulai dilaksanakan, industri pakan ternak skala kecil juga telah ada dan berSNI, namun dalam meningkatkan produksinya sarana prasarannya masih jauh dari memadai, teknologi pasca panen untuk pengolahan hasil masih belum berjalan, sehingga nilai tambah petani masih sangat rendah.

Tabel 2.81
Sarana Prasarana pendukung Usaha Peternakan Kabupaten Bireuen

Tahun	Padang Pengembalaan		Jumlah Pos IB (Unit)	Jumlah PUSKESWAN (Unit)	Jumlah RPH (Unit)	Jumlah TPU (Unit)	Jumlah Pasar Ternak (Unit)		Jumlah Pasar Daging (Unit)	
	Luas (Ha)	Produksi (Ton)					Ternak Besar & Kecil	Unggas	Ternak Besar & Kecil	Unggas
2015	1.685	28.645	8	8	2	3	7	6	2	4
2016	2.131	36.227	8	8	3	3	7	6	2	16
2017	853	14.501	8	8	2	3	2	7	2	8
2018	1.563	26.571	10	8	2	3	2	8	2	10
2019	781,95	9.383,40	10	8	2	3	2	8	2	10

Sumber : Dinas Pertanian, 2020

Potensi sub sektor peternakan yang lazim diusahakan masyarakat di daerah ini adalah sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, itik dan ayam ras pedaging, dengan populasinya sebagaimana diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.82
Populasi Ternak di Kabupaten Bireuen

Tahun	Ternak Besar (ekor)		Ternak Kecil (ekor)		Unggas (ekor)	
	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam	Itik
2015	61.442	4.180	39.622	24.048	918.377	301.371
2016	62.291	2.227	39.538	21.820	840.544	270.273
2017	63.293	2.516	38.311	15.144	778.460	257.200
2018	64.798	1.940	36.537	16.672	779.105	181.890
2019	63.709	2.271	78.242	33.353	483.994	12.835

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, 2020

Sekalipun nilai kontribusi pertanian jauh lebih tinggi dari sektor lainnya namun pada kenyataannya cenderung monoton dan melambat akibat berkembangnya sektor non pertanian yang memanfaatkan lahan pertanian dan pergeseran tingkat strata sosial dengan pola pikir anak petani jangan jadi petani lagi. Situasi ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang dominasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bireuen semakin berkurang dan akan bergeser ke sektor lain, terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan, bangunan/perumahan, serta sektor jasa lainnya. Hal ini sebuah keniscayaan pola pertumbuhan ekonomi yang bersifat progressive yang tidak konservatif pada sektor pertanian agraris. Namun demikian sektor pertanian tetap harus dipacu pada aspek off farmnya dan mendorong berkembangnya industri hilir yang berbasis pertanian sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi petani agar nilai tukar petani bisa ditingkatkan, dengan harapan disparitas pendapatan di sektor pertanian tidak terpaut jauh dengan sektor non pertanian yang diprediksi pertumbuhannya akan lebih tinggi.

2. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya perhektar

Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Bireuen selama lima tahun terakhir terus berfluktuasi, sangat berpengaruh pada kondisi iklim dan tingkat berfungsinya infrastruktur pertanian. Tingkat produktivitasnya digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.83
Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya Tahun 2015-2019
di Kabupaten Bireuen

Komoditi Pangan	Tahun (Kw/ha)				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Padi	62,83	62,46	62,71	63,93	65,10
2. Jagung	41,71	41,70	41,69	41,68	50,40
3. Kedelai	16,07	15,26	14,85	15,58	8,50
4. Kacang Tanah	15,57	15,28	16,80	15,81	16,8
5. Kacang Hijau	15,27	15,32	15,76	15,53	16,6
6. Ubi Kayu	191,97	192,16	192,43	199,68	252,2
7. Ubi Jalar	156,57	157,14	157,20	158	190,5

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rata-rata produktivitas komoditas pangan Kabupaten Bireuen adalah; padi 51,10 kw/ha, jagung 50,10 kw/ha, kedelai 8,50 kw/ha, kacang tanah 16,8 kw/ha, Kacang hijau 16,6 kw/ha, ubi kayu 252,2 kw/ha dan ubi jalar 190,5 kw/ha. Salah satu faktor yang menyebabkan produksi pertanian sulit meningkat khususnya komoditas pangan adalah terjadinya alih fungsi lahan secara terus-menerus, baik ke penggunaan non-pertanian maupun ke komoditas perkebunan. Petani masih sering mengalami risiko gagal panen karena kekeringan, banjir dan serangan hama dan penyakit.

3. Cakupan Bina Kelompok Tani

Pembinaan kelembagaan petani dilakukan secara berkesinambungan, diarahkan pada perubahan pola pikir petani dalam menerapkan sistem agribisnis, poktan dan gapoktan harus menjalankan fungsinya, serta peningkatan kapasitasnya melalui pengembangan kerjasama dalam bentuk jejaring dan kemitraan. Kondisi saat ini masih banyak gapoktan yang belum memiliki kekuatan hukum sehingga posisi tawarnya rendah. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usahatani. Gapoktan yang berhasil mengembangkan usahanya berpeluang untuk ditingkatkan kemampuannya membentuk kelembagaan ekonomi petani.

Pemberdayaan petani dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kemampuan poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian, dengan melaksanakan penilaian

klasifikasi kemampuan poktan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya. Agar poktan dapat menjadi kelembagaan petani yang memiliki kelayakan usaha yang memenuhi skala ekonomi dan efisiensi usaha, maka poktan didorong untuk menyatukan kelompoknya ke dalam gapoktan.

Gabungan kelompok tani berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai hilir secara komersial dan berorientasi pasar. Pada tahap pengembangannya gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi dan permodalan kepada anggota kelompoknya serta menjalin kerjasama dengan pihak lain. Diharapkan penggabungan poktan dalam gapoktan akan menjadikan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing.

Penumbuhan gapoktan, dilakukan melalui tahapan :

a. Persiapan Penumbuhan Gabungan KelompokTani

Penyuluh pertanian melakukan identifikasi terhadap poktan yang berpotensi untuk ditingkatkan kemampuannya melalui pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan poktan. Penyuluh pertanian melakukan advokasi (memberikan saran dan pendapat) serta informasi kepada tokoh-tokoh petani setempat dan aparat desa

b. Proses Penumbuhan Gabungan Kelompok Tani.

Penyuluh pertanian memberikan sosialisasi melalui pertemuan kelompok-kelompok tani dan pertemuan dusun dalam satu gampong. Membuat surat pernyataan kesepakatan tertulis dari poktan-poktan tentang pembentukan gapoktan dan membentuk kesepakatan gapoktan. Daftar poktan yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam gapoktan selanjutnya dimasukkan dalam salah satu bahan dalam penyusunan program gampong. Setelah program disusun maka pengembangan gapoktan menjadi bahan bagi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyuluh Pertanian

Adapun Gabungan Kelompok tani berketentuan Gapoktan beranggotakan beberapa kelompok tani, memiliki pengurus terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dilakukan Peningkatan kemampuan gapoktan dimaksudkan agar dapat berfungsi sebagai (1) unit usaha sarana dan prasarana produksi; (2) unit usaha tani; (3) unit usaha pengolahan; (4) unit usaha pemasaran; dan (5) unit usaha keuangan mikro (simpan-pinjam) serta unit jasa penunjang lainnya.

Pengembangan gapoktan dilakukan agar gapoktan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Ruang lingkup materi dalam pengembangan gapoktan meliputi (1) peningkatan dan perluasan usaha tani serta jenis usaha tani yang berorientasi pasar; (2) peningkatan kerjasama melalui jejaring dan kemitraan usaha tani baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir; (3) Fasilitasi penguatan gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi petani dengan basis poktan/gapoktan yang berbadan hukum guna meningkatkan posisi tawarnya.

Pengembangan gapoktan dilakukan melalui pendampingan penyuluh pertanian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengubah perilaku petani agar mengembangkan usaha produktif yang dikelola secara bersama dalam satuan skala usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menguntungkan dan efisien;
- b. Meningkatkan perluasan fungsi-fungsi unit usaha dalam gapoktan, bisa juga dengan perluasan kapasitas usaha dan/atau jenis usaha;
- c. Pemberdayaan usaha pertanian melalui pengembangan jenis-jenis usaha yang berorientasi pasar dan berskala ekonomi;
- d. Fasilitasi pembentukan jejaring agribisnis/kemitraan antar pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Gapoktan yang berhasil dalam mengembangkan usaha taninya ditingkatkan kemampuannya untuk membentuk kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum;
- f. Pembentukan kelembagaan ekonomi petani diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani.

Dalam rangka memantau proses pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani maka perlu dilakukan monitoring secara terencana, sistimatis dan berkesinambungan, yang dilaksanakan pada masing-masing tingkatan; dalam hal ini untuk Kabupaten Bireuen di tingkat kecamatannya dilakukan oleh BP3K dan untuk kabupaten dilakukan oleh Dinas Pertanian.

Demikian juga evaluasi pembinaan kelompok tani perlu dilaksanakan secara teratur, baik evaluasi awal (pre-evaluation), evaluasi proses (on-going evaluation), evaluasi akhir (post/terminal evaluation), maupun evaluasi dampak (ex-post evaluation). Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara reguler dan berjenjang mulai dari tingkat gampong, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat untuk mengetahui perkembangan poktan dan gapoktan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penyuluh

pertanian di lapangan dan petugas lainnya perlu membuat laporan yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan perencanaan dan kebijakan tahun berikutnya.

II.3.4.3 KEHUTANAN

Kabupaten Bireuen memiliki kawasan hutan produksi tetap seluas 30.279,20 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 4.656,08 hektar, pada tanggal 19 Oktober 2009 Menteri Kehutanan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK. 723/Menhut-II/2009 tentang Pencadangan Areal untuk Pembangunan HTR di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh seluas 1.335 hektar.

Pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 22 ayat 1 berimplikasi bahwa urusan kehutanan menjadi wewenang provinsi dan pusat sehingga tidak lagi menjadi wewenang kabupaten, namun wilayah wilayah kecamatan atau kampung yang berbatasan dengan hutan tetap menjadi perhatian pihak kabupaten dengan berkoordinasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau bila dianggap perlu maka pihak kabupaten akan memberi masukan kepada BKSDA dan dinas kehutanan provinsi.

II.3.4.4 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. Ketersediaan Listrik

Sumber daya lain yang juga menjadi kebutuhan hidup masyarakat adalah ketersediaan sumber daya energi listrik. Pada saat ini sistem prasarana jaringan listrik telah menjangkau seluruh desa yang ada di Kabupaten Bireuen dengan cakupan 100 persen terlayani, dengan jumlah pelanggan sebanyak 107.560 pelanggan. Dalam perencanaannya, prasarana jaringan listrik di Kabupaten Bireuen akan diperluas dan terdapat rencana relokasi jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) menjadi kabel tanah, di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh-Medan, yang melintasi Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang, Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura. Kebutuhan listrik dipergunakan untuk keperluan-keperluan seperti berikut:

- Kebutuhan rumah tangga : Perkotaan 1.300 VA dan pedesaan 950 VA
- Kebutuhan fasilitas perdagangan: 40 persen dari kebutuhan perumahan
- Kebutuhan fasilitas umum : 30 persen dari kebutuhan perumahan
- Kebutuhan penerangan: 1 persen dari kebutuhan perumahan

Tabel 2.84
Peguna Listrik di Kabupaten Bireuen Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah RT Pengguna Listrik	98.350	101.210	103.975	107.560	110.747
Jumlah RT	100.505	102.428	104.643	106.606	108.833
Persentase RT pengguna listrik	97,86	99,00	99,36	100,00	101,76

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Kab. Bireuen , 2020

Tabel 2.85
Jumlah Sambungan Listrik Menurut Kategori Pelanggan PLN Rayon Bireuen di Kabupaten Bireuen Tahun 2019

Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Jumlah KWH	Nilai (Rp)
Rumah Tangga	40 654	60 896 928	52 327 766 389
Badan Sosial dan Sarana Umum	1 081	7 020 366	5 057 267 973
Niaga Kecil	4 678	5 964 113	9 025 896 888
Niaga Besar	750	13 741 557	13 330 334 105
Industri	398	6 862 906	7 514 896 055
Industri Pemerintah	325	7 706 959	10 767 045 192
Jumlah	47 886	102 192 829	98 023 206 602

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen 2020

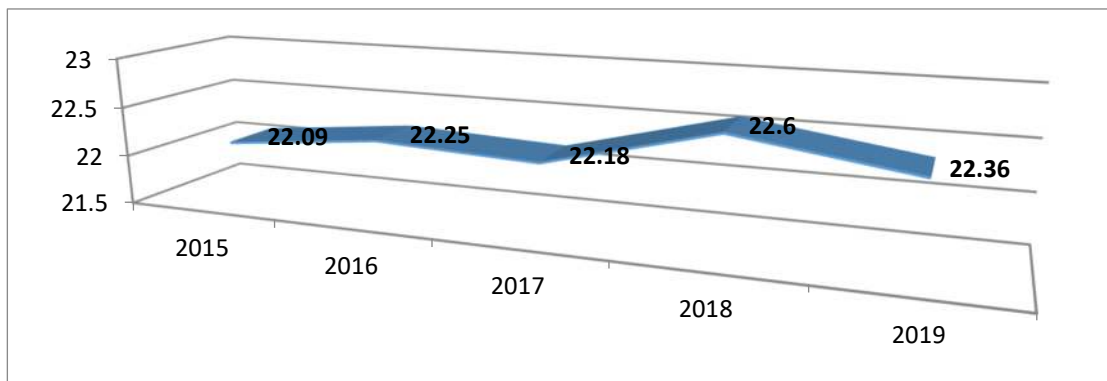
2. Persentase Pertambangan Tanpa Izin

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang dulunya berada di pemerintah kabupaten. Dengan adanya perubahan sistem perizinan dapat menimbulkan masalah baru di wilayah pemerintah kabupaten disebabkan tempat pelaksanaan penambangan berada diwilayah kabupaten. Berdasarkan kondisi dilapangan beberapa tahun terakhir banyaknya perusahaan galian C yang tidak terkontrol dalam melakukan penambangan yang mengakibatkan kerusakan alam yang menjadi beban dari pemerintah kabupaten.

II.3.4.5 PERDAGANGAN

Lapangan usaha perdagangan yang mencakup perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor sebagai penyumbang PDRB terbesar kedua setelah pertanian, memiliki kontribusi sebesar 22,36 persen

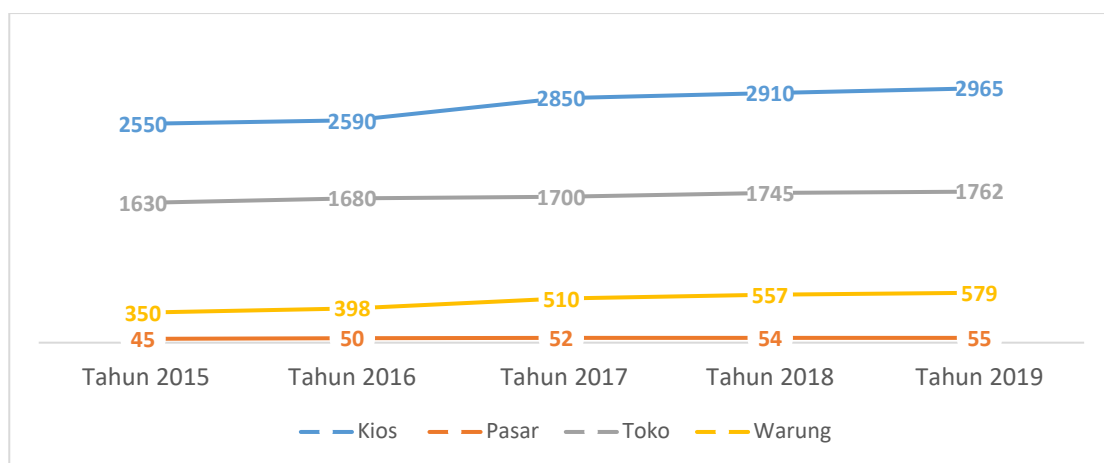
pada tahun 2019. Berikut adalah tabel data mengenai distribusi persentase PDRB Kabupaten Bireuen



Sumber : BPS, Kab. Bireuen. 2020

Grafik 2.33 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bireuen

Pada tahun 2019, terdapat 586 perusahaan dengan badan hukum PT, CV/Firma, dan Perseorangan yang mendaftarkan di Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen. Jumlah Usaha perseorangan memiliki persentase terbesar sebanyak 72,18 persen dari total perusahaan yang mendaftarkan. Sektor perdagangan termasuk kedalam 5 besar sektor utama pendukung perekonomian Kabupaten Bireuen. Pada tahun 2019, pedagang kecil masih menjadi primadona utama dalam sektor perdagangan di Kabupaten Bireuen, sebesar 61 persen pedagang di Kabupaten Bireuen adalah pedagang kecil. Sedangkan jumlah sarana perdagangan selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan sebesar 1,8 persen dari tahun 2018. Sedangkan untuk sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Bireuen semakin meningkat. Peranan sektor perdagangan di Kabupaten Bireuen perlu terus ditingkatkan demi memacu peningkatan pendapatan daerah.



Sumber : BPS Kab. Bireuen, 2020

Grafik 2.34 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Sebagai daerah yang terletak di kawasan perlintasan jalan negara lintas pulau sumatera, sejumlah usaha dagang berbagai jenis di sejumlah titik lokasi yang ada di Kabupaten Bireuen selama ini telah menjadi bagian penting dari perjalanan roda perekonomian daerah ini. Perkembangan sektor usaha perdagangan juga ikut dipengaruhi oleh sejumlah aspek/dimensi lain, seperti: iklim usaha, daya beli masyarakat, maupun sejumlah “*driven factor*” lainnya. Perkembangan sektor usaha jasa perdagangan itu sendiri antara lain dapat dilihat dari jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel yang terdapat di halaman berikut.

Tabel 2.86
Jumlah Penerbitan S.I.U.P Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah SIUP/Kategori Usaha			Jumlah
	Besar	Menengah	Kecil	
2015	2	37	238	277
2016	2	23	216	241
2017	3	26	221	247
2018	4	27	227	249
2019	35	135	277	447

Sumber : DPMGPKB dan BPS Kab. Bireuen, 2020

Berdasarkan data jumlah surat izin usaha perdagangan (SIUP) pada tabel tersebut, terlihat bahwa secara keseluruhan, penerbitan izin usaha perdagangan baik kategori usaha besar, menengah dan kecil mengalami penurunan jumlah selama beberapa tahun terakhir. Namun mengalami peningkatan yang cukup drastis pada tahun 2019 dengan total penerbitan izin baik kategori usaha besar, menengah dan kecil sebanyak 447 izin.

Meskipun secara umum, jumlah penerbitan ijin pada usaha kecil jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan ijin usaha besar dan menengah. Fenomena tersebut dirasa perlu untuk dicermati lebih jauh, agar nantinya dapat diperoleh gambaran terkait kemungkinan faktor-faktor yang menjadi penyebab kondisi tersebut, sehingga dimasa mendatang dapat ditempuh langkah-langkah yang mampu lebih merangsang tumbuhnya sektor usaha perdagangan tersebut dalam jumlah maupun skala yang lebih besar, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik.

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa dikonsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan

ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang/jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai. Pemerintah menyadari bahwa diperlukan undang-undang serta peraturan-peraturan di segala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pengusaha ke konsumen. Pemerintah juga bertugas untuk mengawasi berjalannya peraturan serta undang-undang tersebut dengan baik.

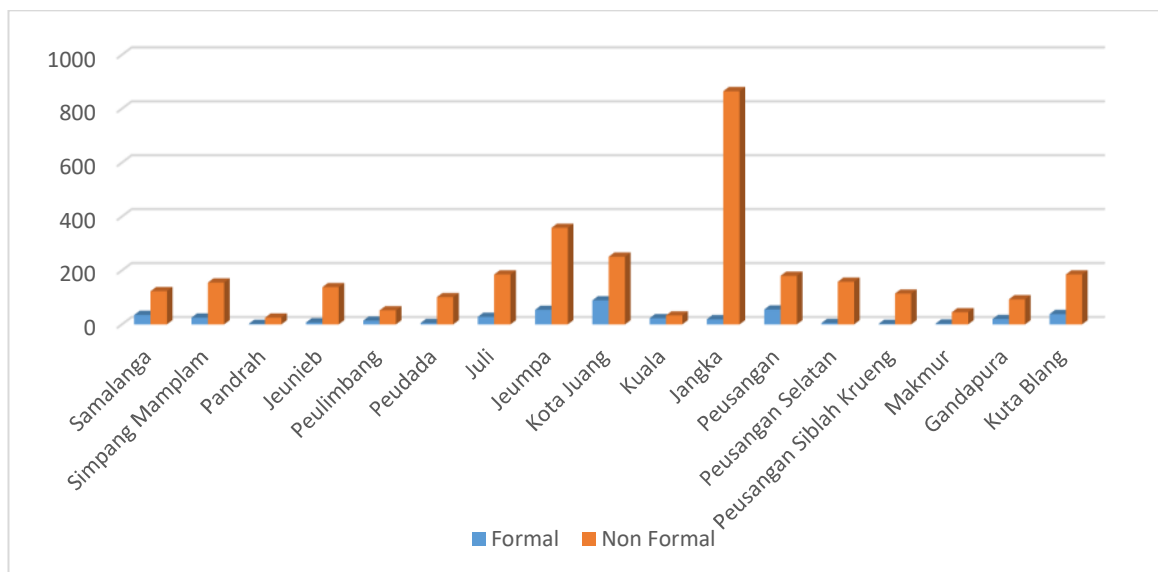
II.3.4.6 PERINDUSTRIAN

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memegang peranan penting bagi perekonomian daerah, karena sektor ini merupakan salah satu jawaban untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendapatan daerah dan industri kecil menengah secara umum mampu bertahan dan terus berkembang dikarenakan pada umumnya sektor ini memanfaatkan sumber daya lokal, baik manusia, modal, bahan baku hingga peralatan. Namun demikian, untuk melaksanakan peran ini, industri kecil dan menengah harus membekali diri untuk meningkatkan daya saingnya, sehingga industri kecil dan menengah perlu diberi pelatihan atau bimbingan.

Upaya pembangunan perindustrian di Kabupaten Bireuen terus ditingkatkan, terutama yang dapat menunjang sektor pertanian. Melalui upaya ini diharapkan kontribusi sektor industri terhadap penciptaan nilai tambah semakin meningkat setiap tahunnya. Jenis usaha industri yang ada di kabupaten Bireuen terdiri dari industri formal dan non formal. Jumlah unit usaha industri kecil Bireuen pada tahun 2019 sejumlah 3.535 unit usaha yang terdiri dari 3.111 unit usaha Non Formal dan 424 unit Usaha Formal.

Pada Tahun 2019 jumlah unit usaha Formal terbesar terdapat di Kecamatan Kota Juang yang merupakan Kecamatan dimana Ibu Kota Kabupaten Bireuen terletak, sementara itu untuk unit usaha Non Formal terbesar terletak di Kecamatan Jangka yang memiliki karakteristik usaha pertanian, perikanan dan dan industri.

Jenis usaha industri kecil dari jenis industri makanan, minuman dan tembakau memiliki persentasi kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja dengan persentase sebesar 43,97 persen sedangkan Industri Kayu dan Hasil Hutan memiliki persentase kontribusi terbesar dalam perolehan omset industri dengan persentase sebesar 35,62 persen. Usaha-usaha industri kecil/rumah tangga yang mendukung pengembangan sektor pertanian dan telah beroperasi selama ini antara lain industri bubuk kopi, tepung beras, minyak kelapa, nilam kapuk, anyaman, kopiah, juga bordir. Untuk usaha industri kecil, yang paling banyak ditekuni masyarakat di daerah ini antara lain industri garam rakyat, pembuatan kue kering, minyak kelapa, pembuatan perabot, batu bata, dan pembuatan kosen ketam. Seluruh usaha industri kecil/industri rumah tangga yang ada selama ini menggunakan teknologi yang sederhana, sehingga kualitas produksinya masih belum memadai. Akibatnya, pemasarannya lebih banyak di pasaran lokal. Di daerah ini, juga terdapat beberapa jenis industri menengah, seperti usaha industri karoseri mobil. Usaha ini telah dikenal baik oleh konsumen luar daerah, terutama dalam hal kualitas, model dan daya saing di pasaran. Kendati demikian, upaya mengembangkan sektor industri yang berdaya saing di daerah ini masih dihadapkan pada minimnya prasarana dan sarana pendukung yang tersedia. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan berbagai kebutuhan pendukung ini.



Grafik 2.35 Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal di Kabupaten Bireuen Tahun 2019

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan dan Industri juga merupakan salah satu aktivitas ekonomi non pertanian yang memiliki peluang besar dalam rangka

perluasan lapangan pekerjaan. Berikut adalah data mengenai jumlah unit usaha industri kecil di Kabupaten Bireuen,

Tabel 2.87
Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal Dan Non Formal Dalam Kabupaten Bireuen Menurut Jenis, Tenaga Kerja, dan Omset Tahun 2019

No.	Jenis Industri	Jumlah					
		Industri		Tenaga Kerja		Omset Industri (Juta)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	1262	1267	2052	2076	30780	41080
2	Tekstil, Barang kulit dan alas kaki	350	350	700	700	10050	10050
3	Kayu dan Hasil Hutan	390	394	117	136	39000	52000
4	Kertas dan Barang Cetak	38	38	190	192	5472	5972
5	Pupuk, Kimia, dan Barang Dari Karet	-	2	-	20	-	66
6	Semen dan Barang Galian Bukan Logam	101	101	246	246	8910	8910
7	Logam dasar Besi dan Baja	97	97	201	201	25713	25713
8	Industri Es Batu/Es Balok/Es Kristal	5	5	28	28	937	937
9	Barang Lainnya	62	63	1120	1122	1245	1247
Jumlah		2305	2317	4654	4721	122107	145975

Sumber : Bireuen Dalam Angka 2020

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa jenis industri makanan, minuman dan tembakau adalah jenis industri dengan jumlah industri terbesar dengan jumlah industri sebanyak 1.262 industri serta menyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan dengan jenis industri lain sebanyak 2052 orang.

II.3.4.7 TRANSMIGRASI

Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atas inisiatif pemerintah. Transmigrasi dipandang sebagai kerangka eksperimen dalam usaha pemanfaatan daerah di Indonesia. Dalam melakukan transmigrasi harus memiliki ketentuan-ketentuan dalam berlangsungnya transmigrasi tersebut sehingga perpindahan penduduk dapat dikatakan sebagai sebuah transmigrasi.

Transmigrasi memiliki jenis-jenis yang dibedakan dalam tujuan dan fungsinya masing-masing, yaitu transmigrasi umum, transmigrasi swakarya, transmigrasi sektoral, transmigrasi keluarga, transmigrasi swakarsa/spontan, transmigrasi bedol desa dan transmigrasi lokal.

Transmigrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen adalah transmigrasi lokal, yang dilaksanakan di daerah UPT Krueng

Meuseugob/Lhok Tanoh Kecamatan Simpang Mamplam pada tahun 2013 dan UPT Cot Kruet/Alur Kuta Kecamatan Peudada pada tahun 2016 sampai dengan 2018.

Tabel 2.88
Kawasan Transmigrasi Lokal Harus Muda Jaya Kabupaten Bireuen

No	Uraian	Kec. Jeunib	Kec. Peulimbang	Kec. Peudada	Kec. Samalanga	Kec. Sp. Mamplam	Kec. Peudada	Kec. Pandrah	Kec. Jeunib
1	Jumlah Desa	7	22	53	8	40	13	18	45
2	Luas (Ha)	7.765,66			7.975,26			17.987,51	
3	Satuan Kawasan Pengembangan	SKP 1			SKP 2			SKP 3	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian, 2019

II.3.4.8 KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup melimpah baik dibidang perikanan tangkap maupun bidang perikanan budidaya. Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan memiliki sasaran meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian. Untuk mengukur capaian dari urusan kelautan dan perikanan tersebut digunakan beberapa indikator diantaranya: (1) produksi perikanan; (2) konsumsi ikan; (3) cakupan bina kelompok nelayan; (4) jumlah nelayan yang dapat bantuan pemda; dan (5) produksi perikanan kelompok nelayan.

1. Produksi Perikanan

Potensi sumberdaya perikanan budidaya di Kabupaten Bireuen terdiri dari budidaya air payau, budidaya air tawar dan budidaya di laut. Untuk Budidaya Air Payau Kabupaten Bireuen memiliki tambak seluas 4.945 Ha yang dimanfaatkan untuk usaha budidaya udang, bandeng, kerapu, nila dan komoditas lainnya. Untuk pengairan tambak tersebut didukung dengan saluran tambak sepanjang 313,67 Km yang terdiri dari saluran primer, sekunder, tertier dan kuarter. Sedangkan untuk menunjang aktivitas masyarakat pembudidaya ikan tersedia akses jalan produksi tambak sepanjang 324 Km dan jembatan penghubung ratusan unit, sebagaimana diperlihatkan tabel berikut.

Tabel 2.89
Produksi Perikanan Budidaya dan Sarana Pendukung
Tahun 2015 - 2019 Kabupaten Bireuen

Tahun	Luas Lahan Budidaya Perikanan (Ha)	Luas Tambak (Ha)	Jumlah Petani Tambak (Orang)	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	Luas Kolam (Ha)	Jumlah Petani Kolam (Orang)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Nilai Produksi (Rp.)
2015	5.087	5.000	5.679	120	150	611	11.561,50	326.298.000.000
2016	5.095	4.226	5.679	120	139	611	11.700,00	360.294.500.000
2017	5.095	4.945	4.665	141	150	674	11.727,50	447.750.000.000
2018	5.095	4.945	4.861	180	150	674	11.847,90	445.500.300.000
2019	5.095	4.945	4.863	195	150	678	12.386,20	481.217.200.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2020

Komoditas unggulan perikanan budidaya Kabupaten Bireuen adalah Ikan Kerapu, Udang Windu dan Bandeng dengan jumlah produksinya pada tahun 2019 sebanyak 12.386,20 ton. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah budidaya perikanan tambak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.35/KEPMEN-KP/2013 Tahun 2013 Kabupaten Bireuen ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan berbasis Perikanan Budidaya dengan pusat (minapolis)nya adalah Kecamatan Jangka dan hinter landnya Kecamatan; Gandapura, Peusangan, Kuala dan Jeumpa (dengan wilayah cakupan 5 kecamatan dan 59 desa). Untuk sarana prasarannya diperlihatkan pada tabel dibawah ini,

Tabel 2.90
Sarana Prasarana Kawasan Minapolitan
di Kabupaten Bireuen Tahun 2018

Saluran Tambak (KM)			Luas Areal Tambak (Ha)	Jalan Produksi Tambak (KM)		Jembatan Produksi Tambak (Unit)	Jalan (KM)		Toko Saprodi (Unit)	Pasar Ikan (Unit)
Primer	Sekunder	Tersier		Perkerasan Tanah /Batu	h		Hotmik	Batu		
56,03	96,09	45,21	3.125,73	12	74	132	104	30	17	11

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2019

Minapolitan adalah konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan (akselerasi). Sedangkan Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan serta pelayanan jasa dan kegiatan pendukung lainnya. Tujuan minapolitan adalah untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pemasar ikan serta

mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah dengan sentra produksinya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.91
Sentra Produksi Perikanan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Bireuen

Sentra Produksi (Kec.)							
Pembenihan Udang (Kuala)	Pembenihan Bandeng (Jangka)	Udang Vannamei	Udang Windu	Bandeng	Kerapu (Jangka)	Pengolahan Ikan (Jangka)	Pemasaran Ikan (Pasar)
Ujong Blang Aron	Tanoh Anoe	Jeumpa	Jangka	Gandapura	Alue Buya Pasie	Pante Paku	Matang Glp Dua
Ujong Blang Mesjid	Alue Kuta	Kuala	Gandapura	Jangka	Pulo Pineueng Mns. Dua	Jangka Mesjid	Gandapura
Jangka			Peusangan			Bireuen	
Kuala							

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2019

Hasil produksi komoditas unggulan kawasan minapolitan Kabupaten Bireuen juga sangat menjanjikan, dimana setiap tahunnya terus meningkat sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 2.92
Data Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bireuen

Komoditas	Produksi (Ton)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Bandeng	4.196	3.188	6.410	6.228	6.235
Udang	5.510	7.763	3.373	3.935	4.346
Lele	99	52	872	980	285,41
Total	9.805	11.003	10.655	11.143	11.143

Sumber : BPS Kab. Bireuen, 2020

Pelaksanaan minapolitan di Kabupaten Bireuen masih dihadapkan dengan masalah kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan sehingga menghambat upaya-upaya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas komoditas perikanan. Hal ini dapat dilihat di lapangan khususnya di kawasan minapolitan masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai seperti kondisi kuala yang tersumbat, kondisi PPI dan TPI yang kurang optimal, kondisi armada perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih tradisional, saluran tambak yang masih dangkal dan prasarana kelautan dan perikanan lainnya yang masih memerlukan pengembangan dan perbaikan. Hal tersebut mengakibatkan banyak tambak yang tidak mendapatkan pengairan yang baik sehingga produksi dan produktivitas tambak masih rendah. Begitu juga dengan kondisi jalan, jembatan dan prasarana lainnya masih memerlukan perbaikan dan penambahan.

Untuk potensi sumber daya perikanan tangkap Kabupaten Bireuen memiliki garis pantai sepanjang 69 Km dengan luas laut 1.511 Km². Potensi produksi lestari perikanan tangkap di Kabupaten Bireuen sebesar 32.000 ton/tahun. Sedangkan pemanfaatannya pada tahun 2019 baru mencapai 11.847,90 ton/tahun (47 persen). Usaha Perikanan tangkap Kabupaten Bireuen hingga sekarang masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan armada perikanan tangkap berukuran kecil (dibawah 5 GT) dan menggunakan alat tangkap sederhana. Potensi perikanan juga menjadi andalan, karena didukung dengan letak Kabupaten Bireuen yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka disebalah utara. Kabupaten Bireuen juga memiliki 2 (dua) TPI yang sangat mendukung untuk perkembangan sub sektor perikanan ke depannya, namun sarana prasarananya masih jauh dari memadai. Berikut tabel sarana-prasarana perikanan tangkap di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.93

Sarana Pendukung dan Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Bireuen

Tahun	Jumlah Nelayan (Orang)	Jumlah kelompok Nelayan (Klp)	Jumlah Perahu (Unit)		Jumlah Alat Tangkap (Unit)	Jumlah TPI (Unit)	Jumlah PPI (Unit)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
			Tanpa Motor	Motor				
2015	5.896	52	124	1.487	1.854	10	3	11.029
2016	6.777	58	148	1.470	1.947	10	3	11.048
2017	6.789	60	152	1.473	1.959	10	3	11.056
2018	6.821	62	154	1.479	1.968	10	3	11.063
2019	7 614	101	346	1 728	2 038	10	3	12 809

Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan dan BPS Kab. Bireuen, 2020

Dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas komoditas perikanan serta meningkatkan pendapatan masyarakat diperlukan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang memadai, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun pengolahan dan pemasaran hasil perikanan agar mampu mendukung usaha perikanan masyarakat.

2. Konsumsi Ikan

Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Rata-rata, tingkat konsumsi ikan di Indonesia pada tahun 2016 baru mencapai 43,03 kilogram (kg) perkapita pertahun. Untuk tahun 2019 meningkat menjadi 54 kg/kapita demikian juga dengan Kabupaten Bireuen meningkat rata-rata 41,65 kg/kapita/tahun selama lima tahun terakhir. Berikut data konsumsi ikan Kabupaten Bireuen pertahunnya.

Tabel 2.94
Konsumsi Ikan Perkapita Tahun 2015-2019 Kabupaten Bireuen

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun)	37	39,35	37	40,67	41,65
Target Nasional (Kg/kapita/tahun)	40,9	43,88	47,12	50,65	54,00
Persentase konsumsi ikan	90,46	89,67	78,52	80,29	77,13

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2020

Untuk meningkatkan konsumsi ikan Kabupaten Bireuen telah ikut melaksanakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Program ini rutin digelar di setiap tahunnya yang dikomandoi oleh Ibu Bupati Bireuen. Gerakan ini sangat perlu disosialisasikan dan diaplikasikan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan nilai konsumsi protein. Dampak dari bertambahnya produksi perikanan tidak terlepas dari pembinaan kelompok nelayan baik itu kelompok nelayan tangkap maupun budidaya. Kelompok yang dibina pada tahun-tahun mendatang dapat ditingkatkan sehingga menjadi kelompok lebih mandiri.

3. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen jumlah produksi ikan yang berasal dari hasil kelompok nelayan terhadap jumlah produksi ikan di Kabupaten Bireuen per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah produksi ikan yang berasal dari hasil kelompok nelayan dibagi dengan jumlah produksi ikan di Kabupaten Bireuen dikali 100. Tahun 2014 indikator ini tercatat sebesar 29,25 persen, tahun 2015 tercatat sebesar 28,07 persen dan tahun 2016 kembali menurun menjadi 27,79 persen, selanjutnya pada tahun 2019 kembali menunjukkan angka peningkatan menjadi 29,10 persen dan seterusnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.95
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan
di Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	21.411	22.590	22.839	22.897	22.924	25.886
Jumlah Kelompok	191	206	206	208	208	233
Jumlah Produksi Kelompok (Ton)	6.264	6.343	6.347	6.349	6.351	7.232
Persentase Produksi Kelompok Nelayan	29,25	28,07	27,79	27,81	27,82	29,10

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2019

Indikator ini menunjukkan trend yang positif walaupun tidak berbeda jauh setiap tahunnya, artinya bahwa setiap tahun produksi ikan kelompok nelayan masih dapat dipertahankan walau agak melambat, untuk ini perlu adanya peningkatan pendampingan, pelatihan dan sarana prasarana lainnya yang dibutuhkan.

4. Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman di Kabupaten Bireuen semakin meningkat dari tahun ke tahun, untuk tahun 2018 baru mencapai 44,72 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa target pemanfaatan tangkapan di Kabupaten Bireuen belum sepenuhnya dimanfaatkan, dalam hal ini perlu penambahan alat dan armada penangkapan sesuai kriteria yang dibutuhkan. Berikut disajikan data proporsi tangkapan pertahunnya.

Tabel 2.96
Proporsi Tangkapan Ikan dalam Batasan Biologis yang aman
di Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Tangkapan Ikan (Ton)	10.511	10.752	11.029	11.048	11.125	11.148	12.809
Produksi Maksimum Lestari (Ton)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Proporsi Tangkapan Ikan (persen)	41,06	42	43,08	43,16	44,21	44,72	40,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2019

5. Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Luas perairan teritorial Kabupaten Bireuen adalah 511,152 Km², berdasarkan RTRW belum ditetapkan untuk kawasan lindung perairannya.

6. Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan merupakan perbandingan antara indeks yang diterima nelayan dengan indeks yang dibayar nelayan. Jika Nilai Tukar Nelayan lebih dari 100persen ini menunjukkan kesejahteraan petani, dalam hal ini nelayan relatif baik, berarti adanya perbaikan dan kenaikan kesejahteraan. Untuk Kabupaten Bireuen Nilai Tukar Nelayannya untuk saat ini memang sudah diatas seratus persen, namun kondisi ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan mengelola sarana prasarana perikanan dan peningkatan SDM serta kelembagaan nelayan, sehingga nilai

tambahnya untuk kesejahteraan nelayan dapat tercapai. Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Bireuen diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 2.97
Nilai Tukar Nelayan di Kabupaten Bireuen

Uraian	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Tukar Nelayan (persen)	101,85	102,12	102,25	102,65	102,72	101,37

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2019

Indeks yang diterima mencerminkan harga produksi petani, dalam hal ini produk ikan. Sementara indeks yang dibayar merupakan indikasi harga untuk kebutuhan rumah tangga dan harga kebutuhan usaha. NTN merupakan representasi dari usaha rumah tangga perikanan tangkap yang menggunakan kapal bermotor maupun kapal tidak bermotor. Faktor apa yang mendorong naiknya NTN faktor tersebut merupakan komposisi dari meningkatnya ikan yang ditangkap, kualitasnya lebih baik, harga yang lebih baik, dan biaya yang lebih rendah. Kalau selama ini biasanya nelayan mengeluarkan 100.000 untuk BBM, tapi karena ikan sudah banyak yang mereka tangkap maka pendapatannya juga semakin meningkat, inilah yang mempengaruhi nilai-nilai ekonomi dalam statistik.

II.3.5 PENUNJANG URUSAN

II.3.5.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Perencanaan merupakan bagian penting dan tidak boleh diabaikan dalam proses pembangunan. Melalui perencanaan dirumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia serta mengembangkan potensi yang ada di daerah.

Tabel 2.98
Kondisi Dokumen Perencanaan di Kabupaten Bireuen

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	Ada
4	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	Ada

Sumber : Bappeda Kab. Bireuen

Tabel 2.99
Konsistensi Program Daerah di Kabupaten Bireuen

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100	100	100	100	100
2	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100	100	100	100	100
3	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	95	95	95	95	95

Sumber : Bappeda Kab. Bireuen

A. Perencanaan Dalam Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Perencanaan dalam bidang penelitian dan pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen memiliki tujuan mendorong kemajuan daerah. Tujuan dan Arah Penelitian dan Pengembangan disusun dengan memperhatikan fokus pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dikaitkan dengan kewenangan sesuai tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan.

Hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan adalah dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang dapat direkomendasikan dalam rangka meningkatkan produktivitas di berbagai sektor dapat digunakan oleh pengambil kebijakan di Pusat dan Daerah untuk perencanaan, perumusan kebijakan serta pembinaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Bireuen.

B. Perencanaan pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 tahun 2019 mengamanatkan bidang ekonomi dan infrastruktur digabung menjadi satu. Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA, Infrastruktur dan kewilayahan di Kabupaten Bireuen pada periode ini diharapkan mencapai perkembangan sosial ekonomi yang cukup stabil dengan target tetap positif dalam pengaruh perekonomian global dan nasional dengan pertumbuhan ekonomi 3,3 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,5 persen di tahun 2022 mendatang.

Upaya Pencapaian hal tersebut dengan mendorong perkembangan berbagai sektor ekonomi seperti pertanian yang membutuhkan penyelesaian infrastruktur Bendungan Pante Lhong, Mon Seuke Pulet, Aneuk Gajah Rhet,

pompanisasi, embung dan saluran irigasi, mekanisasi dan agro input pertanian, peningkatan SDM penyuluh dan petani, peningkatan fungsi kawasan, peningkatan produksi dan produktivitas, pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran, serta peningkatan nilai tambah dan Nilai Tukar Petani (NTP) terutama untuk ketahanan pangan di Kabupaten Bireuen.

Sektor perikanan seperti pembangunan TPI Jangka dan Peudada, jetty, Kawasan Minapolitan, normalisasi saluran tambak, meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya maupun perikanan tangkap, pengolahan hasil, peningkatan NTN maupun perlindungan terhadap nelayan.

Sektor investasi, industri, UMKM dan Koperasi Seperti mewujudkan Kawasan Industri Bireuen (KIB) sebagai kawasan untuk berinvestasi di tahun mendatang, penyelesaian revitalisasi pasar, memperkuat home industri, UMKM dan Koperasi untuk menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi yang telah terbukti tahan terhadap fluktuasi moneter dimasa lalu, pengembangan pariwisata halal dan industri kreatif.

Sektor ketenagakerjaan seperti mendorong BLK dan SMK agar lebih banyak dapat meningkatkan kualitas dan skill tenaga kerja di sektor industri, baik di dalam maupun luar daerah atau membuka peluang usaha secara mandiri dan berbagai perkembangan pembangunan sektor ekonomi yang dapat memperluas kesempatan kerja.

Dengan pertimbangan bahwa strategi penataan ruang Kabupaten Bireuen adalah turunan dari kebijakan yang dijabarkan secara lebih proporsional agar dapat dituangkan dalam bentuk keruangan. Mengacu pada klausul kebijakan yang telah dirumuskan di atas serta dikaitkan dengan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bireuen tahun 2007-2012 serta kelanjutan kebijakan yang akan dirumuskan dalam RPJMD kedepan, maka strategi penataan ruang Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan, Meningkatkan dan Mendorong produktivitas wilayah dengan intensivitas lahan serta pengelolaan sumber daya alam pada kawasan budidaya yang berbasis kawasan agropolitan dan minapolitan sehingga dapat dikelola secara terpadu, modernisasi dan tepat guna agar lebih ramah lingkungan, melalui strategi:
 - a. Pengembangan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut

- dan biota laut serta Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbaru (renewable energi);
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau, dan tawar;
 - c. Memantapkan pembangunan sarana prasarana kelautan dan Mengembangkan industri pengolahan ikan;
 - d. Peningkatan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan.
 - e. Pemanfaatan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
 - f. Peningkatan teknologi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga menghasilkan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi.
 - g. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
 - h. Mengembangkan fungsi kawasan perkebunan secara terpadu dengan peternakan dan pertanian lahan kering;
 - i. Menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan; dan
 - j. Menetapkan kawasan strategis sentra pertanian dan perternakan terpadu.
2. Mengedepankan potensi wilayah dan membuka investasi modal usaha sebagai perwujudan untuk pengembangan perindustrian skala besar dan menengah dengan memberikan kenyamanan berinvestasi pada setiap pelaku usaha dengan menumbuhkan trend industri yang berbasis lingkungan hidup, melalui strategi:
 - a. Meningkatkan investasi potensi komoditas unggulan daerah;
 - b. Mempermudah regulasi, kebijakan daerah, kepabeanaan serta membuka peluang usaha investasi jangka panjang;
 - c. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana penunjang investasi;
 - d. Menyediakan ruang untuk berinvestasi; dan
 - e. Mengupayakan kondisi yang kondusif dibidang keamanan.
 3. Mengembangkan dan mendorong pertumbuhan bidang jasa-jasa, terutama jasa perbankan, pendidikan, kesehatan dan perdagangan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, professional dan terdepan, melalui strategi:

- a. Meningkatkan promosi daerah sebagai penyedia dan pemberi pelayan dalam mengkontribusikan kebutuhan konsumen;
 - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terpadu;
 - c. Meningkatkan potensi pendidikan bersektor pada keilmuan di segala bidang;
 - d. Merevitalisasikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan;
 - e. Membuka jaringan kerjasama antar regional dan internasional agar tercapainya peningkatan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.
4. Mempertahankan kelestarian alam dan sumberdaya alam dengan memperkecil resiko kebencanaan dengan melakukan penerapan dan pengelolaan terhadap keruangan berbasis mitigasi kebencanaan, melalui strategi:
- a. Mengembangkan, Meningkatkan, dan Mengoptimalkan pariwisata unggulan daerah secara terpadu dan memberdayakan alur sempadan sebagai instrument pelengkap;
 - b. Melengkapi industri dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau sesuai skala kegiatannya;
 - c. Mengendalikan perkembangan bagian hulu tersebar di wilayah selatan sebagai kawasan hutan dan perbukitan serta bagian hilir tersebar disepanjang pesisir pantai sebagai kawasan penyangga mitigasi kebencanaan;
 - d. Mengembalikan secara bertahap kawasan lindung yang berubah fungsi;
 - e. Penyusunan program dan pembangunan berbagai unit mitigasi kebencanaan pada berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya; dan
 - f. Melakukan penanaman pohon dan penghijauan lingkungan;
5. Membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis keruangan, melalui strategi:
- a. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
 - b. Pembangunan utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat kawasan permukiman

C. Perencanaan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan di bidang perencanaan dan pendanaan, bidang data dan informasi dan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- k. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.

D. Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dapat didefinisikan sebagai strategi kolektif dan terencana guna meningkatkan kualitas hidup manusia melalui seperangkat kebijakan sosial yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan serta kehidupan beragama termasuk penerapan Syari'at Islam. Perencanaan sosial budaya, SDM dan keistimewaan aceh sangat dibutuhkan agar semua program dan kegiatan dapat bersinergi untuk mencapai semua indikator sesuai target yang telah ditetapkan guna mencapai visi dan misi bupati terpilih dan RPJM 2017 – 2022.

Kegiatan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia merupakan penjabaran dari program-program nasional seperti Program Penanggulangan Kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemanfaatan basis data terpadu dalam perencanaan penerima manfaat program perlindungan sosial, program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.

Kegiatan perencanaan sosial budaya di bidang kesehatan terutama untuk mendukung Program Indonesia Sehat, peningkatan mutu ibu serta program-program yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan program prioritas yang tidak boleh diabaikan.

Disamping itu Kegiatan perencanaan sosial budaya juga tidak terlepas dari upaya peningkatan indeks pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

II.3.5.2 KEUANGAN

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karenanya, dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna. Kabupaten Bireuen sebagai salah satu Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berikut adalah tabel kondisi keuangan daerah Kabupaten Bireuen,

Tabel 2.100
Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen

N O	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA Terhadap APBD	7,30	1,21	3,00	3,11	3,6
3	Persentase Belanja Pendidikan (20persen)	33,34	29,31	23,08	24,46	24,34
4	Persentase Belanja Kesehatan (10persen)	15,43	16,78	17,75	20,76	16,98
5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	39,96: 60,04	34,60: 65,40	42,05: 57,95	34,40: 65,60	36,79: 63,21
6	Penetapan APBD	Nomor 23 Tahun 2014	Nomor 25 Tahun 2015	Nomor 4 Tahun 2016	Nomor 7 Tahun 2017	Nomor 5 Tahun 2018
7	Tanggal	31 Desember 2014	11 Desember 2015	23 Desember 2016	29 Desember 2017	21 Desember 2018

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020

Tabel diatas menunjukkan pengelolaan keuangan dan aset yang cukup baik. Hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2012 dan 2013 terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Bireuen masih katagori Wajar Dengan Pengecualian (WDP) akan tetapi pada tahun 2015 sampai dengan 2019 sudah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juga disertai penetapan APBD yang tepat waktu selama lima tahun.

II.3.5.3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Sumber daya manusia dalam pemerintahan yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di jajaran Pemerintah. Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri atas tiga macam, yaitu a. Penyiapan peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian; b. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji,

tunjangan, kesejahteraan dan pemberhentian PNS Daerah, baik yang menduduki jabatan struktural/fungsional atau tidak; c. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, dan menyampaikan setiap informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2019 berjumlah 8.208 orang dimana sekitar 66 persen adalah pegawai perempuan. Pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah tingkat S1/S2/S3 sebanyak 55,8 persen. Untuk unit kerja pegawai negeri sipil yang paling banyak adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mencapai 3.360 pegawai. Berikut adalah tabel tentang kondisi kepegawaian Kabupaten Bireuen dalam tinjauan pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2.101
Kondisi Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan
Di Kabupaten Bireuen Tahun 2015 -2019

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah ASN Kabupaten Bireuen	10.050	9.755	8.656	8.306	8.208
2	Rata-Rata Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	52,5 jam	209,6 jam	154 jam		
3	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan Formal	7.04	1.84	3.60		
4	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	27.30	27.56	10		
5	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	33 jabatan	33 jabatan	30 jabatan	30 jabatan	30 jabatan
6	Jumlah Pejabat Administrasi Pada Instansi Pemerintah	747 jabatan	754 jabatan	754 jabatan	754 jabatan	754 jabatan
6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	5.969	6.567	4.655	4.404	4.128

Sumber : BKPSDM, 2020

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Aparat Sipil Negara di Kabupaten Bireuen dari tahun 2015 sampai 2019 terjadi penurunan yaitu dari 10.050 orang menjadi 8.208 orang. Hal ini disebabkan karena banyak pegawai sudah memasuki masa pensiun terutama yang berprofesi sebagai guru.

Tujuan dari pendidikan dan pelatihan ini agar ASN menambah pengetahuan ASN, bekerja lebih efisien, lebih cepat berkembang, mengubah dan membentuk sikap ASN dan mengembangkan keahlian ASN sehingga pekerjaan dapat dengan cepat diselesaikan.

II.3.5.4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penelitian dan pengembangan adalah unsur penunjang didalam suatu daerah yang tugasnya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di seluruh bidang yang diperlukan. Penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Kabupaten Bireuen melekat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berperan dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengkoordinasian setiap penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan bidang pembangunan. Yang selanjutnya merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah serta mempublikasikan hasil penelitian melalui website pemerintah.

Untuk implementasi rencana kelitbangan dan pemanfaatan hasil kelitbangan mulai tahun 2020 sudah mulai dilaksanakan melalui pelaksanaan kebijakan inovasi yang diharuskan pemerintah pusat. Dalam hal inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Bireuen mengikuti kompetisi SINOVIK yang diprakarsai KEMENPAN RB, demikian juga dengan kompetisi yang dipertandingkan KEMENDAGRI, Kabupaten Bireuen mengikuti kompetisi New Normal Covid-19 dan INNOVATION GOVERNMENT AWARD dengan capaian peringkat 60 dari 415 Kabupaten se-Indonesia dengan total nilai 2.906 dan termasuk kategori Kabupaten Sangat Inovatif, untuk kompetisi KEMENRISTEK/BRIN Kabupaten Bireuen ikut Lomba Indeks Daya Saing Daerah dengan total indeks yang diperoleh 2,3092 kategori sedang serta untuk kompetisi PANGRIPTA NUSANTARA BAPPENAS Kabupaten Bireuen mendapat predikat terbaik 3 Provinsi Aceh dengan mendapatkan ANUGERAH MAJID IBRAHIM AWARD. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bireuen juga telah menginisiasi untuk penyusunan ROAD MAP SIDA, namun karena kondisi covid terpaksa penganggarannya difocusing dan InsyaAllah akan dilanjutkan pada tahun 2021.

II.3.5.5 PENGAWASAN

Rendahnya kualitas pembangunan secara menyeluruh disebabkan belum optimalnya fungsi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Fungsi perencanaan dan penganggaran

pembangunan harus berada dalam sistem yang terpadu (terintegrasi) sejak dari awal hingga implementasi hingga monitoring dan evaluasi. Demikian juga dengan pengawasan belum memiliki sistem yang kuat, terintegrasi dengan sistem dan siklus perencanaan serta penganggaran.

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban oleh pihak pemerintah itu sendiri. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Tugas pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu.

Penugasan pemeriksaan oleh BPK juga dilaksanakan di Kabupaten Bireuen sebagai daerah pemerintahan. Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan dalam efisiensi penggunaan keuangan negara, yang diperlihatkan dalam tabel berikut, dimana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan dalam jumlah temuan pemeriksaan keuangan, dari 23 kasus pada tahun 2014 menjadi 14 kasus pada tahun 2018, tetapi mengalami sedikit penambahan jumlah temuan kasus pada tahun 2019 menjadi 20 kasus.

Tabel 2.102
Kondisi Pengawasan Daerah di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Temuan BPK	23 Kasus	15 Kasus	13 Kasus	15 Kasus	14 Kasus	20 Kasus

Sumber : Inspektorat, 2017

Tabel 2.103
Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kabupaten Bireuen

Tahun	Kasus Selesai	Belum Selesai	Dalam Proses
2012	43 Kasus	0 Kasus	29 Kasus
2013	39 Kasus	4 Kasus	24 Kasus
2014	34 Kasus	6 Kasus	15 Kasus
2015	28 Kasus	3 Kasus	8 Kasus
2016	7 Kasus	5 Kasus	12 Kasus
2017	7 Kasus	6 Kasus	12 Kasus
2018	7 Kasus	7 Kasus	12 Kasus
2019	27 Kasus	2 Kasus	20 Kasus

Sumber : Inspektorat, 2019

Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan, untuk itu Inspektorat Kabupaten Bireuen merupakan tupoksi khusus yang sangat dibutuhkan kepala daerah guna meningkatkan pendayagunaan aparatur di kabupaten, apalagi dengan adanya dana desa yang menjadi permasalahan sendiri.

Kinerja yang diharapkan pada inspektorat sangat tergantung pada auditor yang dimiliki yaitu 17 orang, sementara jumlah yang dibutuhkan adalah 40 orang, maka Inspektorat Kabuapten Bireuen masih kekurangan 23 orang auditor.

II.3.5.6 SEKRETARIAT DEWAN

Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan program yang termaktub dalam Rencana Kerja Tahunan. Berikut adalah tabel kondisi data mengenai Sekretariat Dewan Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.104
Kondisi Rencana Kerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Bireuen

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Alat-Alat Kelengkapan DPRD provinsi/Kota/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
PERDA, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasi Program-Program Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan PERDA dan Anggaran Kedalam Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Setwan, 2020

II.4 Aspek Daya Saing Daerah

II.4.1 Penguatan Inovasi Daerah

II.4.1.1 Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Perwujudan penguatan sistem inovasi daerah dilakukan melalui penataan daya dukung unsur organisasi, kerangka regulasi dan internalisasi budaya inovasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan interaksi produktif multi pihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi, penyebaran praktik inovasi terbaik, serta hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan tantangan dan potensi unggulan di lingkup kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Nasional dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah atau SIDa. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Bireuen terus meningkatkan inovasi daerah yang bersifat pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama diantaranya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi Lainnya Sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Sistem Inovasi Daerah atau SIDa adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, dan masyarakat di daerah. Sedangkan inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut Kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Pengembangan daerah/kabupaten inovatif

merupakan suatu model pendekatan yang perlu didorong untuk mempercepat dan meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah.

II.4.1.2 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks daya saing bertujuan untuk mengukur pencapaian seluruh aktivitas di daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan ekosistem, potensi dan berbagai hasil iptek dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD menjadi pendorong kepada seluruh stakeholder terutama para pelaku inovasi (seluruh lembaga daerah, dunia usaha, dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam menciptakan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam rangka meningkatkan tingkat daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan sesuai Surat Gubernur Aceh Nomor 590/15766 Tanggal 20 September 2019 tentang Tindaklanjut Pengisian Indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2020.

IDSD menjadi dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi, dan monitoring kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. IDSD juga menjadi alat dalam harmonisasi berbagai kebijakan dan program pembangunan baik pada tingkat nasional maupun daerah. Kabupaten Bireuen pada tahun 2020, telah melakukan penginputan data untuk menentukan nilai dari indeks daya saing daerah, dan hasil yang keluar melalui aplikasi IDSD adalah sebesar 2.3092, masuk dalam daerah dengan daya saing kategori sedang dimana kategori sedang berada pada indeks 1,1–2,5. Tingkat daya saing (*competitiveness*) menjadi salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun akan semakin tinggi pula.

II.4.1.3 Inovation Government Award (IGA)

Inovation Governmen award (IGA) atau penghargaan inovasi daerah merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri sebagai wujud apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berinovasi. Tujuan dari IGA adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah. Memenuhi maksud Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 002.6/2866/S.J tanggal 14 April 2020 tentang Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan

Innovative Government Award (IGA) Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bireuen berinisiatif mengikuti lomba tersebut.

Indeks inovasi salah satunya berfungsi sebagai himpunan data inovasi daerah, sebagai wadah pelaporan inovasi daerah, sebagai instrumen pengukuran inovasi daerah, dan sebagai sarana informasi dan pembelajaran. Keberhasilan Kabupaten Bireuen dalam mengikuti Lomba Inovasi Daerah (IGA) tahun 2020, memperoleh indeks penilaian hasil verifikasi 2.958 dari skor indeks rata-rata kabupaten 7.394 dengan total 112 inovasi, 32 inovasi baru/inisiatif, 6 uji coba pelaksanaan, dan 74 penerapan dan berada pada rangking 51. Pemerintah Daerah yang mengikuti Lomba Inovasi Daerah ini sebanyak 415 Kabupaten dan yang dapat dinilai hanya 360 kabupaten, sementara 55 kabupaten lainnya tidak dapat dinilai. Hasil verifikasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, dari 74 inovasi inovasi Kabupaten Bireuen yang bersifat penerapan, 27 diantaranya mendapatkan *barcode* untuk penilaian IGA dengan total Indeks Inovasi yang diperoleh adalah 2.906 sebagai Kabupaten sangat inovatif dan mendapat penghargaan dari Kemendagri berupa Dana Insentif Daerah.

Tabel 2.105
Daftar Inovasi Kabupaten Bireuen

NO	INOVASI	SKPK	NILAI KEMATANGAN	TAHAPAN INOVASI
1	Pangkat Paperless	BKPSDM	76	UJI COBA
2	LAJANG DUDUK (LAYANAN BERJENJANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)	DISDUKCAPIL	161	PENERAPAN
3	Bantuan Modal Usaha Kecil No Olah No Riba	KEC. KOTA JUANG/ MASYARAKAT	72	UJI COBA
4	BADATA (BAYI LAHIR DAPAT AKTA)	DISDUKCAPIL	84	PENERAPAN
5	BEURATA "Bekerja untuk Pembaharuan Data"	BAPPEDA	156	PENERAPAN
6	SAREENA JAYA	KEC. PEULIMBANG/ MASYARAKAT	93	PENERAPAN
7	JINGKI IE (HYDROLIC RUM PUMP)	DPMGPKB/ MAYARAKAT	137	PENERAPAN
8	Mé Bu Gatéing	DINKES	145	PENERAPAN
9	JARiNG BABI DAN INOVASI BAN BEKAS	DPMGPKB/ MASYARAKAT	123	PENERAPAN
10	Gerakan Subuh Mengaji	DINAS SYARI'AT ISLAM	76	UJI COBA
11	KIPER PERU (KITA PERANGI PENYAKIT PARU)	DINKES	102	PENERAPAN
12	SAKIPA (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akurat)	BAG. ORGANISASI	80	UJI COBA

13	Itsbat Nikah	DINAS SYARI'AT ISLAM	75	PENERAPAN
14	BATA RINGAN (HEBEL)	KEC. JULI/ MASYARAKAT	79	UJI COBA
15	Weu To Weu Ie Be Service (Pelayanan dari kandang ke kandang Inseminator Bireuen)	DISTERNAKWAN	142	PENERAPAN
16	Drone Penyemprot Hama Padi	DISTANBUN	18	UJI COBA
17	RUANG TUNGGU dengan PUSTAKA MINI " RUNGPI "	DINKES	68	UJI COBA
18	Layanan "POSIKANDU" Pos Kesehatan Ikan Terpadu Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan	DISPANGKEL	129	PENERAPAN
19	PENGAWALAN IBU HAMIL RISIKO TINGGI BERSAMA LINTAS SEKTOR MELALUI KASTA(Kamoe Sajan Gata)	DINKES	62	PENERAPAN
20	Klinik Gampong	KEC. SP. MAMPLAM	141	UJI COBA
21	GAMPRADA "Percontohan Gampong Peradilan Adat"	SEKRETARIAT MAA	63	PENERAPAN
22	KLINIK KONSULTASI PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG (KLINASI PENGKEUPONG)	INSPEKTORAT	144	UJI COBA
23	Electronic Scrapbook (Kliping Digital)	BAG.PROTKOMPIM	54	PENERAPAN
24	PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)	DISTANAH	132	UJI COBA
25	TEH DAUN KELOR "CHIE JEBS"	KEC. PSG. SIBLAH KRUENG/ MASYARAKAT	75	PENERAPAN
26	SABUN CAIR LONGRAH	DPMGPKB/ MASYARAKAT	102	PENERAPAN
27	SEJUMPET BERAS POSYANDU TERINTEGRASI BUNGONG JEUMPA	KEC. PANDRAH	127	PENERAPAN

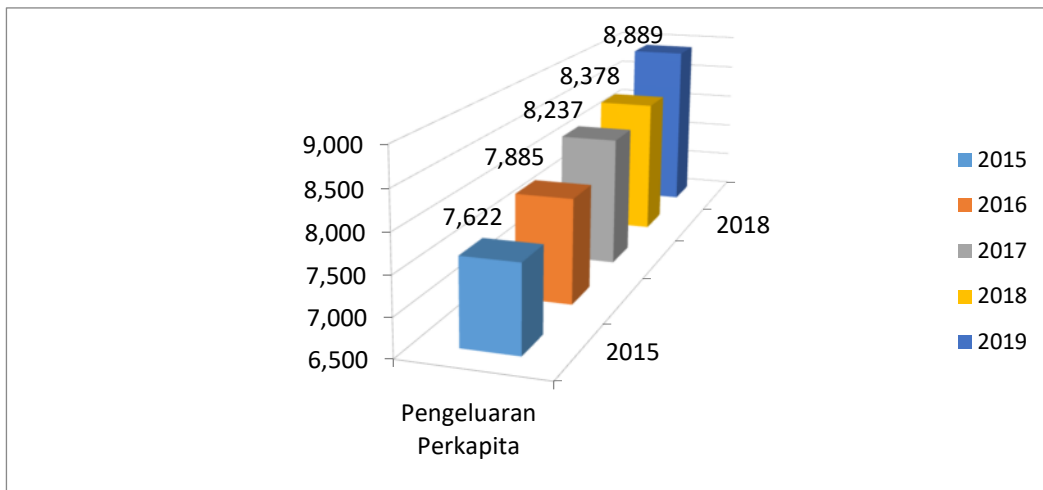
II.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dan nilai tukar petani.

II.4.2.1 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (*Purchasing Power Parity-PPP*) menunjukkan kemampuan (daya beli) masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk konsumsi barang maupun jasa. Perubahan kondisi perekonomian akan secara nyata ikut merubah pola konsumsi masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa komponen ini cukup sensitif. Selama periode tahun 2015-2019, pengeluaran perkapita penduduk

Kabupaten Bireuen setiap tahunnya mengalami kenaikan. Tahun 2015, pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Bireuen terhitung sebesar 7.622 juta rupiah, sementara tahun 2019 meningkat menjadi 8.889 juta rupiah. Grafik 2.36 menampilkan perubahan komponen pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Bireuen selama tahun 2015-2019.



Sumber : IPM Aceh, 2019

Grafik 2.36 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Penduduk Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 (Ribu Rupiah)

II.4.2.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Bireuen masih belum terdata, artinya masih menggunakan nilai tukar petani provinsi Aceh. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di beberapa daerah di Provinsi Aceh mengalami peningkatan 0.16 persen pada Desember 2019, hal ini dipengaruhi oleh besarnya penurunan indeks harga yang dibayar atau pengeluaran petani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan proses produksi pertanian.

II.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Upaya pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan kapitalisasi modal cukup besar agar dapat menghasilkan kondisi yang baik untuk tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penanaman modal dalam bentuk investasi sangat diperlukan dalam rangka pendayagunaan potensi sumber daya yang ada, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja di daerah ini. Untuk meningkatkan peluang-peluang investasi diperlukan hal-hal sebagai berikut seperti terjaminnya iklim usaha yang kondusif, tersedianya infrastruktur, terutama sarana perhubungan baik darat, laut dan udara yang memadai dan juga adanya peran lembaga keuangan yang baik.

II.4.3.1 Angka Kriminal

Angka kriminalitas mempengaruhi investasi yang ada di suatu wilayah atau daerah. Semakin rendah angka kriminalitas pada suatu daerah maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satunya ditunjukkan adanya gangguan keamanan baik oleh masyarakat maupun oleh sekelompok orang. Selama ini kondisi stabilitas keamanan cukup baik, meskipun demikian data polres Bireuen tahun 2019 masih mencatat laporan khusus pidana. Penanganan tindak kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kondusivitas daerah, mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Berikut perkembangan jumlah tindak pidana menurut kepolisian sektor di Kabupaten Bireuen serta persentase penyelesaiannya.

Tabel 2.106
Perkembangan Penanganan Jumlah Tindak Pidana
di Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Tindak Kriminal	
		Yang di Laporkan (kasus)	Persentase penyelesaian (persen)
1	2015	498	83
2	2016	525	32
3	2017	525	64
4	2018	328	65
5	2019	262	72

Sumber : Bireuen Dalam Angka, 2020

Tabel di atas kiranya dapat memberikan gambaran angka kriminalitas di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan data yang ada terlihat angka kriminal di Kabupaten Bireuen selama kurun waktu antara tahun 2015–2019 terjadi penurunan hampir 50 persen, namun persentase penanganannya masih berfluktuatif tergantung kondisi perkembangan kasus.

II.4.3.2 Kemudahan Perizinan

Investasi yang akan masuk kesatu wilayah atau daerah tergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan, pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus menerus dan dipengaruhi oleh beberapa sektor, salah satunya kemudahan perizinan. Pelayanan perizinan di Kabupaten Bireuen dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bireuen meliputi semua izin berusaha/investasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 atau sesuai yang ada dalam Sistem OSS, serta fasilitasi

pelayanan diluar OSS seperti fasilitasi izin pertambangan, izin trayek, izin penyelenggaraan reklame, izin penyelenggaraan satuan pendidikan usia dini, izin alih fungsi lahan, dan lain-lain.

Proses dan Prosedur Perizinan dapat meliputi proses prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. disamping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda beda tergantung jenis izin. adapun jenis izin di Kabupaten Bireuen sejumlah 31 jenis. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perizinan dengan syarat apabila persyaratan telah lengkap, mulai 3 s.d 15 hari kerja. Selama masa pandemi Covid-19, beberapa upaya telah dilakukan oleh DPMPSTSP dalam upaya memudahkan pengurusan perizinan guna mengurangi resiko terpapar covid-19 dengan menggunakan metode jemput bola, dimana petugas akan mendatangi langsung ke rumah masyarakat, layanan online dan berbagai kemudahan layanan lainnya yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan iklim berinvestasi di Kabupaten Bireuen. Adapun fasilitasi pelayanan perizinan di Kabupaten Bireuen diantaranya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.107
Jenis Fasilitasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bireuen

No.	Jenis Fasilitasi Pelayanan Perizinan
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2	Izin Gangguan (HO)
3	Izin Tempat Usaha
4	Izin Usaha Kontruksi (IUJK)
5	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7	Tanda Daftar Industri
8	Izin Reklame
9	Izin trayek
10	Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor
11	Izin Usaha Kepariwisata
12	Izin Usaha peternakan
13	Izin Usaha pertanian
14	Izin Usaha Pertambangan Daerah
15	Izin Usaha Perbengkelan
16	Izin Usaha Sarang burung Walet
17	Izin Pemindahan Limbah
18	Izin Penangkapan Ikan
19	Izin Usaha Perikanan
20	Izin Pas Kapal Di Bawah 7 GT
21	Izin Bidang Penanaman Modal
22	Izin Bidang Kesehatan
23	Izin Usaha Industri
24	Izin Lokasi

25	Izin Penimbunan
26	Izin Usaha Perkebunan
27	Izin Usaha Operasional Pengilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras
28	Izin Kapal Pengangkut Ikan
29	Izin Pengelolaan air
30	Izin Operasi Usaha peyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Pribadi

Sumber : DPMPTSP Kab. Bireuen, 2020

II.4.3.3 Investasi Penanaman Modal Daerah

Salah satu tujuan melakukan investasi, baik investasi PMDN (Investasi Domestik) maupun PMA (Investasi Asing) adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari penyelenggaraan investasi baik investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun PMA (Penanaman Modal Asing) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga akan pemeratakan dan meningkatkan kesejahteraan nasional secara kontinu yang disebut sebagai pembangunan ekonomi. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan.

Perkembangan Investasi PMA dan PMDN, di Kabupaten Bireuen Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.108

Perkembangan Investasi PMDN Kabupaten Bireuen Tahun 2014-2019

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Tahun	Total Investasi	Penyerapan TK		
					TKI		TKA
					L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PT. BLANG KETUMBA	Perkebunan	2014	59,064,633,424		15 7	41 3
2	PT. AISHY AND SONS	Kontraktor, Leveransir	2014	5,000,000,000			4
Jumlah				64,064,633,424		15 7	41 7
1	PT. ACEH PARTNER INTERNATIONAL (APIN)	Industri pengolahan lainnya Ytdl (barang Coconut Matting & Coconut Peat)	2015	400,000,000	11		
2	PT. ACEH PARTNER INTERNATIONAL (APIN)	Industri barang lainnya dari kayu : Industri barang dari Gabus dan barang anyaman dari jerami, Rotan, Bambu dan sejenisnya (Jenis Barang Wood Chip)	2015	300,000,000	7		

3	PT. ACEH PARTNER INTERNATIONAL (APIN)	Industri barang lainnya dari kayu : Industri barang dari Gabus dan barang anyaman dari jerami, Rotan, Bambu dan sejenisnya (Jenis Barang Wood Pellet dan Biomas Pellet)	2015	100,000,000	3		
4	PT. SYAUKATH SEJAHTERA	Perkebunan Kelapa Sawit	2015	72,065,713,660	1,234	26	
5	PT. SYAUKATH SEJAHTERA	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	2015	295,275,611,748	124	7	
6	PT. BLANG KETUMBA	Perkebunan	2015	68,753,847,174	413	15 7	
7	PT. ACEH PARTNER INTERNATIONAL (APIN)	Industri barang bangunan dari kayu : (Jenis Barang Moulding dan Komponen Bahan Bangunan)	2015	100,000,000	3		
8	PT. ACEH PARTNER INTERNATIONAL (APIN)	Industri Furniture : (Jenis Barang Wood Furniture)	2015	100,000,000	3		
Jumlah				437,095,172,582	1,798	19 0	0
1	PT. KURNIA PURNAMATAMA	Jasa Ketenagalistrikan	2016	40,450,000,000	10	5	0
2	PT. ACEH PARTNER INTERNATIONAL (APIN)	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl: Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	2016	400,000,000	11	0	0
3	PT. ACEH PARTNER INTERNATIONAL (APIN)	Industri barang lainnya dari kayu : Industri barang dari Gabus dan barang anyaman dari jerami, Rotan, Bambu dan sejenisnya (Jenis Barang Wood Chip)	2016	1,000,000,000	7	0	0
4	PT. ACEH PARTNER INTERNATIONAL (APIN)	Industri barang lainnya dari kayu : Industri barang dari Gabus dan barang anyaman dari jerami, Rotan, Bambu dan sejenisnya (Jenis Barang Wood Chip)	2016	100,000,000	3	0	0
5	PT. ACEH PARTNER INTERNATIONAL (APIN)	Industri Barang Bangunan Dari Kayu: Industri Barang Bangunan dari Kayu	2016	100,000,000	3	0	0
6	PT. ACEH PARTNER INTERNATIONAL (APIN)	Industri Furnitur: Industri Furnitur	2016	100,000,000	3	0	0
7	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I	Ketenagalistrikan	Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun (2016)	1,804,411,511,483	842	0	32
8	PT. SYAUKATH SEJAHTERA	Perkebunan Kelapa Sawit	2016	140,555,204,562	105	23	0
9	PT. SYAUKATH SEJAHTERA	Pabrik pengolahan kelapa sawit	2016	295,275,611,748	130	8	0
Jumlah				21,634,940,535,791	1,114	36	32
1	PT. P. BAHRUN & SONS	Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet	2017	864,000,000	62		

2	PT. ACEH PARTNER INTERNATIONAL (APIN)	Industri Pengolahan lainnya jenis Barang Coconut Matting & Coconut Peat	2017	400,000,000	11		
3	PT. ACEH PARTNER INTERNATIONAL (APIN)	Industri Barang lainnya dari kayu : Industri barang dari Gabus dan barang anyaman dari jerami, Rotan, Bambu dan sejenisnya (Jenis Barang Wood Chip)	2017	300,000,000	7		
4	PT. ACEH PARTNER INTERNATIONAL (APIN)	Industri Barang dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan sejenisnya (Jenis Barang Wood Pellet & Biomass Pellet)	2017	100,000,000	3		
5	PT. ACEH PARTNER INTERNATIONAL (APIN)	Industri Barang Bangunan dari Kayu (Jenis Barang Moulding & Komponen bahan Bangunan)	2017	100,000,000	3		
6	PT. ACEH PARTNER INTERNATIONAL (APIN)	Industri Furniture (Jenis Barang Wood Furniture)	2017	100,000,000	3		
Jumlah				1,864,000,000	89	-	-
1	PT. BEUDOH MAKMUE ACEH	Perdagangan Besar Berbagai macam Barang	2019				
2	PT. P. BAHRUN & SONS	Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet	2019	818,000,000	25		
3	PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGKIT SUMATERA I	Ketenagalistrikan (Pembangkit Tenaga Listrik)	2019	2,878,696,462,874			
4	PT. SYAUKATH SEJAHTERA	Perkebunan dan Industri Pengolahan	2019	181,206,712,456	134	8	
5	PT. BLANG KETUMBA	Industri Minyak MAKAN Kelapa Sawit	2019				
6	CV. HIJRAH MINA FARM	Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor (Perdagangan Besar Hasil Perikanan)	2019				
7	PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	Pemasangan Bangunan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api (Konstruksi Pembangunan Jalan Tol)	2019				
Jumlah				3,060,721,175,330	159	8	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

Tabel 2.109
Perkembangan PMA Kabupaten Bireuen Tahun 2014 - 2019

No.	Nama Perusahaan	Negara Asal	Bidang Usaha	Tahun	Total Investasi (US\$)	Penyerapan TK		
						TKI		TKA
						L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PT. POJU GRINCOM	Korea Selatan	Perdagangan besar	2015	34,531.00	5		0
Jumlah					34,531.00	5	0	0
1	PT. GANESHA INDOJAYA	Malaysia	Pertambangan mineral logam (pasir besi)	2016	0	0	0	0
Jumlah					0	0	0	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh

Nilai investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) tidak tetap perkembangannya. Dapat kita ketahui realisasi pada tahun 2014 PMDN Kabupaten Bireuen yang berasal dari industri besar adalah sebesar Rp. 64,064,633,424, mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 14,66 persen pada tahun 2015 yaitu Rp. 437,095,172,582. Investasi PMDN untuk tahun-tahun berikutnya terus mengalami fluktuasi yang sangat mempengaruhi perekonomian terutama tahun 2018 dimana tidak ada investasi yang terdata. Keadaan investasi tahun 2016 terdata sebesar Rp. 21,634,940,535,791 meningkat sebesar 2,02 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan yang sangat drastis yaitu 11,61 persen dimana nilai investasinya hanya Rp. 1,864,000,000. Peningkatan PMDN tahun 2019 hanya 0,06 persen dibandingkan tahun 2017, dimana pada tahun 2018 tidak ada data yang terealisasi dengan capaian realisasi Rp. 3,060,721,175,330.

Investasi Pananaman Modal Asing masih tidak berkembang di Kabupaten Bireuen, dapat dilihat pada data hasil investasi dari tahun 2014 – 2019. Kondisi investasi hanya terdata pada tahun 2015, dimana hanya investasi yang terjadi hanya 34.551 US\$, sedangkan tahun selanjutnya hanya terdapat rencana investasi tanpa ada realisasi.

Agar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan di daerah, sektor pertanian masih berperan besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bireuen. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu daerah adalah investasi selain beberapa faktor pendukung lainnya ekonomi antara lain: tanah dan kekayaan alam lainnya; jumlah dan mutu dari penduduk

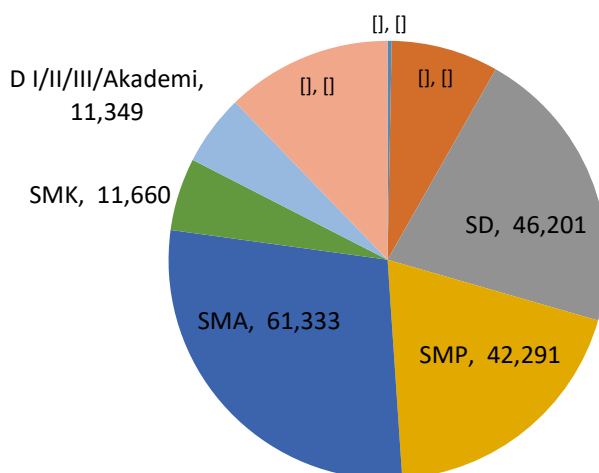
dan tenaga kerja; barang-barang modal dan tingkat teknologi; sistem sosial dan sikap masyarakat; luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Dengan adanya penanaman modal asing dan dalam negeri dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran, selain itu dengan adanya investasi akan mendapatkan ketrampilan baru bagi daerah yang sedang berkembang. Penanaman modal asing juga merupakan sumber tabungan karena dengan adanya investor asing yang menanamkan modalnya maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

II.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: kuantitas dan kualitas. Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas akan menjadi beban bagi pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas Sumber Daya Manusia adalah mutu Sumber Daya Manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

1. Angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan



Sumber : Bireuen Dalam Angka, 2020

Grafik 2.37 Jumlah Penduduk umur 15 Tahun keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2019

Dari data diatas terlihat bahwa sebagian besar angkatan kerja di Kabupaten Bireuen merupakan tamatan SMA, kemudian kelompok besar kedua adalah tamatan SD, berikutnya adalah tamatan SMP dan kemudian Tamatan perguruan tinggi, serta yang terakhir merupaka tamatan DI/II/III/Diploma.

2. Rasio Ketergantungan

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebanyak 471.635, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 231.005 jiwa dan perempuan sebanyak 240.630 jiwa. Penduduk dengan umur produktif di Kabupaten Bireuen yaitu sebesar 311.409. sedangkan umur yang tidak produktif yaitu pada usia 0-14 th sebesar 136.026 jiwa dan pada usia 65+ sebesar 24.200 jiwa. Apabila dibandingkan antara penduduk usia produktif dengan usia tidak produktif maka diperoleh angka ketergantungan sebesar 51,45 persen artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung 51 orang usia tidak produktif.

II.5 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah

II.5.1 Capaian Target Kinerja SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah suatu dokumen yang bertujuan untuk memberikan acuan untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pelayanan. Selain itu Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi

operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan dan kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini diharapkan dengan adanya dokumen SPM maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Setelah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan dengan baik maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian dalam pemberian layanan. Adapun urusan yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal terdiri dari beberapa aspek yaitu:

A. Pendidikan

Jika dievaluasi dari pencapaian terhadap standar pelayanan minimal pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Menurut Permendiknas No. 15 tahun 2010 terdapat 27 standar/Indikator yang menjadi patokan pelayanan yang harus dilaksanakan dalam memberi pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Dimana dari 27 indikator tersebut yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pencapaian SPM adalah sebanyak 14 indikator dan sisanya 13 indikator menjadi tanggungjawab satuan pendidikan masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Penetapan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu, dalam merencanakan percepatan penerapan pelayanan minimal pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen selalu berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut. Baik dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan program pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen.

Dalam melakukan pengukuran pencapaian SPM tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen menggunakan aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar untuk penentuan SPM. Berbagai data dasar yang terdapat ditingkat

satuan pendidikan diinput ke dalam aplikasi ini. Setelah data-data yang terkait indikator SPM tersebut diinput, diolah serta diinterpretasikan (ditafsirkan), maka akan dapat diperoleh hasil tingkat pencapaian SPM, khususnya yang terkait dengan 14 indikator yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan 13 indikator yang menjadi tanggung jawab tingkat satuan Pendidikan.

Tabel 2.110
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar
Kabupaten Bireuen Tahun 2019

Indikator Pencapaian SPM		Realisasi	Target	Penjelasan/Keterangan
IP - 1.1 Kab/kota	Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 KM	100 persen	100 persen	Tidak ada lagi jarak SD di Kabupaten Bireuen Yang melebihi 3 km untuk Pemukiman permanen
IP - 1.2 Kab/kota	Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 KM	100 persen	100 persen	Tidak ada lagi jarak SMP di Kabupaten Bireuen Yang melebihi 6 km untuk Pemukiman permanen
IP - 2.1 Kab/Kota	Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajar (rombel) nya tidak melebihi 32 orang	80 persen	85 persen	1. Membludaknya peminat pada sekolah-sekolah favorit 2. Sekolah tidak membatasi penerimaan siswa per kelas 3. Tidak ada lahan untuk membangun RKB sehingga masih terdapat sekolah yang menggunakan sistem double shift
IP - 2.2 Kab/Kota	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	87,44 persen	100 persen	1. Penyediaan mobile tiap tahun tidak mencukupi kebutuhan mobiler yang rusak 2. kurangnya perawatan mobiler oleh sekolah
IP - 2.3 Kab/Kota	Jumlah SMP/MTs yang semua rombongan belajar (rombel) nya tidak melebihi 36 orang	100 persen	90 persen	1. Tingginya peminat pada sekolah-sekolah favorit 2. Sekolah tidak membatasi jumlah siswa yang diterima sesuai dengan jumlah kelas yang tersedia 3. ketersediaan dana untuk membangun RKB tidak sebanding dengan kebutuhan
IP - 2.4 Kab/Kota	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel	82 persen	85 persen	1. Penyediaan mobile tiap tahun tidak mencukupi kebutuhan mobiler yang rusak 2. Dana BOS tidak memungkinkan di gunakan banyak untuk pengadaan mobile siswa
IP - 3.1 Kab/Kota	Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik	69 persen	70 persen	Terbatasnya anggaran untuk membangun Lab. IPA tiap tahun
IP - 3.2 Kab/Kota	Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	69 persen	80 persen	1. Terbatasnya dana untuk penyediaan alat praktek IPA 2. Kerusakan alat LAB cukup tinggi dibandingkan pengadaannya
IP - 4.1 Kab/Kota	Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang	70 persen	81 persen	1. Terbatasnya sumber mata anggaran

	guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya			
IP - 4.2 Kab/Kota	Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, dan staf kependidikan lainnya	74,16 persen	75 persen	Terbatasnya sumber mata anggaran, ada 23 SMP yang belum memiliki kantor guru
IP - 4.3 Kab/Kota	Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/madrasah yang terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja/kursi	18,67 persen	70 persen	Terbatasnya sumber pendanaan untuk membangun ruang kepala sekolah
IP - 5.1 Kab/Kota	Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	100 persen	100 persen	-
IP - 5.2 Kab/Kota	Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus]	99,5 7perse n	75 persen	Tingkat sebaran dan domisili guru yang tidak merata, umumnya guru berdomisili di kota kabupaten
IP - 6 Kab/Kota	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran]	90 persen	70 persen	1. Untuk bebarapa bidang studi jumlah guru melebihi kebutuhan, dan pada bidang studi lain kekurangan guru 2. tingkat sebaran guru Mapel pun tidak merata
IP-7.1 Kab/Kota	Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV	100 persen	100 persen	1. Faktor usia menjadi hambatan guru untuk melanjutkan pendidikan 2. Jarak tempat tinggal dengan Universitas atau perguruan tinggi yang sangat jauh
IP-7.2 Kab/Kota	Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	96,99 persen	85 persen	Tingkat sebaran guru yang tidak merata menyebabkan jumlah guru yang sudah sertifikasi juga tidak merata untuk guru kelas menumpuk di pusat kota
IP-8.1 Kab/Kota	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV \geq 70persen [untuk daerah khusus \geq 40persen]	93,90 persen	95 persen	1. Jangkauan tempat tinggal dengan unit kerja yang jauh 2. Faktor usia menjadi hambatan guru untuk melanjutkan pendidikan
IP-8.2 Kab/Kota a	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik \geq 35persen [untuk daerah khusus \geq 20persen]	95,06 persen	97 persen	1. Faktor tempat tinggal menyebabkan tingkat sebaran guru yang tidak merata. 2. Guru tidak mau di pindahkan jauh dari tempat tinggal
IP-9 Kab/Kota a	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing 1 (satu) orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	95,06 persen	78 persen	Jumlah Guru Bidangstudi yang sudah ada tidak sesuai dengan kebutuhan, ada mapel yang kelebihan guru dan ada mapel kekurangan guru.
IP-10 Kab/Kota a	Jumlah Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.	99,57 persen	100 persen	1. Banyak guru yang sudah S1 tapi belum cukup pangkat diangkat jadi kepala sekolah 2. Masih ada Kepala Sekolah yang belum memiliki sertifikat NUKS
IP-11 Kab/Kota	Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik	93,89 persen	92 persen	Sebagian guru tidak mau dicalonkan menjadi calon kepala sekolah

a	S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.			
IP-12 Kab/Kota a	Jumlah pengawas sekolah/madrasah yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik.	97,22 persen	95 persen	1. Beberapa kecamatan tidak ada cadangan personil ijazah S1 yang akan dijadikan pengawas SD 2. Banyak kepala sekolah tidak mau diangkat menjadi Pengawas
IP-13 Kab/Kota a	Bila kabupaten/kota memiliki rencana dan telah melaksanakan kegiatan untuk membantu sekolah mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	100 persen	100 persen	Belum semua sekolah mampu menyusun kurikulum sekolahnya dengan baik. Pemerintah kabupaten sangat kosen dalam membina kurikulum sekolah sesuai dengan tuntutan peraturan
IP-14.1 Kab/Kota a	Jumlah SD atau MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	79 persen	86 persen	1. Kurang sarana menyebabkan mobilitas pengawas rendah 2. tingkat usia pengawas yang menjelang pensiun (sakit) yang menyebabkan kunjungan sekolah tidak sesuai target
IP-14.2 Kab/Kota a	Jumlah SMP atau MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	75 persen	75 persen	1. Kurang sarana menyebabkan mobilitas pengawas rendah 2. Jarak tempat tinggal dengan sekolah binaan ikut mempengaruhi tingkat kunjungan sekolah.

B. Kesehatan

Pelayanan minimal bidang kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berhak diterima setiap warga masyarakat di Kabupaten Bireuen secara minimal. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk warganya serta merupakan tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan di Kabupaten Bireuen. SPM bidang kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan esensial dapat dipenuhi, maka target SPM adalah 100 persen setiap tahunnya.

Kabupaten Bireuen tahun 2019 memiliki 20 unit Puskesmas yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama, upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya di wilayah Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.111
Target Pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran / Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Capaian Kabupaten		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Yankes Ibu Hamil	1. Menetapkan sasaran ibu hamil sesuai Proyeksi data BPS 2. Memberikan pelayanan kesehatan kpd ibu hamil sesuai standar kuantitas kunjungan K4 3. Memberikan pelayanan standar Kualitas pelayanan antenatal dengan 10 T	100 persen	10.017	8.377	84 persen
2.	Yankes Bulin	1. Menetapkan sasaran ibu bersalin sesuai proyeksi data BPS 2. Memberikan Pelayanan persalinan normal dan persalinan komplikasi sesuai standar	100 persen	9.561	8.573	90 persen
3.	Yankes Bayi baru Lahir	1. Menetapkan sasaran bayi baru lahir sesuai proyeksi data BPS. 2. Memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kuantitas melalui kegiatan KN Lengkap 3. Memberikan pelayanan Kualitas melalui Neonatus esensial saat lahir dan setelah lahir	100 persen	9.106	7.687	84,4 persen
4.	Yankes Balita	1. Menetapkan sasaran balita dalam satu tahun sesuai proyeksi data BPS 2. Memberikan Palayanan Kesehatan balita sehat melalui pemantauan Tumbuh kembang 3. Pelayanan Kesehatan Balita sakit melalui pendekatan MTBS	100 persen	55.679	24.362	43,75 persen
5.	Yankes pada Usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 dan 7)	1. Menetapkan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar (7 s/d 15 Tahun) menggunakan data proyeksi BPS selama satu tahun 2. Melakukan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar serta tindak lanjut	100 persen	22.854	21.167	92,62 persen
6.	Yankes pada usia Produktif (15 -39) tahun	1. Menetapkan sasaran usia produktif usia 15-59 tahun dalam satu tahun sesuai data proyeksi data BPS 2. Memberikan edukasi dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular 3. Melakukan tindak lanjut hasil skrining kesehatan	100 persen	301.737	102.272	34 persen
7.	Yankes pada usia lanjut (60 tahun keatas)	1. Menetapkan sasaran usia lanjut (usia 60 tahun keatas) dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS 2. Pelayanan edukasi pada usila 3. Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular minimal 1 kali 4. Tindak lanjut hasil skrining berupa rujukan dan penyuluhan kes.	100 persen	37.520	36.674	98 persen
8.	Pelayanan kesehatan	1. Menetapkan sasaran penderita hipertensi dengan menggunakan	100 persen	86.493	23.592	27,3 persen

	penderita Hipertensi	data riskesdas terbaru yang ditetapkan oleh Menkes 2. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar dengan pengukuran tekanan darah, edukasi perubahan gaya hidup. 3. Rujukan penderita jika diperlukan				
9..	Yankes Penderita Diabetes Melitus	1. Menetapkan sasaran penderita Diabetes melitus dengan menggunakan data riskesdas terbaru yang ditetapkan oleh Menkes 2. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus meliputi pengukuran gula darah, edukasi dan terapi farmakologi. 3. Rujukan penderita jika diperlukan.	100 persen	11.809	11.773	100 persen
10.	Yankes orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	1. Menetapkan sasaran penderita ODGJ dengan menggunakan data riskesdas terbaru yang ditetapkan oleh Menkes 2. Pelayanan Kesehatan kepada ODGJ berat bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi sesuai standar 3. Melakukan rujukan penderita jika diperlukan	100 persen	2.139	2.087	98 persen
11.	Yankes Orang dengan Tuberkulosis (TB)	1. Menetapkan sasaran orang terduga TBC dengan menggunakan data riskesdas terbaru yang ditetapkan oleh Menkes 2. Pemeriksaan klinis terduga TBC minimal 1 kali dalam 1 tahun 3. Pemeriksaan penunjang bakteriologis/ radiologis 4. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan 5. Rujukan jika diperlukan	100 persen	7.546	4.106	54 persen
12.	Yankes orang dengan risiko terinfeksi HIV	1. Menetapkan sasaran HIV oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penaja seks, LSL, transgender, WBP dan ibu hamil) 2. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan 3. Skrining HIV minimal 1 kali dalam setahun 4. Rujukan jika diperlukan	100 persen	16.723	5.427	54

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

terhadap target nasional dan mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi SKPK penanggung jawab SPM.

Tabel 2.112
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sub Bidang	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Standar Pelayanan Minimal			Target Nasional	
				Indikator	Tahun Pencapaian (2019)		Nilai	Thn. Pencapaian
					Target	Realisasi		
I	Sumber Daya Air	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	1 Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	75 persen	70 persen	100 persen	2019
				2 Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	90 persen	80 persen	70 persen	2019
II	Jalan	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan jalan Kab/Kota	3 persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang	45,98 persen	46,19 persen	60 persen	2019
		Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Tersedianya konektivitas wilayah Kab/ Kota	4 persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/kota	100 persen	#####	60 persen	2019
III	Cipta Karya	Penyediaan air minum	Meningkatnya kualitas layanan air minum permukiman	5 persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	85 persen	81,00 persen	81,77 persen	2019
		Penyediaan sanitasi	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan	6 persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	85 persen	83,40 persen	60 persen	2019
				7 persentase pengurangan sampah di perkotaan			20 persen	2019
				8 persentase pengangkutan sampah			70 persen	2019
				9 persentase pengoperasian TPA			70 persen	2019
				10 persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	0 persen	0 persen	50 persen	2019
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung	11 persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan			60 persen	2019

		Penangan Pemukiman Kumuh Perkotaan	Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	12	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan			10 persen	2019
IV	Jasa Konstruksi	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	13	persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)			60 persen	2019
		Izin Usaha Jasa konstruksi	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi	14	persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap			5 persen	2019
V	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi Penataan Ruang	15	Persentase tersediannya Informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten / kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100 persen	#####	100 persen	2019
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Meningkatnya ketersediaan RTH	16	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20persen dari luas wilayah kota / Kawasan perkotaan			50 persen	2019

D. Sosial

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Tabel 2.113
 Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
 Urusan Pemerintahan Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian	
			2018	2019
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,37	72,27
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,88	2,14
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,25	5
4	Persentase Penduduk Miskin	Persen	14,31	13,56
5	Prevalensi Stunting	Persen	41	NA
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,96	67,1
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,52	3,88
8	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Ribu/Tahun	8.378	8.889
9	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,81	14,82
10	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,92	71,16
11	Angka Melek Huruf	Persen	99,43	98,89
12	APM SD	APM	96,27	97,40
13	APM SMP	APM	83,37	82,92
14	APM SMA	APM	72,82	72,84
15	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	9,17	9,27
16	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	26,29	27,47
17	Indeks Gini Ratio	Indeks	0,305	0,295
18	Tingkat Inflasi	Persen	2,05	1,20

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah merupakan suatu aspek penting untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Gambaran tentang pengelolaan keuangan Kabupaten Bireuen dalam bentuk laporan, penyajian data dan informasi pertanggungjawaban bertujuan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan dimasa lalu, serta bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan untuk periode lima tahun mendatang. Selanjutnya, analisis pengelolaan keuangan kabupaten dilakukan terhadap APBK dan laporan keuangan kabupaten pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas dan kemampuan keuangan kabupaten dalam mendanai penyelenggaraan pembangunannya. Selain itu dibutuhkan realisasi kinerja keuangan kabupaten sekurang-kurangnya lima tahun sebelumnya sebagai pijakan untuk menyusun APBK lima tahun kedepannya (2017-2022).

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bireuen berpedoman pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Peraturan-peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran kabupaten, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di atas. Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan, baik kinerja keuangan masa lalu maupun

kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang (2017-2022).

III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Penelaahan kinerja keuangan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan APBK dan neraca keuangan kabupaten. Kinerja pelaksanaan APBK terdiri atas target dan realisasi pendapatan, target dan realisasi belanja, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan kabupaten berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan kabupaten.

Peran serta kemampuan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bireuen untuk mendanai serta melaksanakan pembangunan dan roda pemerintahan masih relatif terbatas. Untuk menjalankan roda serta fungsi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat selama ini, proporsi terbesar dari penerimaan masih ditopang dan memiliki ketergantungan yang masih relatif tinggi pada penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan pendapatan untuk anggaran tahun 2015-2020 ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

1. Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah kabupaten, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah dalam lima tahun anggaran;
2. Pendapatan adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu lima tahun anggaran.

Untuk meningkatkan output kemandirian Pemerintah Kabupaten Bireuen yang berasal dari pos PAD kabupaten, maka dilakukan kebijakan peningkatan pendapatan berupa strategi intensifikasi melalui upaya-upaya peningkatan target dan realisasi pendapatan pada sektor pajak daerah kabupaten dan retribusi. Sedangkan ekstensifikasi baru sebatas pada kajian-kajian yang dilakukan upaya untuk menggali potensi pos PAD kabupaten.

Sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Bireuen dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok berdasarkan struktur pendapatan dan asal sumber penerimaannya. Ketiga kelompok sumber penerimaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen pada Tahun Anggaran 2015-2020 tersebut adalah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerah kabupaten. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bireuen adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari daerah kabupaten.
- 2) Dana perimbangan adalah pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*).
- 3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga serta bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) berupa transfer dana Otsus dan Migas serta Dana Hibah lainnya.

Pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Bireuen dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Namun sejak tahun 2018, pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Bireuen kembali dikelola oleh Provinsi Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Akan tetapi pada Tahun 2019 pelaksanaannya dikembalikan lagi ke Kabupaten Bireuen berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Qanun Aceh Nomor Dua Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, perlu dioptimalkan pengelolaan PAD dengan meningkatkan efektifitas pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. Adapun faktor-faktor penyebab masih rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah selama lima tahun terakhir antara lain adalah: (1) Data obyek dan potensi sumber PAD yang masih minim, (2) Rendahnya kualitas SDM pengelola pajak dan retribusi daerah, (3) Kurangnya sosialisasi pajak dan retribusi daerah, (4) Rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak, dan (5) belum

maksimalnya penagihan pajak. Hal ini berarti bahwa berbagai upaya untuk mengefektifkan penggalan sumber-sumber pendanaan pembangunan daerah yang berasal dari PAD perlu terus ditingkatkan agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lambat laun dapat dikurangi. Disamping itu, perlu terobosan melalui berbagai alternatif peningkatan PAD terutama dari pos pajak daerah dan retribusi daerah.

III.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK

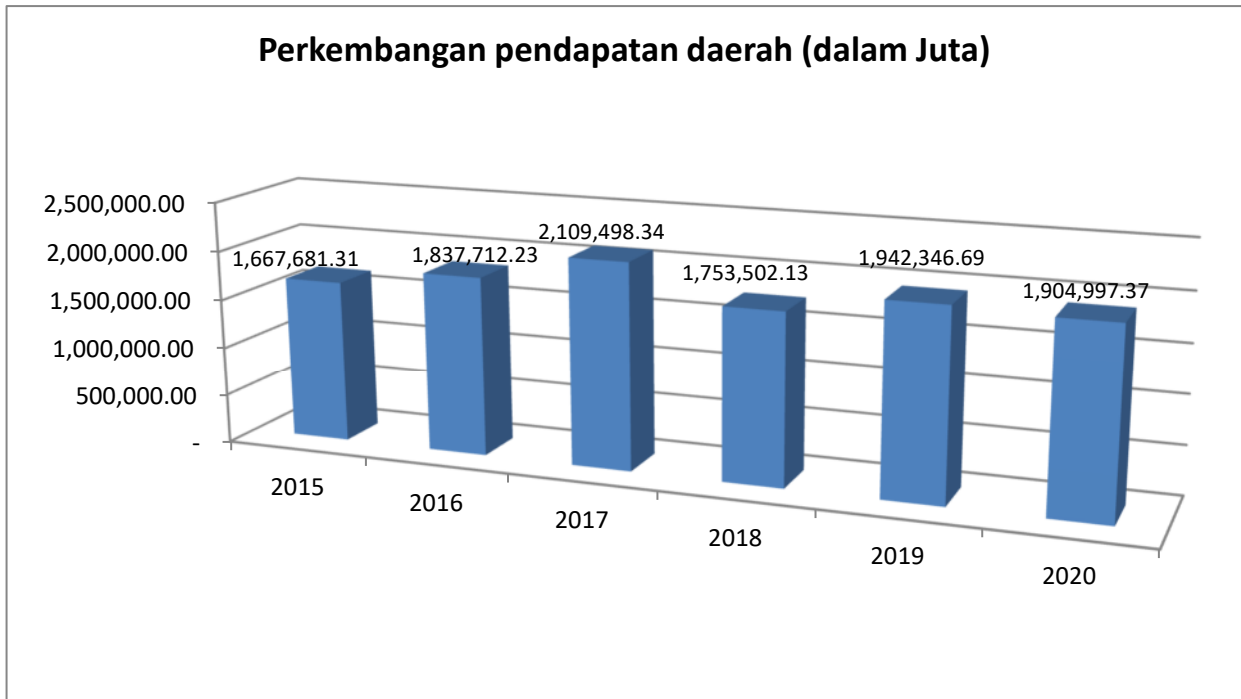
Data realisasi keuangan daerah Kabupaten Bireuen tahun 2015-2019 dan penetapan APBK 2020 perlu disampaikan untuk memberikan gambaran kinerja APBK tahun 2015-2020 dan dapat digunakan sebagai dasar analisis, mencakup analisis kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Analisis kinerja APBK Bireuen periode 2015 sampai dengan 2020 dilihat dari berbagai sudut pandang diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Menyangkut dengan peraturan ini, maka pendapatan Kabupaten Bireuen adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum kabupaten, yang menambah ekuitas dana, dan merupakan hak kabupaten dalam setiap tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh kabupaten. Pendapatan Kabupaten Bireuen dibagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Kabupaten yang Sah.

Realisasi pendapatan Kabupaten Bireuen selama periode 2015-2020 cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi, pada tahun 2015 pendapatan daerah Kabupaten Bireuen sebesar Rp. 1.667.681.314.398,7 meningkat menjadi Rp. 1.837.712.229.968,3 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup berarti menjadi Rp. 2.109.498.338.090,95, peningkatan ini salah satunya berkontribusi cukup besar pada dana Otsus. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 1.753.502.126.161,49, penurunan terjadi hampir pada semua komponen pendapatan, namun yang paling besar pengaruhnya

adalah dana Otsus yang kembali dikelola oleh provinsi. Pada tahun 2019 pendapatan daerah Kabupaten Bireuen kembali meningkat menjadi Rp. 1.942.346.689.900,92 dikarenakan pengelolaan dana otsus kembali menjadi kewenangan daerah. Pada tahun Rata-rata pendapatan Kabupaten Bireuen tahun 2015-2019 Rp. 1.913.819.308.745,- dengan angka realisasi pendapatan mencapai Rp. 1.862.148.139.704,08,- atau rata-rata realisasi mencapai 97,30 persen dari anggaran pendapatan. Perkembangan realisasi pendapatan dari tahun 2015-2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

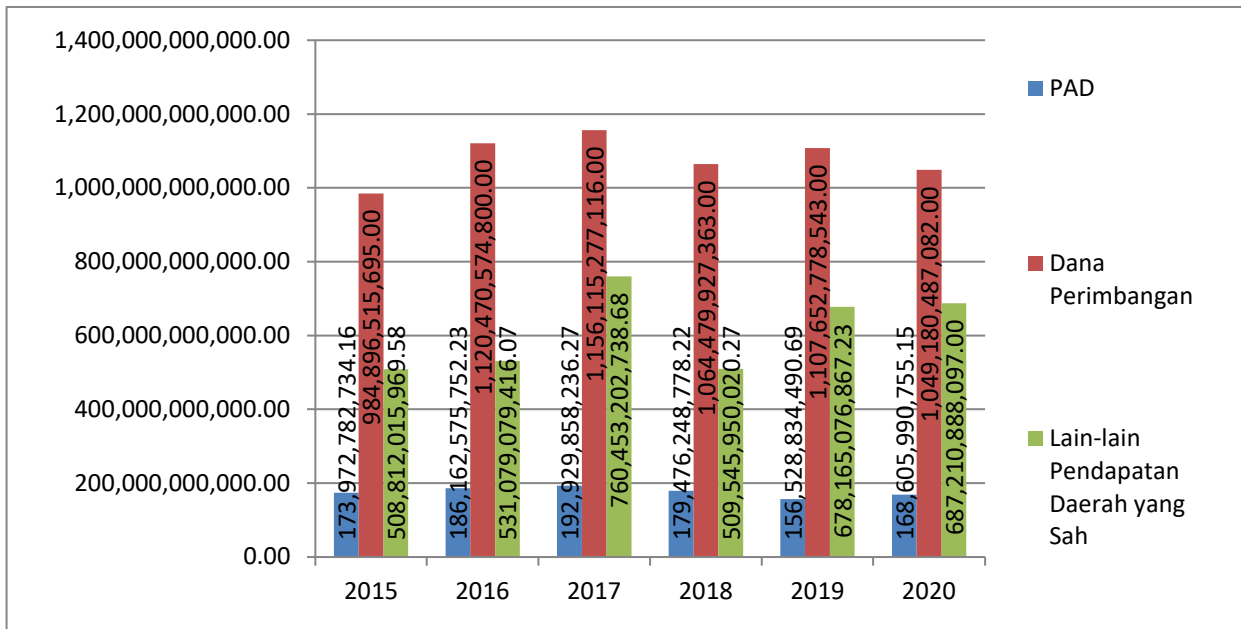


Sumber: BPKD Kabupaten Bireuen 2020, data diolah

Grafik 3.1 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2015-2020

Gambaran perkembangan secara nominal masing masing sumber pendapatan menunjukkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen terus menunjukkan peningkatan hingga tahun 2017, namun mengalami penurunan berturut-turut tahun 2018–2020, penurunan ini dikarenakan menurunnya target pendapatan BLU RS. Dr. Fauziah. Pada tahun 2015 nilai PAD Kabupaten Bireuen berjumlah Rp 167.255.638.456,- dan pada tahun 2018 telah mencapai Rp. 202.758.621.022,-, sedangkan pada tahun 2019 kembali menurun menjadi Rp. 156.245.085.621,-, sehingga persentase kenaikan rata-rata PAD Kabupaten Bireuen selama enam tahun terakhir menjadi minus 0,07 persen, untuk hal ini diperlukan kerja sama semua sektor dalam pencapaian peningkatannya.

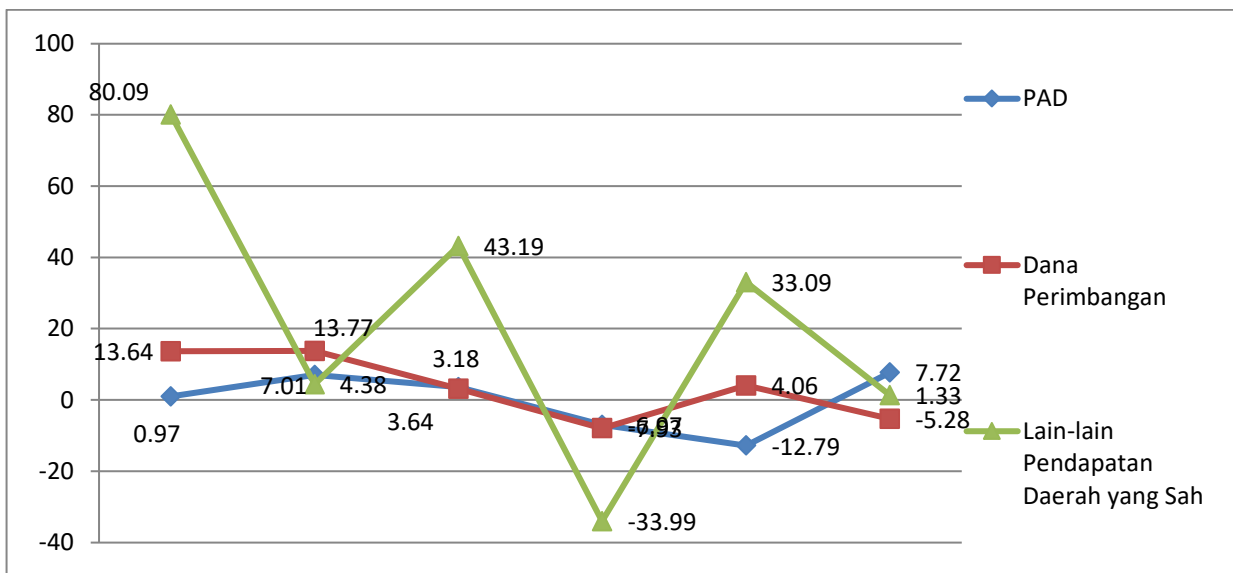
Gambaran perkembangan masing-masing sumber pendapatan daerah selama tahun 2015-2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber : BPKD Kab. Bireuen, 2020

Grafik 3.2 Perkembangan Masing-masing Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) capaian persentase realisasi pendapatan Kabupaten Bireuen dapat dikategorikan sangat baik berkisar antara 94,13 persen sampai dengan 99,62 persen dengan capaian tertinggi pada tahun 2017. Sumber pendapatan dari dana perimbangan dan lain lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan perkembangan yang stabil dengan sedikit berfluktuatif. Pertumbuhan masing-masing sumber pendapatan dapat dilihat pada grafik dibawah:



Grafik 3.3 Pertumbuhan masing-masing unsur pendapatan Kabupaten Bireuen tahun 2015-2020 (%)

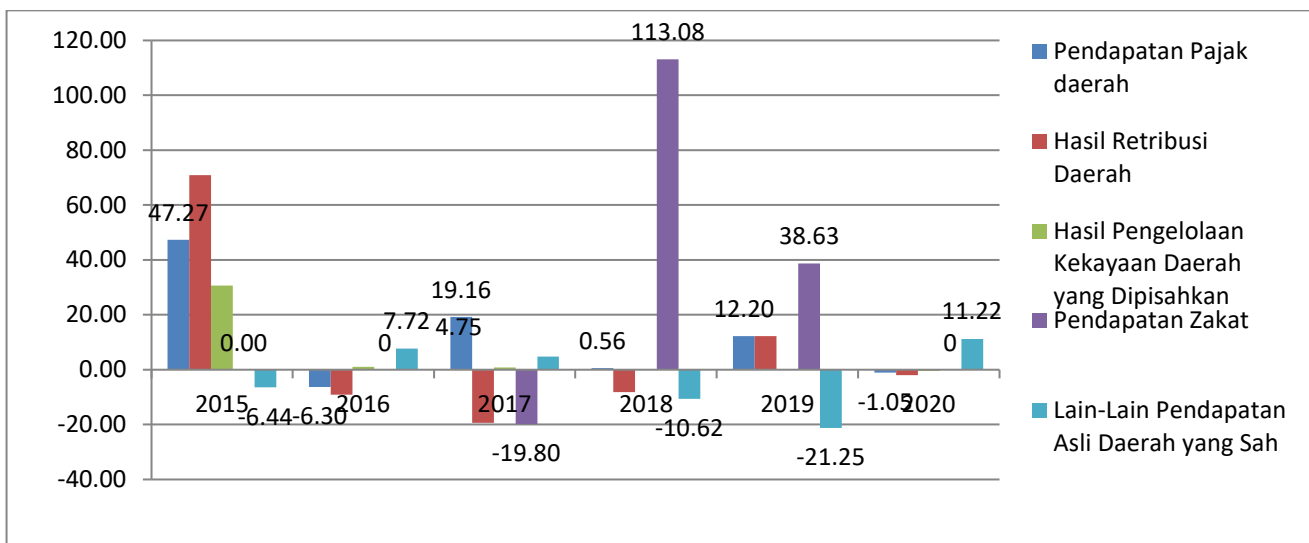
Secara rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN (Rp.)						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	Penetapan APBK 2020	
1	PENDAPATAN	1,667,681,314,398.74	1,837,712,229,968.30	2,109,498,338,090.95	1,753,502,126,161.49	1,942,346,689,900.92	1,904,997,365,934.15	7.19
1.1	Pendapatan Asli Daerah	173,972,782,734.16	186,162,575,752.23	192,929,858,236.27	179,476,248,778.22	156,528,834,490.69	168,605,990,755.15	(0.07)
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	17,648,407,313.00	16,536,779,057.00	19,705,519,346.00	19,816,013,640.00	22,232,789,426.00	22,000,000,000.00	11.97
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14,862,066,190.00	13,510,255,196.00	10,889,296,091.00	10,000,884,640.00	11,219,360,112.00	10,996,450,000.00	7.40
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4,869,061,663.00	4,916,471,188.70	4,954,350,869.68	4,963,058,317.00	4,972,440,041.00	4,950,000,000.00	5.37
1.1.4	Pendapatan Zakat	-	4,059,969,268.00	3,256,090,814.37	6,938,076,478.50	9,618,285,990.69	10,000,000,000.00	5.98
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136,593,247,568.16	147,139,101,042.53	154,124,601,115.22	137,758,215,702.72	108,485,958,921.00	120,659,540,755.15	(2.44)
1.2	Dana Perimbangan	984,896,515,695.00	1,120,470,574,800.00	1,156,115,277,116.00	1,064,479,927,363.00	1,107,652,778,543.00	1,049,180,487,082.00	3.57
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	26,200,824,745.00	24,712,964,929.00	25,181,784,393.00	17,223,780,413.00	14,499,245,165.00	16,699,322,000.00	(10.12)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	780,023,926,000.00	816,856,418,000.00	802,506,877,000.00	781,884,222,840.00	817,988,855,598.00	819,566,518,000.00	1.07
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	178,671,764,950.00	278,901,191,871.00	328,426,615,723.00	265,371,924,110.00	275,164,677,780.00	212,914,647,082.00	38.04
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	508,812,015,969.58	531,079,079,416.07	760,453,202,738.68	509,545,950,020.27	678,165,076,867.23	687,210,888,097.00	21.51
1.3.1	Pendapatan Hibah	92,936,000.00	288,629,000.00	72,176,001,923.00	39,356,243,050.00	52,435,248,933.00	65,182,569,000.00	4,173.85
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	30,839,462,560.58	43,250,464,506.07	37,216,925,374.68	44,720,852,970.27	44,330,640,496.23	40,922,769,062.00	18.82
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	351,220,439,000.00	361,336,571,000.00	506,313,644,584.00	425,468,854,000.00	476,694,337,000.00	463,893,735,000.00	33.91
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	126,659,178,409.00	126,203,414,910.00	144,746,630,857.00	-	104,704,850,438.00	117,211,815,035.00	(13.05)

Pada tahun 2018, pendapatan dari pos Lain-Lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan karena ada pendapatan hibah dari dana BOS yang semula berada pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada tahun 2018 dipindah pada pos pendapatan Hibah pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Begitu juga halnya dengan Dana Perimbangan, semua pos pendapatan pada Dana Perimbangan mengalami penurunan diantaranya DAK, DAU maupun dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Pertumbuhan masing-masing komponen dalam Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 fluktuatif. Dari kelima komponen PAD yang terdiri dari (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan (4) Pendapatan Zakat, dan (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, menunjukkan bahwa pertumbuhan Rata-rata Pendapatan pajak daerah selama lima tahun terakhir sebesar 6.40% per tahun. Rata-rata pertumbuhan komponen Retribusi Daerah menurun sebesar -6.12%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mempunyai nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 0.53% per tahun. Komponen Pendapatan Zakat mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 43.97%. Secara rinci Grafik pertumbuhan masing-masing komponen PAD terlihat pada Grafik dibawah ini:



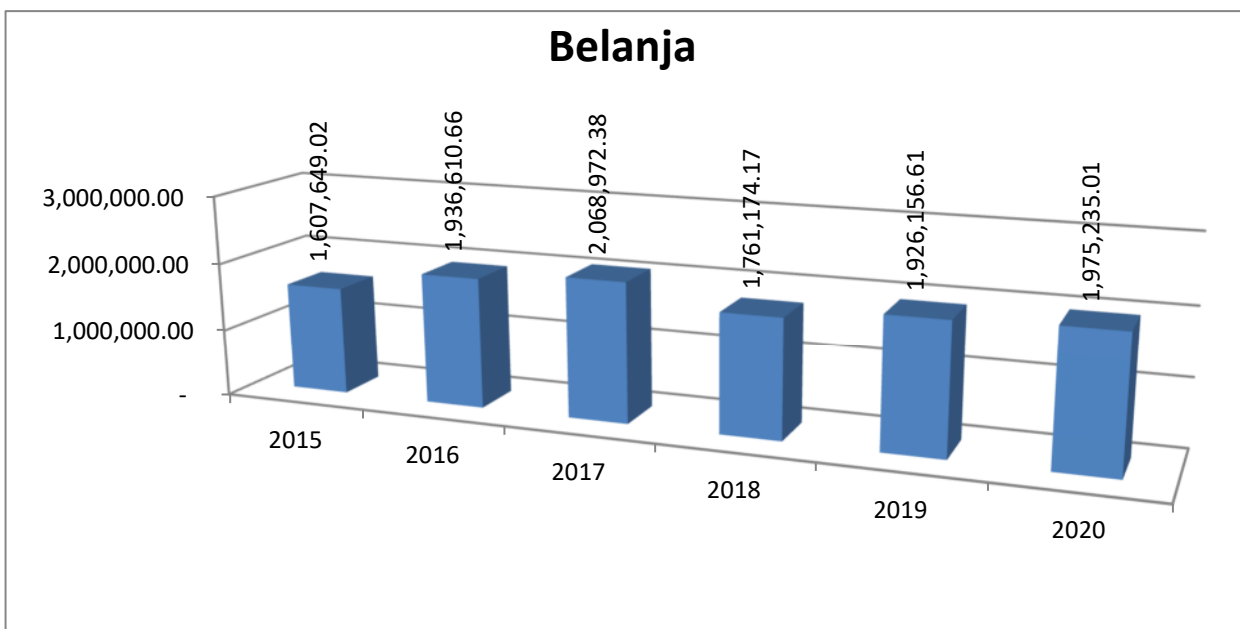
Grafik 3.4 Pertumbuhan Masing-Masing Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu komponen kebijakan keuangan daerah dalam alokasi anggaran. Pengalokasian anggaran yang tepat mengarah pada skala prioritas diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi daerah. Kebijakan dalam penetapan alokasi belanja

pembangunan tidak bisa terlepas dari perhitungan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi, meliputi belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja operasional. Besarnya belanja daerah di Kabupaten Bireuen selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan.

Pada tahun 2015 besarnya belanja sebesar Rp. 1.607.649.017.634,41, pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 1.926.156.612.167,83,- Apabila dikaitkan dengan Tabel 3.1 tentang Besarnya Pendapatan, maka pada tahun 2015-2019 besaran belanja terhadap pendapatan bervariasi. Pada tahun 2016 dan 2018 besaran belanja lebih besar daripada pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran, sedangkan untuk tahun 2015, 2017, dan 2019 besaran belanja lebih kecil dari pendapatan sehingga terjadi surplus. Selengkapnya grafik perkembangan belanja daerah tahun 2015-2020 dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini:

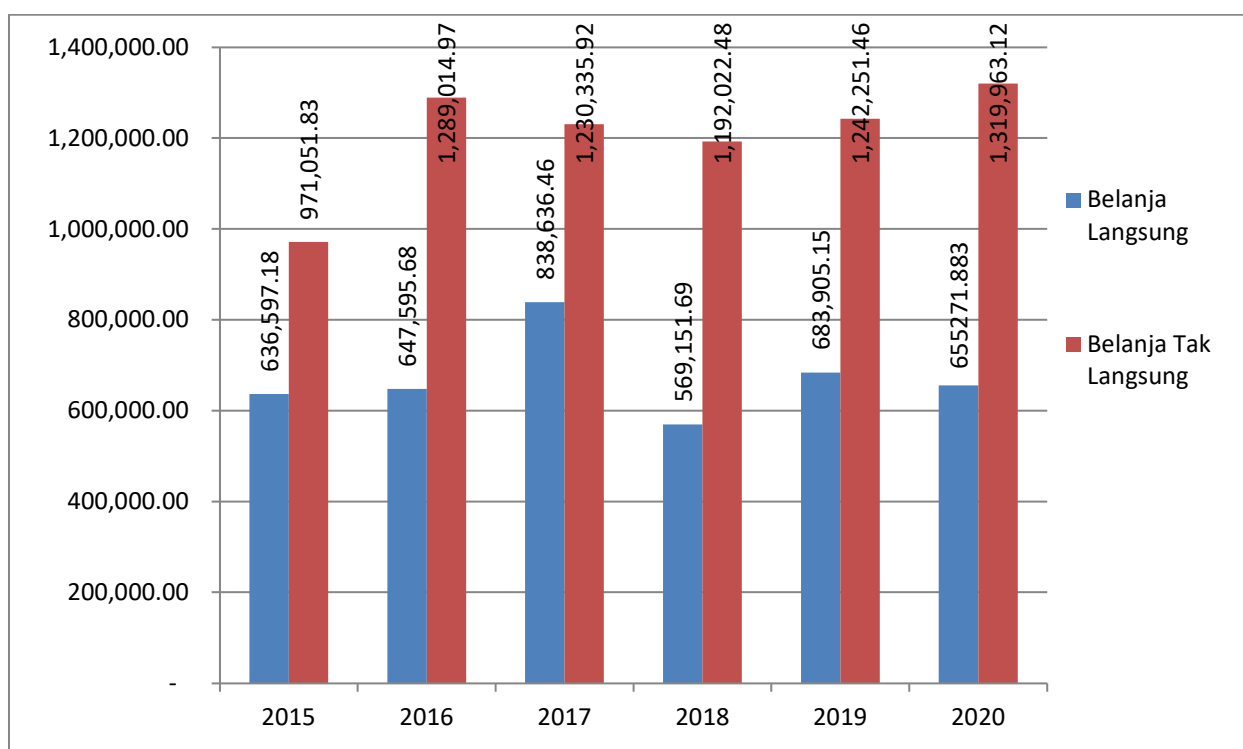


Grafik 3.5 Perkembangan Belanja Daerah Tahun 2015-2020 (Juta Rupiah)

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 dan Penetapan APBK 2020

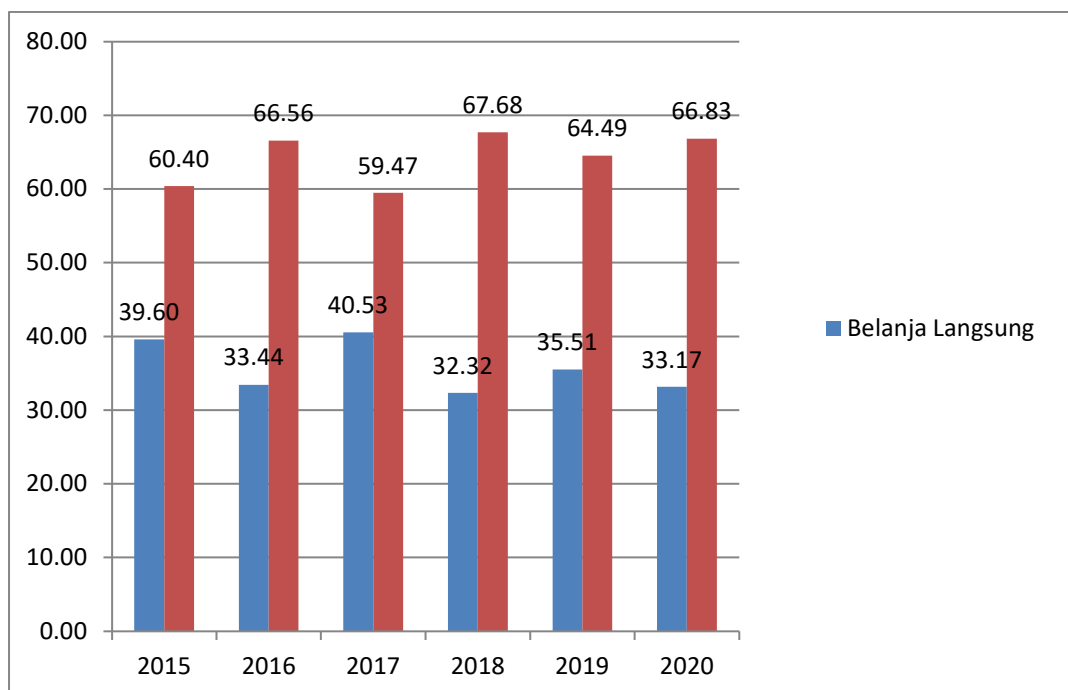
NO	URAIAN	REALISASI TAHUN (Rp.)						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	Penetapan APBK 2020	
2	BELANJA	1,607,649,017,634.41	1,936,610,656,833.08	2,068,972,376,645.53	1,761,174,172,771.00	1,926,156,612,167.83	1,975,235,008,778.71	8.31
2.1	Belanja Tidak Langsung	971,051,833,992.41	1,289,014,973,917.33	1,230,335,915,880.13	1,192,022,484,204.00	1,242,251,462,842.13	1,319,963,124,84	12.18
2.1.1	Belanja Pegawai TL	733,948,025,605.41	788,379,887,911.43	662,479,425,064.00	677,205,417,699.00	685,394,197,967.00	684,668,390,244.56	0.41
2.1.2	Belanja Bunga							
2.1.3	Belanja Subsidi							
2.1.4	Belanja Hibah	10,598,900,000.00	29,880,000,000.00	25,825,676,199.13	8,865,547,000.00	12,157,150,000.00	11,352,600,000.00	22
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4,692,500,000.00	4,442,450,000.00	3,270,500,000.00	3,292,000,000.00	2,319,418,427.13	2,300,000,000.00	(16.85)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	3,981,914,697.00	1,449,635,688.00	2,470,185,000.00	3,200,611,607.00	3,299,645,000.00	6.58
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	220,814,051,387.00	460,358,608,308.90	536,265,945,929.00	499,380,567,755.00	539,180,084,841.00	598,268,733,600.00	27.40
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	998,357,000.00	1,972,113,000.00	1,044,733,000.00	808,766,750.00	-	20,073,756,000.00	(30.65)
2.2	Belanja Langsung	636,597,183,642.00	647,595,682,915.75	838,636,460,765.40	569,151,688,567.00	683,905,149,325.70	655,271,883,000.00	4.30
2.2.1	Belanja Pegawai L	98,659,998,489.00	93,981,696,028.00	103,037,323,088.00	91,699,940,516.00	66,359,574,235.00	93,245,441,477	(1.40)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	237,110,660,961.00	250,246,082,538.00	325,319,046,357.90	316,661,888,135.00	322,146,099,437.70	304,621,941,116.40	8.02
2.2.3	Belanja Modal	300,826,524,192.00	303,367,904,349.75	410,280,091,319.50	160,789,859,916.00	295,399,475,653.00	257,404,495,340.75	10.37
	Surplus/(Defisit)	60,032,296,764.33	(98,898,426,864.78)	40,525,961,445.42	(7,672,046,609.51)	16,190,077,733.09	(70,237,642,844.56)	(220.28)

Selanjutnya untuk grafik perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 3.6 Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020 (Juta Rupiah)

Dilihat dari proporsinya, Belanja Daerah selama kurun waktu tahun 2015-2020 terjadi fluktuasi proporsi masing-masing unsur belanja terhadap total belanja daerah. Fluktuasi proporsi Belanja Langsung dipengaruhi besaran pendapatan daerah, namun demikian besaran Belanja Langsung menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bireuen untuk meningkatkan kemajuan pembangunan daerah. Secara rinci grafik proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 3.7 Perkembangan Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bireuen Terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2015-2020 (Persen)

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi Belanja Langsung terhadap total belanja daerah. Belanja Langsung yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk pembangunan daerah. Belanja Langsung, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Kabupaten adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kabupaten merupakan transaksi keuangan pemerintah kabupaten, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah kabupaten. Kebijakan pembiayaan kabupaten terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan pada:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBK tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penyertaan modal kepada BUMD;
- c. Persentase SILPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran

Struktur pembiayaan Kabupaten Bireuen terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah yang hanya disumbang oleh SiLPA tahun anggaran sebelumnya dengan proporsi 102,42 persen dan pengeluaran pembiayaan daerah (2,42 persen) untuk penyertaan modal (investasi) daerah serta pembayaran pokok hutang. Selama kurun waktu 2015 – 2019 terdapat dua tahun penerimaan pembiayaan yang seluruhnya (100 persen) menjadi pembiayaan daerah karena tidak adanya pengeluaran pembiayaan pada tahun tersebut. Rata-rata realisasi pembiayaan pertahun Rp. 67.789.595.317,87,- dengan rata-rata pertumbuhan 38,33 persen.

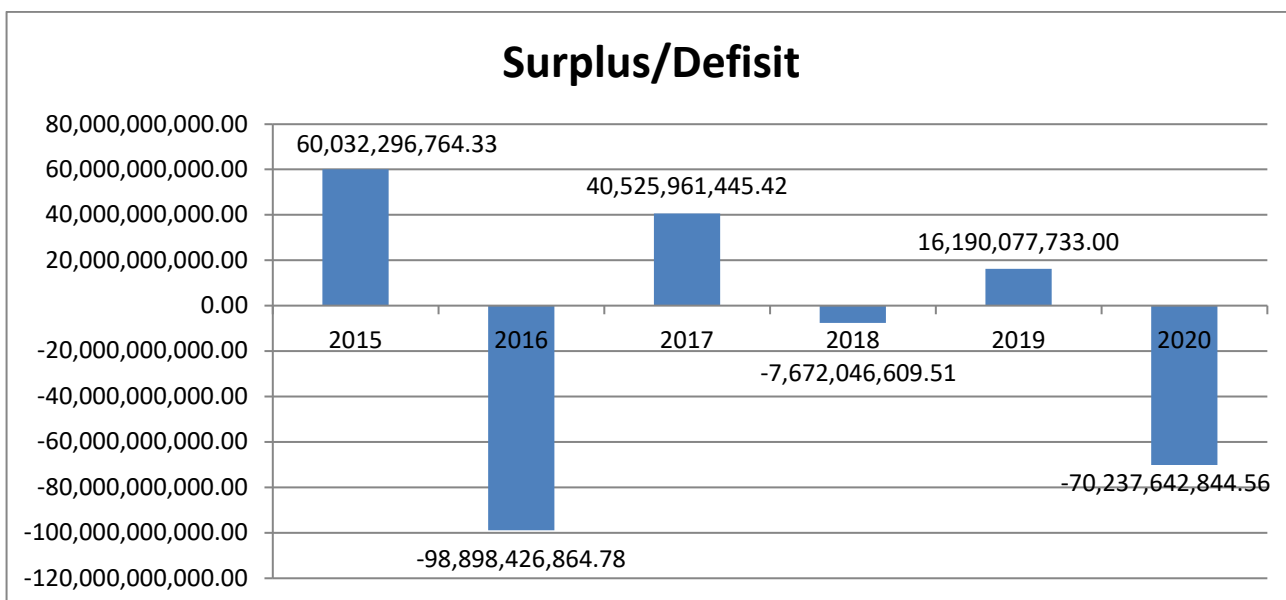
Penerimaan pembiayaan dari sebesar Rp. 71.222.467.904,01,- pada tahun 2015 menjadi Rp. 58.020.714.671,47,- pada tahun 2019. Pengeluaran pembiayaan daerah juga menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2015 Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 4.119.993.803,00,- menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- pada tahun 2019. Penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari satu komponen penerimaan saja yaitu dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). SiLPA terbesar yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 127.054.770.865,34,-, banyak faktor yang menyebabkan besaran SiLPA diantaranya tidak terlaksananya program yang direncanakan. Secara rinci rata-rata perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Bireuen tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.3
Rata-Rata Perkembangan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019
dan Penetapan APBK Tahun 2020

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN (Rp.)						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	Penetapan APBK 2020	
3	PEMBIAYAAN	67,022,474,101.01	124,055,226,700.34	25,156,799,835.56	65,692,761,280.98	57,020,714,671.47	70,237,642,844.56	50.11
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	71,222,467,904.01	127,054,770,865.34	25,156,799,835.56	65,692,761,280.98	58,020,714,671.47	73,210,792,404.56	50.08
3.1.	SiLPA Tahun Anggaran	71,222,467,904.01	127,054,770,865.34	25,156,799,835.56	65,692,761,280.98	58,020,714,671.47	73,210,792,404.56	50.08
	Pencairan Dana Cadangan							
	Hasil Penjualan Kekayaan							
	Penerimaan Pinjaman							
	Penerimaan Kembali							
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	4,199,993,803.00	2,999,544,165.00	-	-	1,000,000,000.00	2,973,149,560.00	16.91
3.2.	Pembentukan Dana				-			
3.2.	Penyertaan Modal	1,200,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00	
3.3.	Pembayaran Pokok Utang	2,999,993,803.00	2,999,544,165.00	-	-	-	473,149,560.00	
3.3.	Pemberian Pinjaman							
3.3.	Pembayaran Kegiatan							
3.3.	Pengeluaran Perhitungan							

Sumber: BPKD Kabupaten Bireuen 2020, data diolah

Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada belanja, maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Besaran defisit menunjukkan tingkat belanja yang tidak dapat dipenuhi oleh pendapatan daerah. Dalam Kurun tahun 2015-2019 defisit terjadi pada tahun 2016 dan 2018, sedangkan surplus terjadi pada tahun 2015, 2017, dan 2019. Selengkapnya Grafik Selisih Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.8 Selisih Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020 (Rupiah)

Pelampauan pendapatan atau penghematan belanja pada realisasi APBK sebelumnya akan menghasilkan sisa dana. Sisa dana tersebut dinamakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disingkat SiLPA. Namun demikian, mengingat bahwa APBK dibuat sebelum berakhirnya tahun anggaran maka SiLPA yang terdapat di APBK merupakan nilai estimasi. Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana idle.

Lebih lengkap mengenai gambaran pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020

No	URAIAN	REALISASI TAHUN (Rp.)						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	Penetapan APBK 2020	
1	PENDAPATAN	1,667,681,314,398.74	1,837,712,229,968.30	2,109,498,338,090.95	1,753,502,126,161.49	1,942,346,689,900.92	1,904,997,365,934.15	7.19
1.1	Pendapatan Asli Daerah	173,972,782,734.16	186,162,575,752.23	192,929,858,236.27	179,476,248,778.22	156,528,834,490.69	168,605,990,755.15	(0.07)
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	17,648,407,313.00	16,536,779,057.00	19,705,519,346.00	19,816,013,640.00	22,232,789,426.00	22,000,000,000.00	11.97
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14,862,066,190.00	13,510,255,196.00	10,889,296,091.00	10,000,884,640.00	11,219,360,112.00	10,996,450,000.00	7.40
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4,869,061,663.00	4,916,471,188.70	4,954,350,869.68	4,963,058,317.00	4,972,440,041.00	4,950,000,000.00	5.37
1.1.4	Pendapatan Zakat	-	4,059,969,268.00	3,256,090,814.37	6,938,076,478.50	9,618,285,990.69	10,000,000,000.00	5.98
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	136,593,247,568.16	147,139,101,042.53	154,124,601,115.22	137,758,215,702.72	108,485,958,921.00	120,659,540,755.15	(2.44)
1.2	Dana Perimbangan	984,896,515,695.00	1,120,470,574,800.00	1,156,115,277,116.00	1,064,479,927,363.00	1,107,652,778,543.00	1,049,180,487,082.00	3.57
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	26,200,824,745.00	24,712,964,929.00	25,181,784,393.00	17,223,780,413.00	14,499,245,165.00	16,699,322,000.00	(10.12)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	780,023,926,000.00	816,856,418,000.00	802,506,877,000.00	781,884,222,840.00	817,988,855,598.00	819,566,518,000.00	1.07
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	178,671,764,950.00	278,901,191,871.00	328,426,615,723.00	265,371,924,110.00	275,164,677,780.00	212,914,647,082.00	38.04
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	508,812,015,969.58	531,079,079,416.07	760,453,202,738.68	509,545,950,020.27	678,165,076,867.23	687,210,888,097.00	21.51
1.3.1	Pendapatan Hibah	92,936,000.00	288,629,000.00	72,176,001,923.00	39,356,243,050.00	52,435,248,933.00	65,182,569,000.00	4,173.85
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	30,839,462,560.58	43,250,464,506.07	37,216,925,374.68	44,720,852,970.27	44,330,640,496.23	40,922,769,062.00	18.82
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	351,220,439,000.00	361,336,571,000.00	506,313,644,584.00	425,468,854,000.00	476,694,337,000.00	463,893,735,000.00	33.91
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	126,659,178,409.00	126,203,414,910.00	144,746,630,857.00	-	104,704,850,438.00	117,211,815,035.00	(13.05)
2	BELANJA	1,607,649,017,634.41	1,936,610,656,833.08	2,068,972,376,645.53	1,761,174,172,771.00	1,926,156,612,167.83	1,975,235,008,778.71	8.31
2.1	Belanja Tidak Langsung	971,051,833,992.41	1,289,014,973,917.33	1,230,335,915,880.13	1,192,022,484,204.00	1,242,251,462,842.13	1,319,963,124,844.56	12.18

2.1.1	Belanja Pegawai TL	733,948,025,605.41	788,379,887,911.43	662,479,425,064.00	677,205,417,699.00	685,394,197,967.00	684,668,390,244.56	0.41
2.1.2	Belanja Bunga							
2.1.3	Belanja Subsidi							
2.1.4	Belanja Hibah	10,598,900,000.00	29,880,000,000.00	25,825,676,199.13	8,865,547,000.00	12,157,150,000.00	11,352,600,000.00	22
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4,692,500,000.00	4,442,450,000.00	3,270,500,000.00	3,292,000,000.00	2,319,418,427.13	2,300,000,000.00	(16.85)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	3,981,914,697.00	1,449,635,688.00	2,470,185,000.00	3,200,611,607.00	3,299,645,000.00	6.58
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	220,814,051,387.00	460,358,608,308.90	536,265,945,929.00	499,380,567,755.00	539,180,084,841.00	598,268,733,600.00	27.40
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	998,357,000.00	1,972,113,000.00	1,044,733,000.00	808,766,750.00	-	20,073,756,000.00	(30.65)
2.2	Belanja Langsung	636,597,183,642.00	647,595,682,915.75	838,636,460,765.40	569,151,688,567.00	683,905,149,325.70	655,271,883,934.15	4.30
2.2.1	Belanja Pegawai L	98,659,998,489.00	93,981,696,028.00	103,037,323,088.00	91,699,940,516.00	66,359,574,235.00	93,194,191,477,477	(1.40)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	237,110,660,961.00	250,246,082,538.00	325,319,046,357.90	316,661,888,135.00	322,146,099,437.70	304,673,197,116.40	8.02
2.2.3	Belanja Modal	300,826,524,192.00	303,367,904,349.75	410,280,091,319.50	160,789,859,916.00	295,399,475,653.00	257,404,495,340.75	10.37
	Surplus/(Defisit)	60,032,296,764.33	(98,898,426,864.78)	40,525,961,445.42	(7,672,046,609.51)	16,190,077,733.09	(70,237,642,844.56)	(220.28)
3	PEMBIAYAAN	67,022,474,101.01	124,055,226,700.34	25,156,799,835.56	65,692,761,280.98	57,020,714,671.47	70,237,642,844.56	50.11
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	71,222,467,904.01	127,054,770,865.34	25,156,799,835.56	65,692,761,280.98	58,020,714,671.47	73,210,792,404.56	50.08
3.1.1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	71,222,467,904.01	127,054,770,865.34	25,156,799,835.56	65,692,761,280.98	58,020,714,671.47	73,210,792,404.56	50.08
	Pencairan Dana Cadangan							
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							

3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah							
	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir							
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4,199,993,803.00	2,999,544,165.00	-	-	1,000,000,000.00	2,973,149,560.00	16.91
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				-			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,200,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00	2,500,000,000.00	
3.3.3	Pembayaran Pokok Utang	2,999,993,803.00	2,999,544,165.00	-	-	-	473,149,560.00	
3.3.4	Pemberian Pinjaman Daerah							
3.3.5	Pembayaran Kegiatan Lanjutan							
3.3.6	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga							

III.1.2 Neraca Kabupaten

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Kabupaten memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dan merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi subrekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Kabupaten merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Kabupaten. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset Kabupaten Bireuen merupakan asset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah kabupaten, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah kabupaten maupun masyarakat pada masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dengan uang.

Neraca Kabupaten Bireuen selama kurun waktu 2015-2019 seperti terlihat pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Bireuen Tahun 2015 - 2019 (Rp. Juta)

No.	Uraian	Tahun (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	ASET	2,335,073,157,416.8	2,459,340,619,281.	2,826,169,035,794.	2,850,283,924,349.8	3,163,869,086,138.2	8.02
1.1.	Aset Lancar	199,465,177,011.05	113,456,116,953.5	152,998,835,406.0	120,750,442,798.58	134,375,756,497.91	(4.52)
1.2	Investasi Jangka Panjang	39,225,096,040.00	41,168,210,138.00	43,012,556,445.00	44,726,731,715.00	47,045,883,740.33	4.65
1.3	Aset Tetap	1,833,729,067,884.6	2,039,373,549,579.	2,131,194,558,461.	1,995,311,483,295.6	2,246,380,353,416.4	5.48
1.4	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
1.5	Aset Lainnya	262,653,816,481.14	265,342,742,610.1	498,963,085,481.3	689,495,266,540.55	736,067,092,483.55	33.50
2	KEWAJIBAN	125,066,152,733.32	144,900,278,885.1	148,633,841,116.5	88,019,779,138.87	68,277,442,297.51	(11.19)
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	125,066,152,733.32	144,900,278,885.1	148,633,841,116.5	88,019,779,138.87	61,462,138,161.51	(13.13)
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	6,815,304,136.00	
3	EKUITAS DANA	2,210,007,004,683.5	2,314,440,340,396.	2,677,535,194,677.	2,762,264,145,210.9	3,095,591,643,840.7	8.91
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,335,073,157,416.85	2,459,340,619,281.32	2,826,169,035,794.03	2,850,283,924,349.81	3,163,869,086,138.26	8.02

Sumber: BPKD Kabupaten Bireuen 2020, data diolah

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas, selama tahun 2015-2019 jumlah aset mengalami perkembangan, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 8,02 persen. Aset tersebut terdiri atas: Aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen); Aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan); Dana cadangan; Aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, asset lainnya), semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan informasi tentang hutang pemerintah kabupaten kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 2015-2019 berfluktuasi dan terus menurun mencapai minus 11,18 persen pada tahun 2019.

Informasi aset dalam neraca juga sangat penting untuk menghitung rasio keuangan tertentu. Karena tujuan menggunakan rasio tersebut dalam rangka menilai kinerja keuangan yang berhubungan dengan laba. Sementara itu, di sektor publik tidak tersedianya informasi laba menyebabkan analisis rasio keuangan yang biasa digunakan sektor bisnis tidak dapat diaplikasikan di sektor publik. Namun ada hal juga analisis rasio keuangan yang dapat digunakan baik di sektor bisnis maupun publik, seperti analisis likuiditas dan solvabilitas.

III.1.2.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasarkan pada anggaran kas saja. Analisis rasio Likuiditas terdiri dari:

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)
 - b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)
- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*) membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek. Rasio lancar merupakan ukuran standar untuk menilai kesehatan keuangan organisasi, baik organisasi bisnis maupun

pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi utangnya.

$$\text{Rasio Lancar (Current Ratio)} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Berikut adalah *current ratio* Kabupaten Bireuen pada tahun 2015-2019:

Tabel 3.6
Current Ratio Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 (Rp. Juta)

NO	TAHUN	AKTIVA LANCAR	HUTANG LANCAR	CURRENT RATIO
1	2015	199,465.18	125,066.15	1.59
2	2016	113,456.12	144,900.28	0.78
3	2017	152,998.84	148,633.84	1.03
4	2018	120,750.44	88,019.78	1.37
5	2019	134,375.76	61,462.14	2.19

Sumber: BPKD Kab. Bireuen (diolah)

Rasio lancar (*Curren ratio*) selama tahun 2015-2019 cukup berfluktuasi dengan rasio lancar terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,78, artinya kemampuan daerah dalam membayar hutang jangka pendek rendah, sedangkan rasio tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,19.

- b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Persediaan merupakan unsur dari aktiva yang tingkat liquiditasnya paling rendah, sering mengalami fluktuasi harga, dan sering menimbulkan kerugian jika terjadi liquidasi. Rasio cepat lebih baik dalam mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, karena dalam perhitungannya semua unsur-unsur persediaan dikurangkan atau dianggap tidak digunakan untuk membayar hutang jangka pendek.

$$\text{Rasio Cepat (Quick Ratio)} = \frac{\text{aktifa lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Berikut adalah *quick ratio* Kabupaten Bireuen pada tahun 2015-2019

Tabel 3.7
Quick Ratio Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

NO	TAHUN	AKTIVA LANCAR	PERSEDIAAN	HUTANG LANCAR	QUICK RATIO
1	2015	199,465.18	18,928.90	125,066.15	1.44
2	2016	113,456.12	28,900.78	144,900.28	0.58
3	2017	152,998.84	35,983.06	148,633.84	0.79
4	2018	120,750.44	20,563.63	88,019.78	1.14
5	2019	134,375.76	15,992.67	61,462.14	1.93

Sumber: BPKD Kab. Bireuen (diolah)

III.1.2.2 Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas disebut juga *ratio leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh daerah dengan dana yang dipinjam. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva daerah dibiayai oleh hutang. Rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (bank). Suatu daerah yang tingkat solvabilitasnya baik belum tentu likuid dan sebaliknya sebuah daerah yang tidak memiliki solvabilitas belum tentu likuid. Rasio Likuiditas terbagi atas:

- a. *Total debt to equity ratio* (Rasio hutang terhadap Equitas)
- b. *Total debt to asset ratio* (Rasio Hutang terhadap Harta)

a. *Total debt to equity ratio* (Rasio hutang terhadap Equitas)

Total debt to equity ratio merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Berikut adalah *Total debt to equity ratio* Kabupaten Bireuen tahun 2015-2019.

$$\text{Total Debt to Equity ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Equitas}} \times 100\%$$

Tabel 3.8
Total Debt to Equity Ratio Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

NO	TAHUN	HUTANG	EKUITAS	TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO
1	2015	125,066.15	2,210,007.00	5.66
2	2016	144,900.28	2,314,440.34	6.26
3	2017	148,633.84	2,677,535.19	5.55
4	2018	88,019.78	2,762,264.15	3.18
5	2019	68,277.44	3,095,591.64	2.21

Sumber: BPKD Kab. Bireuen (diolah)

b. *Total debt to asset ratio* (Rasio Hutang terhadap Harta)

Total debt to asset ratio adalah perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Berikut adalah *Total debt to asset ratio* Kabupaten Bireuen tahun 2015-2019

Tabel 3.9
Total Debt to Asset Ratio Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

NO	TAHUN	HUTANG	AKTIVA	TOTAL DEBT TO ASSET RATIO
1	2015	125,066.15	2,335,073.16	5.36
2	2016	144,900.28	2,459,340.62	5.89
3	2017	148,633.84	2,826,169.04	5.26
4	2018	88,019.78	2,850,283.92	3.09
5	2019	68,277.44	3,163,869.09	2.16

Sumber: BPKD Kab. Bireuen (diolah)

III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasil Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Bireuen diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan.

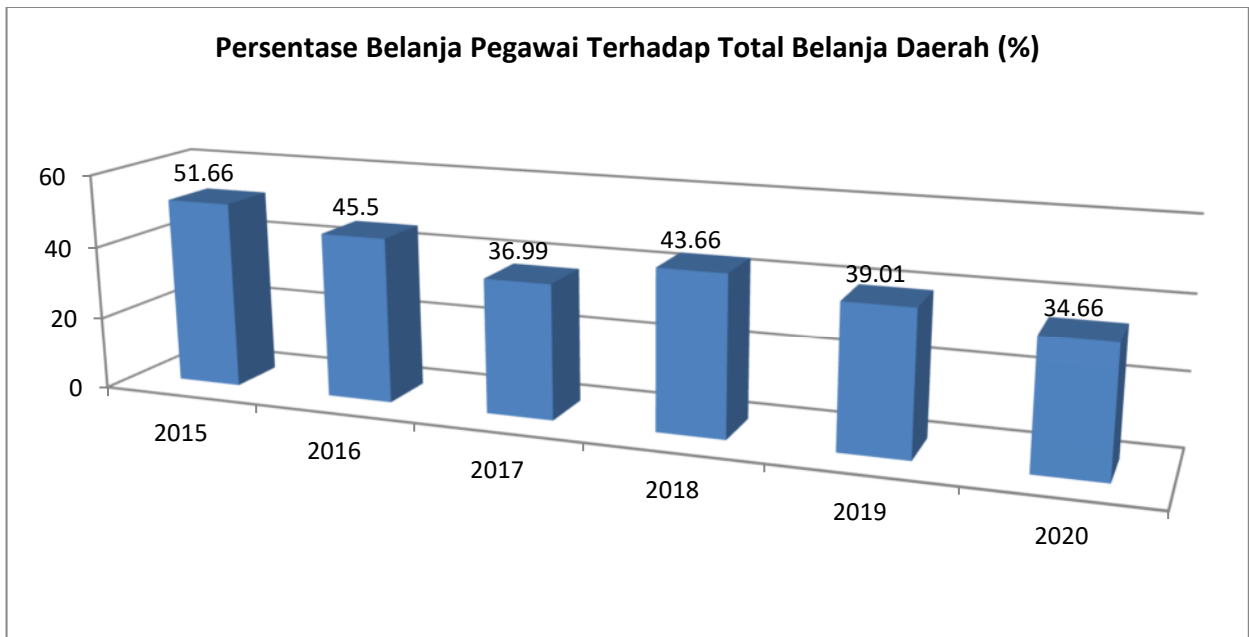
Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPK harus disertai sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan kabupaten. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kabupaten Bireuen secara berkelanjutan.

III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan Kabupaten Bireuen antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan kebutuhan pembangunan. Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisien dan efektif penggunaan anggaran aparatur selama periode yang direncanakan.

Kebijakan umum keuangan Kabupaten Bireuen yang tergambar dalam pelaksanaan APBK yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin untuk proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja Kabupaten mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah dalam konteks Aceh yang disebut Qanun. Anggaran pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah Kabupaten dalam satu tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten dalam bentuk alokasi dana.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan persentase Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung. persentase ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angkanya maka semakin besar proporsi APBK yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBK yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Grafik Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 3.9 Persentase Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah
Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019 (%)

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa selama enam tahun terakhir Persentase Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah cenderung menurun. Dengan demikian maka Kabupaten Bireuen mempunyai kesempatan dalam mendorong roda perekonomian melalui perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi Belanja Langsung terhadap total belanja daerah. Belanja Langsung yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru. Persentase Belanja Langsung terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk pembangunan daerah. Belanja Langsung, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri, oleh karena itu, semakin tinggi angka persentasenya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Perkembangan Analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Presentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	2015	832,608,024,094.41	1,611,849,011,437.41	51.66
2	2016	882,361,583,939.41	1,939,610,200,998.08	45.50
3	2017	765,516,748,152.00	2,068,972,376,645.53	36.99
4	2018	768,905,358,215.00	1,761,174,172,771.00	43.66
5	2019	751,753,772,202.00	1,927,156,612,167.83	39.01
6	2020	777,913,831,721.56	1,978,028,152,338.71	39.33
	Rata-Rata			41.35

Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan (diolah)

Dari Tabel 3.10 di atas menunjukkan bahwa realisasi selama kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) total belanja daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur tiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2015 persentase total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 51,66 persen terus menurun hingga tahun 2019 menjadi 39,01%, sedangkan rata-rata pertumbuhan enam tahun (2015-2020) sebesar 41,35 persen. Hal ini mencerminkan bahwa postur pengelolaan keuangan daerah dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang sangat signifikan serta mengalami peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan publik. Artinya terjadi peningkatan pemenuhan kebutuhan belanja untuk kepentingan pelayanan publik yakni belanja yang dipergunakan untuk pembangunan mengalami peningkatan dan terjadi penurunan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai/aparatur, ini menggambarkan perencanaan dan penganggaran telah berjalan maksimal dengan mencermati segala petunjuk pemerintah atasan dalam penetapan kebijakan.

III.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Kabupaten merupakan transaksi keuangan kabupaten yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan kabupaten dan belanja kabupaten. Selisih lebih pendapatan kabupaten terhadap belanja kabupaten disebut surplus anggaran sedangkan selisih kurang pendapatan terhadap belanja disebut defisit anggaran.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan kabupaten pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja kabupaten. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di tahun yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan Kabupaten. Analisis pembiayaan dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Selanjutnya dilakukan analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan dan Pembiayaan Kabupaten untuk mengukur kinerja APBK.

Pembiayaan yang termuat dalam APBK Bireuen terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah Kabupaten. Pada sisi penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi. Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* dan selisih antara penerimaan dengan belanja merupakan surplus/defisit belanja. Hal ini terjadi karena tidak seimbangannya antara jumlah belanja kabupaten dengan jumlah pendapatan kabupaten. Meskipun tren pendapatan dan belanja kabupaten menunjukkan adanya peningkatan, namun pertumbuhan belanja kabupaten dan pengeluaran pembiayaan daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan kabupaten. Adanya defisit anggaran pada tahun 2015-2018 menunjukkan pengelolaan APBK belum optimal, sehingga kedepan Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Kabupaten Bireuen seperti pajak daerah, retribusi daerah, zakat/infaq dan lain-lain pendapatan kabupaten yang sah (Tabel 3.11).

Tabel 3.11
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Bireuen Tahun 2015 – 2019 (Rp. Juta)

No.	Uraian	Tahun (Rp.)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Realisasi Pendapatan Daerah Dikurangi realisasi:	1,667,681.31	1,837,712.23	2,109,498.34	1,753,502.13	1,942,346.69
2	Belanja Daerah	1,607,649.02	1,936,610.66	2,068,972.38	1,761,174.17	1,926,156.61
3	Pengeluaran Pembiayaan	4.199.99	2,999.54	0	0	1,000.00
	Defisit Riil	55,832.30	(101,897.97)	40.525,961.45	7,672.05	15,190.07

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan (diolah)

Tabel 3.12
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Bireuen Tahun 2015 – 2019 (Rp. Juta)

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil (%) Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	127.56	(124.69)	62.08	856.26	381.96
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	-	-	-	-	-

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan (diolah)

Tabel 3.13
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Bireuen Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA tahun sebelumnya	65,692,761,280.98	20,49	58,020,714,671.47	18,10	73,210,792,404.56	22,83	65,692,761,280.98	20,49	58,020,714,671.47	18,10
2	Pelampauan penerimaan PAD										
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan										
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah										
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya										
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan										
7	Kegiatan lanjutan										

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan (diolah)

Berdasarkan Tabel 3.13 diatas, defisit atau surplus anggaran pendapatan belanja daerah diakibatkan karena adanya selisih antara pendapatan dan belanja. Bilamana terjadi surplus anggaran, maka dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan dan sebaliknya jika terjadi defisit anggaran, maka dibiayai dari penerimaan pembiayaan. Struktur anggaran pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup (1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, (2) pencairan dana cadangan (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) penerimaan pinjaman, dan (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup: (1) pembentukan dana cadangan, (2) penyertaan modal pemerintah daerah, (3) pembayaran pokok hutang, dan (4) pemberian pinjaman.

III.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama lima tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK).

Proyeksi pendapatan merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum Kabupaten, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Kabupaten dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kabupaten. Sumber pendapatan Kabupaten terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah.

Penerimaan Bireuen yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten, berupa pajak dan retribusi Kabupaten, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan kabupaten yang berasal dari Penerimaan Kabupaten Sendiri (PKS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat sehingga faktor ketergantungan Kabupaten Bireuen kepada pemerintah pusat sangat tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa Kabupaten Bireuen selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama untuk Belanja Pegawai berupa gaji yang masih diharapkan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adapun langkah-langkah kebijakan yang telah diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli adalah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Usaha melalui intensifikasi antara lain meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta meningkatkan kinerja aparat Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Pendapatan Kabupaten Bireuen. Sedangkan langkah-langkah usaha ekstensifikasi pendapatan Bireuen adalah melalui pemungutan pajak dan Zakat.

Dalam mendukung pengelolaan keuangan kabupaten, tidak akan terlepas dari pendapatan kabupaten. Pendapatan dalam proses pengelolaan harus dituangkan terlebih dahulu dalam APBK. Tanpa

diketuainya sumber-sumber pendapatan kabupaten, maka pengelolaan keuangan kabupaten tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten secara optimal.

III.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi belanja merupakan semua kewajiban kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis belanja kabupaten digunakan untuk melihat realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan kabupaten pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa yang akan datang.

Proyeksi belanja diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan kesejahteraan masyarakat sebagai kewajiban Kabupaten, yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman umum, dan sosial, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, proyeksi perubahan belanja Tahun Anggaran 2021-2022, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat kabupaten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu, beberapa komponen kerangka pendanaan daerah mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, perubahan tersebut didasari kepada PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri no 90 Tahun 2019, serta Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Proyeksi pertumbuhan Pendapatan Daerah tahun 2021-2022 merupakan perkiraan atau proyeksi tingkat pertumbuhan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dari tahun sebelumnya, yaitu sejak tahun 2015-2020, dimana rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebesar 7.19 persen. Mengingat pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan ditargetkan terus positif serta inflasi yang berada dikisaran rata-rata 2 persen, dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka proyeksi pertumbuhan Pendapatan Daerah untuk tahun 2021-2022 diperkirakan sebesar 0.19 persen. Rincian pertumbuhan terdiri dari proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperkirakan tumbuh sedikit yaitu 0,11 persen. Perkiraan proyeksi pertumbuhan dari Pendapatan Transfer sebesar 1 persen, serta proyeksi pertumbuhan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan turun sebesar 17,87 persen. Penyumbang terbesar penurunan proyeksi pada pendapatan transfer dikarenakan berakhirnya kegiatan IPDM-IP pada tahun 2021, namun diperkirakan akan masih ada hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri lainnya.

Tabel di bawah ini juga memperlihatkan proyeksi pertumbuhan untuk komponen Belanja Daerah yang diproyeksikan bertambah sebesar 0.05 persen, yang terinci dari Belanja Operasi yang tumbuh sebesar 0.80 persen, komponen Belanja Modal diproyeksikan menurun sebesar 2.57 persen, proyeksi untuk Belanja Transfer meningkat sebesar 0.06 persen,

sedangkan untuk komponen Belanja Tak Terduga tidak diproyeksikan pertumbuhannya karena prediksi anggaran yang sama untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Selengkapnya mengenai proyeksi pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 3.14 di bawah ini:

Tabel 3.14
Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Bireuen Tahun 2021-2022

KODE AKUN	URAIAN	Pertumbuhan (%)	PROYEKSI TAHUN (Rp.)				
			2021	2022			
4	PENDAPATAN DAERAH	0.19	2,041,326,428,000.00	2,045,776,648,754.30			
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.11	180,643,599,576.00	180,839,843,218.30		
4	1	1	Pajak Daerah	0.06	29,481,000,000.00	29,500,000,000.00	
4	1	2	Retribusi Daerah	0.59	13,152,325,576.00	13,229,569,218.30	
4	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	4,950,000,000.00	4,950,000,000.00	
4	1	4	Lain-lain PAD yang Sah	0.08	133,060,274,000.00	133,160,274,000.00	
4	2	PENDAPATAN TRANSFER	1.00	1,781,837,186,824.00	1,799,684,005,536.00		
4	2	1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0.92	1,745,682,676,324.00	1,761,761,236,474.00	
4	2	1	1	Dana Perimbangan	1.24	1,156,589,005,000.00	1,170,878,420,314.00
4	2	1	2	Dana Insentif Daerah (DID)	2.00	27,803,658,000.00	28,359,731,160.00
4	2	1	3	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	1.17	105,766,928,324.00	107,000,000,000.00
4	2	1	4	Dana Keistimewaan		-	-
4	2	1	5	Dana Desa	-	455,523,085,000.00	455,523,085,000.00
4	2	2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	4.89	36,154,510,500.00	37,922,769,062.00	
4	2	2	1	Pendapatan Bagi Hasil	4.89	36,154,510,500.00	37,922,769,062.00
4	2	2	2	Bantuan Keuangan	-	-	-
4	3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	(17.87)	78,845,641,600.00	65,252,800,000.00		
4	3	1	Pendapatan Hibah	(39.33)	36,592,281,600.00	22,700,000,000.00	
4	3	1	4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	(39.33)	36,592,841,600.00	22,700,000,000.00
4	3	3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.71	42,252,800,000.00	42,552,800,000.00	
4	3	3	1	Lain-lain Pendapatan	0.71	42,252,800,000.00	42,552,800,000.00
5	BELANJA DAERAH	(0.05)	2,053,826,428,000.00	2,055,276,648,754.30			
5	1	BELANJA OPERASI	0.80	1,168,082,135,536.40	1,177,894,450,625.73		
5	1	1	Belanja Pegawai	0.94	729,498,013,038.00	736,323,697,858.33	

5	1	2		Belanja Barang	0.85	353,211,317,341.00	356,211,317,341.00
5	1	5		Belanja Hibah	12.90	53,022,096,952.40	60,359,435,426.40
5	1	6		Belanja Bantuan Sosial	(22.72)	32,350,708,205.00	25,000,000,000.00
5	2			BELANJA MODAL	(2.57)	336,902,490,706.00	328,230,772,006.74
5	3			BELANJA TIDAK TERDUGA	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
5	3	1	1	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
5	4			BELANJA TRANSFER	0.06	543,841,801,757.60	544,151,426,121.83
5	4	1	1	Belanja Bagi Hasil	0.23	4,263,332,557.60	4,272,956,921.83
5	4	2	2	Belanja Bantuan Keuangan	0.06	539,578,469,200.00	539,878,469,200.00
				Surplus/(Defisit)	-	(12.500.000.000,00)	(9.500.000.000,00)
6				PEMBIAYAAN	(24.00)	12.500.000.000,00	9.500.000.000,00
6	1			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	(11.76)	17.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	(11.76)	17.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6	2			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	22.22	4,500,000,000.00	5,500,000,000.00
6	2	2		Penyertaan Modal Daerah	22.22	4,500,000,000.00	5.500.000.000,00
				Pembiayaan Neto	(24.00)	12,500,000,000.00	9,500,000,000.00
				Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan (SILPA)		-	-
				Total APBD	0.09	2,058,326,428,000.00	2,060,776,648,754.30

III.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan keuangan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja Daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk

menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja Kabupaten Bireuen untuk anggaran dua tahun yang akan datang kedalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Bireuen tahun 2018-2022. Prediksi kemampuan keuangan ini merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, yakni tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi terkini disaat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Tabel 3.15
 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
 Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2022 (Rp. Juta)

No.	Uraian	Tahun (Rp.)				
		Realisasi 2018	Realisasi 2019	APBKP 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
1	Pendapatan	1,753,502,126,161.49	1,942,346,689,900.92	1,904,997,365,934.15	2,041,326,428,000.00	2,045,776,648,754.30
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65,692,761,280.98	58,020,714,671.47	73,210,792,404.56	17,000,000,000.00	15,000,000,000.00-
	Total penerimaan	1,819,194,887,442.47	2,000,367,404,572.39	1,978,208,158,338.71	2,058,326,428,000.00	2,060,776,648,754.30
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak langsung	1,192,022,484,204.00	1,242,251,462,842.13	1,319,963,124,844.56		
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	1,000,000,000.00	2,973,149,560.00	4,500,000,000.00	5,500,000,000.00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	627,172,403,238.47	757,115,941,730.26	655,271,883,934.15	2,053,826,428,000.00	2,055,276,648,754.30

Sumber: BPKD Kab. Bireuen (diolah)

Tabel 3.16
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2022 (Rp. Juta)

No.	Uraian	Realisasi			Proyeksi	
		2018 (Rp)	2019 (Rp)	Penetapan APBKP 2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	627,172,403,238.47	757,115,941,730.26	655,271,883,934.15	2,053,826,428,000.00	2,055,276,648,754.30
2	Prioritas I	433,625,406,359.00	514,841,986,976.70	468,263,795,788.30	1,122,900,654,640.00	1,115,190,496,891.48
3	Prioritas II	193,546,996,879.47	242,273,954,753.56	187,008,088,145.75	930,866,983,360.00	940,086,151,862.82

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan keuangan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja Daerah.

Pada bagian ini akan dikemukakan kerangka pendanaan untuk menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja Kabupaten Bireuen untuk anggaran dua tahun yang akan datang kedalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Bireuen tahun 2018-2022. Prediksi kemampuan keuangan ini merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, yakni tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi terkini disaat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Berdasarkan Tabel 3.15 di atas bahwa, realisasi dan proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib, maka dapat dilihat realisasi dan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah (Tabel 3.16) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selama masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen tahun 2017-2022. Prioritas I diprioritaskan untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan prioritas II untuk pencapaian visi dan misi. Realisasi dan perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah yang disajikan diatas, merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, dalam artian tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan informasi terkini pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Namun pembangunan Kabupaten Bireuen tidak bisa maksimal jika hanya mengandalkan APBK saja, tanggung jawab dan pendanaan untuk membangun daerah tidak semata-mata dibebankan kepada pemerintah, tetapi perlu adanya kolaborasi stakeholder (perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUKD yang turut andil dalam mengatasi permasalahan pembangunan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dengan Corporate

Social Responsibility (CSR), sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

IV.1 Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan kondisi Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka masih terdapat persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan. Permasalahan pembangunan daerah tersebut tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Tiap aspek di dalam tata kehidupan nasional maupun skala daerah relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis.

Respon yang efektif terhadap dinamika perubahan terutama untuk menghadapi tantangan potensial dan menangkap peluang sangat penting agar cita-cita dan harapan bersama untuk mewujudkan masa depan lebih baik bagi Kabupaten Bireuen kedepannya. Tantangan dan ancaman sebagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Oleh karena itu, tahap identifikasi masalah sangat berperan penting dalam proses perencanaan sebelum melakukan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bireuen waktu beberapa tahun terakhir telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bireuen dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten, provinsi maupun nasional.

Hal utama yang menjadi pertimbangan mendasar adalah hasil pengendalian dan evaluasi yang menunjukkan beberapa isu-isu yang ditemukan pada saat penyusunan RPJM Kabupaten Bireuen tahun 2017-2022 yang semula mendesak untuk diselesaikan, telah tuntas pada tahun sebelumnya. Namun ada pula temuan dari hasil evaluasi yang menunjukkan munculnya isu-isu baru yang mendesak untuk dituntaskan hingga akhir periode RPJMD 2022.

Dengan memperhatikan analisis kinerja, dan telaah-telaah pada bab sebelumnya, sehingga memunculkan beberapa permasalahan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pembangunan jangka menengah pada Perubahan RPJMK ini. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Bireuen dapat dijabarkan sebagai berikut:

IV.1.1 Unsur Kekhususan

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh. Dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai permasalahan, diantaranya:

1. Masih banyaknya pelanggaran syariat islam baik yang terjaring razia maupun tidak;
2. Belum optimalnya peran MPU dalam pemerintahan;
3. Terbatasnya dana untuk event Islami
4. Kurangnya pengawasan dan pembinaan pelanggar syariat
5. Belum optimalnya lembaga dan SDM terkait penguatan syariat Islam
6. Belum memadainya sarana dan prasarana dayah dan balai pengajian
7. Belum optimalnya pengelolaan BAZIS
8. Masih banyak lembaga pendidikan dayah yang belum terakreditasi
9. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memakmurkan mesjid dengan shalat jama'ah dan kegiatan keagamaan lainnya.

IV.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

A. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan suatu daerah. Negara-negara maju telah membuktikan bahwa, pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas bangsanya. Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan suatu bangsa, karena melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain:

1. Masih kurangnya pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan;
2. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan, terutama fasilitas sanitasi seperti MCK Siswa;
3. Perlunya revitalisasi SMPN 1 Bireuen menjadi Boarding School;
4. Masih rendahnya mutu guru dan distribusi guru yang berkualitas;
5. Masih rendahnya APM jenjang pendidikan SMA/ sederajat
6. Masih rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah
7. Belum optimalnya tata kelola lembaga pendidikan;
8. Belum optimalnya layanan pelatihan keterampilan.

B. Kesehatan

Selain pendidikan, pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia secara optimal. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Upaya peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Bireuen selama ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan antara lain:

1. Masih tingginya angka prevalensi *stunting*;
2. Masih tingginya angka mortalitas atau angka kematian;
3. Masih tingginya angka morbiditas atau angka kesakitan
4. Masih perlunya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit;
5. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya kesehatan;
6. Perlunya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan lebih proaktif dengan metode “jemput bola”.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Prasarana Jalan

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah, terutama menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bireuen terus dilakukan, namun masih ada jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten Bireuen dalam kondisi tidak baik. Berikut ini beberapa permasalahan pada prasarana jalan antara lain:

- Pada ruas jalan tertentu setiap hari selalu terjadi kelebihan beban muatan kendaraan (*tonase*) terutama jalur wilayah galian C;
- Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk merasa ikut memiliki, menjaga, memelihara dan melestarikan prasarana fisik yang telah dibangun;
- Keterbatasan personil dan sarana mobilitas penanganan program ke-PU-an terutama pada jumlah kendaraan, alat berat, perangkat laboratorium, dan perangkat survey perencanaan;
- Masih terdapat ruas jalan kabupaten yang belum tertangani;
- Belum adanya data base jalan yang sesuai dengan nomenklatur klasifikasi jalan;
- Pengawasan yang lemah terhadap pengoperasian hasil-hasil pembangunan infrastruktur;
- Perencanaan infrastruktur kurang memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian fungsi lingkungan

2. Prasarana Sumber Daya Air

Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku, pengairan lahan pertanian dan air industri. Seiring pertumbuhan penduduk dan kompleksitas aktivitas masyarakat akan semakin meningkatkan kebutuhan air, beberapa permasalahan dalam upaya pemenuhan sumber daya air sebagai berikut:

- Belum optimalnya pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air;
- Masih terdapat jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi rusak;
- Masih rendahnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air baku;

- Kurang terpadunya pengeleloaan sumber daya air dari hulu hingga hilir sehingga ketika musim penghujan terjadi banjir di daerah hilir sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan;
- Kurang terpeliharanya jaringan irigasi yang ada;
- Masih terbatasnya biaya baik untuk pembangunan, rehabilitasi maupun operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- Perlunya data base sistem pengairan yang terintegrasi.

3. Air Minum dan Sanitasi

Ketersediaan air minum dan pelayanan sanitasi menjadi hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan permasalahan yang harus diatasi, yaitu:

- Masih banyak penduduk yang belum terlayani air minum, jumlah penduduk yang memiliki akses air minum baru 76,45% dan yang terlayani dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) hanya 24,92%;
- Sumber-sumber air baku yang potensial belum dimanfaatkan secara optimal;
- Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah;
- Belum ada pihak swasta yang tertarik untuk melakukan investasi disektor air minum;
- Belum optimalnya penggalan potensi pendanaan dari masyarakat;
- Pemahaman masyarakat akan kebutuhan air minum layak terhadap kesehatan masih kurang;
- Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan;
- Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat;
- Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air bersih secara mandiri;
- Masih rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam memulai proses perencanaan sampai monitoring dan evaluasi;
- Masih banyak masyarakat yang belum terakses terhadap sanitasi dasar seperti: jamban dan saluran limbah;
- Pemahaman masyarakat akan pentingnya akses sanitasi terhadap kesehatan masih kurang;

- Masih minimnya media sosialisasi berkaitan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

4. Penataan Ruang

Penataan ruang menjadi hal strategis dalam pembangunan terutama sebagai matra spasial pembangunan. Untuk itu, diperlukan perhatian pada proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang dengan melibatkan partisipasi aktif dari stakeholder sehingga meminimalisir pelanggaran pemanfaatan ruang. Permasalahan-permasalahan di sektor penataan ruang yaitu:

- kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya pada penyediaan RTH perkotaan, pengelolaan dan pelestarian kawasan dengan fungsi lindung;
- Belum adanya peraturan daerah mengenai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
- Belum optimalnya kinerja kelembagaan bidang penataan ruang utamanya ketersediaan sumber daya manusia;
- Belum jelasnya kebijakan insentif-desinsentif dan penegakan aturan atas pelanggaran tata ruang;
- Belum optimalnya sistem informasi penataan ruang.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Permasalahan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

- Masih terdapat selisih antara jumlah keluarga dengan jumlah rumah/kekurangan rumah (backlog);
- Masih banyak rumah yang tidak layak huni;
- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman;
- Perlunya data base penerima bantuan rumah yang terintegrasi.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Guna meningkatkan kondusivitas wilayah di Kabupaten Bireuen, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas kehidupan demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta penanggulangan bencana. Salah satu tantangan dan permasalahan terkait urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu perhatian adalah:

1. Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat, terutama terkait pemahaman bahwa politik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;
2. Perlu adanya kelembagaan Satpol Pamong Praja yang kuat dan tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Masih rendahnya rasio jumlah Satpol PP dan WH per satuan penduduk.
4. Belum adanya kajian pemetaan resiko bencana yang merupakan dasar penanganan bencana di Kabupaten;
5. Masih terjadinya penggundulan hutan terutama daerah selatan Samalanga sampai Kecamatan Juli sehingga berpotensi longsor bila musim penghujan tiba;
6. Kondisi drainase yang kurang baik terutama di wilayah perkotaan sehingga sering terjadi banjir.
7. Kurangnya pelibatan masyarakat sebagai agen utama dalam penanggulangan bencana.

F. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek didalamnya lansia dan penyandang disabilitas. Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bireuen senantiasa dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

1. Perlunya peningkatan pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor;
2. Masih belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan;
3. Perlunya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial;
4. Masih terbatasnya pengetahuan perempuan dalam mendidik anak;

IV.1.3 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Sebagai implikasi dari bonus demografi yang menciptakan banyak penduduk usia kerja, serta tantangan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global, maka pembangunan ketenagakerjaan saat ini menjadi penting untuk perhatian berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berupaya melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Namun demikian, masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian kedepan antara lain:

1. Tingginya jumlah pengangguran;
2. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki;
3. Masih terdapatnya anak putus sekolah yang terpaksa harus bekerja;
4. Kurangnya jumlah lapangan kerja.
5. Kurangnya tenaga ahli dibidang yang digeluti.
6. Kurangnya tenaga pelatih berlisensi untuk diklat tenaga kerja.

B. Perempuan dan perlindungan anak

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian yaitu belum optimalnya kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang, antara lain

1. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak :
 - Belum adanya Penguatan kelembagaan terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak anak.
 - Belum maksimalnya Pemenuhan Hak Sipil Anak
 - Masih tingginya kekerasan terhadap anak dan perkawinan usia dini
 - Belum semua fasilitas umum berpedoman pada kondisi ramah anak
 - Belum semua SKPK, media dan dunia usaha memahami pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

2. Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

- Masih tingginya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Keterlibatan perempuan dalam pembangunan belum maksimal
- Belum semua SKPK memahami tentang Kesetaraan Gender
- Penganggaran yang belum responsif gender pada SKPK terkait

C. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Dalam mewujudkannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu dalam hal ketersediaan, Kabupaten Bireuen merupakan daerah surplus pangan, namun tidak tahan pangan, sedangkan untuk konsumsi pangannya juga belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).

D. Pertanahan

Pembangunan membutuhkan adanya kepastian akan lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian berkelanjutan, infrastruktur strategis dan lain sebagainya. Terkait hal tersebut permasalahan pertanahan yang muncul diantaranya:

1. Masih adanya konflik-konflik pertanahan;
2. Belum optimalnya pengelolaan pertanahan;
3. Belum semua lahan bersertifikat termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

E. Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaannya ditemukan permasalahan meliputi:

1. Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan;
2. Kurang optimalnya pengelolaan/pemilahan sampah pada sumbernya sehingga sampah yang terangkut ke TPA masih cukup besar.
3. Keterbatasan ketersediaan lahan pemerintah untuk RTH Publik.
4. Masih minimnya kapasitas pengelolaan sampah, baik dari segi kuantitas timbulan sampah, rendahnya kualitas pengelolaan serta tidak optimalnya lahan TPA;
5. Alokasi Pembiayaan yang masih rendah dari total anggaran APBD;

6. Belum memadainya jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) kontainer, gerobak, kendaraan pengangkut sampah, dump truck;
7. Belum tersedianya alat-alat berat yang dibutuhkan (seperti Buldozer, loader), dan jembatan timbang;
8. Sistem pengelolaan sampah yang belum modern.
9. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan belum optimal.

F. Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyediaan data dan informasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagai rujukan dasar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan, masih dihadapkan pada permasalahan diantaranya rendahnya konsistensi penggunaan data kependudukan sebagai rujukan dalam berbagai sektor pembangunan.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Belum semua masyarakat dan desa memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap manfaat aset milik gampong, teknologi, alat produksi, modal dan pasar, serta akses terhadap sumber daya keuangan;
2. Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
3. Keterlibatan masyarakat miskin dan rentan, kelompok perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa yang masih perlu ditingkatkan;
4. Belum semua gampong mampu dan mau mengembangkan BUMG untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat;
5. Belum semua gampong mampu menciptakan inovasi baru untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Permasalahan yang masih perlu perhatian adalah penggerakan masyarakat untuk sadar ber-KB dan perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

I. Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Bireuen. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

1. Belum optimalnya fungsi terminal;
2. Potensi kerawanan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan nasional masih perlu diminimalisir;
3. Belum adanya pemantauan lalu lintas secara otomatis untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi;
4. Masih kurangnya jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) bagi daerah terisolasi dan terpencil.

J. Komunikasi, Informatika, dan Persandian

Pemanfaatan aplikasi informatika dan website harus terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah. Upaya tersebut masih menemui beberapa permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya:

1. Masih rendahnya penggunaan sistem informasi pembangunan e-Government secara lengkap, aman, terintegrasi, dan terkelola dengan baik serta akuntabel;
2. Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet;
3. Masih adanya PPID OPD yang belum aktif.

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

1. Tingkat produktivitas koperasi dan UMKM belum maksimal;
2. Belum optimalnya pemasaran produk koperasi dan UMKM.;
3. Masih rendahnya dukungan pembiayaan usaha;
4. Koperasi masih kurang diminati oleh masyarakat.

L. Penanaman Modal

Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu:

1. Belum optimalnya realisasi penanaman modal;
2. Rendahnya pertumbuhan investasi di Kabupaten Bireuen.
3. Pengurusan izin masih sangat panjang.

M. Pemuda dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun dan menjadi tulang punggung pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Bireuen, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

1. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat provinsi dan nasional;
2. Kurang dan belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana olahraga sesuai standar;
3. Belum optimalnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet;
4. Kurangnya tenaga pelatih yang berlisensi.

N. Statistik

Penyediaan data dan informasi yang reliable, up to date, dan relevan harus terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara terintegrasi. Beberapa permasalahan yang kerap dihadapi terkait dengan data dan informasi antara lain validitas data dan informasi, belum link and match antara data yang tersedia dengan dinamika kebutuhan pembangunan, serta belum optimalnya sistem informasi satu data yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

O. Kebudayaan

Nilai-nilai budaya di Aceh khususnya Kabupaten Bireuen merupakan keunikan yang harus terus dijaga dan dipertahankan agar dapat semakin memperkuat daya tahan dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan era industri 4.0. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan karena dalam implementasinya menjumpai

berbagai persoalan antara lain adanya indikasi yang mengarah pada melunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di kalangan muda, terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan, serta didukung kondisi sarana prasarana dan pengelolaan cagar budaya yang belum optimal untuk menjadi sebuah tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal.

P. Perpustakaan dan kearsipan

Guna mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat di Kabupaten Bireuen, permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat, terbatasnya jumlah perpustakaan, dan jam operasional perpustakaan.

Salah satu pendukung mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bireuen, penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dan sarana prasarana yang belum memadai.

IV.1.4 Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk menjaga produksi perikanan dan garam, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui usaha pengolahan guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu:

1. Masih rendahnya nilai tambah dan lemahnya daya saing komoditas perikanan;
2. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya;
3. Masih lemahnya lembaga di tingkat nelayan;
4. Sarana Prasarana Perikanan yang belum memadai.

B. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian, yaitu:

1. Belum adanya pengelolaan yang baik, terutama kebersihan;
2. Penerapan regulasi yang belum patuh, kurangnya pengawasan, serta kurangnya promosi wisata;
3. Akses lokasi wisata yang belum memadai;
4. Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif.

C. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi off-farm upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

1. Menurunnya minat dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian;
2. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian, perkebunan, dan peternakan;
3. Masih kurangnya pabrik pengolahan bahan baku di Kabupaten Bireuen;
4. Sarana prasarana pertanian yang belum optimal.

D. Kehutanan

Persoalan ketidakpastian tata batas hutan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi yang memiliki izin usaha kehutanan dan pemerintah. Di tingkat lapangan batas yang berupa patok batas hutan juga sering kali tidak jelas sehingga sulit diverifikasi dalam pembuatan berita acara.

E. Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian dan industri), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu: rendahnya daya saing pasar, pengelolaan yang belum optimal, serta sarana prasarana pusat perdagangan yang belum memadai, kondisi pasar tradisional yang masih kumuh dan semraut.

F. Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Masih rendahnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi;
2. Belum optimalnya inovasi teknologi industri;
3. Belum adanya kluster industri;
4. Terbatasnya penganggaran untuk kemajuan perindustrian.
5. Terbatasnya industri yang bersertifikat ISO

IV.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan adalah fungsi awal dalam proses pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, yang tidak bisa diprediksi dan tak terbatas menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses

perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sejalan dengan hal tersebut terdapat permasalahan meliputi:

1. Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang;
2. Perlu adanya tenaga fungsional perencana dan tenaga fungsional peneliti sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penelitian;
3. Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja;
4. Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai feed back dalam proses pembangunan daerah.
5. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan.
6. Belum adanya Sistem Satu Data Pembangunan dan Terpadu;
7. Belum terkoneksi data dan informasi pembangunan;
8. Perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan data dan fakta.

B. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menjawab beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain:

1. Belum optimalnya inventarisasi asset daerah dan pemanfaatan asset dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
2. Belum optimalnya pengelolaan Pendaptan Asli Daerah.

C. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan SDM ASN Pemerintah Kabupaten Bireuen yang handal, memiliki integritas, kompetensi, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Masih banyaknya penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan keahlian;
2. Masih lemahnya kualitas SDM aparatur pemerintah yang sesuai dengan bidang keahlian;
3. Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN;
4. Sistem penilaian kinerja ASN yang belum terlalu akurat.

IV.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan program pembangunan daerah (prioritas utama), yang disinergikan dengan isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Isu Strategis pembangunan di Kabupaten Bireuen terdiri dari Isu Strategis Nasional, Isu Strategis Provinsi, dan Isu Strategis Daerah.

Isu Strategis Nasional meliputi:

1. Memperkuat tatanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Isu Strategis Provinsi meliputi:

1. Peningkatan sumber Penerimaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (*Aceh Kaya*);
2. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik (*Aceh Peumulia*);
3. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan (*Aceh Meuadapt*);
4. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan (*Aceh Dame*);
5. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan (*Aceh Troe; Aceh Meugoe; Aceh Meulaot*);
6. Pengembangan pertanian dan perikanan (*Aceh Meugoe; Aceh Meulaot*);

7. Pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM (*Aceh Kaya*);
8. Pengembangan pariwisata (*Aceh Kaya*);
9. Ketenagakerjaan (*Aceh Kreatif*);
10. Ketersediaan dan ketahanan energi (*Aceh Energi*);
11. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi (*Aceh SIAT*);
12. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah (*Aceh Seumeugot*);
13. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni (*Aceh Seuninya*);
14. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan (*Aceh Caroeng*);
15. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga (*Aceh Teuga*);
16. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (*Aceh Seujahtera*);
17. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (*Aceh Seujahtera*);
18. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup (*Aceh Green*).

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, maka diketahui permasalahan utama Kabupaten Bireuen yakni “Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen”. Masalah utama tersebut dirumuskan menjadi 7 (tujuh) Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

1. Penguatan nilai-nilai Syariat Islam, adat dan budaya
2. Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
4. Tanggap Bencana dan pemulihan sosial ekonomi
5. Tata Kelola Pemerintahan
6. Pengembangan potensi pemuda, pariwisata, dan daya saing daerah
7. Pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar masyarakat



Gambar 4.1: Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bireuen

IV.2.1 Penguatan Nilai-Nilai Syariat Islam, Sosial, Adat dan Budaya

Penguatan nilai-nilai syariat Islam difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca Al-Quran di kalangan anak-anak, orang dewasa dan lanjut usia dengan mengadakan kegiatan berupa kelompok pengajian membaca Al-Quran dengan memberdayakan balai-balai, meunasah dan mesjid pada setiap gampong.

Melaksanakan optimalisasi peran ulama dalam pembangunan dan peningkatan SDM tentang syariat Islam yang juga merupakan faktor yang mempengaruhi peningkatan minat belajar Al-Quran dan ilmu agama di kalangan masyarakat, perlu peningkatan pelatihan dan pemberian beasiswa untuk mencetak ulama di lembaga pendidikan yang berprestise baik, sehingga kader-kader tersebut diharapkan punya kemampuan untuk mendidik dan menyebarkan ilmu agama secara baik dan benar.

Selanjutnya perlu adanya peningkatan kegiatan event Islami yang selama ini masih kurang pembinaannya, dikarenakan kurang tersedianya dana untuk pembinaan kegiatan tersebut. Oleh sebab itu pendanaan yang memadai perlu disediakan Pemkab, baik melalui APBD, maupun sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Disamping itu, juga yang menjadi perhatian berupa peningkatan minat pemuda dalam pemahaman syariat Islam, untuk hal tersebut perlu pembinaan dan peran pemuda dalam pelaksanaan syariat Islam terutama dengan peningkatan pemberdayaan Karang Taruna yang ada dan adanya sosialisasi dan pembinaan pemuda tentang bahaya aliran sesat. Juga

menjadi perhatian yang berkaitan dengan regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan kelengkapan instrument hukum/pembinaan tentang penguatan syariat Islam (narkoba, hari besar Islam, waktu shalat, waktu adzan, pakaian, olahraga, pertunjukan kesenian dan rekreasi), untuk itu perlu pembentukan instrument hukum dalam penguatan syariat Islam.

Untuk meningkatkan nilai-nilai keislaman, dibentuk adanya gampong percontohan syariat Islam yang sebelumnya belum ada, menjadi model bagi gampong-gampong lainnya. Pelanggaran syariat Islam dapat diminimalisir di tengah-tengah masyarakat melalui pengawasan dan pembinaan bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut perlu memperkuat kelembagaan yang telah ada untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang disertai dengan dukungan dana yang memadai. Selain itu yang tidak kalah penting, yaitu pendataan dan penertiban aset wakaf, maka perlu dibentuk tim kerja untuk penertiban aset wakaf.

Selain upaya tersebut diatas, beberapa catatan penting berhubungan dengan upaya penguatan nilai-nilai syariat islam, sosial, adat dan budaya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pilar dalam penguatan syariat Islam adalah bagaimana merangkai sebuah pendidikan yang bersifat islami dalam rangka membina pemahaman khusus wanita terhadap diri mereka sendiri. Perangkat syariat Islam seperti Dinas Syariat, Dinas Dayah, Dinas Pendidikan, Majelis Pendidikan Aceh (MPA), Majelis Adat Aceh (MAA) dan lain-lain, harus mendesain sebuah program pendidikan baik cara formal maupun informal untuk membentuk sebuah paradigma bahwa jilbab itu penting bagi perempuan, nongkrong bersama laki-laki non mahram hukumnya haram.
- b. Kesadaran kolektif adalah satu jawaban untuk persoalan ini. Pemerintah harus bersinergi dengan semua pihak menciptakan kesadaran kolektif ini bahwa syariat Islam di Aceh dimaknai sebagai proses pendidikan. Pemerintah secara formal harus mengoptimalkan penggarapan kurikulum berbasis syariat di sekolah dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Di samping memberikan penguatan-penguatan kepada lembaga informal seperti dayah, pesantren, dan balai pengajian di gampong.
- c. Penegakan hukum syariat, seiring dengan tarbiyah pola penegakan hukum syariat Islam seperti cambuk tetap harus berjalan. Hukum cambuk pada prinsipnya adalah untuk memberi efek jera dan

pembelajaran bagi pelaku tindak pidana. Nilai positif lainnya yang ingin dicapai adalah agar dapat mencegah perbuatan kriminal atau maksiat. Hukuman cambuk ini juga menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan publik yang harus dijaga. Hukuman yang ditetapkan untuk kriminal itu lebih bersifat preventif, sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu. Hukum tentunya tidak akan berjalan efektif bila hanya sebatas melarang, tanpa ada sanksi yang tegas.

IV.2.2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam proses pembangunan daerah. Sumber daya manusia dalam pembangunan daerah haruslah memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah.

Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat. Belum optimalnya kualitas SDM Kabupaten Bireuen berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain belum optimalnya akses dan mutu pendidikan, belum optimalnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan pendapatan per kapita yang dipengaruhi oleh sektor ekstratif skala besar. Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan pengalaman pada perencanaan RPJMK Bireuen sebelumnya, bahwa pendidikan memegang salah satu kunci penting untuk meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa serta menguasai pengetahuan dan teknologi. Pendidikan yang baik dan layak akan memacu minat peserta didik melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yang berdampak semakin tinggi pula kualitas SDM dan tingkat keterampilan dari hasil pendidikan tersebut, mempebesar peluang kesempatan dalam kerja. Beberapa permasalahan yang masih menjadi tugas bersama adalah menyangkut penyebaran guru antar sekolah dan distribusi kompetensi keahlian para guru di masing-masing sekolah, belum terpantau dan belum

tertangani dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut perlu regulasi/pembenahan untuk peningkatan kualitas kompetensi keahlian guru disemua jenjang pendidikan. Hal ini penting, untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan di Kabupaten Bireuen karena lebih rendah dari rata-rata provinsi Aceh, kualifikasi guru yang berpendidikan S1/D-IV, untuk sekolah dasar masih 62%, pendidikan menengah pertama 86% dan sekolah menengah atas 65%. Oleh sebab itu peran Balai Latihan Guru harus dioptimalkan, dan menekankan kepada keahlian yang sangat penting berupa guru keahlian Matematika, fisika, keterampilan/olahraga dan bahasa Inggris. Demikian juga untuk sektor pendidikan dayah.

Selain itu, perlu pembenahan mutu pendidikan berupa akreditasi sekolah di segala jenjang pendidikan dan peningkatan mutu tenaga administrasi sekolah. Dalam hal kepemimpinan di setiap sekolah harus diterapkan kompetisi dan kompetensi kepala sekolah agar kualitas sekolah semakin meningkat. Disamping itu diperlukan sekolah inklusi untuk anak yang berkebutuhan khusus, sekolah berasrama, sekolah kejuruan perlu mendapat perhatian lebih. Untuk pendidikan pra sekolah berupa sekolah PAUD perlu ditingkatkan di setiap kecamatan dan desa, sehingga pemerataan pendidikan di setiap wilayah dalam kabupaten Bireuen semakin baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, strategi yang perlu dilakukan berupa peningkatan kelembagaan, sumberdaya manusia, penambahan pra sarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik berfokus ke kompetensi keahlian dan pemerataan keahlian di setiap sekolah, serta pembiayaan sekolah yang murah.

Permasalahan berikutnya yang mempengaruhi SDM yang belum berkualitas adalah akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan layanan kesehatan sangat perlu dilakukan mengingat kesehatan merupakan kunci utama individu dalam melaksanakan aktivitasnya. Melalui isu strategis ini, maka pelayanan kesehatan harus mampu menjangkau semua lapisan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terukur serta akuntabel. Pemasalahan yang masih ada yakni angka kematian bayi, berdasarkan data dari dinas kesehatan Kabupaten Bireuen angka kematian bayi pada tahun 2019 sebanyak 14/1000 kelahiran hidup.

Disamping itu masih ada jumlah bayi bergizi buruk, data selama ini menunjukkan angka yang berfluktuatif, artinya kondisi gizi buruk di Kabupaten Bireuen masih belum stabil, perkembangan upaya penanganan

gizi buruk di Kabupaten Bireuen cukup berhasil dimana angka gizi buruk dari tahun ke tahun terus menurun, ini terlihat dari angka gizi buruk tahun 2015 sedikit meningkat menjadi 27 orang dan kembali menurun pada tahun 2016 menjadi 11 orang, namun kembali meningkat di tahun 2017 sebanyak 22 orang. Namun untuk tahun 2018 kembali menurun dengan jumlah kasus gizi buruk sebanyak 17 kasus. Untuk tahun 2019, angka gizi buruk kembali mengalami penurunan dimana sebanyak 5 kasus yang terjadi di Kabupaten Bireuen. Untuk itu permasalahan bayi ini harus ditekan sekecil mungkin dan seoptimal mungkin dapat ditiadakan. Isu stunting juga mesti menjadi perhatian, Angka prevalensi stunting di Kabupaten Bireuen melampaui prevalensi stunting aceh dan nasional. Sehingga Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive, salah satunya berupa kampanye pola makan sehat dan seimbang disetiap kesempatan.

Kebijakan strategis bidang kesehatan yang diambil antara lain: peningkatan sarana dan pra sarana kesehatan, peningkatan kuantitas, kualitas dan kompetensi tenaga medis dan dokter, perbaikan sistem pelayanan untuk dapat menjangkau seluruh wilayah, pelayanan lebih optimal untuk bayi dan ibu melahirkan, kelompok masyarakat miskin di gampong dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

Secara detail kebijakan untuk menanggulangi persoalan kesehatan diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.
 - Pelaksanaan deteksi dini kelainan kehamilan
 - Pemberian imunisasi bayi dan balita
 - Pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan makanan pendamping ASI.
 - Pendampingan dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui, bayi dan balita
 - Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil
 - Pendampingan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran
 - Pengembangan kampung ASI
 - Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
 - Kampanye pola makan sehat dan seimbang di segala kesempatan.

3. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan. Upaya ini dapat dilakukan dengan mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan. Arah kebijakan ditujukan untuk :
 - Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan standar dan perkembangan ilmu kesehatan
 - Peningkatan sarana prasarana kesehatan melalui sistem informasi kesehatan
 - Pemenuhan operasional pelayanan kesehatan
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala dan bersifat preventif
 - Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai tipe rumah sakit dan perkembangan ilmu kesehatan
4. Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai standar untuk keselamatan pasien. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu
 - Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala
 - Peningkatan mutu SDM kesehatan melalui sertifikasi dan akreditasi
 - Pengembangan manajemen serta pelayanan kesehatan rujukan, medik, administrasi, dan keperawatan di sarana kesehatan
5. Menjamin ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - Perencanaan dan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan berbasis kebutuhan
 - Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat.
6. Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu :
 - Pemantauan kebersihan dan kesehatan makanan dan minuman di Masyarakat.
 - Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas
 - Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - Penyediaan pelayanan kesehatan khusus

IV.2.3 Meningkatkan Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi berbasis potensi dan kekuatan lokal sehingga perekonomian tidak lagi bergantung dari faktor eksternal. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya dan potensi lokal berupa usaha mikro dan koperasi harus lebih ditingkatkan produktivitasnya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah. Berbagai upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi adalah:

1. Memperluas dan menciptakan lapangan kerja

Adapun cara pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yang menyeluruh, dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan perencanaan tenaga kerja secara wilayah dan komprehensif. Dalam hubungan ini dipergunakan empat jenis kebijaksanaan, pertama adalah kebijaksanaan umum yang ditujukan untuk menciptakan iklim, suasana, serta kerangka pengambilan keputusan secara menyeluruh sedemikian rupa sehingga kegiatan pembangunan yang bersifat intensif tenaga kerja dapat lebih mudah terwujud. Di bidang ekonomi-keuangan peralatan yang dipergunakan antara lain perkreditan, perpajakan, dan bea masuk.

Bentuk kebijaksanaan yang kedua adalah kebijaksanaan sektor, yang dituju adalah agar pilihan produk dan pilihan cara produksi di masing-masing sektor bersifat padat karya baik langsung maupun tidak langsung. Bentuk kebijaksanaan yang ketiga adalah kebijaksanaan khusus. Kebijaksanaan ini merupakan langkah-langkah yang khusus dilaksanakan dalam rangka perluasan lapangan kerja, pengurangan pengangguran baik yang terbuka maupun yang tersembunyi dan usaha peningkatan mutu tenaga kerja. Kebijaksanaan keempat adalah yang menyangkut daerah. Dalam hubungan ini ditingkatkan perencanaan dan pelaksanaan usaha perluasan kesempatan kerja berdasarkan perencanaan daerah yang terpadu khususnya di daerah-daerah padat penduduk, minus dan miskin dan daerah-daerah pemukiman baru. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkatkan partisipasi golongan masyarakat yang langsung terlihat di dalam usaha perluasan lapangan kerja. Dengan demikian diciptakan satu kebijaksanaan perencanaan tenaga kerja yang menyeluruh.

2. Meningkatkan ketersediaan dan kemandirian pangan

Dua strategi utama untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan prinsip kemandirian pangan adalah pengembangan panganekaragaman pangan dan pengembangan pangan fungsional secara tersistem dari hulu ke

hilir secara dinamis dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal ini berbagai regulasi terkait perlu disempurnakan dan dikembangkan. Investasi perlu diarahkan secara proporsional, baik di sektor ekonomi maupun sosial dengan mempertimbangkan daya ungkit kebijakan dan program lainnya seperti peningkatan kesempatan usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, serta peningkatan penyediaan dan ekspor pangan. Pembangunan ketahanan dan kemandirian pangan membutuhkan pendekatan teknologi, ekonomi, sosial (termasuk budaya), dan lingkungan secara sinergis. Pesatnya kemajuan pembangunan di segala bidang baik yang dilaksanakan oleh Pemkab maupun oleh usaha swasta serta perseorangan, membutuhkan lahan yang semakin luas pula. Salah satu dampaknya meningkatnya alih fungsi lahan pertanian/persawahan, untuk itu perlu qanun/regulasi yang mengatur pemanfaatan lahan dan mengganti lahan yang sudah beralih fungsi dengan cara memperluas lahan pertanian meliputi: pencetakan sawah baru dan mengoptimalkan sawah-sawah yang tidak produktif, dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Bireuen.

Pemenuhan untuk sarana dan prasarana untuk ketahanan pangan yang memadai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan, berupa penyediaan bibit unggul, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, sarana irigasi yang memadai, penyediaan alat-alat produksi pertanian, pengaturan musim tanam. Memperkecil adanya wilayah rawan pangan di Kabupaten Bireuen, maka diperlukan pembangunan lumbung pangan terutama di wilayah-wilayah yang krisis pangan, sosialisasi dan promosi keragaman pangan yang sehat.

3. Mengoptimalkan dan membina industri kecil, koperasi dan UMKM

Usaha koperasi masih belum optimal, untuk itu perlu optimalisasi koperasi, usaha/kelompok usaha kecil dan menengah. Perlu dukungan pendampingan dan dana yang cukup dari berbagai sumber yang difasilitasi oleh pemda. Akses pemodal, pembinaan manajemen koperasi terutama dengan pengawasan dan pengembangan usaha yang lebih luas. Hal ini dilakukan dengan memperkuat kelompok usaha koperasi khusus di bidang usaha tertentu seperti petani sawit, petani palawija, nelayan, petani tambak, industri rumah tangga, pedagang kecil, sehingga mempermudah akses berusaha.

4. Mengoptimalkan lahan pertanian dan perikanan

Isu strategis untuk kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering yang luas. Lahan basah berupa sawah, berada hampir di setiap kecamatan yang terletak di kawasan pantai dan kawasan tengah. Disamping itu pertanian lahan kering yang dominan adalah tanaman kedelai dan jagung yang secara umum sesuai dikembangkan pada daerah bagian utara dan tengah wilayah Kabupaten Bireuen seluas 14.702,81 ha. Lokasi lahan pertanian ini tersebar pada seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen. Baik lahan basah maupun lahan kering belum dikelola secara baik. Oleh karena itu lahan-lahan tersebut perlu dioptimalkan penggarapan melalui penguatan teknologi yang tepat, keragaman tanaman, peningkatan produksi serta pemasaran hasil pertanian.

Program kawasan peternakan yang akan direncanakan pengembangannya dalam wilayah Kabupaten Bireuen seluas 6.530,41 ha, meliputi:

- Kawasan sentra peternakan terpadu seluas 20,41 ha;
- Kawasan sentra pakan ternak berupa potensi kebun rumput seluas 845 ha, dan lahan pengembalaan seluas 5.665 ha, tersebar di seluruh kecamatan;
- Pengembangan sentra peternakan ternak kecil tersebar di seluruh kecamatan; dan
- Pengembangan sentra peternakan unggas berada tersebar di seluruh kecamatan.

Dengan melihat hasil analisis kesesuaian lahan, berdasarkan luas lahan perkebunan yang ada, izin lokasi kawasan perkebunan, serta rencana pengembangan kawasan permukiman dan peruntukan lainnya, maka luas lahan perkebunan di Kabupaten Bireuen perlu direncanakan seluas 55.219,09, antara lain:

- Peruntukan Perkebunan skala besar seluas 9.735,59 Ha;
- Peruntukan perkebunan rakyat seluas 45.279,50 Ha.

Lahan perkebunan yang sangat potensial untuk dilakukan pengembangan dan peningkatan adalah kelapa dalam, pinang, kakao. Adapun perkebunan sawit dan karet merupakan sektor komoditi yang harus disetarakan pengembangannya, sehingga dapat melayani bahan baku pengolahan minyak ke industri CPO.

Isu strategis untuk produksi perikanan tangkap antara lain meliputi; ikan tuna, tongkol, kakap, kerapu, udang, kepiting dan berbagai jenis ikan

lainnya. Saat ini produksi ikan nelayan belum dikelola secara optimal, sehingga diperlukan berbagai upaya produktivitas, penangkapan dan pengolahan hasil laut. Perlu penegakan hukum untuk penggunaan alat tangkap dan manajemen pengelolaan nelayan dalam organisasi Panglima Laot Kabupaten, pengolahan hasil tangkapan harus berorientasi kepada kesehatan konsumen seperti tidak menggunakan bahan yang berbahaya dalam pengolahan dan pengawetan hasil tangkapan. Penguatan dan peningkatan manajemen TPI (Tempat Pendaratan Ikan) perlu ditingkatkan, berupa fasilitas pelabuhan, fasilitas penyimpanan ikan, tempat pelelangan ikan, dan pembinaan SDM nelayan.

Beberapa jenis ikan yang dihasilkan dari budidaya perikanan darat antara lain; udang, bandeng, kepiting bakau, ikan nila dan berbagai jenis ikan lainnya. Disamping itu juga terdapat tempat-tempat pembenihan ikan. Budidaya Perikanan di Kabupaten Bireuen memiliki luasan 5.702,59 Ha. Untuk itu perlu optimalisasi produk perikanan dengan peningkatan kualitas tambak, benih dan pemasaran.

IV.2.4 Penanggulangan Pencemaran Lingkungan, Tanggap Bencana dan Pemulihan Sosial Ekonomi

Pengelolaan sampah yang belum memadai di TPA menjadi isu utama pencemaran lingkungan, disamping itu sarana dan prasarana TPA (Tempat Pembuangan Akhir) juga belum memadai. Belum tersedianya RTH (Ruang Terbuka Hijau) untuk ibu kota kabupaten dan kecamatan, yang menyebabkan berkurangnya kualitas udara dan air. Untuk hal tersebut perlu perencanaan dan pembangunan RTH demi kenyamanan warga masyarakat. Semakin rendahnya daya dukung alam yang berdampak menurunnya kualitas air dan udara. Untuk hal tersebut perlu adanya laboratorium/alat uji kualitas air dan udara agar dapat mengoptimalkan laboratorium lingkungan hidup yang saat ini tidak berfungsi.

Kondisi pasar tradisional yang masih semraut, kotor dan jauh dari kata nyaman menjadi tugas yang harus segera dituntaskan, mengingat pasar merupakan infrastruktur dasar masyarakat yang paling dibutuhkan. Kedepan diharapkan Kabupaten Bireuen memiliki pasar yang tertata rapi, bersih, memiliki sistem pengelolaan yang baik, sehingga menjadi tempat yang nyaman dikunjungi setiap hari.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan, untuk itu perlu sosialisasi dan regulasi dalam hal kebersihan

lingkungan dan termasuk Regulasi persampahan di seluruh wilayah kabupaten. Semakin tingginya volume kendaraan yang dapat mengakibatkan tingginya angka fatal di jalan disebabkan belum memadainya infrastruktur pendukung di jalan raya. Oleh sebab itu perlu peningkatan dan sosialisasi infrastruktur pendukung di jalan raya.

Penggunaan racun pestisida masih tinggi, terutama di bidang pertanian, untuk itu perlu minimalisasi racun pestisida yang menyebar di lingkungan terbuka dan perlindungan air tanah. Pengelolaan lahan dan hutan di Kabupaten Bireuen belum dibuat regulasinya sehingga banyaknya lahan terlantar dan kerusakan lahan akibat penggalian/penimbunan tanah galian C, sehingga perlu dioptimalkan pengelolaan lahan dan hutan. Saat ini ibu kota kabupaten dan kota kecamatan penataan kotanya masih semraut, sehingga perlu penertiban dan pengaturan tata kota yang baik.

Luas hutan Kabupaten Bireuen mencapai 65.895 ha yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Kawasan hutan lindung memiliki luas areal 30.004 Ha. Sedangkan kawasan hutan produksi seluas 35.891 Ha, karena keterbasan kawasan hutan lindung, sehingga hutan produksi direncanakan untuk dijadikan sebagai hutan lindung seluas 3.749,29 Ha. Pada desa-desa dipinggiran kawasan hutan lindung yang sering terjadi konflik dengan satwa liar terutama gajah direncanakan penanganannya. Selanjutnya kawasan hutan produksi tetap yang direncanakan seluas 33.695,37 Ha, dan kawasan Hutan Rakyat mencakup areal seluas 2.302,27 Ha atau 1,77 % dari luas kabupaten. Kawasan Hutan Rakyat tersebar di beberapa kecamatan, semua kawasan hutan tersebut harus dioptimalkan manfaat dan pelestariannya berdasarkan program pro rakyat, dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Bireuen

Melalui isu strategis ini, adanya pembinaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan/janda dan anak-anak korban konflik yang belum tertata dengan baik, peningkatan perhatian dan pemberdayaan terhadap korban konflik tersebut melalui program pemberdayaan ekonomi, pemberian bantuan beasiswa dan pendanaan yang memadai oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA), sumber dana resmi lainnya dengan berkoordinasi bersama pemerintah Kabupaten Bireuen.

IV.2.5 Tata Kelola Pemerintahan

Berbagai hal yang berhubungan dengan masih kurangnya kemampuan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, masih saja menjadi

bahan perbincangan publik. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kondisi pengelolaan pemerintahan bisa dilihat dari capaian nilai SAKIP yang masih rendah, data dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan capaian skor tertinggi baru pada kriteria C. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih sangat rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di pemerintahan Kabupaten Bireuen belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan mendasar. Berbagai hal perlu dilakukan usaha untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik maka perlu dilakukan:

- a. Membangun Profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah yaitu kompetensi untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar serta meningkatkan moral, kejujuran, ketulusan dalam bekerja.
- b. Meningkatkan Pelayanan publik atau pelayanan umum yang bersifat responsif/aktif.
- c. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan praktik good and clean governance meliputi:
 - Penguatan gerakan anti korupsi
 - Transparansi
 - Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna)
 - Penguatan audit internal
- d. Partisipasi masyarakat madani berupa keikutsertaan masyarakat dalam membangun rasa memiliki dan bertanggung jawab
- e. Penguatan azas akuntabilitas berupa pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- f. Penguatan manajemen sistem informasi yang meliputi:
 - Pengelolaan database
 - Monitoring dan pengendalian

Selain itu, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik juga melalui pengembangan data yang berkualitas untuk komunikasi pemerintahan merupakan upaya penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan mencapai keberhasilan dalam mengelola pemerintahan. Sebagai tugas pokok pemerintahan untuk

menjaga keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan sosial, ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan lain-lain, maka sangat diperlukan adanya komunikator aparatur pemerintahan yang dapat bekerja secara profesional dan memiliki integritas. Beberapa hal yang sangat perlu mendapat penguatan dalam hal urusan komunikasi meliputi:

1. Penguatan sumber daya komunikasi publik melalui pengelolaan Website, Media Center dan Telecenter, penerbitan tabloid, majalah;
2. Melakukan diseminasi informasi dan iklan layanan masyarakat melalui media radio, televisi;
3. Penyertaan dalam pameran/promosi, baliho, spanduk, poster;
4. Pengelolaan opini dan aspirasi publik.

Penguatan sistem informasi dalam pengelolan pemerintahan (*E-Government*) sangat perlu didukung dengan Peningkatan kemampuan SDM aparatur meliputi peningkatan kompetensi keahlian aparatur pemerintahan serta pengadaan sarana dan prasarana yang meliputi:

1. Pengembangan sarana intranet dan penguatan akses internet;
2. pengelolaan data centre (data base);
3. Pengembangan inovasi Teknologi Informasi (Aplikasi, *E-Procurement*, *E-Mail*, *E-Lybrary*, *E-Recruitment*, *E-News*, *E-Keurani*, dll)

IV.2.6 Pengembangan potensi pemuda, pariwisata, dan daya saing daerah

Peran pemuda dan pemudi dalam pembangunan di Kabupaten Bireuen belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Perkumpulan pemuda dalam bentuk karang taruna dalam kondisi relative pasif, disebabkan persoalan terkait dengan manajemen, pembinaan, sarana dan prasarana, dan pendanaan yang kurang memadai. Untuk itu perlu diaktifkan kembali dan ditingkatkan peran sertanya dalam pembangunan.

Kegiatan keolahragaan belum berkembang seperti yang diharapkan, hal ini disebabkan minimnya SDM pelatih, wasit dan juri. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu mengoptimalkan SDM pelatih, wasit dan juri melalui pengiriman mengikuti kegiatan training baik di tingkat propinsi maupun tingkat nasional. Adapun sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional di kabupaten Bireuen belum tersedia, maka perlu peningkatan sarana dan prasarana tersebut. Sementara itu pembinaan untuk olahragawan yang berprestasi masih minim dan tidak terarah, maka untuk hal tersebut perlu pembinaan yang lebih optimal lagi, sehingga kompetisi

olahraga di kabupaten Bireuen semakin baik dan berprestasi go nasional dan internasional.

Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang telah ada kurang terawat dan terpelihara, salah satunya disebabkan kurangnya pendanaan dan promosi. Untuk itu perlu mengoptimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang telah ada, agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Perhatian untuk pembina, pelatih dan pelaku olahraga di Kabupaten Bireuen masih kurang diapresiasi. Berdasarkan permasalahan tersebut pihak pemerintah dan perangkatnya di kabupaten Bireuen tidak hanya mengandalkan anggaran yang bersumber dari APBK, akan tetapi harus berupaya mencari sumber-sumber lain yang sah tetapi tidak terikat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain upaya strategis diatas, perlu kebijakan yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan pemuda serta memberi ruang yang optimal untuk turut serta dalam pembangunan. Berikut beberapa kebijakan yang ditujukan untuk peningkatan partisipasi pemuda dalam mengisi pembangunan:

- a. Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut dengan meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan:
 - Menggiatkan organisasi kepemudaan di tingkat RW/Kelurahan/Gampong (Karang Taruna) dengan konsep kekinian,
 - Melakukan pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor)

Isu strategis di sektor pariwisata dikembangkan dengan memperhatikan wilayah Kabupaten Bireuen dengan topografi wilayah pegunungan dan pantai yang dapat dijadikan sebagai promosi wisata lokal. Wisata lokal berupa wisata sejarah, wisata alam, wisata pantai, wisata buatan dan wisata minat khusus. Bireuen mempunyai sejarah yang gemilang pada saat awal kemerdekaan karena pernah menjadi ibukota sementara Republik Indonesia dan mempunyai bangunan bersejarah yang pernah dikunjungi oleh Presiden Pertama Republik Indonesia yaitu Ir. Soekarno. Disamping itu juga terdapat kuburan/situs sejarah cagar budaya perang kemerdekaan yang perlu dipromosikan ke luar daerah.

Kekayaan adat dan budaya serta adat istiadat juga beragam dan menarik untuk dikembangkan dalam promosi pariwisata. Juga terdapat banyak pantai dan sungai serta daerah irigasi yang luas dan menarik sebagai objek wisata daerah. Wisata kuliner dengan beragam macam makanan dan minuman dapat dijadikan sebagai komoditas objek wisata. Semua potensi wisata perlu dilakukan pendataan, perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan penguatan dalam usaha melestarikan sehingga dapat meningkatkan sumber PAD kabupaten. Manajemen hotel dan penginapan lainnya perlu dioptimalkan. Penguatan profesionalisme tenaga kepariwisataan, perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar kelayakan sebagai objek wisata.

Upaya untuk meningkatkan inovasi di berbagai sektor sangat diperlukan guna meningkatkan daya saing daerah. Perlu adanya usaha yang serius untuk memacu inovasi baik di kalangan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan, salah satu upaya adalah dengan meningkatkan minat dan perhatian masyarakat dalam berinovasi dengan mengadakan perlombaan inovasi tingkat daerah, mengapresiasi tinggi pelaku usaha yang berinovasi serta membuat regulasi yang bisa mendorong masyarakat berinovasi.

IV.2.7 Pengendalian tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar masyarakat

Isu strategis untuk perumahan dan permukiman yang baik merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah terutama pemerintah daerah. Kebutuhan rumah setiap tahun meningkat yang berbarengan dengan penambahan jumlah penduduk. Pembangunan perumahan berupa kegiatan perbaikan rumah yang tidak layak huni hingga pembangunan perumahan baru bagi masyarakat kelompok dhuafa. Pembangunan perumahan baru yang layak dibutuhkan areal yang luas dan memiliki akses transportasi yang memadai. Permasalahan yang banyak terjadi, bahwa lahan sawah produktif banyak diperjual belikan untuk pembangunan perumahan. Hal ini dapat mengurangi volume pertanian terutama padi dan palawija. Permasalahan sanitasi rumah berupa MCK (Mandi Cuci Kakus) kurang diperhatikan oleh masyarakat, sehingga kesehatan dan kebersihan perumahan masyarakat dapat menimbulkan lingkungan yang kotor dan dapat menimbulkan penyakit. Untuk hal tersebut harus dibenahi secara kontinyu selama lima tahun ke depan.

Isu strategis yang terkait kawasan permukiman adalah adanya sebagian areal permukiman bercampur baurnya kawasan perumahan masyarakat dengan bangunan kegiatan ekonomi lainnya. Banyaknya pembangunan pertokoan bertingkat dan gudang-gudang industri yang dapat merusak lingkungan perumahan masyarakat seperti limbah industri, kebisingan, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Permasalahan ruang terbuka hijau untuk ibu kota kabupaten dan kecamatan belum serius untuk ditata ulang, hal ini untuk memberikan keindahan dan mengurangi polusi udara. Permasalahan penataan kawasan rumah ibadah dan pesantren belum ditata secara rapi.

Isu strategis untuk kegiatan pekerjaan umum didominasi oleh pembangunan jalan kabupaten, jalan kecamatan dan jalan desa, pengairan, air minum dan drainase. Jalan kabupaten yang telah dibangun untuk data terakhir 2019, bahwa jalan kabupaten panjang seluruhnya 1.207,67 km yang terdiri dari jalan permukaan aspal 682,32 km sekitar 56,49 %, kerikil/pengerasan 410,25 km sekitar 33,97 %, dan jalan tanah 102,84 km sekitar 8,52 %. Secara umum kondisi jalan baik 41,70 %, sedang 4,49 %, rusak ringan 7,75 % dan rusak berat 46,06 %. Permasalahan perbaikan jalan yang ada belum optimal karena jalan aspal baru mencapai 56,49 % akan ditingkatkan menjadi 70%, sehingga mengurangi jalan yang rusak dan yang berlapis kerikil.

Permasalahan pembangunan jembatan yang menghubungkan kecamatan dan desa perlu ditingkatkan menjadi jembatan permanen dan mengikuti lebar jalan baru. Areal persawahan mulai mengecil dan menyebabkan penyusutan produksi padi, hal ini banyak lahan produktif berubah fungsi untuk peruntukan perumahan dan sarana industri/perdagangan. Perlu regulasi untuk mempertahankan lahan irigasi yang telah ada dan usaha mencetak sawah baru. Pada kegiatan irigasi ternyata terjadi kekurangan air, maka harus dibangun waduk baru untuk menampung air yang digunakan pada saat kekurangan air danantisipasi kekurangannya pada musim kemarau. Permasalahan drainase lahan dan drainase irigasi belum optimal dibangun, maka perlu perencanaan dan pembangunan sehingga kelebihan air dapat optimal dibuang ke pembuangan akhir (outlet).

Isu strategis untuk listrik dan air minum, bahwa masalah rumah tangga pelanggan listrik PLN sudah melebihi 100% berarti sangat baik dimana seluruh rumah tangga telah memiliki listrik, namun untuk

pelanggan PDAM pada tahun 2019 masih sangat rendah yaitu sekitar 21,31% rumah tangga, ditargetkan meningkat menjadi 31,74 % pada tahun 2022. Hal ini menjadi sangat penting pada sisa pelaksanaan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 dalam rangka peningkatan yang signifikan untuk pelayanan air bersih bagi masyarakat, dan pelaksanaannya didukung sumber air berupa debit sungai di Kabupaten Bireuen sangat mencukupi berupa Krueng Peusangan yang mampu menyuplai dengan kapasitas 0,71 m³/det, bahkan dapat melayani industri besar yang ada di Kota Administratif Lhokseumawe. Untuk wilayah Samalanga hingga peudada dapat dilayani oleh Krueng Peudada dengan kapasitas 0,29 m³/det.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

V.1 Visi

Visi pembangunan Kabupaten Bireuen yang dituangkan dalam RPJMK Bireuen adalah merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Bireuen terpilih. Perumusan visi ini merupakan gambaran arah pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk periode 2017-2022. Visi pembangunan Kabupaten Bireuen adalah “TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARI’AT ISLAM”. Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kabupaten Bireuen diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Bireuen yang Adil dan Makmur

Bermakna adanya keseimbangan dan kesebandingan dalam semua aspek pembangunan dalam wilayah kabupaten Bireuen. Keadilan dalam membangun Kabupaten Bireuen didasarkan pada keadilan komutatif yaitu keadilan yang merata, namun dalam keadaan tertentu juga diperhatikan adanya keadilan distributif yaitu keadilan yang diberikan berdasarkan kebutuhan bagi masing-masing masyarakat. Terciptanya keadilan akan membawa dampak secara langsung bagi tercapainya masyarakat Bireuen yang makmur, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Bireuen yang didasarkan kepada asas keadilan. Kedua aspek keadilan dan kemakmuran adalah suatu tujuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

2) Bireuen yang Aman, Damai dan Sejahtera

Bermakna, terciptanya ketenangan, kenyamanan, kedamaian, serta kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Bireuen dengan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan semangat MoU Helsinki serta Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

3) Berlandaskan Syariat Islam

Bermakna bahwa, pada setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bireuen dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip *good governance* serta dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Syari'at Islam secara *kaffah*. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang *madani*, yaitu masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai selaras dengan terciptanya aparatur pemerintahan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

V.2 Misi

Untuk mencapai visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen sebagaimana disebutkan di atas, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi kabupaten Bireuen untuk tahun 2017-2022, sebagai berikut:

Misi 1: Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur dan terintegrasi berdasarkan Syariat Islam.

Melalui misi 1 ini akan tercipta pembangunan Kabupaten Bireuen di segala bidang yang merata dan adil, sehingga dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang makmur, aman dan damai yang didasarkan pada pengamalan atas nilai-nilai Syariat Islam oleh aparatur pemerintah maupun masyarakat Kabupaten Bireuen.

Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Melalui misi 2 ini akan menghasilkan masyarakat dan khususnya generasi muda Bireuen yang sehat dan cerdas, serta mampu bersaing bukan hanya pada tingkat lokal, namun juga pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Pemenuhan akses terhadap kesehatan dan pendidikan akan menjadi perhatian besar Pemerintah Kabupaten Bireuen. Selain itu, peningkatan kualitas bagi aparatur pada bidang pendidikan dan kesehatan turut menjadi bagian dari upaya pada misi kedua ini, sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Bireuen yang bermartabat dengan memenuhi standar minimum atas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Misi 3: Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi.

Melalui misi 3 ini akan mendorong dan mengembangkan berbagai sentra produksi dan industri masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, sehingga dapat mewujudkan kemakmuran masyarakat serta meningkatkan daya saing ekonomi kabupaten Bireuen.

Misi 4: Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

Melalui misi 4 ini akan membangun masyarakat Bireuen yang berkualitas dan berdaya saing serta meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Upaya pencapaian misi ini dimulai dari 1) pengembangan sistem informasi dan database potensi yang dimiliki oleh pemuda Bireuen dari segala bidang, diantaranya pada potensi olahraga, seni budaya, serta pada bidang keagamaan. Dilanjutkan dengan 2) upaya pembinaan dan pengembangan potensi pemuda, olah raga dan pariwisata di Kabupaten Bireuen yang akan dilakukan tidak hanya pada a) aspek penyediaan sarana prasarana pendukung namun juga termasuk pada b) penataan regulasi terkait, serta c) pembinaan sumberdaya manusia-nya baik mental maupun spiritual serta kesadaran tentang bahaya narkoba, yaitu seluruh pemuda dan masyarakat Kabupaten Bireuen dan pada kawasan pariwisata, sehingga upaya untuk menciptakan kawasan wisata Islami di Bireuen akan dapat tercapai.

Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Melalui misi 5 ini, adalah komitmen pemerintahan Bireuen sebagai pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam setiap aspek pemerintahan. Perubahan paradigma birokrasi (reformasi birokrasi) akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dimulai dari penempatan *the right man in the right place* sehingga dapat menempatkan aparatur pelaksana yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Perubahan *mindset* aparatur pemerintahan menjadi aparatur yang melayani masyarakat secara langsung akan menunjukkan pencapaian tujuan pembangunan yang adil, makmur, aman dan damai berlandaskan pada pengamalan nilai-nilai Syariat Islam.

Misi 6: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan.

Melalui misi 6 ini akan mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Bireuen di segala sektor dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Misi 7: Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Melalui misi 7 ini, merupakan upaya penguatan terhadap UUPA dan MoU Helsinki dalam rangka menciptakan situasi aman dan damai di semua lapisan masyarakat serta memberikan perlindungan sosial dengan mengutamakan tindakan afirmasi bagi kelompok marginal (perempuan, anak-anak, manula dan kelompok disabilitas, serta kelompok marginal lainnya). Upaya penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam berbagai aspeknya, dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Untuk mewujudkan visi masyarakat Kabupaten Bireuen melalui ketujuh misi ini, pada dasarnya merupakan satu kesatuan rangkaian sistem pembangunan. Ketujuh misi berfungsi sebagai lokomotif pembangunan dari serangkaian jабaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang. Kondisi Kabupaten Bireuen yang sejahtera akan dilihat dari kemandirian ekonomi yang meningkat, Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) yang semakin membaik, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat.

Kemandirian ekonomi dapat ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan. Pada saat ini angka kemiskinan menunjukkan penurunan secara signifikan yaitu pada tahun 2015 sebesar 16,94 persen menurun menjadi 14,31 persen pada tahun 2018 dan menjadi 13,56 persen di tahun 2019. Target penurunan untuk tahun 2020 – 2022 karena kondisi pandemi Covid-19 yang sedang kita alami, maka penurunannya tidak begitu signifikan lagi, namun dengan berbagai upaya dan terobosan pemberdayaan ekonomi tetap diusahakan menurun, dengan target 13,06 pada tahun 2020; tahun 2021 diharapkan menjadi 12,56 persen dan tahun 2022 menjadi

12,06 persen. Selain itu, dapat dilihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan capaian tahun 2015 sebesar 3,8 persen meningkat menjadi 4.33 persen pada tahun 2018 dan terus melaju menjadi 5 persen pada tahun 2019. Dengan kondisi covid target untuk tahun 2020 dan seterusnya cenderung menurun namun tetap diupayakan positif masing-masing dengan angka 2,5 persen, 3 persen sampai 3,3 persen.

Untuk mengukur atau mengklasifikasikan suatu daerah maju, berkembang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup maka dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Bireuen pada tahun 2015 dengan capaian sebesar 69,77 persen meningkat menjadi sebesar 71,37 persen pada tahun 2018 dan 72,27 pada tahun 2019. Seterusnya untuk tahun 2020 sampai dengan 2022 masing-masing ditargetkan 72,28; 72,29 dan 73.

Selain melihat kemandirian suatu daerah, Kabupaten Bireuen juga membangun semangat kebersamaan dengan membangun kemauan untuk berjuang dan bekerja, menyatukan tekad guna mencapai tujuan bersama. Semua itu dapat dilihat dari pemerintahan yang baik, diukur dari Indeks reformasi birokrasi suatu daerah, target nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 sebesar 50-60 poin dengan kriteria CC. Untuk itu keberhasilan yang lain dapat dilihat dari nilai Sakip, nilai Sakip Kabupaten Bireuen dari tahun 2017 sampai dengan 2019 masih dengan kriteria C, pada tahun 2017 memperoleh nilai 47,47 poin dengan kriteria C, tahun 2018 mendapatkan nilai sakip 48,83 poin dengan kriteria C, dan pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan dengan skor 49,25 poin masih pada kriteria C. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih relatif rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di pemerintahan Kabupaten Bireuen belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan mendasar. Sedangkan untuk target tahun 2020, 2021 dan 2022, nilai Sakip diharapkan bisa mendapatkan kriteria B.

Pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam menanggulangi kemiskinan selama ini telah dilakukan secara bersama-sama dari berbagai stakeholders baik pemerintah, dunia usaha

melalui CSRnya dan personal melalui Baitul Mal. Proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen periode 2017-2022, melalui pelaksanaan program-program kerja dilaksanakan dengan slogan

“CEPAT, TEPAT, TUNTAS DAN IKHLAS”.

V.4 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, diperlukan penjabaran lebih lanjut pada tujuan dan sasaran pembangunan. Pada tabel 5.1 disajikan realisasi tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 serta target capaian tahun 2020, dikarenakan pada Qanun Nomor 3 tahun 2018 tentang RPJM Kabupaten Bireuen 2017-2022, tujuan dan sasaran pembangunannya menampilkan indikator dan target yang bersifat output bukan out come maka capaiannyapun menjadi sangat variatif, selanjutnya tabel 5.2 menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan untuk tahun 2021-2022.

Tabel 5.1
Capaian Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Bireuen Tahun 2018 dan 2019 serta Target tahun 2020

Visi: Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bireuen yang Adil, Makmur, Aman, Damai
dan Sejahtera Berlandaskan Syari'at Islam

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1 : Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur, dan terintegrasi berdasarkan syari'at Islam								
	Memperkuat Pelaksanaan Aqidah, Syariah dan akhlak dalam tatanan Kehidupan Bermasyarakat	Sasaran : Meningkatkan Nilai-nilai Syariat Islam Dalam tatanan Kehidupan Bermasyarakat	Jumlah kunjungan safari Ramadhan	Kecamatan	17	17	17	17
		Sasaran : Meningkatkan pelayanan Jamaah haji	Jumlah kloter jamaah haji Kabupaten Bireuen per tahun	Kloter	1	1	1	1
		Sasaran : Meningkatkan akses pelayanan pendidikan Non-Formal bidang keagamaan	Jumlah Pelatihan pendidikan Non Formal bidang keagamaan	Pelatihan	2	2	1	2
		Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan pengurus lembaga keagamaan	Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga	186	186	188	190

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	2020
		Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan pengurus lembaga keagamaan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelatihan pemahaman wawasan syariat Islam	Kecamatan	17	17	17	17
		Sasaran : Meningkatnya kerukunan umat beragama	Jumlah sidang mubahasah	Sidang	1	2	2	2
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan								
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana Pendidikan	Sasaran : Meningkatnya proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	50	61.79	63.73	65
		Sasaran : Sarana Prasarana Pendidikan dasar Sembilan tahun sesuai SPM	Persentase Fasilitas Pendidikan dasar Sembilan Tahun	persen	85	87	90	93
		Sasaran : Terpenuhinya manajemen pelayanan pendidikan yang baik	Jumlah sekolah yang mengadakan ujian	sekolah	454	454	454	454
	Meningkatnya Sarana Prasarana Dayah	Sasaran : lancarnya Proses Belajar di Dayah	Jumlah dayah	Dayah/ Balai pengajian	105	126	145	105
	Meningkatkan pelayanan mutu pendidikan	Sasaran : Meningkatnya pelayanan pendidikan	Jumlah Pembinaan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pembinaan	35	25	35	45

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	
	Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan	Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan yang kompeten	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	PKM	4	3	20	20
	Meningkatkan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Sasaran : PKM, Pustu dan Poskesdes (20 PKM, 47 Pustu dan 285 Poskesdes)	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71	70.92	71.16	71.04
		Sasaran : Calon Jamaah/Jamaah Haji , Orang Dengan Gangguan Jiwa atau Kelompok Khusus mendapat layanan kesehatan yang layak	Jumlah Jamaah Haji, Jumlah orang Gangguan Jiwa atau Kelompok Khusus mendapat layanan kesehatan yang layak	Kecamatan	17	17	17	17
		Sasaran : Masyarakat peserta JKN	Jumlah Kepesertaan JKN	Orang	407.222	438.000	439.000	409.000
	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Sasaran : Masyarakat Kabupaten Bireuen	Jumlah Keluarga Sehat	Keluarga Sehat	6.110	40.547	55.771	102.482
		Sasaran : Peningkatan Hidup Sehat Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Rumah Tangga	14.561	15.700	16.300	17.200
	Meningkatkan kesehatan ibu melahirkan dan anak	Sasaran : Ibu Hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui dan anak	Jumlah angka kematian ibu bayi dan anak balita	orang	159	164	199	130

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	2020
	Mengendalikan penyakit menular pada daerah endemis dan sekitarnya	Sasaran : Daerah dan lokasi rawan endemis Penyakit Menular	Jumlah desa yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi dalam waktu < 24 jam	Desa	609	609	609	609
	Menurunkan jumlah penderita penyakit tidak menular	Sasaran : Penderita penyakit deabetes mellitus, Hypertensi, Jantung, dan PTM lainnya	Persentase puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	Persen	50	60	70	80
	Peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai standar	Sasaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan	Persentase sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya	Persen	70	75	80	85
	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah sakit	Sasaran : Fasilitas tempat pelayanan, peralatan medis dan non medis	Persentase sarana prasarana rumah sakit sesuai standar	Persen	70	75	80	85
Misi 3 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi.								
	Meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif	Sasaran : Menciptakan tenaga kerja yang memiliki keahlian	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Angkatan	15	3	1	7

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	2020
	Menciptakan keharmonisan kerja antara para pihak	Sasaran : Tenaga Kerja dan pemberi kerja	Persentase pengembangan dan Peningkatan SDM	Persen	35	40	45	50
	Meningkatkan produktivitas dan minat masyarakat untuk bertransmigrasi	Sasaran : Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi	Lokasi transmigran swakarsa	Lokasi	1	1	1	1
	Meningkatkan peran industri daerah	Sasaran : Meningkatnya jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal	Jumlah pembinaan IKM	IKM	241	130	218	100
	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Sasaran : Pelaku ekonomi kreatif	Jenis usaha kreatifitas	Jenis usaha	10	10	10	10
	Peningkatkan daya saing koperasi, usaha kecil menengah (UMKM)	Sasaran : Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengikuti pembinaan	UKM	50	45	30	135

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	2020
	Meningkatkan tertib niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa	Sasaran : Terlindunginya masyarakat dengan payung hukum	Indeks Pemahaman Konsumen	Persen	50	85	90	90
	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Sasaran : Meningkatkan perekonomian PKL dan Asongan	Jumlah unit usaha yang dibina	orang	104	45	30	75
	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan	Sasaran : Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM petani, peternak dan pekebun	Jumlah pelaku usaha dan pelaku utama	Orang	125	50	150	150
		Sasaran : Meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha pertanian dan perkebunan	Panjang Sarana Jalan Perkebunan dan kegiatan promosi produk unggulan	Meter dan kali	18.700;1	17.075;1	6.500;1	7000;1
		Sasaran : Meningkatkan Hasil Produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Alsintan dan Infrastruktur Pertanian	Unit dan Meter	7 ; 3500	8 ; 5150	4 ; 6110	8;3.500
		Sasaran : Meningkatkan Hasil Produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman ean (Pajale) dan Tanaman Perkebunan (kelapa, Karet dan Kakao)	Ton	246.571; 17.038	260.871; 17.50	278.097 ; 19.243	255.270; 17.038

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	2020
		Sasaran : Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Sarana BPP dan SDM Penyuluh	BPP/Orang	17;56	17;40	17;56	17;56
	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sasaran : Peningkatan kesehatan hewan	Jumlah pelayanan kesehatan hewan dan aktifitas Puskesmas	Ekor	17,394;8	16,483;8	16,622;8	16,849;8
		Sasaran : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi ternak	Ekor	877.668	1.038.466	1.174.811	1.272.366
		Sasaran : Peningkatan Pemasaran dan Promosi Ternak	Jumlah kontes ternak	kali	1	1	1	1
		Sasaran : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Petani	Jumlah Kelembagaan Petani	Lembaga	50	6	0	12
	Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah	Sasaran : Ketersediaan Distribusi, Akses dan Stabilitas Harga Pangan	Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Kelompok	115.25	0	115.66	20
	Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan	Sasaran : Peningkatan Kelembagaan Nelayan	Jumlah Pemangku adat Laot	Pemangku Adat Laot	11	11	11	11
	Meningkatkan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Daerah	Sasaran : Meningkatnya pelaporan capaian kinerja APBK	Kinerja Keuangan Daerah dalam pencapaian WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatkan pendapatan daerah	Sasaran : Meningkatnya pengelolaan objek pendapatan daerah	Jumlah PBB dan retribusi per tahun	PBB	138,566	144.418	150.000	152.000

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	
	Meningkatkan kemandirian Lembaga Gampong	Sasaran : Lembaga Ekonomi Gampong	Jumlah lembaga ekonomi gampong aktif	Lembaga	5	115	300	5
		Sasaran : Lembaga ekonomi pedesaan	Persentase pengembangan perdesaan	Persen	45	50	0	50
		Sasaran : Meningkatnya kapasitas aparatur gampong	Persentase pemilihan aparatur gampong	Persen	50	60	70	80
	Meningkatkan kinerja keuangan daerah	Sasaran : Kinerja fisik dan keuangan daerah	Persentase kinerja fisik dan keuangan daerah	persen	100	100	100	100
Misi 4 : Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata								
	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Sasaran : Pemuda yang cerdas berkarakter dan berdaya saing	Jumlah pembinaan dan pelatihan kepemudaan	Angkatan	4	2	5	6
	Meningkatkan prestasi olahraga daerah	Sasaran : Meningkatnya sarana prasarana olahraga	Persentase sarana olahraga	Persen	40	42	44	46
		Sasaran : Meningkatnya kapasitas pelatih dan atlit	Kelompok usia cabang olahraga sepak bola	Kelompok Usia	3	3	3	3

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	2020
	Meningkatkan dan mengembangkan budaya daerah	Sasaran : Melestarikan dan mengembangkan adat budaya daerah	Jumlah event budaya daerah	event	6	1	4	4
	Meningkatkan potensi wisata daerah	Sasaran : Destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata	Destinasi wisata	22	22	22	22
	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Sasaran : Pelaku ekonomi kreatif	Jenis usaha kreatifitas	Jenis usaha	10	10	10	10
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih								
	Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat	Sasaran : Meningkatnya peraturan dan Otonomi Daerah	Nilai LPPD Pemerintah	Skor	2,6/tinggi	2,6/tinggi	2,65/tinggi	2.7
		Sasaran : ASN dan Masyarakat	Jumlah Pelatihan Pengetahuan Perundang-Undangan	Pelatihan	1	0	1	2
		Sasaran : Tanah Asset Pemda	Jumlah Sertifikasi Tanah	Sertifikasi Tanah	2	1	30	5
		Sasaran : Batas Wilayah	Jumlah penyelesaian batas wilayah	Lokasi Perbatasan	1	1	1	1
		Sasaran : Terciptanya ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Produk Hukum	Produk Hukum	38	582	606	550

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	
		Sasaran : Media Massa	Jumlah kerjasama informasi	even	6	7	7	7
		Sasaran : SKPK dan masyarakat umum	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	Persen	60	65	70	75
	Meningkatkan tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah	Sasaran : Terwujudnya proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase tahapan proses perencanaan pembangunan daerah	Persen	60	65	70	75
		Sasaran : Aparatur perencana daerah	Persentase peningkatan kapasitas perencana daerah	Persen	80	80	85	85
	Meningkatkan kapasitas dan pelayanan ASN	Sasaran : Pejabat eselon	Event Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	kegiatan	3	5	3	3
	Meningkatkan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Sasaran : Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah naskah protokoler Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Naskah	384	384	390	395
	Meningkatkan kesadaran berkebangsaan dan berketuhanan	Sasaran : ASN dan Masyarakat	Jumlah peringatan hari-hari besar	Melaksanakan upacara dan kegiatan keagamaan	8	7	8	8
	Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel	Sasaran : Meningkatkan Kelembagaan Daerah	Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan Daerah	Dokumen	6	4	5	5

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	2020
		Sasaran : ASN	Perolehan nilai LAKIP Pemerintah	Skor	C	C	C	B
	Meningkatkan Sistem Pendaftaran Tanah asset Pemkab	Sasaran : Terdatanya kepemilikan tanah asset Pemkab	Jumlah tanah asset pemkab yang tersertifikasi	Sertifikat	0	1	30	1
	Meningkatkan penataan Administrasi Kependudukan	Sasaran : Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan database kependudukan	Persen	76	85	87	90
	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga	Sasaran : Meningkatnya Penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur	Jumlah Akseptor KB	Akseptor	62.912	51.535	26.993	68.253
	Mewujudkan pelayanan sistem informasi terintegrasi	Sasaran : Adanya pelayanan sistem informasi terintegrasi	Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan hidup	Dokumen	3	4	18	2
	Mewujudkan pengelolaan lelang secara elektronik	Sasaran : Stakeholder	Jumlah Paket Lelang	Paket	190	58	141	250
	Mewujudkan pelayanan sistem informasi terintegrasi	Sasaran : Adanya pelayanan sistem informasi terintegrasi	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelatihan informasi	Kecamatan	1	17	17	3
	Meningkatkan penyelamatan	Sasaran : Pengklarifikasian dokumen dan arsip Daerah	Jumlah Arsip Daerah	Arsip	8	333	307	8

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	2020
	pelestarian dokumen arsip daerah	Sasaran : SKPK	Persentase SKPK yang mengelola arsip secara baku	Persen	39	50	55	60
	Meningkatkan budaya baca di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Sasaran : Terwujudnya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan umum daerah	Orang	5673	6.993	5.903	6847
	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan perpustakaan	Sasaran : Tenaga Perpustakaan	Jumlah Tenaga Perpustakaan	Orang	15	20	21	18
	Mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan Daerah	Sasaran : Kebijakan Daerah	Tingkat Kapabilitas pengawasan internal pemerintah	Level	2	2	2	3
		Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan	Jumlah auditor yang mendapatkan pelatihan	Orang	12	6	6	6
		Sasaran : Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan LPPD dan laporan kinerja	Dokumen	3	3	3	3
	Mewujudkan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Sasaran : SKPK dan stakeholder	Jumlah dokumen kinerja keuangan daerah	Dokumen	3	3	3	3

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	
	Mewujudkan kestabilan harga pasar	Sasaran : Pelaku pasar dan harga bahan makanan pokok	Persentase peningkatan harga pasar dan jumlah akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan	Persen	100	100	100	100
	Mewujudkan peningkatan ketahanan pangan	Sasaran : Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah keluarga penerima manfaat	Kecamatan	17	17	17	17
	Meningkatkan Kapasitas Perwakilan Rakyat Daerah	Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dewan	Persen	100	100	100	100
Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan								
	Meningkatkan perekonomian daerah	Sasaran : Pertumbuhan ekonomi	Tingkat pertumbuhan ekonomi	Persen	4.23	4.33	5	2.5
		Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan penduduk Kab. Bireuen	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	71.11	71.37	72.27	72.28
	Meningkatkan dan pemeratakan pembangunan sarana	Sasaran : Terwujudnya pemerataan pembangunan dalam pemenuhan	Panjang jalan dan jembatan	Meter	79,573.00	37,119	75,345	80,158

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	
	dan prasarana yang terintegrasi, layak, memadai dan berkualitas	infrastruktur dasar masyarakat						
		Sasaran : Terwujudnya pembangunan dalam upaya peningkatan swasembada pangan	Persentase areal sawah teraliri	Persen	55	57	60	70
		Sasaran : Terwujudnya pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air	Luas lahan konservasi sungai, danau dan sumber daya air	Persen	55	57	60	65
		Sasaran : Meningkatnya cakupan layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat	Persentase layanan air minum layak	Persen	72	78,68	80,75	85
		Sasaran : Terwujudnya kawasan strategis cepat tumbuh	Persentase pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	Persen	60	65	70	75
		Sasaran : Terwujudnya peningkatan sistem jaringan drainase	Panjang saluran dan-gorong	meter	450	685	1,461.6	600
		Sasaran : Masyarakat umum	Persentase wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi	Persen	60	65	0	75

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	2020
	Terwujudnya pengembangan sistem penataan ruang wilayah dan perkotaan yang terpadu, terarah dan representatif	Sasaran : Meningkatnya perencanaan tata ruang dengan pendekatan zoning regulation	Jumlah rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan	Rekome-dasi	35	26	32	50
	Meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah	Sasaran : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah rumah layak huni	unit	171	1.067	953	400
	Melaksanakan Pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan daya dukung lingkungan, sosial dan ekonomi	Sasaran : Terwujudnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Persentase pemeliharaan ruang terbuka hijau	Persen	50	55	60	65
		Sasaran : Terwujudnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	76	80	83	86
		Sasaran : Terlaksananya penanganan, pengelolaan dan pengawasan kinerja persampahan	Persentase peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persen	70	72	74	76
	Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana	Sasaran : Meningkatnya kenyamanan berlalulintas	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan	Unit	5	1	0	2

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	2020
	transportasi dan kelalulintasan yang layak dan memadai	Sasaran : Meningkatkan layanan angkutan umum	Jumlah alat uji kendaraan umum	alat uji	2500	11	11	5500
		Sasaran : Meningkatnya kualitas kelaikan angkutan umum	Persentase peningkatan akses informasi masyarakat	persen	70	74	78	85
	Terwujudnya informasi pengelolaan zakat yang akuntabel	Sasaran : Tersedianya informasi pengelolaan zakat bagi masyarakat	Jumlah publikasi informasi pengelolaan zakat	bulan	12	12	12	12
Misi 7 : Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat								
	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Sasaran : Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Lingkungan	Jumlah kasus keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasus	8	9	15	15
		Sasaran : Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Lingkungan	Jumlah pelanggaran qanun	Kasus	36	348	189	27
		Sasaran : Masyarakat Umum	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan pengembangan wawasan	Persen	70	75	80	80

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	
		Sasaran : Seluruh Instansi terkait	Jumlah kasus pelanggaran kebangsaan	Kasus	13	8	8	7
		Sasaran : Seluruh lapisan masyarakat yang sudah berhak ikut Pemilu	Persentase Pendidikan Politik Masyarakat	Persen	45	50	55	60
		Sasaran : Terlaksananya penanggulangan bahaya kebakaran	Tersedianya operasional pencegahan bahaya kebakaran	orang	47	48	50	60
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Sasaran : Terbinanya lembaga-lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial	Lembaga sosial	3	3	3	3
		Sasaran : PMKS dalam wilayah Kab. Bireuen	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	0,5	0,85	0,95	1
		Sasaran : Penyandang cacat, trauma dan disabilitas lainnya	Jumlah warga penyandang cacat dan trauma	Orang	102	77	100	105
		Sasaran : Masyarakat di Panti asuhan / panti Jompo	Jumlah panti sosial dan panti Jompo	Unit	11	11	11	11
		Sasaran : Para warga Exs penyandang penyakit sosial	Jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	Orang	688	678	668	658
	Meningkatkan Kualitas dan keserasian Hidup	Sasaran : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan,	Jumlah pelatihan peningkatan kualitas	Pelatihan	0	17	17	17

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	
	Keluarga, Perempuan, Anak dan masyarakat	Perlindungan Anak dan masyarakat	anak dan perempuan					
		Sasaran : SKPK terkait dengan program kesetaraan gender	Persentase penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan anak	Persen	5	10	15	20
		Sasaran : Rumah tangga korban kekerasan	Jumlah kasus KDRT	Kasus	23	72	89	19
		Sasaran : Perempuan, anak, lansia, dan disabilitas	Persentase peran serta kaum marginal dalam pembangunan	Persen	10	15	20	25
		Sasaran : PKK Kecamatan	Jumlah PKK Kecamatan	Kecamatan	17	17	17	17
		Sasaran : Aparatur pemerintahan desa	Persentase penyerapan APBG	Persen	60	65	70	75
	Terwujudnya gampong yang madani	Sasaran : Imum Mukim dan Tuha 4 Mukim	75 Imum Mukim dan 75 Tuha Peut Mukim	Bulan	12	12	12	12
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Sasaran : Fakir miskin, korban bencana, Tenaga TKSK, Tenaga PKH dan PMKS lainnya	Persentase Fakir miskin, korban bencana dan PMKS lainnya	Persen	25	27	30	32	

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun)		Target Tahun
						2018	2019	
	Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, anak yatim dan kaum dhuafa	Sasaran : Fakir miskin, anak yatim dan kaum dhuafa	Jumlah Penerima zakat	Orang	19.000	19.000	30.000	30.000
	Penyampaian syariat islam melalui silaturahmi kabupaten ke kecamatan	Sasaran : Safari ramazan di dimesjid kecamatan, mushaal kantor pemetahan	Jumlah Event Pemberdayaan keagamaan dan keistimewaan aceh	Event	17	17	17	17
	Meningkatkan peluang pendidikan bagi keluarga miskin	Sasaran : Mahasiswa keluarga miskin	Jumlah beasiswa bagi mahasiswa miskin	Kegiatan	2	1	3	3
	Meningkatkan penanganan penyelesaian di masyarakat	Sasaran : Masyarakat Umum	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100	100

Tabel 5.2
Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2021-2022

Visi: Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bireuen yang Adil, Makmur, Aman, Damai dan Sejahtera Berlandaskan Syari'at Islam

TUJUAN (1)	Indikator Tujuan (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	Satuan (5)	Target		Kondisi Akhir (8)
					2021 (6)	2022 (7)	
Misi 1: Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur, dan terintegrasi berdasarkan syari'at Islam							
Memperkuat Aqidah dan Akhlak serta pelaksanaan Syariah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat	Cakupan Pembinaan Syariat Islam			persen	100	100	100
		Meningkatnya Nilai-nilai Syariat Islam Dalam tatanan Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Penerapan Syariat Islam	Indeks	0,97	0,95	0,95
		Meningkatnya mutu pendidikan Keislaman	Persentase dayah terakreditasi	persen	93	95	95
		Meningkatnya kerukunan umat beragama	Jumlah kasus konflik antar dan intra umat beragama	Kasus	1 (intra)	0	0
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan							
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia			Indeks	72,29	72,30	72,30
		Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	9,29	9,30	9,30
		Meningkatnya mutu dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	71,30	71.38	71.38
Misi 3: Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi.							
Meningkatnya	Pertumbuhan Ekonomi			Persen	3	3,3	3,3

TUJUAN (1)	Indikator Tujuan (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	Satuan (5)	Target		Kondisi Akhir (8)
					2021 (6)	2022 (7)	
pertumbuhan ekonomi		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	Persen	4,00	3,95	3,95
		Mengurangi angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen	12,56	12,06	12,06
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Nilai PDRB ADHB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Rp (milyar)	4.641,6	4.870,8	4.870,8
		Meningkatnya Perkembangan UMKM	Jumlah UMKM dan Koperasi yang diberdayakan	UMKM dan Koperasi	230	265	315
		Menjaga Stabilitas Harga	Tingkat Inflasi	Persen	3	2,7	2,7
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Rp (milyar)	235,98	248,89	248,89
		Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah	Persen	8,15	8,29	8,29

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Target		Kondisi Akhir
					2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya perlindungan masyarakat sebagai konsumen	Jumlah produk hukum daerah yang mengatur tentang perlindungan konsumen	Perbup	1	1	1
Misi 4: Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata							
Memanfaatkan bonus demografi untuk pembangunan daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			Persen	73	73,6	73,6
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	92	95	95
		Meningkatnya tatanan budaya dan adat istiadat	Jumlah urusan pemerintahan yang menggunakan kearifan lokal	Urusan	5	5	5
		Mengembangkan potensi pariwisata daerah	Jumlah destinasi wisata	Destinasi	54	65	65
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih							
Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	CC	CC	CC
		Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Target		Kondisi Akhir
					2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan	Indeks Perencanaan	Indeks	80.5	82.25	82.25
		Meningkatnya peran dan fungsi lembaga legislatif	Persentase Rancangan yang disahkan menjadi Qanun	Persen	20	21	21
		Meningkatnya fungsi penelitian dan inovasi dalam pembangunan	Kebijakan Inovasi yang dikembangkan dalam Pembangunan	Persen	20	50	50
		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Skor	B	B	B
Misi 6: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan							
	Persentase pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan			Persen	70	75	75
Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan		Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar	Indeks Infratraktur Dasar	Indeks	69	70	70
		Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan Lindung	luas kawasan lindung	Ha	40.647,38	40.647,38	40.647,38

TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Target		Kondisi Akhir
					2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya akses aliran irigasi	Luas daerah irigasi	Ha	2.878,22	2.878,22	2.878,22
		Terlaksananya pelayanan di bidang pertanahan	Persentase pelayanan pertanahan yang tertangani	Persen	85	90	80
		Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (air, udara dan tanah)	Indeks	80	81	81
Misi 7: Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat							
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban			Indeks	1,3	1,1	1,1
Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam berpolitik	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	Persen	77,9	80,05	80,05
		Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	0,8	0,9	0,9
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,91	94,92	94,92

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VI.1 Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bireuen tahun 2017-2022, disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Bireuen. Dalam rangka optimalisasi penentuan strategi dan arah kebijakan tersebut dilakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

VI.1.1 Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan:

1. Ketersediaan SDA yang Baik.
2. Ketersediaan Lahan pengembangan wilayah.
3. Ketersediaan Sumber Daya Air yang Baik.
4. Letak geografis yang strategis.
5. Kondisi Wilayah yang aman dan nyaman.
6. Potensi Kelautan dan perikanan yang melimpah.
7. Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan telah berbasis ICT.
8. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang baik.
9. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pengaturan jarak kelahiran.
10. Kompetensi pendidik yang baik.
11. Kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana yang semakin meningkat.
12. Penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan yang sudah mencapai 30%.
13. Meningkatnya indeks pembangunan gender.
14. Kesadaran berpolitik masyarakat yang semakin meningkat.
15. Adanya Jaminan Kesehatan Daerah (JKA) plus.
16. Berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah.
17. Fasilitas kesehatan memadai.
18. Fasilitas pendidikan yang memadai.
19. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang relatif tinggi.
20. Potensi pariwisata yang baik.
21. Reformasi Birokrasi.

22. Potensi pendapatan asli daerah yang masih dapat dimaksimalkan.
23. Tersedianya produk hukum daerah.
24. Keamanan dan kenyamanan.

Kelemahan:

1. Belum maksimalnya implementasi produk hukum daerah.
2. Masih minimnya minat baca masyarakat.
3. Adanya Perbedaan pandangan dalam ber Agama.
4. Masih terdapat perbedaan pandangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.
5. Kurangnya disiplin Aparatur Sipil Negara
6. Kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang.
7. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya.
8. Kualitas/Nilai kelulusan siswa yang belum optimal.
9. Angka kemiskinan dan Penyandang masalah-masalah Sosial yang masih tinggi.
10. Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum dilaporkan.
11. Belum ditetapkan RDTR menjadi produk hukum daerah.
12. Kurang optimalnya pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan.
13. Perlindungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang belum maksimal.
14. Keterampilan tenaga kerja yang belum merata.
15. Ketersediaan fasilitas penunjang perekonomian belum memadai.
16. Masih terdapat kawasan kumuh.
17. Rendahnya sanitasi permukiman.
18. Rendahnya kesadaran pemahaman terhadap tata ruang.
19. Pendataan penduduk miskin belum optimal.
20. Masih tingginya angka pengangguran.
21. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya, pelestarian adat istiadat.
22. Pelayanan kepada masyarakat masih kurang efektif dan transparan.
23. Penanganan terhadap sampah dan limbah yang belum optimal.
24. Pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang belum optimal.
25. Pengelolaan pemerintahan gampong belum maksimal.
26. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana masih terbatas.

VI.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Semakin intensifnya program pemerintah terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk.
2. Semakin meluasnya pangsa pasar usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Tingkat kunjungan wisatawan yang semakin meningkat.
4. Pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat yang semakin meningkat.
5. Kepedulian sektor swasta dan intervensi program penanganan kemiskinan dari pemerintah yang semakin meningkat.
6. Kewenangan pemerintahan mukim dan gampong yang semakin banyak.
7. Meningkatnya minat wisatawan
8. Perlindungan perempuan dan anak semakin baik.
9. Peluang penyerapan tenaga kerja antar daerah dan negara.
10. Semakin banyak dan terbukanya akses bagi masyarakat dalam mengemukakan pendapat, berkumpul dan berserikat.
11. Tersedianya pedoman aturan tentang laporan kinerja, penyusunan, perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
12. Tingkat APK dan APM pendidikan tinggi.
13. Arah kebijakan nasional mengenai pembangunan infrastruktur.
14. Intervensi pemerintah dengan program berkelanjutan.
15. Kebijakan pemerintah pusat mempermudah investasi.
16. Sarana dan prasarana Lapangan Terbang.
17. Pembangunan Pusat Pasar.
18. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Industri.
19. Peluang Ekspor Komoditi Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan.
20. Ketersediaan SDA untuk Investasi.
21. Ketersediaan media informasi yang baik.

Ancaman:

1. Media ekspresi ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah yang semakin terbuka.
2. Adanya perbedaan antar pusat dengan daerah terhadap suatu peraturan perundang-undangan.
3. Banyaknya pendatang di wilayah perkotaan yang berpotensi mengakulturasi budaya setempat dengan budaya pendatang.
4. Dampak buruk dari era globalisasi.

5. Ekspansi pemilik modal besar di bidang pasar modern.
6. Kebutuhan penggunaan ruang untuk permukiman yang semakin meningkat.
7. Ketimpangan sosial ekonomi nasional dengan daerah yang semakin meningkat.
8. Masih adanya anak putus sekolah.
9. Moratorium pegawai negeri sipil.
10. Penurunan kualitas tanah, air dan udara.
11. Persepsi kesetaraan gender yang belum komprehensif.
12. Potensi kebencanaan di Kabupaten Bireuen yang relatif besar.
13. Proyeksi kenaikan alokasi dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah dan propinsi yang belum signifikan.
14. Masih terdapat penyakit degeneratif, angka kematian ibu dan bayi serta balita gizi buruk masih relatif tinggi.
15. Serbuan barang sebagai akibat kebijakan MEA.
16. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih kurang.
17. Keterbatasan Energi dan tidak berkelanjutannya Energi untuk industri dan Investasi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
18. Masih rendahnya kualitas ketrampilan dan inovasi masyarakat.
19. Cepatnya Publikasi informasi yang terkait dengan kekerasan.
20. Tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi.

Selanjutnya penentuan strategi disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, memadukan kelemahan dengan peluang, memadukan kekuatan dengan ancaman, dan memadukan kelemahan dengan ancaman. Dengan demikian diperoleh berbagai strategi yang merupakan hasil dari perpaduan antara unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bireuen, mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang terkristal pada tujuh pilar pembangunan yang telah dirumuskan dan dipaparkan oleh bupati dan wakil bupati pada saat pilkada 2017, dalam acara penyampaian visi dan misi dihadapan sidang DPRK Bireuen. Tujuh pilar pembangunan ini oleh tim RPJMK Bireuen telah dilakukan deseminasi pada kegiatan FGD satu dan FGD dua bersama komponen SKPK, konsultasi publik bersama tokoh masyarakat guna mendengar pendapat, menggali dan menampung aspirasi untuk dijadikan cita-cita bersama masyarakat dan *stakeholder*

yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah kabupaten sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah serta arah pembangunan kabupaten pada periode 2017 – 2022.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Sasaran dan Strategi Pembangunan 2017-2022

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI :			
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARI'AT ISLAM			
Misi 1: Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur, dan terintegrasi berdasarkan syari'at Islam			
	Memperkuat Aqidah dan Akhlak serta pelaksanaan Syariah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya Nilai-nilai Syariat Islam Dalam tatanan Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatkan pemahaman wawasan Islam
		Meningkatnya mutu pendidikan Keislaman	Meningkatkan kualitas pendidikan keislaman dan manajemen dayah
		Meningkatnya kerukunan umat beragama	Meningkatkan toleransi antar umat beragama
Misi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan			
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat	Meningkatkan pelayanan pendidikan formal dan informal
		Meningkatnya mutu dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan
Misi 3: Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi.			
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Menciptakan lapangan usaha baru
		Mengurangi angka kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
			Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
			Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI :			
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARI'AT ISLAM			
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
		Meningkatnya perkembangan UMKM	Mendorong UMKM naik kelas
		Menjaga Stabilitas Harga	Pemantauan harga barang dan operasi pasar
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan	Meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor industri pengolahan
		Meningkatnya kemandirian ekonomi daerah	Mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah
		Meningkatnya perlindungan masyarakat sebagai konsumen	Pengawasan terhadap produk yang beredar
Misi 4: Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata			
	Memanfaatkan bonus demografi untuk pembangunan daerah	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan di berbagai bidang
		Meningkatnya tatanan budaya dan adat istiadat	Penerapan budaya dan adat istiadat lokal
		Mengembangkan potensi pariwisata daerah	Meningkatkan promosi pariwisata daerah
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Akuntabel	Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih	Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan
		Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian berbasis dokumen perencanaan
		Meningkatnya peran dan fungsi lembaga Legislatif	Meningkatkan tata kelola kelembagaan dan kinerja Legislatif

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI		
VISI : TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARI'AT ISLAM					
		Meningkatnya fungsi penelitian dan inovasi dalam pembangunan	Meningkatkan pemanfaatan dokumen penelitian dan inovasi untuk perencanaan pembangunan		
		Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Pemenuhan pelayanan publik berbasis elektronik Terpenuhinya pelayanan SPM		
Misi 6: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan					
	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan Meningkatkan akses air minum layak Meningkatkan akses sanitasi layak Meningkatkan pengelolaan persampahan		
		Meningkatnya perlindungan terhadap kawasan lindung	Meningkatkan pengawasan terhadap kawasan lindung		
		Meningkatnya akses aliran irigasi	Memperluas dan mengoptimalkan fungsi irigasi		
		Terlaksananya pelayanan di bidang pertanahan	Menata tanah kepemilikan pemerintah kabupaten		
		Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Penataan lingkungan hidup yang berkualitas		
		Misi 7: Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan publik dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat			
		Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam berpolitik	Memperkuat Pendidikan politik masyarakat	
Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat	Meningkatkan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak				

VI.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PAGU INDIKATIF

Dari rumusan visi, misi tujuan dan sasaran dikelompokkan menjadi “Tujuh Pilar Pembangunan Kabupaten Bireuen 2017 – 2022 yaitu masing-masing memiliki maksud dan pengertian sebagai berikut:

1. Syariat Islam, Publik, Adat dan Budaya;

Mewujudkan masyarakat yang agamis, bersosialisasi adat yang santun, beradab dan berbudaya, yaitu suatu kondisi masyarakat yang senantiasa memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, perilaku sosial, ketertiban, adat dan budaya serta produktivitas tinggi. Oleh karenanya Kabupaten Bireuen mendorong dan memprogramkan adanya gampong percontohan syariat Islam yang menjadi model bagi gampong gampong lainnya. Meningkatkan Pengawasan adanya pelanggaran syariat Islam yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat dan langkah yang ditempuh dilakukan pembinaan bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut perlu memperkuat kelembagaan yang telah ada untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang disertai dengan dukungan dana yang memadai dan program yang tepat.

2. Penanggulangan kemiskinan

Mewujudkan kreativitas dan aktifitas sumber daya manusia kemiskinan dengan mengurangi ketergantungan dan memberikan daya dukung dalam bentuk ketrampilan dan modal usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki.

3. Ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

Mewujudkan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang bermutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau. Untuk itu perlu qanun/regulasi yang mengatur pemanfaatan lahan dan

mengganti lahan yang sudah beralih fungsi dengan cara memperluas lahan pertanian meliputi; pencetakan sawah baru dan mengoptimalkan sawah-sawah yang tidak produktif, dengan memperhatikan RTRW Daerah Kabupaten Bireuen. Dibutuhkan sarana dan prasarana ketahanan pangan yang memadai guna meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas pangan, berupa penyediaan bibit unggul, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, sarana irigasi yang memadai, penyediaan alat-alat produksi pertanian, pengaturan musim tanam serta perlu dibangun lumbung pangan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat diorientasikan dalam bentuk usaha koperasi yang optimal, kelompok usaha kecil dan menengah. Oleh karenanya Pemerintah harus memberikan dukungan, pendampingan dan pendanaan yang cukup dari berbagai sumber. Akses pemodalan, pembinaan manajemen koperasi terutama dengan pengawasan dan pengembangan usaha yang lebih luas. Pemerintah perlu mendorong adanya kelompok usaha koperasi khusus di bidang usaha tertentu seperti petani sawit, petani palawija, nelayan, petani tambak, industri rumah tangga, pedagang kecil, sehingga mempermudah akses berusaha.

4. Kesehatan dan Lingkungan Hidup;

Mewujudkan Pembangunan Kesehatan dan lingkungan hidup yang mendukung upaya Program Indonesia Sehat. Dengan demikian perlu dibuat perencanaan dan pembangunan RTH tersebut untuk kenyamanan warga masyarakat. Oleh karena semakin rendahnya daya dukung alam yang berdampak menurunnya kualitas air dan udara, maka diperlukan adanya laboratorium/alat uji kualitas air dan udara tersebut melalui pengoptimalan Laboratorium lingkungan hidup yang saat ini tidak berfungsi. Oleh sebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan, maka pemerintah perlu mensosialisasikan dan membuat regulasi tentang kebersihan

lingkungan, termasuk regulasi persampahan di seluruh wilayah kabupaten.

5. Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

1. Mewujudkan lembaga pendidikan yang profesional dan akuntabilitas sebagai pusat ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
2. Mewujudkan sumber daya pemuda yang berkualitas dan menjadikan olahraga sebagai pondasi dalam pembangunan dan pengembangan prestasi olahraga untuk menuju event publik, regional dan nasional.
3. Mewujudkan Kabupaten Bireuen sebagai tujuan destinasi wisata, terutama wisata pantai, kuliner dan budaya.

6. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;

Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam melakukan pembenahan dan perubahan secara signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance).

7. Menjaga keberlanjutan perdamaian aceh;

Mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

VI.2.1 Tema – Tema Tahunan Pembangunan

RPJMD Kabupaten Bireuen tahun 2017-2022 dilaksanakan dan dijabarkan dalam renja dan renstra setiap tahun perencanaan dengan

arahan prioritas tema tahunan. Indikasi Prioritas Tema Perencanaan Tahunan sebagai berikut:

1. Tema Pembangunan Tahun 2018:

“Melalui Musrenbang Kita Tingkatkan Kualitas SDM Berkarakter, Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Berkesinambungan”

2. Tema Pembangunan Tahun 2019:

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi yang Terpadu dalam Rangka Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan”

3. Tema Pembangunan Tahun 2020:

“Memacu Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja dan Swasembada Pangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

4. Tema Pembangunan Tahun 2021:

“Mengembangkan Potensi SDA dan Daya Saing SDM untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”

5. Tema Pembangunan Tahun 2022:

“Memantapkan Pemulihan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Menuju Kesejahteraan serta Kemandirian Masyarakat Kabupaten Bireuen”

Lebih lanjut, untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kabupaten bireuen, disajikan pada tabel 6.2 berikut ini. Arah kebijakan diuraikan setiap tahun anggaran, disesuaikan dengan misi yang ingin dicapai pada RPJMK Bireuen tahun 2017 s/d 2022.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bireuen

No	Arah Kebijakan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penguatan Syariat Islam.	√	√	√	√	√
2	Menurunkan angka kemiskinan dari tahun sebelumnya.	√	√	√	√	√
3	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya.	√	√	√	√	√
4	Penurunan tingkat pengangguran terbuka dari tahun sebelumnya.	√	√	√	√	√
5	Penguatan kelembagaan perekonomian gampong.	√	√	√	√	√
6	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	√	√	√	√	√
7	Peningkatan ketahanan pangan dan energi	√	√	√	√	√
8	Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, pertanian, perikanan, dan sektor lainnya.	√	√	√	√	√
9	Penyediaan lahan	√	√	√	√	√
10	Memaksimalkan pemanfaatan dokumen perencanaan	√	√	√	√	√
11	Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Inovasi dalam pembangunan	√	√	√	√	√
12	Pembangunan Kawasan Industri Bireuen dan fasilitas pariwisata, dan sektor lainnya	√	√	√	√	√
13	Pembangunan infrastruktur dasar	√	√	√	√	√
14	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√	√
15	Monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	√	√	√	√	√
16	Menumbuhkan ekonomi kerakyatan	√	√	√	√	√
17	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	√	√	√	√	√
18	Peningkatan mutu pendidikan dan dayah.	√	√	√	√	√
19	Peningkatan pelestarian adat dan budaya	√	√	√	√	√
20	Peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga	√	√	√	√	√
21	Peningkatan budaya baca dan manajemen arsip	√	√	√	√	√
22	Peningkatan mutu pelayanan publik	√	√	√	√	√

23	Pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana	√	√	√	√	√
24	Peningkatan dan optimalisasi peran Baitul Mal		√	√	√	√
25	Menghadirkan investor untuk industri dan perdagangan		√	√	√	√
26	Peningkatan PAD		√	√	√	√
27	Peningkatan keterampilan bagi pencari kerja		√	√	√	√
28	Penanganan sosial masyarakat dan narkoba		√	√	√	√
29	Persiapan IT kabupaten		√			
30	Implementasi IT kabupaten			√	√	√
31	Pemantapan pembangunan IT kabupaten				√	√

Dari hasil telaahan visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan yang telah diuraikan, maka Prioritas Pembangunan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut,

Tabel 6.3
Prioritas Pembangunan RPJM Kabupaten Bireuen 2017-2022

No.	Prioritas Pembangunan
1	Penguatan Syari'at Islam
2	Pendidikan dan Kesehatan
3	Peningkatan Perekonomian Daerah dan Pengentasan Kemiskinan
4	Peningkatan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
5	Perdamaian dan Reformasi Birokrasi

Tabel 6.4
Capaian Program Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2020

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15
Visi : Terwujudnya Kabupaten Bireuen yang Adil, Makmur, Aman, Damai Berlandaskan Syari'at Islam											
Misi 1 : Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur, dan terintegrasi berdasarkan syari'at Islam											
Tujuan : Memperkuat Pelaksanaan Aqidah, Syariah dan akhlak dalam tatanan Kehidupan Bermasyarakat											
Sasaran : Meningkatkan Nilai-nilai Syariat Islam Dalam tatanan Kehidupan Bermasyarakat											
	Program Pemberdayaan Keagamaan dan Keistimewaan Aceh	Jumlah kunjungan safari Ramadhan	Kecamatan	17	17	178.000.000,00	17	177.636.100,00	17	179.700.000,00	SETDA
Sasaran : Meningkatkan akses pelayanan pendidikan Non-Formal bidang keagamaan											
	Program Pendidikan Non formal	Jumlah Pelatihan pendidikan Non Formal bidang keagamaan	Pelatihan	2	2	20,000,000.00	1	17,200,000.00	2	35.000.000,00	Dinas Syariat Islam
Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan pengurus lembaga keagamaan											
	Program Penguatan Lembaga Keagamaan	Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga	186	186	2,721,722,500.00	188	2,591,346,000.00	190	2.593.800.000,00	Dinas Syariat Islam
Sasaran : Meningkatkan kerukunan umat beragama											
	Program Pelaksanaan Kehidupan Beragama	Jumlah sidang mubahasah	Sidang		2	115.000.000,00	2	110.987.500,00	2	151.500.000,00	Sekretariat MPU
Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan											
Tujuan : Meningkatkan kualitas sarana prasarana Pendidikan											
Sasaran : Meningkatkan proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen		55	2.214.346.066,00	55	3.924.130.335,00	60	2.168.696.000,00	Disdikpora
Sasaran : Sarana Prasarana Pendidikan dasar Sembilan tahun sesuai SPM											
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Fasilitas Pendidikan dasar Sembilan Tahun	persen		87	54.624.247.214,00	90	67.434.872.567,70	93	81.881.836.639,45	Disdikpora
Sasaran : Meningkatkan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan											
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan	Nilai Uji Kompetensi Guru	UKG		57	99.998.000,00	67	484.300.000,00	77	1.867.320.000,00	Disdikpora
	Program manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah sekolah yang mengadakan ujian	sekolah	454	454	901.609.000,00	454	1.378.408.200,00	454	228.612.300,00	Disdikpora
Sasaran : Meningkatnya kapasitas pendidik non formal											
	Program Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah pelatihan pendidikan Non formal	Pelatihan	2	2	856.795.000,00	2	149.848.500,00	2	7.688.828.000,00	Disdikpora
Sasaran : Dayah dan Santri											
	Program Pendidikan Dayah dan Pemberdayaan Santri	Jumlah kegiatan Pemberdayaan santri	Kegiatan	3	2	528.906.000,00	3	1.028.134.000,00	3	1.138.800.000,00	Dinas Pendidikan Dayah
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik Dayah											
Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pendidika Dayah											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dayah dan tenaga kependidikan dayah	Jumlah pendidik dayah	Orang	1.1	1.15	1,836,600,000.00	1.15	1,833,410,000.00	1	1.833.410.000,00	Dinas Pendidikan Dayah
Tujuan : Meningkatkan Sarana Prasarana Dayah											
Sasaran : lancarnya Proses Belajar di Dayah											
	Program Peningkatan sarana dan pra sarana dayah	Jumlah dayah/balai pengajian	Dayah/Balai pengajian	105	92	4,496,075,500.00	100	8,161,608,000.00	105	8.357.700.000,00	Dinas Pendidikan Dayah
Tujuan : Meningkatkan pelayanan mutu pendidikan											
Sasaran : Meningkatnya pelayanan pendidikan											
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Pembinaan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pembinaan	35	25	186,950,000.00	35	175,520,000.00	35	180.400.000,00	Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
	Program Pemeliharaan Perpustakaan, Dokumentasi, dan Publikasi	Jumlah jenis media informasi pendidikan	Jenis	3	3	8,000,000.00	0		5	5.000.000,00	Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
Tujuan : Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan											
Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan yang kompeten											
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	PKM	4	3	324,582,848.00	20	97,189,100.00	20	47.200.000,00	Dinkes
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan kesehatan kepada masyarakat											
Sasaran : PKM, Pustu dan Poskesdes (20 PKM, 47 Pustu dan 285 Poskesdes)											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71	71	5,206,434,545.00	71	3,815,063,958.00	71	3.176.614.000,00	Dinkes
Sasaran : Calon Jamaah/Jamaah Haji , Orang Dengan Gangguan Jiwa atau Kelompok Khusus mendapat layanan kesehatan yang layak											
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Jamaah Haji, Jumlah orang Gangguan Jiwa atau Kelompok Khusus mendapat layanan kesehatan yang layak	Orang	2.559	2.559	3,919,932,029.00	2.559	6,432,565,000.00	3	13.318.369.392,00	Dinkes
Sasaran : Masyarakat peserta JKN											
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kepesertaan JKN	Orang	407.222	438	42,081,269,190.00	439	39,973,920,827.00	440	50.612.534.381,00	Dinkes
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat											
Sasaran : Masyarakat Kabupaten Bireuen											
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga Sehat	Keluarga Sehat	6.11	40.547	814,149,500.00	55.771	961,290,000.00	102	342.350.000,00	Dinkes
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Kasus Kurang Gizi, Gizi Buruk dan Stunting	Orang	159	850	202.712.800,00	750	788.201.390,00	650	2.049.999.000,00	Dinkes
Sasaran : Peningkatan Hidup Sehat Rumah Tangga											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan Lingkungan sehat	Jumlah Rumah Tangga Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)	Rumah Tangga	14.561	15.7	279.126.000,00	16.3	213.677.000,00	172	596.850.000,00	Dinkes
Tujuan : Meningkatkan keshatan ibu melahirkan dan anak											
Sasaran : Ibu Hamil, ibu melahirkan , ibu meyusui dan anak											
	Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Jumlah angka kematian ibu bayi dan anak balita	orang	159	140	299,072,550.00	135	274,501,550.00	130	1.648.529.000,00	Dinkes
Tujuan : Mengendalikan penyakit menular pada daerah endemis dan sekitarnya											
Sasaran : Daerah dan lokasi rawan endemis Penyakit Menular											
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah desa yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi dalam waktu < 24 jam	Desa	609	609	581,322,550.00	609	1,428,131,449.00	609	2.102.800.000,00	Dinkes
Tujuan : Menurunkan jumlah penderita penyakit tidak menular											
Sasaran : Penderita penyakit deabetes mellitus, Hypertensi, Jantung, dan PTM lainnya											
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	Persen	50	60	-	70	141,575,600.00	80	2.187.999.000,00	Dinkes
Tujuan : Peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai standar											
Sasaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program pengadaan, Peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya	Persen	70	75	7,712,585,158.00	80	22,732,611,500.00	85	15.168.299.500,00	Dinkes
Tujuan : Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah sakit											
Sasaran : Fasilitas tempat pelayanan, peralatan medis dan non medis											
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata	Persentase sarana prasarana rumah sakit sesuai standar	Persen	70	75	31.467.917.152,00	80	50.846.851.931,00	85	9.165.759.000,00	RSUD dr. Fauziah Bireuen
	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Persen	60	65	31.467.917.152,00	70	50.846.851.931,00	80	3.200.000.000,00	RSUD dr. Fauziah Bireuen
	Program Pelayanan kesehatan pada layanan badan umum daerah	Persentase Pelayanan kesehatan pada layanan badan umum daerah	Persen	60	65	106.839.730.759,00	70	71.374.923.857,00	75	80.563.016.741,85	RSUD dr. Fauziah Bireuen
Misi 3 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi.											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan : Meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif											
Sasaran : Menciptakan tenaga kerja yang memiliki keahlian											
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Angkatan	15	5	236,137,650.00	5	205,216,230.00	7	838.130.000,00	DISNAKERT RANSPRIND
Tujuan : Menciptakan keharmonisan kerja antara para pihak											
Sasaran : Tenaga Kerja dan pemberi kerja											
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM	Persentase pengembangan dan Peningkatan SDM	Persen	35	40	30,775,000.00	45	41,750,000.00	-	-	DISNAKERT RANSPRIND
Tujuan : Meningkatkan produktivitas dan minat masyarakat untuk bertransmigrasi											
Sasaran : Tersalurkannya minat masyarakat untuk bertransmigrasi											
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase pengembangan kawasan	Persen	50	55	-	60	928,559,000.00	65	2.378.559.000,00	DISNAKERT RANSPRIND
	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Lokasi transmigran swakarsa	Lokasi	50	50	47,396,500.00	1	45,975,000.00	1	39.610.000,00	DISNAKERT RANSPRIND
Tujuan : Meningkatkan peran industri daerah											
Sasaran : Meningkatkan jumlah dan kemandirian industri kecil dan menengah dalam mengembangkan ekonomi lokal											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah pembinaan IKM	IKM	241	67	938,903,055.00	100	276,410,401.00	-	95.000.000,00	DISNAKERT RANSPRIND
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	0	0	-	3	-	-	-	DISNAKERT RANSPRIND
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah promosi daerah	Promosi	4	3	942,136,300.00	3	392,670,956.00	-	-	DISNAKERT RANSPRIND
Tujuan : Meningkatkan perekonomian masyarakat											
Sasaran : Pelaku ekonomi kreatif											
	Program pengembangan ekonomi kreatif	Jenis usaha kreatifitas	Jenis usaha	10	10	-	10	260,575,000.00	10	40.000.000,00	DISNAKERT RANSPRIND
Tujuan : Meningkatkan daya saing koperasi, usaha kecil menengah (UMKM)											
Sasaran : Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro kecil dan menengah											
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	Koperasi	200	40	44,950,000.00	80	42,420,000.00	80	25.400.000,00	DISPEMDAG KOP&UKM
	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengikuti pembinaan	Kegiatan	2	0	-	4	19,250,000.00	-	-	DISPEMDAG KOP&UKM
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil, Menengah yang Kondusif	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengikuti pembinaan	UKM	50	50	29,400,000.00	135	8,000,000.00	-	-	DISPEMDAG KOP&UKM

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan : Meningkatkan daya saing koperasi, usaha kecil menengah (UMKM)											
Sasaran : Meningkatnya jumlah koperasi aktif dan kemandirian usaha mikro kecil dan menengah											
	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Investasi	Dokumen	0	0	28,796,706.00	3	33,020,000.00	-	-	DISPEMDAG KOP&UKM
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Perizinan	Perizinan	2.5	2,6	204,400,000.00	2,7	168,477,000.00	2,8	366.830.000,00	DISPEMDAG KOP&UKM
	Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama investasi	Persentase Promosi	Persen	50	55	30.000.000,00	60	46.855.000,00	65	29.595.000,00	DISPEMDAG KOP&UKM
Tujuan : Meningkatkan tertib niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa											
Sasaran : Terlindunginya masyarakat dengan payung hukum											
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Indeks Pemahaman Konsumen	Persen	50	85	139,830,450.00	90	1,496,449,000.00	90	143.994.000,00	DISPEMDAG KOP&UKM
Tujuan : Meningkatkan perekonomian masyarakat											
Sasaran : Meningkatkan perekonomian PKL dan Asongan											
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah unit usaha yang dibina	orang	104	69	984,011,043.00	70	15,950,000.00	-	-	DISPEMDAG KOP&UKM
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah kecamatan yang diadakan Operasi Pasar	Kecamatan	17	17	4,866,275,000.00	17	3,344,150,000.00	17	1.735.000.000,00	DISPEMDAG KOP&UKM
Tujuan : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perkebunan											
Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM petani, peternak dan pekebun											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah pelaku usaha dan pelaku utama	Orang	125	50	134,769,900.00	150	119,164,000.00	150	53.150.000,00	DISTAN
Sasaran : Meningkatkan aksesibilitas pelaku usaha pertanian dan perkebunan											
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi (pertanian/ Perkebunan)	Panjang Sarana Jalan Perkebunan dan kegiatan promosi produk unggulan	Meter dan kali	18700;1	17075;1	4,890,301,000.00	6500;1	6,783,747,000.00	7000;1	5.012.410.000,00	DISTAN
Sasaran : Meningkatkan Hasil Produksi pertanian/perkebunan											
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Alsintan dan Infrastruktur Pertanian	Unit dan Meter	7 ; 3500	12 ; 4800	2.124.308.000,00	6 ; 3000	4.280.966.954,00	8 ; 3500	3.750.764.000,00	DISTAN
Sasaran : Meningkatkan Hasil Produksi pertanian/perkebunan											
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan (kelapa, Karet dan Kakao)	Ton	246.571; 17.038	246.571; 17.038	529.234.000,00	249.948; 17.038	109.620.500,00	255.270;17.038	56.925.000,00	DISTAN
Sasaran : Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan											
	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan	Jumlah Sarana BPP dan SDM Penyuluh	BPP/Orang	17;56	17;56	648.484.900,00	17;56	1.702.702.150,00	17;56	565.679.500,00	DISTAN
Tujuan : Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Veteriner											
Sasaran : Peningkatan kesehatan hewan											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah pelayanan kesehatan hewan dan aktifitas Puskesmas	Ekor		16,483;8	296,804,300.00	16,622;8	204,266,500.00	16,849;8	146.550.000,00	DISTAN
Sasaran : Peningkatan Produksi Hasil Peternakan											
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi ternak, produksi daging ayam potong dan telur	Ekor	877.668	1.038.466	1,471,868,500.00	1.174.811	3,050,368,400.00	1.272.366	5.439.829.357,00	DISTAN
Kg			1.146.680	1.318.682	1.450.550		1.470.630				
Kg			79.389	85.277	88.34		91				
Butir			410	462	468.08		473				
Sasaran : Peningkatan Pemasaran dan Promosi Ternak											
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Sarana dan prasarana pasar ternak, RPH dan Kontes Ternak	Paket	2	2	123,029,500.00	1	231,437,500.00		-	DISTAN
			Kali	1	1		1				
Sasaran : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Petani											
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Petani	Jumlah Kelembagaan Petani	Lembaga	50	6	334,817,000.00	0	179,924,000.00	12	200.000.000,00	DISTAN
Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Pangan Daerah											
Sasaran : Ketersediaan Distribusi, Akses dan Stabilitas Harga Pangan											
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Kelompok	115.25	13	394.845.600,00	20	744.631.200,00	10	544.770.000,00	DISTAN
			Gapoktan		6		8		20		

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan		2	38.399.100,00	4	33.549.100,00		80.600.000,00	DISTAN
Tujuan : Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan											
Sasaran : Peningkatan Kelembagaan Nelayan											
	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	Jumlah Pemangku adat Laot	Pemangku Adat Laot	11	11	148,475,000.00	11	170,460,400.00	11	159.650.000,00	DKPP
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya	Ton	11.7	12	1,218,701,200.00	12,5	2,589,626,520.00	13	6.542.390.000,00	DKPP
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	11,064	11,5	199,850,000.00	12	4,669,009,000.00	12	739.302.000,00	DKPP
Tujuan : Meningkatkan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Daerah											
Sasaran : Meningkatnya pelaporan capaian kinerja APBK											
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kinerja Keuangan Daerah semesteran	Persen	100	100	40.000.000,00	100	94.963.000,00	100	95.000.000,00	BPKD
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kinerja Keuangan Daerah dalam pencapaian WTP	WTP	WTP	WTP	2,018,630,754.00	WTP	2,203,156,789.00	WTP	3.072.742.500,00	BPKD
Tujuan : Meningkatkan pendapatan daerah											
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan objek pendapatan daerah											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan PAD dan PBB	Persentase kenaikan PAD per tahun	Persen	100	100	258,511,645.00	100	293,308,900.00	100	260.000.000,00	BPKD
	Program Optimalisasi Penghitungan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase kenaikan PBB dan retribusi per tahun	PBB	138,566	144.418	208,122,050.00	150	207,742,000.00	152	329.500.500,00	BPKD
	Program Optimalisasi Perhitungan dan Penetapan Pajak Retribusi Daerah	Jumlah wajib Pajak dan wajib retribusi per tahun	wajib pajak dan wajib retribusi	0	0	-	800	45,596,500.00		55.000.000,00	BPKD
Tujuan : Meningkatkan kemandirian Lembaga Gampong											
Sasaran : Lembaga Ekonomi Gampong											
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi gampong aktif	Lembaga	5	5	224.365.200,00	5	199.049.840,00	5	80.667.500,00	DPMGPKB
Sasaran : Lembaga ekonomi pedesaan											
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase pengembangan pedesaan	Persen	45	50	29.571.050,00	0	-	50	20.000.000,00	SETDA PEREKONOMIAN DAERAH
Sasaran : Meningkatnya kapasitas aparatur gampong											
	Program Pembinaan Kelembagaan dan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong	Persentase pemilihan aparatur gampong	Persen	50	60	65.755.000,00	70	91.937.500,00	80	100.000.000,00	DPMGPKB
Tujuan : Meningkatkan kinerja keuangan daerah											
Sasaran : Kinerja fisik dan keuangan daerah											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kinerja fisik dan keuangan daerah	persen		100	40.000.000,00	100	94.963.000,00	100	95.000.000,00	BPKD
	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase kinerja fisik dan keuangan daerah	persen	100	100	318.860.574,00	100	-	100	220.985.000,00	SETDA ADM PEMBANGUNAN
Misi 4 : Menata dan mengembangkan potensi pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata											
Tujuan : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan											
Sasaran : Pemuda yang cerdas berkarakter dan berdaya saing											
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pembinaan dan pelatihan kepemudaan	Angkatan	4	2	159.492.000,00	5	358.574.500,00	6	296.730.000,00	Disdikpora
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah pembinaan dan palatihan atlit dan pelatih	orang		40	688.012.800,00	40	300.000.000,00		150.000.000,00	Disdikpora
	Program Pengembangn Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah pelatihan manajemen dan olahraga	Pelatihan	3	1	30.000.000,00	3	-	40	150.000.000,00	Disdikpora
Tujuan : Meningkatkan prestasi olahraga daerah											
Sasaran : Meningkatnya sarana prasarana olahraga											
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana olahraga	Persen	40	42	1.635.310.000,00	44	1.821.952.000,00	46	1.200.200.000,00	
Sasaran : Meningkatnya kapasitas pelatih dan atlit											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Kelompok usia cabang olahraga sepak bola	Kelompok Usia	3	3	-	3	169,960,000.00	-	-	Disdikpora
Tujuan : Meningkatkan dan mengembangkan budaya daerah											
Sasaran : Melestarikan dan mengembangkan adat budaya daerah											
	Program pengembangan nilai budaya	Jumlah event budaya daerah	event	6	1	199,900,000.00	4	415,000,000.00	4	30.000.000,00	Disdikpora
	Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah event budaya daerah	event	0	1	1,675,626,800.00	1	1,729,148,300.00	1	173.000.000,00	Disdikpora
	Program Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah sanggar seni budaya	sanggar	1	1	194,818,900.00	1	-	1	40.000.000,00	Disdikpora
Tujuan : Meningkatkan potensi wisata daerah											
Sasaran : Destinasi wisata											
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata	Destinasi wisata	22	22	82,310,000.00	22	-	22	150.000.000,00	Disdikpora
	Program Pengembangan Pemasaran pariwisata	Jumlah Event pemasaran pariwisata	event	1	1	70,000,000.00	2	58,500,000.00	-	-	Disdikpora
Tujuan : Meningkatkan perekonomian masyarakat											
Sasaran : Pelaku ekonomi kreatif											
	Program pengembangan ekonomi kreatif	Jenis usaha kreatifitas	Jenis usaha	10	10	-	10	-	10	40.000.000,00	Disdikpora
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran : Meningkatkan peraturan dan Otonomi Daerah											
	Program Pembinaan Otonomi Daerah	Nilai LPPD Pemerintah	Skor	2,6/tinggi	2,6/tinggi	191.171.500,00	2,65/tinggi	224.022.900,00	2,7/tinggi	319.867.000,00	SETDA TAPEM
Sasaran : ASN dan Masyarakat											
	Program Peningkatan Pengetahuan Perundang-undangan	Jumlah Pelatihan Pengetahuan Perundang-Undangan	Pelatihan	1	1	32.630.000,00	1	5.200.000,00	-	-	SETDA TAPEM
Sasaran : Tanah Asset Pemda											
	Program Pembinaan Tata Ruang dan Pertanahan	Jumlah Sertifikasi Tanah	Sertifikasi Tanah	2	4	49.100.000,00	5	-	-	-	SETDA TAPEM
Sasaran : Batas Wilayah											
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah penyelesaian batas wilayah	Lokasi Perbatasan	1	1	48.750.000,00	1	37.899.500,00	1	128.667.000,00	SETDA TAPEM
Sasaran : Terciptanya ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan											
	Program Peningkatan Pelayanan Hukum	Jumlah Produk Hukum	Produk Hukum	38	552	425.693.900,00	550	396.031.600,00	550	360.000.000,00	SETDA HUKUM
Sasaran : Media Massa											
	Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa	Jumlah kerjasama informasi	even	6	7	707.503.400,00	7	793.920.000,00	12	11.800.000,00	SETDA HUMAS
Sasaran : SKPK dan masyarakat umum											
	Program pengembangan data dan informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	Persen	60	65	352,383,878.00	70	589,018,232.00	75	431.400.000,00	BAPPEDA
Tujuan : Meningkatkan tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran : Terwujudnya proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas											
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tahapan proses perencanaan pembangunan daerah	Persen	60	65	1,459,496,150.00	70	2,012,095,778.00	75	1.352.524.000,00	BAPPEDA
Sasaran : Aparatur perencana daerah											
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan kapasitas perencana daerah	Persen	80	80	65,500,000.00	85	218,058,000.00	85	260.000.000,00	BAPPEDA
Tujuan : Meningkatkan kapasitas dan pelayanan ASN											
Sasaran : Pejabat eselon											
	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah angkatan pendidikan kedinasan	Angkatan	4	1	458,346,811.00	3	4,118,912,270.00	3	518.750.000,00	BKPSDM
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Event Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	kegiatan	3	5	586,896,500.00	3	169,882,000.00	3	771.563.000,00	BKPSDM
Tujuan : Meningkatkan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah											
Sasaran : Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah											
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah naskah protokoler Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Naskah	384	384	433.882.450,00	390	436.659.800,00	-	-	SETDA & HUMAS
Tujuan : Meningkatkan kesadaran berkebangsaan dan berketuhanan											
Sasaran : ASN dan Masyarakat											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari-hari besar	Melaksanakan upacara dan kegiatan keagamaan	8	7	735.805.200,00	8	882.144.850,00	8	200.000.000,00	SETDA HUMAS & KESRA
Tujuan : Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel											
Sasaran : Meningkatkan Kelembagaan Daerah											
	Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bireuen	Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan Daerah	Dokumen	6	4	147.170.000,00	5	97.783.750,00	5	216.900.000,00	SETDA ORPEG
Sasaran : ASN											
	Program Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	persentase pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	30	50	150.800.000,00	65	159.970.000,00	-	-	SETDA ORPEG
	Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Perolehan nilai LAKIP Pemerintah	Skor	C	CC	-	CC	302.596.450,00	CC	169.100.000,00	SETDA ORPEG
Tujuan : Meningkatkan Sistem Pendaftaran Tanah asset Pemkab											
Sasaran : Terdatanya kepemilikan tanah asset Pemkab											
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Persentase pendataan kepemilikan tanah asset Pemkab	Persen	0	30	-	40	299,949,840.00	-	-	Dinas Pertanian

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program penataan, Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan dan pemamfaatan Tanah	Jumlah tanah asset pemkab yang tersertifikasi	Sertifikat	0	1	68,064,444.00	1	57,555,000.00	1	514.294.724,00	Dinas Pertanian
Tujuan : Meningkatkan penataan Administrasi Kependudukan											
Sasaran : Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan											
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan database kependudukan	Persen	76	85	1,582,458,102.00	87	1,624,730,095.00	90	2.067.271.000,00	DISDUKCAP IL
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga											
Sasaran : Meningkatnya Penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur											
	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Aseptor KB	Akseptor	62.912	64.912	2.567.825.500,00	66.912	91.937.500,00	68	7.473.744.000,00	DPMGPKB
	Program Peningkatan Dukungan Sarana Pelayanan KB	Persentase sarana pelayanan KB	Persen	30	35	739.450.500,00	60	1.134.149.800,00	70	1.233.975.000,00	DPMGPKB
Tujuan : Mewujudkan pelayanan sistem informasi terintegrasi											
Sasaran : Adanya pelayanan sistem informasi terintegrasi											
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan hidup	Dokumen	3	0	-	1	29,978,925.00	2	25.000.000,00	Perkim & LH
Tujuan : Mewujudkan pengelolaan lelang secara elektronik											
Sasaran : Stakeholder											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Paket Lelang	Paket	190	210	861.176.825,00	250	-	250	266.100.000,00	SETDA ULP
Tujuan : Mewujudkan pelayanan sistem informasi terintegrasi											
Sasaran : Adanya pelayanan sistem informasi terintegrasi											
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelatihan informasi	Kecamatan	1	2	35,275,000.00	3	-	3	40.000.000,00	DISKOMINFO
Tujuan : Mewujudkan Penelitian Pengembangan											
Sasaran : Tewujudnya Penelitian Pengembangan Pendidikan dayah											
	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	Jumlah dayah terakreditasi	Dayah			-		56,576,000.00	-	-	Dinas Pendidikan Dayah
Tujuan : Meningkatkan penyelamatan pelestarian dokumen arsip daerah											
Sasaran : Pengklarifikasian dokumen dan arsip Daerah											
	Program Penyelamatan dan Pestaarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip Daerah	Arsip	8	8	48,800,000.00	8	314,458,750.00	8	36.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sasaran : SKPK											
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase SKPK yang mengelola arsip secara baku	Persen	39	50	20,000,000.00	55	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tujuan : Meningkatkan budaya baca di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat											
Sasaran : Terwujudnya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan umum daerah	Orang	5673	5798	557,892,000.00	6301	940,653,930.00	6847	93.550.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tujuan : Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan perpustakaan											
Sasaran : Tenaga Perpustakaan											
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Tenaga Perpustakaan	Orang	15	16	61,200,000.00	17	50,000,000.00	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tujuan : Mewujudkan Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah											
Sasaran : Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah											
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Jumlah Masyarakat yang memiliki wawasan informasi	Pelatihan	0	1	-	0	-	2	80.000.000,00	Diskominfo
Tujuan : Mewujudkan Pengendalian dan Pengawasan Kebijakan Daerah											
Sasaran : Kebijakan Daerah											
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kapabilitas pengawasan internal pemerintah	Level	2	2	1,124,107,800.00	3	1,153,495,900.00	3	1.181.155.500,00	Inspektorat
Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM aparatur pengawasan											
	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah auditor yang mendapatkan pelatihan	Orang	12	6	79,754,100.00	6	106,644,900.00	6	58.840.000,00	Inspektorat

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran : Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan											
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan LPPD dan laporan kinerja	Dokumen	3	3	37,569,800.00	3	29,999,000.00	3	30.000.000,00	Inspektorat
Tujuan : Mewujudkan pengembangan pengelolaan keuangan daerah											
Sasaran : SKPK dan stakeholder											
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen kinerja keuangan daerah	dokumen	2	2	-	3	823.555.518,00	3	95.000.000,00	SETDA EKONOMI
Tujuan : Mewujudkan kestabilan harga pasar											
Sasaran : Pelaku pasar dan harga bahan makanan pokok											
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase peningkatan harga pasar dan jumlah akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan	Persen	100	100	76.180.300,00	100	64.350.000,00	100	95.358.000,00	SETDA EKONOMI
Tujuan : Mewujudkan peningkatan ketahanan pangan											
Sasaran : Keluarga Penerima Manfaat											
	Program peningkatan ketahanan pangan	Jumlah keluarga penerima manfaat	Kecamatan	17	17	38.398.750,00	17	-	17	20.000.000,00	SETDA EKONOMI
Tujuan : Meningkatkan Kapasitas Perwakilan Rakyat Daerah											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran : Meningkatkan Kapasitas Perwakilan Rakyat Daerah											
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dewan	Persen	100	100	10.428.212.265,00	100	10.796.415.684,00	1	5.982.697.966,00	Sekretariat DPRK
Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan											
Tujuan : Meningkatkan perekonomian daerah											
Sasaran : Pertumbuhan ekonomi											
	Program Perencanaan pembangunan bidang Ekonomi	Tingkat pertumbuhan ekonomi	Persen	4,5	4,9	421,646,000.00	5,1	249,576,380.00	-	181.500.000,00	BAPPEDA
Sasaran : Meningkatkan kesejahteraan penduduk Kab. Bireuen											
	Program Perencanaan pembangunan bidang Sosial dan Budaya	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	71,11	72	602,094,900.00	73	524,279,000.00	74	469.800.000,00	BAPPEDA
Tujuan : Meningkatkan dan pemeratakan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi, layak, memadai dan berkualitas											
Sasaran : Terwujudnya pemerataan pembangunan dalam pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat											
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan	Meter	79,573.00	37,119	35.405.404.900,00	75,345	89.880.321.100,00	80158	47.689.682.111,00	PUPR
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang jalan dan jembatan yang direhabilitasi	Meter	151,350	18,401	14.303.305.700,00	20,78	30.574.975.300,00	22148	44.272.684.623,00	PUPR
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	panjang jalan dan jembatan perdesaan	Meter	5	1.25	1.234.186.200,00	1.583	3.443.533.100,00		1.908.659.000,00	PUPR
Sasaran : Terwujudnya pembangunan dalam upaya peningkatan swasembada pangan											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas Daerah Irigasi	Ha	14,210	0	-	735	18.481.026.350,00	800	27.012.340.700,00	PUPR
	Program Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Persentase areal sawah teraliri	Persen	55	57	1.890.138.800,00	60	1.741.170.000,00	65	2.582.518.000,00	PUPR
Sasaran : Terwujudnya pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air											
	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Luas lahan konservasi sungai, danau dan sumber daya air	Persen	55	57	32.241.604.823,00	60	2.390.043.000,00	65	590.750.000,00	PUPR
Sasaran : Meningkatkan cakupan layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat											
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase layanan air minum layak	Persen	72	80	10.481.010.000,00	85	14.554.089.800,00	90	11.989.650.000,00	PUPR
Sasaran : Terwujudnya kawasan strategis cepat tumbuh											
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	Persen	60	65	7.207.029.000,00	70	15.004.149.500,00	75	14.005.778.000,00	PUPR
Sasaran : Terwujudnya peningkatan sistem jaringan drainase											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran dan-gorong	meter	450	500	471.697.000,00	550	777.204.800,00	600	312.000.000,00	PUPR
Sasaran : Masyarakat umum											
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Persentase wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi	Persen	60	65	9,660,161,883.00	0	-	-	-	BPBD
	Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Jumlah pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Pelatihan	1	1	61,369,000.00	1	-	-	-	BPBD
Tujuan : Terwujudnya pengembangan sistem penataan ruang wilayah dan perkotaan yang terpadu, terarah dan representatif											
Sasaran : Meningkatnya perencanaan tata ruang dengan pendekatan zoning regulation											
	Program Perencanaan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan	rekomendasi	35	30	761,835,000.00	50	1,002,955,300.00		-	BAPPEDA
Tujuan : Meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah											
Sasaran : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah											
	Program pengembangan perumahan	Jumlah rumah layak huni	unit	171	337	31,068,844,850.00	200	27,232,538,847.00	250	14.011.247.400,00	PERKIM & LH
Tujuan : Melaksanakan Pembangunan yang berorientasi pada keseimbangan daya dukung lingkungan, sosial dan ekonomi											
Sasaran : Terwujudnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup											
	Program Perlindungan dan konservasi SDA	Persentase lahan resapan	Persen	10	15	-	20	-	25	160.000.000,00	PERKIM & LH

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		air									
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau	Persentase pemeliharaan ruang terbuka hijau	Persen	50	55	199,227,957.00	60	1,130,254,700.00	65	63.150.000,00	PERKIM & LH
Sasaran : Terlaksananya penanganan, pengelolaan dan pengawasan kinerja persampahan											
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	76	80	6,677,173,589.00	83	7,837,376,289.00	-	-	PERKIM & LH
Tujuan : Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi dan kelalulintasan yang layak dan memadai											
Sasaran : Meningkatnya kenyamanan berlalulintas											
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persen	70	72	39,935,000.00	74	104,545,000.00	76	64.480.000,00	DISHUB
	Program Pengendalian dan Pengembangan Lalu Lintas	Persentase Jumlah pengamanan lalu lintas	persen	50	55	1,497,320,000.00	60	526,900,000.00	65	51.250.000,00	DISHUB
	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	Jumlah dokumen analisis peningkatan manajemen transportasi	dokumen	0	0	-	12	12,900,000.00	-	-	DISHUB
	Program Pelayanan Angkutan	Persentase meningkatnya pelayanan angkutan umum	persen	50	55	280,876,500.00	60	1,272,903,000.00		-	DISHUB
Sasaran : Meningkatkan layanan angkutan umum											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan	Unit	5	1	200,000,000.00	0	99,880,000.00		-	DISHUB
Sasaran : Meningkatnya kualitas kelaikan angkutan umum											
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kendaraan umum	Jumlah alat uji kendaraan umum	2500	4000	153,900,000.00	5000	166,000,000.00		238.600.000,00	DISHUB
Tujuan : Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi daerah											
Sasaran : Terwujudnya kelancaran komunikasi dan pertukaran informasi pemerintah dan masyarakat											
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase peningkatan akses informasi masyarakat	Persen	70	74	380,255,487.00	78	81.549.950,00	82	90.000.000,00	DISKOMINFO
	Program pengembangan dan pendayagunaan teknologi informatika	Jumlah frekuensi BHP daerah	frekuensi	2	2	8,404,560.00	0	57,067,215.00	2	50.000.000,00	DISKOMINFO
	Program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah publikasi melalui media massa	publikasi	1	1	64,293,300.00	1	32,240,000.00		321.000.000,00	DISKOMINFO
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah sosialisasi dan pelatihan	Pelatihan / sosialisasi	0	1	64,293,300.00	2	32,240,000.00	1		DISKOMINFO

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah dokumen informasi dan komunikasi	Dokumen	0	1	8,700,000.00	0	-	1	30.000.000,00	DISKOMINFO
Tujuan : Terwujudnya informasi pengelolaan zakat yang akuntabel											
Sasaran : Tersedianya informasi pengelolaan zakat bagi masyarakat											
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah publikasi informasi pengelolaan zakat	bulan	12	12	25,000,000.00	12	10,800,000.00	12	11.800.000,00	Baitul Mal
	Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah penerimaan besaran zakat	rupiah	0	0	29,450,000.00	6	-	-	-	Baitul Mal
Misi 7 : Meningkatkan keamanan, kedamaian dan perlindungan sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat											
Tujuan : Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat											
Sasaran : Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Lingkungan											
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	orang	180	182	1.662.655.200,00	184	2.131.940.146,00	186	1.697.781.988,00	Satpol PP & WH
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kasus keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kasus	8	9	50,000,000.00	15	68,000,000.00	-	-	KESBANGPOL
Sasaran : Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Lingkungan											
	Program penegakan hukum dan peraturan daerah	Jumlah pelanggaran qanun	Kasus	36	33	100.008.700,00	30	90.430.000,00	27	79.000.000,00	Satpol PP & WH

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran : Masyarakat Umum											
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan pengembangan wawasan	Persen	70	75	60,800,000.00	80	601,636,000.00	-	KESBANGPOL	
Sasaran : Seluruh Instansi terkait											
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kasus pelanggaran kebangsaan	Kasus	13	8	130,672,000.00	8	79,400,000.00	7	104.809.000,00	KESBANGPOL
Sasaran : Seluruh lapisan masyarakat yang sudah berhak ikut Pemilu											
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Pendidikan Politik Masyarakat	Persen	45	50	45,600,000.00	55	40,300,000.00	60	25.084.000,00	KESBANGPOL
Sasaran : Terlaksananya penanggulangan bahaya kebakaran											
	Program peningkatan kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tersedianya operasional pencegahan bahaya kebakaran	orang	47	48	549,720,379.00	50	498,621,000.00	55	2.595.523.800,00	BPBD
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat											
Sasaran : Terbinanya lembaga-lembaga kesejahteraan sosial											
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial	Lembaga sosial	3	3	-	3	706,108,000.00	4	100.000.000,00	Dinas Sosial
Sasaran : PMKS dalam wilayah Kab. Bireuen											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	0,5	0,85	529,466,750.00	0,95	392,500,600.00	1	487.000.000,00	Dinas Sosial
Sasaran : Penyandang cacat, trauma dan disabilitas lainnya											
	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah warga penyandang cacat dan trauma	Orang	102	77	119,040,000.00	100	235,350,000.00	110	524.962.600,00	Dinas Sosial
Sasaran : Masyarakat di Panti asuhan / panti Jompo											
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Jumlah panti sosial dan panti Jompo	Unit	11	11	665,181,545.00	11	675,331,095.00	11	272.952.000,00	Dinas Sosial
Sasaran : Para warga Exs penyandang penyakit sosial											
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	Orang	688	678	-	668	85,878,250.00	658	139.880.000,00	Dinas Sosial
Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan keserasian Hidup Keluarga, Perempuan, Anak dan masyarakat											
Sasaran : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan masyarakat											
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah pelatihan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Pelatihan	0	17	19.900.000,00	17	-	17	26.600.000,00	DPMGPKB
Sasaran : SKPK terkait dengan program kesetaraan gender											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan anak	Persen	5	10	138.139.000,00	15	190.228.900,00	20	204.200.000,00	DPMGPKB
Sasaran : Rumah tangga korban kekerasan											
	Program Penguatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah kasus KDRT	Kasus	23	23	29.300.000,00	21	-	-	-	DPMGPKB
Sasaran : Perempuan, anak, lansia, dan disabilitas											
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase peran serta kaum marginal dalam pembangunan	Persen	10	15	262.352.959,00	20	477.544.550,00	25	443.500.000,00	DPMGPKB
Sasaran : PKK Kecamatan											
	Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah PKK Kecamatan	Kecamatan	17	17	533.255.000,00	17	540.663.200,00	17	250.000.000,00	DPMGPKB
Sasaran : Aparatur pemerintahan desa											
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase penyerapan APBG	Persen	60	65	142.610.000,00	70	144.935.000,00	75	258.675.000,00	DPMGPKB
Tujuan : Terwujudnya gampong yang madani											
Sasaran : Imum Mukim dan Tuha 4 Mukim											
	Program Peningkatan Kesejahteraan Imum Mukim	75 Imum Mukim dan 75 Tuha Peut Mukim	Bulan	12	12	1.084.499.800,00	12	1.107.848.900,00	12	1.198.400.000,00	DPMGPKB
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran : Fakir miskin, korban bencana, Tenaga TKSK, Tenaga PKH dan PMKS lainnya											
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Fakir miskin, korban bencana dan PMKS lainnya	Persen	688	678	2,846,056,900.00	668	3,374,575,289.00	-	2.715.717.000,00	Dinas Sosial
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, anak yatim dan kaum dhuafa											
Sasaran : Fakir miskin, anak yatim dan kaum dhuafa											
	Program Pemberdayaan Fakir miskin, anak yatim dan kaum dhuafa	Jumlah Penerima zakat	Orang	19	19	6,099,295,750.00	30	3,898,262,000.00	30	17.779.288.168,19	Baitul Mal
Tujuan : Penyampaian syariat islam melalui silaturahmi kabupaten ke kecamatan											
Sasaran : Safari ramazan di dimesjid kecamatan, mushaal kantor pemetaan											
	Program pemberdayaan keagamaan dan keistimewaan aceh	Jumlah Event Pemberdayaan keagamaan dan keistimewaan aceh	Event	17	17	178,000,000.00	17	177,636,100.00	17	179.700.000,00	Bagian Sosial SETDA
Tujuan : Meningkatkan peluang pendidikan bagi keluarga miskin											
Sasaran : Mahasiswa keluarga miskin											
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah beasiswa bagi mahasiswa miskin	Kegiatan	2	1	63.380.000,00	3	29.723.450,00	-	-	SETDA
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan SDM											
Sasaran : SDM penanggulangan bencana											

VISI, MISI, Tujuan, dan Sasaran	Program	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social	Tersedianya operasional TRC	orang			301,320,000.00		361,680,000.00	26	522.355.000,00	BPBD
Tujuan : Meningkatkan penanganan penyelesaian di masyarakat											
Sasaran : Masyarakat Umum											
	Program Mengidentifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Persen	0	100	79.918.600,00	100	16.000.000,00	100	16.700.000,00	SETDA HUMAS

Tabel 6.5

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2021 dan 2022 Kabupaten Bireuen

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact/ outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp			
Visi : TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN SYARI'AT ISLAM											
Misi I : Menciptakan dan meningkatkan pembangunan yang seimbang, terukur, dan terintegrasi berdasarkan syari'at Islam											
1.1	Tujuan	Memperkuat Aqidah dan Akhlak serta pelaksanaan syariah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat	Cakupan pembinaan Syariat Islam	Persen	100	21,740,387,780.00	100	18,760,310,040.00	100	40,500,697,820	DSI, MPU, Disdikdayah, dan Bakesbangpol
1.1.1	Sasaran	Meningkatnya Nilai-nilai Syariat Islam Dalam tatanan Kehidupan Bermasyarakat	Indeks Penerapan Syariat Islam	Indeks	0.97	8,660,567,948.00	0.95	5,600,000,000.00	0.95	14,260,567,948	DSI & Sekretariat MPU
	1.1.1.1	Program Syariat Islam Aceh	Jumlah Gampong yang mengadakan pengajian rutin	Gampong	609	8,075,569,013.00	609	5,000,000,000.00	609	13,075,569,013	Dinas Syariat Islam
	1.1.1.2	Program Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Bireuen	Persentase sidang yang menghasilkan keputusan	Persen	90	584,998,935.00	90	600,000,000.00	90	1,184,998,935	Sekretariat MPU
1.1.2	Sasaran	Meningkatnya mutu pendidikan keislaman	Persentase dayah terakreditasi	Persen	93	13,025,310,040.00	95	13,050,310,040.00	95	26,075,620,080	Dinas Pendidikan Dayah
	1.1.2.1	Program Pendidikan Dayah	Jumlah dayah Naik Kelas	Dayah	135	13,025,310,040.00	135	13,050,310,040.00	135	26,075,620,080	Dinas Pendidikan Dayah

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		Target	Rp		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp					
1.1.3	Sasaran	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Jumlah kasus konflik antar dan intra umat beragama	Kasus		1 (Intra)	54,509,792.00	0	110,000,000.00	0	164,509,792	Bakesbangpol		
	1.1.3.1	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase tingkat ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Persen		65	54,509,792.00	70	110,000,000.00	70	164,509,792	Bakesbangpol		
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan														
2.1	Tujuan	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks		72.29	221,295,225,704.00	72.30	220,779,942,330	72.30	442,075,168,034.00	Dinas PK, MPA, dan Dinas PerpusArsip, Dinas Kesehatan dan RSUD Fauziah		
2.1.1	Sasaran	Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun		9,29	107,895,644,814.00	9,30	105,509,942,330	9,30	213,405,587,144	Dinas PK, MPA, dan Dinas Perpustakaan Arsip.		
	2.1.1.1	Program Pengelolaan Pendidikan	APM Pendidikan dasar 9 tahun	Nilai		99.38	106,718,353,833.00	99.43	104,100,000,000.00	99.43	210,818,353,833.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	2.1.1.2	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal	Persen		-	-	75	100,000,000.00	75	100,000,000.00	Dinas Pendidikan dan		

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2021		2022		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp				
											Kebudayaan	
	2.1.1.3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah Guru yang Berkompetensi	Persen		80	830,000,240.00	86	925,000,000.00	86	1,755,000,240.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.1.1.4	Program Penyelenggaraan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	Persentase sekolah/Dayah yang menerapkan pendidikan karakter	Persen		50	183,942,330.00	55	184,942,330.00	55	368,884,660.00	MPA Kab. Bireuen
	2.1.1.5	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang		7,038	163,348,411.00	7,280	200,000,000.00	14,318	363,348,411.00	Dinas perpustakaan dan kearsipan
2.1.2	Sasaran	Meningkatnya mutu dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun		71.30	113,399,580,890.00	71.38	115,270,000,000	71.38	228,669,580,890	Dinas Kesehatan dan RSUD Fauziah
	2.1.2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor		B	77,226,780,104.00	B	78,500,000,000.00	B	155,726,780,104.00	Dinas Kesehatan
	2.1.2.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemerataan SDM dan Kompetensi serta Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	PKM		20	231,743,900.00	20	250,000,000.00	20	481,743,900.00	Dinas Kesehatan
	2.1.2.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pengawasan sarana Kefarmasian, makanan minuman Angka Usia Harapan Hidup	Sarana		187	211,356,886.00	196	220,000,000.00	383	431,356,886.00	Dinas Kesehatan

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		Target	Rp		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp					
	2.1.2.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pengawasan sarana Kefarmasian, Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	UKBM		-	-	1,749	200,000,000.00	1,749	200,000,000.00	Dinas Kesehatan		
	2.1.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemerataan SDM dan Kompetensi serta Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen		80	1,573,195,000.00	85	1,600,000,000.00	85	3,173,195,000.00	RSUD dr. Fauziah		
	2.1.2.6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor		B	34,156,505,000.00	B	34,500,000,000.00	B	68,656,505,000.00	RSUD dr. Fauziah		
Misi 3 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah bidang ekonomi.														
3.1	Tujuan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Persen		3	60,480,396,370.00	3.3	62,605,300,000.00	3.3	123,085,696,370.0	Disnakertrans, DPPKUKM, DLHK, Baitul mal, Dinas Sosial, DPMGPKB, DPKP, Distanbun, Disnak keswan, Bag perekonomian dan SDA, Bag. Pengd Barjas, Bag. ADM Pembangunan, DPMPTSP dan BPKD		
3.1.1	Sasaran	Menurunnya tingkat pengangguran Terbuka	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen		4	7,836,143,164.00	3.95	5,585,000,000	3.95	13,421,143,164	Disnakertrans dan DPPKUKM		

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp			
	3.1.1.1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang telah ditempatkan	Orang		150	15,000,000.00	200	55,000,000.00	350	70,000,000.00	Disnakertrans
	3.1.1.2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang		144	676,150,480.00	160	700,000,000.00	224	1,376,150,480.00	Disnakertrans
	3.1.1.3	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Perusahaan yang memiliki Perizinan dan pendaftaran	Persen		50	44,999,295.00	50	55,000,000.00	85	99,999,295.00	DPPKUKM
	3.1.1.4	Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan	Persentase Pengelolaan Sarana Perdagangan yang berfungsi	Persen		30	7,049,993,453.00	30	4,600,000,000.00	20	11,649,993,453.00	DPPKUKM
	3.1.1.5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pelatihan	Persen		14	49,999,936.00	21	175,000,000.00	21	224,999,936.00	DPPKUKM
3.1.2	Sasaran	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen		12.56	17,207,356,455.00	12,06	18,365,300,000	12,06	35,572,656,455	Baitul mal, Dinas Sosial, Disnakertrans, dan DPMGPKB
	3.1.2.1	Program Baitul Mal Kabupaten Bireuen	Jumlah Mustahik	Orang		30,975	12,120,004,438.00	32,000	13,120,000,000.00	62,975	25,240,004,438.00	Baitul Mal
	3.1.2.2	Program Pemberdayaan Sosial	persentase kemampuan potensi sumber kesejahteraan dalam pemberdayaan sosial masyarakat	Persen		80	792,848,099.00	85	800,000,000.00	85	1,592,848,099.00	Dinsos
	3.1.2.3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan anak terlantar dan tersedianya data fakir miskin	Persen		80	414,871,226.00	85	450,000,000.00	85	864,871,226.00	Dinsos
	3.1.2.4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi	Persen		-	-	39.35	100,000,000.00	39.35	100,000,000.00	Disnakertras

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		Target	Rp		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp					
	3.1.2.5	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase UPT mandiri	Persen		50	54,332,692.00	50	70,000,000.00	50	124,332,692.00	Disnakertras		
	3.1.2.6	Program pemberdayaan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase desa yang memiliki kelompok Tribina	Persen		24.6	3,825,300,000.00	27.9	3,825,300,000.00	27.9	7,650,600,000.00	DPMGPKB		
3.1.3	Sasaran	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Milyar Rupiah		4,441.6	30,067,580,673.00	4,670.8	31,180,000,000.00	4,670.8	61,247,580,673.0	DPKP, Distanbun, Disnak Keswan		
	3.1.3.1	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan pangan utama (beras)	Persen		33.25	500,000,000.00	34.55	550,000,000.00	34.55	1,050,000,000	DPKP		
	3.1.3.2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor		80.2	1,170,141,925.00	84.6	1,200,000,000.00	84.6	2,370,141,925	DPKP		
	3.1.3.3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Desa yang terindikasi rawan pangan	Persen		50	32,799,977.00	66	50,000,000.00	66	82,799,977	DPKP		
	3.1.3.4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton		13,500	5,064,760,587.00	14,000	5,200,000,000.00	64,700	10,264,760,587	DPKP		
	3.1.3.5	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton		13,000	2,234,899,782.00	13,500	2,250,000,000.00	62,600	4,484,899,782	DPKP		
	3.1.3.6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Olahan	Ton		1,400	64,784,085.00	1,500	100,000,000.00	6,500	164,784,085	DPKP		

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		Target	Rp		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp					
	3.1.3.7	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persen		-	-	55	50,000,000.00	55	50,000,000	DPKP		
	3.1.3.8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan (kelapa, Karet dan Kakao	Ton	263,609	15,081	954,549,526.00	385	1,100,000,000.00	309,378	2,054,549,526	Distanbun		
	3.1.3.9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah PDRB sektor Pertanian	Triliun Rupiah		4.6	12,069,806,511.00	4.8	12,100,000,000.00	4.8	24,169,806,511	Distanbun		
	3.1.3.10	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanggulangan Luas Serangan OPT dan DPI	Persen	65	75	108,309,625.00	80	120,000,000.00	80	228,309,625	Distanbun		
	3.1.3.11	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Yang Naik Kelas	Kelompok Tani		8	3,157,504,084.00	9	3,230,000,000.00	17	6,387,504,084	Distanbun		
	3.1.3.12	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Populasi ternak	Persen		3	3,418,723,277.00	3	3,600,000,000.00	3	7,018,723,277	Distanbun		
	3.1.3.13	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan PAD Sektor Peternakan	Persen	2	2	1,085,001,033.00	2	1,150,000,000.00	2	2,235,001,033	Distanbun		
	3.1.3.14	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kasus Penyakit yang Hewan yang Tertangani	Persen		70	206,300,261.00	75	480,000,000.00	75	686,300,261	Distanbun		
3.1.4	Sasaran	Meningkatnya Perkembangan UMKM	Jumlah UMKM dan Koperasi yang diberdayakan	UMKM dan Koperasi		230	2,388,166,604.00	260	2,675,000,000	315	5,063,166,604	DPPKUKM		

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	3.1.4.1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM		50	160,699,113.00	75	200,000,000.00	125	360,699,113.00	DPPKUKM
	3.1.4.2	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang naik Kelas	UMKM		3	2,107,473,111.00	3	2,150,000,000.00	6	4,257,473,111.00	DPPKUKM
	3.1.4.3	Program penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan Daerah	Produk Unggulan		2	39,999,742.00	2	45,000,000.00	4	84,999,742.00	DPPKUKM
	3.1.4.4	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah	Koperasi			-	20	60,000,000.00	30	60,000,000.00	DPPKUKM
	3.1.4.5	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang mendapat pengawasan	Persen			-	20	75,000,000.00	25	75,000,000.00	DPPKUKM
	3.1.4.6	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Dinilai	Persen			-	12	45,000,000.00	50	45,000,000.00	DPPKUKM
	3.1.4.7	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen		74,38	79,994,638.00	78,51	100,000,000.00	14	179,994,638.00	DPPKUKM
3.1.5	Sasaran	Menjaga stabilitas harga	Tingkat Inflasi	Persen	1.8	3	1,421,964,795.00	2,7	2,050,000,000	2,7	3,471,964,795	DPPKUKM, Bagian Ekonomi, ULP, dan ADM Pembangunan
	3.1.5.1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting	Ya/Tidak		Ya	194,988,041.00	Ya	550,000,000.00	Tidak	744,988,041.00	DPPKUKM

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp			
		dan Barang Penting										
	3.1.5.2	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Cakupan Layanan Administrasi Umum, Organisasi, Protokoler, Perencanaan dan Keuangan	persen		90	1,226,976,754.00	100	1,500,000,000.00	85	2,726,976,754.00	Bagian ekonomi, ULP, dan adm pembangunan
3.1.6	Sasaran	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Rp (Milyar)		235.98	169,693,541.00	248.89	1,205,000,000	248.89	1,374,693,541	DPPKUKM dan Disnakertrans
	3.1.6.1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Pelaku Usaha Industri	Pelaku Usaha		1592	149,693,541.00	1600	1,170,000,000.00	1600	1,319,693,541	DPPKUKM
	3.1.6.2	Program Hubungan Industrial	Jumlah karyawan dan pelaku usaha yang mengikuti Bimtek Penyelesaian Hubungan Industrial dan Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Orang		50	20,000,000.00	70	35,000,000.00	120	55,000,000	Disnakertrans
3.1.7	Sasaran	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen		7.8	1,188,746,481.00	7.75	1,325,000,000	8.29	2,513,746,481	DPMPPTSP dan BPKD
	3.1.7.1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tingkat Kondusif Iklim Investasi	Persen		60	31,572,479.00	80	35,000,000.00	80	66,572,479	DPMPPTSP
	3.1.7.2	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Rencana Investasi	Persen		60	20,054,785.00	80	25,000,000.00	80	45,054,785	DPMPPTSP

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		Target	Rp		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp					
	3.1.7.3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan yang diterbitkan	Persen		85	121,598,719.00	90	135,000,000.00	90	256,598,719	DPMPTSP		
	3.1.7.4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Realisasi Investasi	Perusahaan/ Pelaku usaha		400	335,521,877.00	700	350,000,000.00	700	685,521,877	DPMPTSP		
	3.1.7.5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD	Persen		100	679,998,621.00	100	780,000,000.00	100	1,459,998,621	BPKD		
3.1.8	Sasaran	Meningkatnya perlindungan masyarakat sebagai konsumen	Jumlah produk hukum daerah yang mengatur tentang perlindungan konsumen	PerBup		1	200,744,657.00	1	220,000,000	1	420,744,657	DPKP dan DPPKUKM		
	3.1.8.1	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	Persen	-	80	60,748,767.00	85	70,000,000.00	85	130,748,767.00	DPKP		
	3.1.8.2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Standarisasi dan Perlindungan Konsumen di Kecamatan	Persen		100	139,995,890.00	100	150,000,000.00	100	289,995,890.00	DPPKUKM		
Misi 4 : Menata dan Mengembangkan Potensi Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata														
4.1	Tujuan	Memanfaatkan bonus demogrfi untuk pembangunan daerah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen		67,09	10,832,458,833.00	67,1	6,375,000,000.00	67,1	17,207,458,833.00	Disporapar, Dinas PK, Dinsos, Dinas PerpusArsip, DLHK, DPMGPKB, dan MAA		
4.1.1	Sasaran	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen		92	8,553,684,475.00	95	3,930,000,000	95	12,483,684,475	Disporapar		

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp			
	4.1.1.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif	Organisasi		23	1,079,089,585.00	24	1,100,000,000.00	24	2,179,089,585.00	Disporapar
	4.1.1.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olahraga yang mendapat medali di even Provinsi	Persen		20	7,174,594,890.00	25	2,500,000,000.00	25	9,674,594,890.00	Disporapar
	4.1.1.3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					300,000,000.00		330,000,000.00		630,000,000.00	Disporapar
4.1.2	Sasaran	Meningkatnya tatanan budaya dan adat istiadat	Jumlah urusan pemerintahan yang menggunakan kearifan lokal	Urusan		5	1,940,047,705.00	5	1,800,000,000.00	5	3,740,047,705.00	Dinas PK, Dinsos, DLHK, DPMGPKB, dan MAA
	4.1.2.1	Program Pengembangan Kebudayaan	Peningkatan jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan diinventarisir	Persen		50	445,000,140.00	60	525,000,000.00	60	970,000,140.00	Dinas PK
	4.1.2.2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kelompok Kesenian yang dibina	Kelompok		20	589,999,713.00	25	175,000,000.00	25	764,999,713.00	Dinas PK
	4.1.2.3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya yang tertangani	Persen		70	119,999,583.00	80	100,000,000.00	80	219,999,583.00	Dinas PK
	4.1.2.4	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Museum yang Dikelola	Persen		100	100,000,000.00	100	120,000,000.00	100	220,000,000.00	Dinas PK
	4.1.2.5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana taman makam pahlawan	Persen				75	100,000,000.00	75	100,000,000.00	Dinsos

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp			
	4.1.2.6	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	Lembaga		4	619,997,206.00	4	630,000,000.00	4	1,249,997,206.00	DPMGPKB
	4.1.2.7	Program Sekretariat Majelis Adat Aceh	Jumlah Pembinaan Adat dan Adat Istiadat	Pelatihan		3	65,051,063.00	4	150,000,000.00	7	215,051,063.00	MAA
4.1.3	Sasaran	Mengembangkan potensi pariwisata daerah	Jumlah destinasi wisata	destinasi		54	338,726,653.00	65	645,000,000.00	65	983,726,653.00	Disporapar
	4.1.3.1	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Promosi Wisata	Persen		85	59,998,704.00	90	75,000,000.00	90	134,998,704.00	Disporapar
	4.1.3.2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisata	Persen		70	195,400,000.00	75	350,000,000.00	75	545,400,000.00	Disporapar
	4.1.3.3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Pembinaan	Persen		50	83,327,949.00	55	220,000,000.00	55	303,327,949.00	Disporapar
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih												
5.1	Tujuan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		CC	1,459,017,043,133	CC	1,480,419,854,482	CC	2,939,436,897,615	Seluruh SKPK
5.1.1	Sasaran	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK	Opini		WTP	553,307,268,182	WTP	557,968,590,994	WTP	1,111,275,859,176	BPKD dan Inspektorat
	5.1.1.1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Keuangan Daerah	Persen		97	551,494,590,994.00	98	555,494,590,994.00	98	1,106,989,181,988	BPKD
	5.1.1.2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Manajemen Aset Daerah	persen		100	405,787,580.00	100	450,000,000.00	100	855,787,580.00	BPKD

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp			
	5.1.1.3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Kepatuhan dalam Pelaporan Keuangan dan kinerja	persen		75	1,291,627,984.00	80	1,600,000,000.00	80	2,891,627,984.00	Inspektorat
	5.1.1.4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Penurunan Jumlah Kasus Kesalahan Prosedur Pengelolaan Dana APBK	kasus		6	115,261,624.00	4	424,000,000.00	4	539,261,624.00	Inspektorat
5.1.2	Sasaran	Meningkatkan pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan	Indeks Perencanaan	Indeks		80.5	3,181,353,545.00	82.25	4,050,000,000.00	82.25	7,231,353,545.00	Bappeda
	5.1.2.1	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan daerah	Persentase Kesesuaian Penganggaran antara APBD dengan RPJM	Persen		90	1,124,974,899.00	95	1,950,000,000.00	95	3,074,974,899.00	Bappeda
	5.1.2.2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program antara RPJM dengan APBK	Persen		100	2,056,378,646.00	100	2,100,000,000.00	100	4,156,378,646.00	Bappeda
5.1.3	Sasaran	Meningkatnya peran dan fungsi lembaga legislatif	Persentase Rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun	persen		20	8,528,883,742.00	21	8,600,000,000.00	21	17,128,883,742.00	Sekretariat DPRK
	5.1.3.1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Raperda yang di tetapkan menjadi Perda	Persen		0	8,528,883,742.00	0	8,600,000,000.00	0	17,128,883,742.00	Sekretariat DPRK
5.1.4	Sasaran	Meningkatnya fungsi penelitian dan inovasi dalam pembangunan	Persentase kebijakan inovasi yang dikembangkan dalam pembangunan	Persen		20	664,998,766.00	50	700,000,000.00	50	1,364,998,766.00	Bappada
	5.1.4.1	Program Penelitian dan Pembangunan Daerah	Persentase SKPK yang melaksanakan Penelitian dan Pengembangan	Persen		85	664,998,766.00	90	700,000,000.00	90	1,364,998,766.00	Bappeda

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		Target	Rp		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp					
5.1.5	Sasaran	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Skor		B	893,334,538,898.00	B	909,101,263,488.00	B	1,802,435,802,386.00	Seluruh SKPK		
	5.1.5.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		100	879,266,363,259.00	100	892,935,263,488.00	100	1,772,201,626,747.00	Seluruh SKPK		
	5.1.5.2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persen				100	850,000,000.00	100	850,000,000.00	Seluruh Kecamatan		
	5.1.5.3	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen		97.5	1,303,940,336.00	98	1,350,000,000.00	98	2,653,940,336.00	Disdukcapil		
	5.1.5.4	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Persen		95	220,647,110.00	98	235,000,000.00	98	455,647,110.00	Disdukcapil		
	5.1.5.5	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen		95	330,713,264.00	98	350,000,000.00	98	680,713,264.00	Disdukcapil		
	5.1.5.6	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Profil Kependudukan	Dokumen		1	14,955,101.00	1	20,000,000.00	2	34,955,101.00	Disdukcapil		
	5.1.5.7	Program Penataan Desa	Adanya fasilitasi permasalahan gampong dan pendataan gampong	Persen Ada/Tidak		Ada	1,198,320,225.00	Ada	1,210,000,000.00	Ada	2,408,320,225.00	DPMGPKB		
	5.1.5.8	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan dan Sistem pengelolaan keuangan yang baik	Persen		85	363,461,726.00	87	375,000,000.00	87	738,461,726.00	DPMGPKB		

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		Target	Rp		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp					
5.1.5.9	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Cakupan Rekomendasi/ Naskah Dinas yang terselesaikan	persen		90	3,831,594,998.00	100	4,000,000,000.00	100	7,831,594,998.00	Setda, Sosial kemasyarakatan, hukum, Perekonomian Daerah, Adm. Pembangunan, Orpeg dan Tapem		
5.1.5.10	Program Kepegawaian Daerah		Persentase Tata kelola kepegawaian sesuai Manajemen ASN	persen		70	1,020,812,902.00	80	1,100,000,000.00	80	2,120,812,902.00	BKPSDM		
5.1.5.11	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM yang dilatih	persen		80	3,449,999,203.00	85	3,600,000,000.00	85	7,049,999,203.00	BKPSDM		
5.1.5.12	Program penyelenggaraan urusan pemerintah umum		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	persen		70	335,414,546.00	75	405,000,000.00	75	740,414,546.00	Seluruh Kecamatan		
5.1.5.13	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen		80	856,007,396.00	90	1,020,000,000.00	90	1,876,007,396.00	Seluruh Kecamatan		
5.1.5.14	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	persen		35	5,005,740.00	45	455,000,000.00	45	460,005,740.00	Seluruh Kecamatan		
5.1.5.15	Program Pengelolaan Arsip		Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Persen		65	33,119,325.00	70	50,000,000.00	70	83,119,325.00	Dinas perpustakaan dan kearsipan		
5.1.5.16	Program Informasi dan Komunikasi Publik		Peringkat Nilai Keterbukaan Informasi Publik.	Peringkat		97 (Menuju informasi)	787,394,953.00	97 (Menuju informatif)	800,000,000.00	97 (Menuju informatif)	1,587,394,953.00	Diskom infosan		

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp			
					tif)						
	5.1.5.17	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Nilai	1,8 (cukup)	149,904,663.00	2,6 (Baik)	160,000,000.00	2,6 (Baik)	309,904,663.00	Diskom infosan
	5.1.5.18	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Ketersediaan Data Statistik sektoral	Persen	100	34,958,649.00	100	40,000,000.00	100	74,958,649.00	Diskom infosan
	5.1.5.19	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI).	Tingkat	I+	64,632,847.00	II	70,000,000.00	II	134,632,847.00	Diskom infosan
	5.1.5.20	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Partisipan/Masyarakat yang mengurus izin usaha	Persen	50	27,296,287.00	75	31,000,000.00	75	58,296,287.00	DPMPSTP
	5.1.5.21	Program Pengelolaan Sitem Informasi Industri Nasional	Tersedianya data industri dalam Sistem Industri Nasional (SINAS)	Ya/Tidak	Ya	39,996,368.00	Ya	45,000,000.00	Ya	84,996,368.00	DPPKUKM
Misi 6 : Meningkatkan pebangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan											
6.1	Tujuan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan	Persentase pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	Persen	70	254,625,140,863.00	75	234,360,483,807.48	75	488,985,624,670.48	Dinas PUPR, Dishub, Perkim, DLHK, dan Dinas Pertanahan
6.1.1	Sasaran	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	69	175,270,310,965.00	70	177,523,685,000.00	70	352,793,995,965.00	Dinas PUPR, Perkim dan Dishub

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp			
6.1.1.1	Program Penyelenggaraan Jalan		Persentase jalan dalam kondisi baik	Persen		60	123,338,675,311.00	63	123,500,000,000.00	63	246,838,675,311.00	Dinas PUPR
6.1.1.2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Persentase pelayanan lalu lintas	Persen		65	1,964,057,501.00	70	1,975,000,000.00	70	3,939,057,501.00	Dishub
6.1.1.3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Persentase kondisi IPAL terpusat dalam kondisi baik	Persen		70	4,525,397,000.00	76	4,525,397,000.00	88	9,050,794,000.00	Dinas PUPR
6.1.1.4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen		60	1,225,000,000.00	70	1,325,000,000.00	70	2,550,000,000.00	Dinas PUPR
6.1.1.5	Program Penataan Bangunan Gedung		Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	Persen		40	33,091,200,000.00	45	33,500,000,000.00	45	66,591,200,000.00	Dinas PUPR
6.1.1.6	Program Penataan Bangunan dan lingkungannya		Persentase Gedung Pemerintah dan Lingkungannya yang Terpelihara	Persen					1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	Dinas PUPR
6.1.1.7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		Jumlah aparatur jasa konstruksi yang bersertifikat	Orang		175	320,399,706.00	225	350,000,000.00	400	670,399,706.00	Dinas PUPR
6.1.1.8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		Persentase Kesesuaian Pelaksanaan dengan Perencanaan penataan Ruang	Persen		60	514,994,500.00	70	550,000,000.00	70	1,064,994,500.00	Dinas PUPR
6.1.1.9	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Cakupan akses air minum	Persen		75	5,048,288,000.00	80	5,148,288,000.00	80	10,196,576,000.00	Dinas PUPR

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		Target	Rp		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp					
	6.1.1.10	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah layak huni	Unit		175	1,587,951,801.00	177	1,750,000,000.00	352	3,337,951,801.00	Perkim		
	6.1.1.11	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan pemukiman kumuh	persen		57	3,404,347,146.00	57	3,500,000,000.00	57	6,904,347,146.00	Perkim		
	6.1.1.12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kawasan perumahan dengan kondisi PSU yang layak	persen		45	250,000,000.00	47	300,000,000.00	47	550,000,000.00	Perkim		
	6.1.1.13	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang memiliki sertifikasi	Pengembang perusahaan				2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	Perkim		
6.1.2	Sasaran	Meningkatkan perlindungan terhadap kawasan lindung	Luas kawasan lindung	Ha		40,647.38	147,977,500.00	40,647.38	200,000,000.00	40,647.38	347,977,500.00	Dinas LH dan Kehutanan		
	6.1.2.1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rasio RTH yang Tertangani	Persen		30	147,977,500.00	40	200,000,000.00	40	347,977,500.00	Dinas LH dan Kehutanan		
6.1.3	Sasaran	Meningkatnya akses aliran irigasi	Luas daerah irigasi	Ha		2,878.22	65,146,495,600.00	2,878.22	45,116,798,807.48	2,878.22	110,263,294,407.48	Dinas PUPR		
	6.1.3.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase cakupan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian	Persen		70	65,146,495,600.00	75	45,116,798,807.48	75	110,263,294,407.48	Dinas PUPR		
6.1.4	Sasaran	Meningkatnya pelayanan di bidang pertanahan	Persentase pelayanan pertanahan yang tertangani	Persen		85	6,119,946,210.00	90	3,255,000,000.00	90	9,374,946,210.00	Dinas Pertanahan		

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp			
	6.1.4.1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah kasus Sengketa Tanah yang tertangani	Kasus				4	30,000,000.00	8	30,000,000.00	Dinas Pertanahan
	6.1.4.2	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Tanah terlantar dan Absentee yang didistribusi	Persen		54	94,981,905.00	66	100,000,000.00	66	194,981,905.00	Dinas Pertanahan
	6.1.4.3	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Pengadaan Tanah yang di fasilitasi	Persen		80	14,999,931.00	90	25,000,000.00	90	39,999,931.00	Dinas Pertanahan
	6.1.4.4	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Masyarakat terdampak yang disantuni	Persen		90	5,500,000,000.00	95	2,500,000,000.00		8,000,000,000.00	Dinas Pertanahan
	6.1.4.5	Program Pengurusan Hak Atas Tanah	Persentase tanah yang bersertifikat	Persen		54	430,779,441.00	66	450,000,000.00		880,779,441.00	Dinas Pertanahan
	6.1.4.6	Program Penanganan Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Persentase kasus konflik dan sengketa yang ditangani	Persen		80	79,184,933.00	85	85,000,000.00		164,184,933.00	Dinas Pertanahan
	6.1.4.7	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Data Tanah Kosong	Persen				60	30,000,000.00	60	30,000,000.00	Dinas Pertanahan
	6.1.4.8	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah sesuai dengan peruntukannya	Persen				55	35,000,000.00	55	35,000,000.00	Dinas Pertanahan
6.1.5	Sasaran	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (Air, udara, dan tanah)	Indeks		80	7,940,410,588.00	81	8,265,000,000.00	81	16,205,410,588.00	Dinas LH dan Kehutanan
	6.1.5.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Persen		0<1	449,029,880.00	0<1	500,000,000.00	0<1	949,029,880.00	Dinas LH dan Kehutanan

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2021		2022		Target	Rp		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp					
	6.1.5.2	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	persen		88	7,231,380,988.00	90	7,500,000,000.00	90	14,731,380,988.00	Dinas LH dan Kehutanan		
	6.1.5.3	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Orang		30	259,999,720.00	60	265,000,000.00	90	524,999,720.00	Dinas LH dan Kehtanan		
Misi 7 : Meningkatkan Keamanan, kedamaian, dan perlindungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat														
7.1	Tujuan	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks		1.3	25,776,985,317.00	1.1	31,310,758,094.82	1.1	57,087,743,411.82	Pol PP &WH, Bangkesbang pol, Dinasos, dan BPBD, DPMGPKB		
7.1.1	Sasaran	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam berpolitik	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	Persen		77,9	11,015,379,629.00	80.05	16,428,106,094.82	80,05	27,443,485,723.82	Bankesbang pol		
	7.1.1.1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman terhadap penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen		83	93,294,333.00	93	120,000,000.00	93	213,294,333.00	Bankesbang pol		
	7.1.1.2	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Peserta Partai politik yang memahami mekanisme pengelolaan partai	Persen		87	10,857,617,773.00	92	16,203,106,094.82	92	27,060,723,867.82	Bankesbang pol		

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp			
	7.1.1.3	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Persen		87	14,999,715.00	92	30,000,000.00	90	44,999,715.00	Bankesbang pol
	7.1.1.4	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Ancamaan/deteksi dini konflik yang tertangani	Persen		60	49,467,808.00	75	75,000,000.00	75	124,467,808.00	Bankesbang pol
7.1.2	Sasaran	Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat	Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan	Persen		0.8	8,829,136,427.00	0.9	8,850,000,000.00	0.9	17,679,136,427.00	Satpol PP, Dinas Sosial dan BPBD
	7.1.2.1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase kasus pelanggaran Qanun yang diselesaikan	Persen		90	2,568,054,662.00	92	2,600,000,000.00	92	5,168,054,662.00	Satpol PP dan WH
	7.1.2.2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Upaya Pengurangan Kerentanan/Darurat Bencana dan Penanganan Bencana	Persen		100	605,148,004.00	100	700,000,000.00	100	1,305,148,004.00	BPBD
	7.1.2.3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran.	Persen		100	2,756,943,545.00	100	2,800,000,000.00	100	5,556,943,545.00	BPBD
	7.1.2.4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyediaan dan pemberian bagi penyandang rehabilitasi sosial	Persen		80	2,205,402,668.00	85	2,000,000,000.00	85	4,205,402,668.00	Dinsos
	7.1.2.5	Program Penanganan Bencana	Tertanganinya sandang dan pangan korban	Persen		90	693,587,548.00	95	750,000,000.00	95	1,443,587,548.00	Dinsos

No.	Visi/Misi/Tujuan/Sasaran/Proram Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (2017)	Target Capaian Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJM		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp			
		bencana									
7.1.3	Sasaran	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,91	5,932,469,261.00	94,92	6,032,652,000.00	94,92	11,965,121,261.00	DPMGPKB
	7.1.3.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase organisasi wanita yang aktif	Persen	70	389,999,872.00	80	400,000,000.00	80	789,999,872.00	DPMGPKB
	7.1.3.2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan Perempuan yang tertangani	Persen	90	414,210,251.00	95	450,000,000.00	95	864,210,251.00	DPMGPKB
	7.1.3.3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan penanganan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Persen	90	629,985,787.00	95	650,000,000.00	95	1,279,985,787.00	DPMGPKB
	7.1.3.4	Program Pengendalian Penduduk	Adanya Ketersediaan sistem Informasi keluarga penyuluhan, advokasi keluarga berencana dan ketahanan keluarga	Ada/Tidak	Ada/iTidak	265,770,000.00	Ada/Tidak	275,000,000.00	Ada/Tidak	540,770,000.00	DPMGPKB
	7.1.3.5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Gampong Layak Anak	Persen	25	133,851,443.00	45	150,000,000.00	45	283,851,443.00	DPMGPKB
	7.1.3.6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan anak yang tertangani	Persen	85	190,999,908.00	90	200,000,000.00	90	390,999,908.00	DPMGPKB
	7.1.3.7	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase peningkatan asektor KB aktif	Persen	32	3,907,652,000.00	55	3,907,652,000.00	55	7,815,304,000.00	DPMGPKB

VI.2.2 Ikon Promotif

Untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dan daya tahan salah satu strategi pencapaian visi-misi pembangunan Kabupaten Bireuen, dapat dimulai melalui RPJMK tahun 2017–2022 hingga 5 tahun kedepan mencanangkan slogan promosi daerah: *Kabupaten Bireuen sebagai Bumi Agro-Wisata religi islami yang terdepan di Provinsi Aceh*, dengan 2 ikon andalan, yaitu : 1) *Agro* dimaksudkan sebagai pertanian dalam arti luas dan *komprehensif* yang meliputi komoditas beras, jagung, sayur mayur, buah-buahan, gula kelapa, daging, susu dan ikan; 2) *Wisata religi islami*. Keunggulan potensi utama kita angkat yaitu *sektor pertanian, perikanan dan sektor pariwisata religi islami* sebagai promosi ekonomi, dilandaskan atas kondisi riil potensi utama Kabupaten Bireuen, yaitu sektor pertanian dan sektor pariwisata. Kedua sektor ini harus mampu dipacu untuk berkembang cepat dan pesat maka dampaknya pada sektor lainnya seperti industri kerajinan perumahan rakyat, industri pengolahan, perdagangan, jasa-jasa akan terpacu berkembang pesat dan menjadi bagian dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian juga dengan *pariwisata religi islami* yang disamping akan mendatangkan wisatawan juga akan memajukan perdagangan dan investasi. Tahapan selanjutnya yaitu mempersiapkan infrastruktur untuk semua sektor dan diarahkan dapat berkembang bersama yang pada gilirannya berdampak pada perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen bahkan hingga ke perbatasan wilayah kabupaten lain dalam Provinsi Aceh. Berdasarkan potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Bireuen yang cukup banyak ragamnya maka dicanangkan pula slogan promosi pariwisata yaitu *Kabupaten Bireuen Sebagai Pesona wilayah bagian pantura Provinsi Aceh Yang Sesungguhnya*. Selain itu dalam rangka pengembangan produk unggulan dalam 5 tahun ke depan dilaksanakan pula gerakan 1 gampong/kelurahan percontohan islami dalam 17 kecamatan yang masing-

masing gampong mengembangkan 1 produk unggulan utama dalam rangka memperkuat pasar lokal sebagai dorongan kepada seluruh masyarakat khususnya dan jajaran pemerintahan harus dapat mengembangkan aksi “cinta dan bangga mengkonsumsi produk lokal”. Sebagai implementasi dari ikon promotif ini setiap SKPK memiliki program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan menjadi bagian strategi untuk menggerakkan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing Kabupaten Bireuen yang ada di Provinsi Aceh.

BAB VII PERUBAHAN KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

VII.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah yang tersisa selama tiga tahun ke depan.

Kerangka pendanaan keuangan Kabupaten meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan kabupaten dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan kerangka pendanaan keuangan Kabupaten dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. Keuangan Kabupaten dalam APBK Bireuen dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bireuen yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang. Sebelumnya di jabarkan terlebih dahulu kapasitas Rill kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2018-2020 Kabupaten Bireuen

NO	KAPASITAS RILL/BELANJA	REALISASI TAHUN (Rp.)		
		2018	2019	Penetapan APBKP 2020
	KAPASITAS RILL KEUANGAN			
2	BELANJA	1,761,174,172,771.00	1,926,156,612,167.83	1,975,235,008,778.71
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,192,022,484,204.00	1,242,251,462,842.13	1,319,235,008,778.56
2.1.1	Belanja Pegawai TL	677,205,417,699.00	685,394,197,967.00	684,668,390,244.56
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah	8,865,547,000.00	12,157,150,000.00	11,352,600,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3,292,000,000.00	2,319,418,427.13	2,300,000,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2,470,185,000.00	3,200,611,607.00	3,299,645,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	499,380,567,755.00	539,180,084,841.00	598,268,733,600.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	808,766,750.00	-	20,073,756,000.00
2.2	Belanja Langsung	569,151,688,567.00	683,905,149,325.70	655,271,883,000.00
2.2.1	Belanja Pegawai L	91,699,940,516.00	66,359,574,235.00	93,245,441,477
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	316,661,888,135.00	322,146,099,437.70	304,621,941,116.40
2.2.3	Belanja Modal	160,789,859,916.00	295,399,475,653.00	257,404,495,340.75
	Surplus/(Defisit)	-7,672,046,609.51	16,190,077,733.09	-70,237,642,844.56

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2021-2022 Kabupaten Bireuen

KODE	KAPASITAS RILL/BELANJA	PROYEKSI TAHUN (Rp.)	
		2021	2022
5	BELANJA DAERAH	2,053,826,428,000.00	2,055,276,648,754.30
5 1	BELANJA OPERASI	1,168,082,135,536.40	1,177,894,450,625.73
5 1 1	Belanja Pegawai	729,498,013,038.00	736,323,697,858.33

KODE				KAPASITAS RILL/BELANJA	PROYEKSI TAHUN (Rp.)	
					2021	2022
5	1	2		Belanja Barang	353,211,317,341.00	356,211,317,341.00
5	1	5		Belanja Hibah	53,022,096,952.40	60,359,435,426.40
5	1	6		Belanja Bantuan Sosial	32,350,708,205.00	25,000,000,000.00
5	2			BELANJA MODAL	336,902,490,706.00	328,230,772,006.74
5	3			BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
5	3	1	1	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
5	4			BELANJA TRANSFER	543,841,801,757.60	544,151,426,121.83
5	4	1	1	Belanja Bagi Hasil	4,263,332,557.60	4,272,956,921.83
5	4	2	2	Belanja Bantuan Keuangan	539,578,469,200.00	539,878,469,200.00
				Surplus/(Defisit)	(12.500.000.000,00)	(9.500.000.000,00)

Beberapa komponen kerangka pendanaan daerah mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, perubahan tersebut didasari kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, serta Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Berkaitan dengan pos Belanja, belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 0.16 persen dibandingkan dengan penetapan tahun 2020, kenaikan tersebut cukup besar dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai baru serta kenaikan pangkat pegawai yang berarti adanya kenaikan gaji.

VII.2 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode

perencanaan. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Bireuen berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, oleh karena itu penjabaran program pembangunan daerah tahun 2021-2022 didasarkan kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis yang terdiri atas Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan serta fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan dan kode rekening yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, didalamnya memuat program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Klasifikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas Program penunjang urusan pemerintah daerah, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, unsur pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintah, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan. Realisasi capaian program tahun 2018-2019. Penetapan APBK Tahun 2020, serta proyeksi Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.3
Realisasi Capaian Program Prioritas yang disertai dengan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bireuen
Tahun 2018 dan Tahun 2019

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019			
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		JUMLAH				569.151.688.567,00		683.905.149.325,70		
1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				433.625.406.359,00		514.841.986.976,70		
1	1	PENDIDIKAN :								
1	1	1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				66.279.683.010,00		81.700.639.385,70		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	2.752.363.814,00	12	3.337.664.833,00	DISDIKPORA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	94.853.416,00	12	138.280.150,00	DISDIKPORA
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	50	55	2.214.346.066,00	55	3.924.130.335,00	DISDIKPORA
		Program Pendidikan Non Formal	Jumlah pelatihan pendidikan Non formal	Pelatihan	2	2	856.795.000,00	2	149.848.500,00	DISDIKPORA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Fasilitas Pendidikan dasar Sembilan Tahun	Persen	85	87	54.624.247.214,00	90	67.434.872.567,70	DISDIKPORA
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pembinaan dan pelatihan kepemudaan	Angkatan	4	2	159.492.000,00	5	358.574.500,00	DISDIKPORA
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah pelatihan manajemen dan olahraga	Pelatihan	3	1	30.000.000,00	3	-	DISDIKPORA
	Program Pembinaan dan Permasalahan Olahraga	Jumlah pembinaan dan pelatihan atlet dan pelatih	Orang	0	40	688.012.800,00	40	300.000.000,00	DISDIKPORA
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana olahraga	Persen	40	42	1.635.310.000,00	44	1.821.952.000,00	DISDIKPORA
	Program Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Kelompok usia cabang olahraga sepak bola	Kelompok usia	3	3	-	3	169.960.000,00	DISDIKPORA
	Program peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan	Nilai Uji Kompetensi Guru	UKG	47,38	57	99.998.000,00	67	484.300.000,00	DISDIKPORA
	Program manajemen pelayanan pendidikan	Jumlah sekolah yang mengadakan ujian	sekolah	454	454	901.609.000,00	454	1.378.408.200,00	DISDIKPORA
	Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah event budaya daerah	event	0	1	1.675.626.800,00	1	1.729.148.300,00	DISDIKPORA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019				
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)			
		Program pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah sanggar seni budaya dan kebudayaan daerah	Sanggar	1	1	194.818.900,00	1	-	DISDIKPORA	
		Program pengembangan nilai budaya	Jumlah event budaya daerah	event	6	1	199.900.000,00	4	415.000.000,00	DISDIKPORA	
		Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Event pemasaran pariwisata	Event	1	1	70.000.000,00	2	58.500.000,00	DISDIKPORA	
		Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi wisata	Destinasi wisata	22	22	82.310.000,00	22	-	DISDIKPORA	
		Program pengembangan ekonomi kreatif	Jenis usaha kreatifitas	Jenis Usaha	10	10	-	10	-	DISDIKPORA	
1	2	KESEHATAN:									
1	2	1	Dinas Kesehatan				66.133.491.394,00		81.530.541.486,00		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	4.371.069.559,00	12	4.294.316.062,00	DINKES
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	341.234.665,00	12	377.498.050,00	DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Jamaah Haji, Jumlah orang Gangguan Jiwa atau Kelompok Khusus mendapat layanan kesehatan yang layak	Orang	2.559	2.559	3.919.932.029,00	2.559	6.432.565.000,00	DINKES
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kepesertaan JKN	Orang	407.222	438.000	42.081.269.190,00	439.000	39.973.920.827,00	DINKES
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Rumah Tangga Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)	Rumah Tangga	14.561	15.700	279.126.000,00	16.300	213.677.000,00	DINKES
	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Keluarga Sehat	Keluarga Sehat	6.110	40.547	814.149.500,00	55.771	961.290.000,00	DINKES
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Jumlah angka kematian ibu, bayi dan anak balita	Orang	159	140	299.072.550,00	135	274.501.550,00	DINKES
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Kasus Kurang Gizi, Gizi Buruk dan Stunting	Orang	903	850	202.712.800,00	750	788.201.390,00	DINKES
	Program pengadaan, Peningkatan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas	Persentase sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya	Persen	70	75	7.712.585.158,00	80	22.732.611.500,00	DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019			
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)		
		pembantu dan jaringannya								
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah desa yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi dalam waktu < 24 jam	Desa	609	609	581.322.550,00	609	1.428.131.449,00	DINKES
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	Persen	50	60	-	70	141.575.600,00	DINKES
		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	PKM	4	13	324.582.848,00	20	97.189.100,00	DINKES
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71	71	5.206.434.545,00	71	3.815.063.958,00	DINKES
1	2	2	Badan Layanan Umum RSUD dr. Fauziah Bireuen				138.307.647.911,00		123.030.275.788,00	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						808.500.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase pelayanan BLUD	Persen	60	65	106.839.730.759,00	70	71.374.923.857,00	RSUD dr. Fauziah Bireuen
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana Rumah sakit sesuai standar	Persen	70	75	31.467.917.152,00	80	50.846.851.931,00	RSUD dr. Fauziah Bireuen
	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit	Persen	60	65	-	70	-	RSUD dr. Fauziah Bireuen
1	3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :							
1	3	1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				104.932.858.548,00		179.847.112.977,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	1.426.127.675,00	12	1.520.998.627,00	Dinas PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	272.354.450,00	12	916.518.200,00	Dinas PUPR
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan	Meter	79,573.00	37,119	35.405.404.900,00	75,345	89.880.321.100,00	Dinas PUPR
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang jalan dan jembatan yang direhabilitasi	Meter	151,350.00	18,401.00	14.303.305.700,00	20,78	30.574.975.300,00	Dinas PUPR
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	panjang jalan dan jembatan perdesaan	Meter	5.000	1.250	1.234.186.200,00	1.583	3.443.533.100,00	Dinas PUPR
	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Luas Daerah Irigasi	Ha	14,210.00	0	-	735	18.481.026.350,00	Dinas PUPR
	Program Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Luas areal sawah teraliri	Persen	55	57	1.890.138.800,00	60	1.741.170.000,00	Dinas PUPR
	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Luas lahan konservasi sungai, danau dan sumber daya air	Persen	55	57	32.241.604.823,00	60	2.390.043.000,00	Dinas PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase layanan air minum layak	Persen	72	80	10.481.010.000,00	85	14.554.089.800,00	Dinas PUPR
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	Persen	60	65	7.207.029.000,00	70	15.004.149.500,00	Dinas PUPR
	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran dan gorong-gorong	Meter	450	500	471.697.000,00	550	777.204.800,00	Dinas PUPR
	Program Perencanaan Penataan Ruang	Persentase tahapan perencanaan tata ruang	Persen	30	35	-	40	563.083.200,00	Dinas PUPR
1	4	PEKERJAAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKINAN :							
1	4	1 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup				38.579.299.710,00		37.067.709.623,00	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	553.917.589,00	12	491.904.573,00	PERKIM & LH
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Bulan	12	12	80.135.725,00	12	102.821.289,00	PERKIM & LH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Aparatur								
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Pasang	266	0	-	266	192.780.000,00	PERKIM & LH
	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan hidup	Dokumen	3	0	-	1	29.978.925,00	PERKIM & LH
	Program Perlindungan dan konservasi SDA	Persentase luas lahan resapan air	Persen	10	15	-	20	-	PERKIM & LH
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau	Persentase pemeliharaan ruang terbuka hijau	Persen	50	55	199.227.957,00	60	1.130.254.700,00	PERKIM & LH
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	76	80	6.677.173.589,00	83	7.837.376.289,00	PERKIM & LH
	Program pengembangan perumahan	Jumlah rumah layak huni	Unit	171	337	31.068.844.850,00	200	27.232.538.847,00	PERKIM & LH
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi							50.055.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019				
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)			
1	5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT:									
1	5	1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah			2.890.741.413,00		3.658.573.459,00			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	758.295.413,00	12	907.833.413,00	Satpol PP & WH
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	159.982.100,00	12	237.189.900,00	Satpol PP & WH
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Pasang	227	180	179.800.000,00	227	178.821.000,00	Satpol PP & WH
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan aparatur keamanan	Orang	100	0	-	100	82.900.000,00	Satpol PP & WH
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Orang	180	182	1.662.655.200,00	184	2.131.940.146,00	Satpol PP & WH
			Program Penegakan Hukum dan Peraturan Daerah	Jumlah pelanggaran qanun	Kasus	36	33	100.008.700,00	30	90.430.000,00	Satpol PP & WH
			Program Peringatan hari-	Jumlah hari besar	Kegiatan	1	1	30.000.000,00	1	29.459.000,00	Satpol PP &

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019			
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)		
		hari besar	satpol						WH	
1	6	SOSIAL								
1	6	1	Dinas sosial			4.899.548.952,00		6.139.792.027,00		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	443.910.407,00	12	476.592.043,00	Dinas Sosial
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	295.893.350,00	12	193.456.750,00	Dinas Sosial
		Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	0,5	0,85	529.466.750,00	0,95	392.500.600,00	Dinas Sosial
		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial	Lembaga sosial	3	3	-	3	706.108.000,00	Dinas Sosial
		Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah warga penyandang cacat dan trauma	Orang	102	77	119.040.000,00	100	235.350.000,00	Dinas Sosial
		Program Pembinaan Pantu Asuhan/Panti Jompo	Jumlah Pantu sosial dan pantu Jompo	Unit	11	11	665.181.545,00	11	675.331.095,00	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019				
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)			
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial	Orang	688	678	-	668	85.878.250,00	Dinas Sosial	
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Fakir miskin, korban bencana dan PMKS lainnya	Persen	25	27	2.846.056.900,00	30	3.374.575.289,00	Dinas Sosial	
1	6	2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				11.602.135.421,00		1.867.342.231,00		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	601.443.159,00	12	668.379.718,00	BPBD
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	358.699.000,00	12	288.127.513,00	BPBD
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Pasang	127	0	-	0	-	BPBD
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pelatihan aparatur	Pelatihan	1	2	69.422.000,00	2	50.534.000,00	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tersedianya operasional TRC	orang	24	24	301.320.000,00	25	361.680.000,00	BPBD
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Pelatihan	1	1	61.369.000,00	1	-	BPBD
	Program peningkatan kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tersedianya operasional pencegahan bahaya kebakaran	orang	47	48	549.720.379,00	50	498.621.000,00	BPBD
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Persentase wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi	Persen	60	65	9.660.161.883,00	0	-	BPBD
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					27.922.135.315,00		41.681.174.906,00	
2	1	Tenaga Kerja							
2	1	1	Dinas Tenaga, Transmigrasi dan Perindustrian			3.011.012.792,00		5.395.510.774,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	449.210.337,00	12	463.610.987,00	DISNAKERTR ANSPRIND

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	192.083.950,00	12	63.033.200,00	DISNAKERTR ANSPRIND
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Angkatan	15	5	236.137.650,00	5	205.216.230,00	DISNAKERTR ANSPRIND
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM	Persentase pengembangan dan Peningkatan SDM	Persen	35	40	30.775.000,00	45	41.750.000,00	DISNAKERTR ANSPRIND
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase pengembangan kawasan	Persen	50	55	-	60	928.559.000,00	DISNAKERTR ANSPRIND
	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran swakarsa	Lokasi	50	50	47.396.500,00	1	45.975.000,00	DISNAKERTR ANSPRIND
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah pembinaan IKM	IKM	241	67	938.903.055,00	100	276.410.401,00	DISNAKERTR ANSPRIND
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah pembinaan IKM	Kegiatan	0	0	-	3	-	DISNAKERTR ANSPRIND
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah promosi daerah	Kegiatan	4	3	942.136.300,00	3	392.670.956,00	DISNAKERTR ANSPRIND

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019			
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)		
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jenis usaha kreatifitas	Jenis Usaha	10	10	-	10	260.575.000,00	DISNAKERTR ANSPRIND	
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase UPT Mandiri				174.370.000,00				
	Program Pembangunan Wilayah Transmigrasi							2.717.710.000,00		
2	3	PANGAN :								
2	3	1 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan				2.668.206.114,00		8.987.299.170,00		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	486.597.214,00	12	599.023.780,00	DKPP
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	181.338.000,00	12	180.999.170,00	DKPP
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Kelompok Gapoktan	35 5	13 6	394.845.600,00	20 8	744.631.200,00	DKPP
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Meningkatnya Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan	1	2	38.399.100,00	4	33.549.100,00	DKPP
		Program Peningkatan Kegiatan Budaya	Meningkatnya Sosialisasi Budaya	Pemangku Adat Laot	11	11	148.475.000,00	11	170.460.400,00	DKPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
		Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	Orang	-	200		200		
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Ton	11,7	12	1.218.701.200,00	12,5	2.589.626.520,00	DKPP
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Ton	11,064	11,5	199.850.000,00	12	4.669.009.000,00	DKPP
2	4	PERTANAHAN :							
2	4	1 Dinas Pertanahan				688.460.196,00		839.185.972,00	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	477.078.931,00	12	337.428.582,00	Dinas Pertanahan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	114.712.821,00	12	144.252.550,00	Dinas Pertanahan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan	0	3	28.604.000,00	3	-	Dinas Pertanahan
		Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Persen	0	30	-	40	299.949.840,00	Dinas Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019			
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)		
		Program penataan, Penguasaan, Pemilikan Dan Penggunaan dan pemamfaatan Tanah	Jumlah tanah asset pemkab yang tersertifikasi	Sosialisasi Sertifikat	0	1 0	68.064.444,00	1 150	57.555.000,00	Dinas Pertanahan
2	6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL :								
2	6	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2.168.877.914,00		2.457.623.029,00	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	330.141.612,00	12	440.402.434,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	256.278.200,00	12	367.940.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	Orang				30	24.550.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Cakupan database kependudukan	Persen	76	85	1.582.458.102,00	87	1.624.730.095,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :							
2	7	1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana				6.274.367.055,00		11.288.045.146,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	391.163.096,00	12	394.837.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
									dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	75.751.000,00	12	107.423.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah lembaga ekonomi gampong aktif	Lembaga	5	5	224.365.200,00	5	199.049.840,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Pembinaan Kelembagaan dan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong	Persentase pemilihan aparatur gampong	Persen	50	60	65.755.000,00	70	91.937.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
									Berencana
	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah akseptor KB	Akseptor	62.912	64.912	2.567.825.500,00	66.912	6.899.426.856,00	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Dukungan Sarana Pelayanan KB	Persentase sarana pelayanan KB	Persen	30	35	739.450.500,00	60	1.134.149.800,00	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah pelatihan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Pelatihan	0	17	19.900.000,00	17	-	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Gampong,

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
									Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan anak	Persen	5	10	138.139.000,00	15	190.228.900,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Penguatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah kasus KDRT	Kasus	23	23	29.300.000,00	21	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase peran serta kaum marginal dalam pembangunan	persen	10	15	262.352.959,00	20	477.544.550,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
									dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah PKK Kecamatan	Kecamatan	17	17	533.255.000,00	17	540.663.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase penyerapan APBG	Persen	60	65	142.610.000,00	70	144.935.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana
	Program Peningkatan Kesejahteraan Imum Mukim	75 Imum Mukim dan 75 Tuha Peut Mukim	Bulan	12	12	1.084.499.800,00	12	1.107.848.900,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019				
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)			
									Berencana		
2	9		PERHUBUNGAN :								
2	9	1	Dinas Perhubungan			3.807.628.603,00		4.373.371.307,00			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	454.367.103,00	12	428.146.207,00	DISHUB
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	1.181.230.000,00	12	1.717.937.100,00	DISHUB
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Pasang	75	0	-	0	44.160.000,00	DISHUB
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan	unit	5	1	200.000.000,00	0	99.880.000,00	DISHUB
			Program Pengendalian dan Pengembangan Lalu Lintas	Persentase Jumlah pengamanan lalu lintas	Persen	50	55	1.497.320.000,00	60	526.900.000,00	DISHUB
			Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	Jumlah dokumen analisis peningkatan manajemen transportasi	dokumen	0	0	-	12	12.900.000,00	DISHUB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019			
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)		
	Program Pelayanan Angkutan	Persentase meningkatnya pelayanan angkutan umum	Persen	50	55	280.876.500,00	60	1.272.903.000,00	DISHUB	
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kendaraan umum	Buku uji Plat uji stiker	2500 5000 2000	4000 4000 2500	153.900.000,00	5000 4000 2500	166.000.000,00	DISHUB	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Pesen	70	72	39.935.000,00	74	104.545.000,00	DISHUB	
2	1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :								
2	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian				1.127.841.477,00		695.429.001,00	DISKOMINFO	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	430.183.780,00	12	405.074.686,00	DISKOMINFO
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	150.729.350,00	12	101.237.150,00	DISKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Aparatur								
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelatihan informasi	Kec	1	2	35.275.000,00	3	-	DISKOMINFO
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Jumlah Masyarakat yang memiliki wawasan informasi	Pelatihan	0	1	-	0	-	DISKOMINFO
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase peningkatan akses informasi masyarakat	Persen	70	74	380.255.487,00	78	81.549.950,00	DISKOMINFO
	Program Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase peningkatan sarana dan prasarana teknologi informatika	Persen	0	0	-	0	18.260.000,00	DISKOMINFO
	Program pengembangan dan pendayagunaan teknologi informatika	Jumlah frekuensi BHP daerah	frekuensi	2	2	8.404.560,00	0	57.067.215,00	DISKOMINFO
	Program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah publikasi melalui media massa	publikasi	1	1	50.000.000,00	1	-	DISKOMINFO
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah sosialisasi dan pelatihan	Pelatihan / sosialisasi	0	1	64.293.300,00	2	32.240.000,00	DISKOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019			
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)		
		Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah dokumen informasi dan komunikasi	Dokumen	0	1	8.700.000,00	0	-	DISKOMINFO
2	1 2	PASAR MODAL :								
2	1 2	1 Dinas Penanaman Modal, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					6.878.502.144,00		86.391.110,00	DISPENDAGK OP
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	430.122.095,00	12	385.211.610,00	DISPENDAGK OP
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	120.716.850,00	12	226.608.500,00	DISPENDAGK OP
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	Koperasi	200	40	44.950.000,00	80	42.420.000,00	DISPENDAGK OP
		Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kegiatan	2	0	-	4	19.250.000,00	DISPENDAGK OP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil, Menengah yang Kondusif	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	UMKM	50	50	29.400.000,00	135	8.000.000,00	DISPENDAGK OP
	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian Investasi	Dokumen	0	0	28.796.706,00	3	33.020.000,00	DISPENDAGK OP
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Perizinan	Perizinan	2,5	2,6	204.400.000,00	2,7	168.477.000,00	DISPENDAGK OP
	Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama investasi	Persentase Promosi	Persen	50	55	30.000.000,00	60	46.855.000,00	DISPENDAGK OP
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Indeks Pemahaman Konsumen	Persen	50	85	139.830.450,00	90	1.496.449.000,00	DISPENDAGK OP
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah PKL dan Asongan	Orang	104	69	984.011.043,00	70	15.950.000,00	DISPENDAGK OP
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pasar dan Operasi Pasar	Kecamatan / Pasar	17	17	4.866.275.000,00	17	3.344.150.000,00	DISPENDAGK OP
2	1 7	PERPUSTAKAAN :							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019				
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)			
2	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			1.297.239.020,00		1.858.319.397,00			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	344.995.620,00	12	348.556.467,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	264.351.400,00	12	184.750.250,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pelatihan Kapasitas Perpustakaan dan Arsip	Pelatihan	0	0	-	2	19.900.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Tenaga Perpustakaan	Orang	15	16	61.200.000,00	17	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase SKPK yang mengelola arsip secara baku	Persen	39	50	20.000.000,00	55	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip Daerah	Arsip	8	8	48.800.000,00	8	314.458.750,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan umum daerah	Orang	5673	5798	557.892.000,00	6301	940.653.930,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019			
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)		
3		URUSAN PILIHAN				12.496.181.217,00		17.515.090.201,00		
3	1	PERTANIAN								
3	1	1 Dinas Pertanian				12.496.181.217,00		17.515.090.201,00	DISTAN	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	641	12	680.845.367,00	12	619.195.247,00	DISTAN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	2.523	12	1.261.718.750,00	12	233.697.950,00	DISTAN
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah pelaku usaha dan pelaku utama	Orang	125	50	134.769.900,00	150	119.164.000,00	DISTAN
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Produktivitas ketahanan Pangan Komoditas Pajale	Kwintal/ Hektar	115,25	0	-	115,66	-	DINTAN
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi (pertanian/ Perkebunan)	Panjang Sarana Jalan Perkebunan dan kegiatan promosi produk unggulan	Meter dan Kali	18700;1	17075; 1	4.890.301.000,00	6500;1	6.783.747.000,00	DISTAN
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Alsintan dan Infrastruktur Pertanian	Unit dan Meter	7 ; 3500	12 ; 4800	2.124.308.000,00	6 ; 3000	4.280.966.954,00	DISTAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan (kelapa, Karet dan Kakao)	Ton	246.571;17.038	246.571; 17.038	529.234.000,00	249.948; 17.038	109.620.500,00	DISTAN
	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / perkebunan Lapangan	Jumlah Sarana BPP dan SDM Penyuluh	BPP	17;56	17;56	648.484.900,00	17;56	1.702.702.150,00	DISTAN
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah pelayanan kesehatan hewan dan aktifitas Puskesmas	Ekor	17.394;8	16,483; 8	296.804.300,00	16,622;8	204.266.500,00	DISTAN
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi ternak, produksi daging ayam potong dan telur	Ekor Kg Kg Butir	877.668 1.146.680 79.389 410.000	1.038.466 1.318.682 85.277 462.000	1.471.868.500,00	1.174.811 1.450.550 88.340 468.080	3.050.368.400,00	DISTAN
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Sarana dan prasarana pasar ternak, RPH dan Kontes Ternak	Paket Kali	2 1	2 1	123.029.500,00	1 1	231.437.500,00	DISTAN
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Petani	Jumlah Kelembagaan Petani	Lembaga	50	6	334.817.000,00	0	179.924.000,00	DISTAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019			
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)		
4		PENUNJANG URUSAN				67.733.143.014,00		78.216.206.728,00		
4	1	SEKRETARIAT DAERAH								
4	1	1 Sekretariat Daerah				20.395.463.983,00		22.839.062.156,00		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	12.996.963.805,00	12	12.795.072.437,00	SETDA & Bag. Umum & Bag. Humas
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	2.282.278.479,00	12	5.295.827.801,00	SETDA Bag. Umum
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Pasang	338	126	315.260.000,00	216	206.100.000,00	SETDA Umum
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDM Aparatur	Orang	17	25	190.800.000,00	25	69.568.000,00	SETDA TAPEM, UMUM, ULP,
		Program Pemberdayaan Keagamaan dan Keistimewaan Aceh	Jumlah Event Pemberdayaan keagamaan dan keistimewaan aceh	Event	17	17	178.000.000,00	17	177.636.100,00	SETDA Sosial Kemasyarakatan
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Pertambangan	Jumlah Kecamatan eksplorasi minyak, gas dan air	Kec	5	5	15.842.300,00	5	15.000.000,00	SET+T287+U287
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Persentase pengembangan perdesaan	Persen	45	50	29.571.050,00	0	-	SETDA EKONOMI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Pembinaan Otonomi Daerah	Nilai LPPD Pemerintah	Skor	2,6/tinggi	2,6/tinggi	191.171.500,00	2,65/tinggi	224.022.900,00	SETDA TAPEM
	Program Peningkatan Pengetahuan Perundang-undangan	Jumlah Pelatihan Pengetahuan Perundang-Undangan	Pelatihan	1	1	32.630.000,00	1	5.200.000,00	SETDA TAPEM
	Program Peningkatan Pelayanan Hukum	Jumlah Produk Hukum	Produk Hukum	38	552	425.693.900,00	550	396.031.600,00	SETDA HUKUM
	Program Kerja Sama Informasi dan Media Massa	Jumlah tena informasi	Event	6	7	707.503.400,00	7	793.920.000,00	SETDA HUMAS
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah naskah protokoler Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Naskah	384	384	433.882.450,00	390	436.659.800,00	SETDA & HUMAS
	Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bireuen	Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan Daerah	Dokumen	6	4	147.170.000,00	5	97.783.750,00	SETDA ORPEG
	Program Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	persentase pengelolaan administrasi kepegawaian	persen	30	50	150.800.000,00	65	159.970.000,00	SETDA ORPEG
	Program Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Perolehan nilai LAKIP Pemerintah	Skor	C	CC	-	B	302.596.450,00	SETDA ORPEG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Kinerja Fisik dan Keuangan Daerah	Dokumen	2	2	-	3	823.555.518,00	SETDA EKONOMI
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase peningkatan harga pasar dan jumlah akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan	Persen	100	100	76.180.300,00	100	64.350.000,00	SETDA EKONOMI
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kinerja Fisik dan Keuangan Daerah	Persen	100	100	318.860.574,00	100	-	SETDA ADM PEMBANGUNAN
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Paket Lelang	Paket	190	210	861.176.825,00	250	-	SETDA ULP
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Beasiswa bagi mahasiswa keluarga miskin	Kegiatan	2	1	63.380.000,00	3	29.723.450,00	SETDA
	Program peningkatan ketahanan pangan	Jumlah keluarga penerima manfaat	Kec	17	17	38.398.750,00	17	-	SETDA EKONOMI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Mengidentifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase penanganan pengaduan	Persen	0	100	79.918.600,00	100	16.000.000,00	SETDA HUMAS
	Program Pembinaan Tata Ruang dan Pertanahan	Jumlah Sertifikasi Tanah	Sertifikasi	2	4	49.100.000,00	5	-	SETDA TAPEM
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah penyelesaian batas wilayah	Lokasi Perbatasan	1	1	48.750.000,00	1	37.899.500,00	SETDA TAPEM
	Program peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari-hari besar	Hari besar	8	7	735.805.200,00	8	882.144.850,00	SETDA HUMAS & KESRA
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku							10.000.000,00	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM					26.326.850,00			
4	2	SEKRETARIAT DPRK							
4	2	1 Sekretariat DPRK				13.336.822.754,00		16.076.191.150,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap	Bulan	12	12	1.721.364.386,00	12	1.783.762.491,00	Sekretariat DPRK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
		Layanan Pemerintahan							
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	450.406.103,00	12	2.577.062.975,00	Sekretariat DPRK
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Orang	45	40	735.440.000,00	40	918.950.000,00	Sekretariat DPRK
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Orang	40	40	1.400.000,00	0	-	Sekretariat DPRK
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dewan	Persen	100	100	10.428.212.265,00	100	10.796.415.684,00	Sekretariat DPRK
4	3	INSPEKTORAT							
4	3	1 Inspektorat Kabupaten				1.682.136.620,00		1.964.669.133,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	309.539.550,00	12	366.217.979,00	Inspektorat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	131.165.370,00	12	308.311.354,00	Inspektorat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019			
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan LPPD dan laporan kinerja	Dokumen	3	3	37.569.800,00	3	29.999.000,00	Inspektorat	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kapabilitas pengawasan internal pemerintah	Level	2	2	1.124.107.800,00	3	1.153.495.900,00	Inspektorat	
	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah auditor yang mendapatkan pelatihan	Orang	12	6	79.754.100,00	6	106.644.900,00	Inspektorat	
4	4	PERENCANAAN								
4	4	1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				4.750.475.163,00		6.005.553.030,00		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	946.152.635,00	12	1.074.897.440,00	BAPPEDA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	141.366.600,00	12	326.672.900,00	BAPPEDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Pasang	60	12	-	0	8.000.000,00	BAPPEDA
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase peningkatan kapasitas perencana daerah	Persen	80	80	65.500.000,00	85	218.058.000,00	BAPPEDA
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tahapan proses perencanaan pembangunan daerah	Persen	60	65	1.459.496.150,00	70	2.012.095.778,00	BAPPEDA
	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	Persen	60	65	352.383.878,00	70	589.018.232,00	BAPPEDA
	Program Perencanaan pembangunan bidang Ekonomi	Tingkat pertumbuhan ekonomi	persen	4,5	4,9	421.646.000,00	5,1	249.576.380,00	BAPPEDA
	Program Perencanaan pembangunan bidang Sosial dan Budaya	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	71,11	72	602.094.900,00	73	524.279.000,00	BAPPEDA
	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan	rekomendasi	35	30	761.835.000,00	50	1.002.955.300,00	BAPPEDA
4	5	KEUANGAN							

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019				
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)			
4	5	1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			24.775.489.306,00		25.739.309.948,00			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	21.504.477.396,00	12	21.751.006.899,00	BPKD
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	537.328.061,00	12	1.035.480.660,00	BPKD
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur	Orang	0	0	208.419.400,00	250	108.055.200,00	BPKD
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kinerja Fisik dan Keuangan Daerah	Persen	100	100	40.000.000,00	100	94.963.000,00	BPKD
			Program Peningkatan PAD dan PBB	Persentase kenaikan PAD per tahun	Persen/ kegiatan	100	100	258.511.645,00	100	293.308.900,00	BPKD
			Program Optimalisasi Penghitungan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase kenaikan PBB dan retribusi per tahun	PBB	138,566	144.418	208.122.050,00	150	207.742.000,00	BPKD
			Program Optimalisasi Perhitungan dan Penetapan Pajak Retribusi Daerah	Persentase kenaikan wajib Pajak dan wajib retribusi per tahun	Wajib Pajak/ wajib Retribusi	0 0	0 0	- -	800 650	45.596.500,00	BPKD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kinerja Keuangan Daerah dalam pencapaian WTP	WTP	WTP	WTP	2.018.630.754,00	WTP	2.203.156.789,00	BPKD
4	6	KEPEGAWAIAN							
4	6	1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			2.792.755.188,00		5.591.421.311,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	513.998.077,00	12	582.619.227,00	BKPSDM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	39.375.000,00	12	95.734.000,00	BKPSDM
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Pelatihan	5	3	1.194.138.800,00	4	624.273.814,00	BKPSDM
	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah angkatan pendidikan kedinasan	Angkatan	4	1	458.346.811,00	3	4.118.912.270,00	BKPSDM
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan	Kegiatan	3	5	586.896.500,00	3	169.882.000,00	BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019			
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)		
6		URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				554.988.500,00		1.097.372.000,00		
6	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
6	1	1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik				554.988.500,00		1.097.372.000,00		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	245.916.500,00	12	239.474.500,00	KESBANGPOL
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	22.000.000,00	12	68.561.500,00	KESBANGPOL
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pendidikan politik masyarakat	Persen	45	50	45.600.000,00	55	40.300.000,00	KESBANGPOL
		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pengembangan wawasan	Persen	70	75	60.800.000,00	80	601.636.000,00	KESBANGPOL
		Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kasus pelanggaran kebangsaan	kasus	13	8	130.672.000,00	8	79.400.000,00	KESBANGPOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kasus keamanan dan kenyamanan lingkungan	kasus	8	9	50.000.000,00	15	68.000.000,00	KESBANGPOL
7	KEISTIMEWAAN DAN KHUSUSAN ACEH					20.835.700.697,00		23.916.083.316,00	
7	1	KEISTIMEWAAN ACEH							
7	1	1	Dinas Syariat Islam			4.588.523.025,00		5.986.719.889,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	bulan	12	12	319.295.225,00	12	300.046.094,00	Dinas Syariat Islam
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	12	12	49.889.900,00	12	73.689.300,00	Dinas Syariat Islam
	Program Pembinaan Calon Qari-Qariah	Jumlah Qari/Qariah	orang	20	25	775.180.400,00	35	1.590.832.900,00	Dinas Syariat Islam
	Program Pelayanan dan Pembinaan Ibadah Haji	Jumlah kloter jamaah haji	kloter	1	0	162.980.000,00	1	155.551.000,00	Dinas Syariat Islam
	Program Pendidikan Non formal	Jumlah Pelatihan pendidikan Non Formal bidang keagamaan	Pelatihan	2	2	20.000.000,00	1	17.200.000,00	Dinas Syariat Islam
	Program Sarana dan Prasarana Keagamaan							240.604.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Penguatan Lembaga Keagamaan	Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga	186	186	2.721.722.500,00	188	2.591.346.000,00	Dinas Syariat Islam
	Program pembinaan syari'at Islam	Jumlah kegiatan pembinaan	Kegiatan	0	0	529.455.000,00	1	582.820.000,00	Dinas Syariat Islam
	Program pembinaan dakwah dan syiar Islam	Jumlah kecamatan yang mendapat kegiatan pembinaan	Kegiatan	17	17	-	17	380.550.595,00	Dinas Syariat Islam
	Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelatihan pemahaman wawasan syariat Islam	Kecamatan	17	17	10.000.000,00	0	14.480.000,00	Dinas Syariat Islam
	Program Peningkatan Pemahaman dan Penghayatan Alquran							39.600.000,00	
7	1	2	Dinas Pendidikan Dayah			7.248.995.251,00		11.461.751.133,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	317.533.751,00	12	299.102.833,00	Dinas Pendidikan Dayah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	69.880.000,00	12	82.920.300,00	Dinas Pendidikan Dayah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019				
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Jumlah dayah/balai pengajian	Dayah/BP	105	92	4.496.075.500,00	100	8.161.608.000,00	Dinas Pendidikan Dayah		
	Program Pendidikan Dayah dan Pemberdayaan Santri	Jumlah kegiatan Pemberdayaan santri	Kegiatan	3	2	528.906.000,00	0	1.028.134.000,00	Dinas Pendidikan Dayah		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	Jumlah pendidik dayah	orang	1.100	1.150	1.836.600.000,00	1.150	1.833.410.000,00	Dinas Pendidikan Dayah		
	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	Jumlah dayah terakreditasi	Dayah	135	0	-	135	56.576.000,00	Dinas Pendidikan Dayah		
7	1	3	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama			1.395.315.205,00		1.390.371.706,00			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	1.208.463.605,00	12	1.193.182.406,00	Sekretariat MPU
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	71.851.600,00	12	86.201.800,00	Sekretariat MPU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab	
					Tahun 2018		Tahun 2019			
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)		
		Program Pelaksanaan Kehidupan Beragama	Jumlah sidang mubahasah	sidang	1	2	115.000.000,00	2	110.987.500,00	Sekretariat MPU
7	1	4	Sekretariat Majelis Adat Aceh				733.075.642,00		549.048.428,00	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	303.675.242,00	12	321.376.328,00	Sekretariat MAA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	84.575.400,00	12	59.184.100,00	Sekretariat MAA
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Pelatihan	0	0	-	3	18.488.000,00	Sekretariat MAA
		Program Pengembangan Budaya Daerah	Jumlah Buletin/Buku Budaya Daerah	Dokumen	0	1	254.825.000,00	0	-	Sekretariat MAA
		Program Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Event Pelestarian Adat Budaya Daerah	Event	0	1	90.000.000,00	3	150.000.000,00	Sekretariat MAA
7	1	5	Sekretaris Majelis Pendidikan Daerah				469.979.050,00		357.140.336,00	Majelis Pendidikan Daerah (MPD)

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	135.080.750,00	12	152.739.636,00	Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	139.948.300,00	12	28.880.700,00	Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Pembinaan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pembinaan	35	25	186.950.000,00	35	175.520.000,00	Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
	Program Pemeliharaan Perpustakaan, Dokumentasi, dan Publikasi	Jumlah jenis media informasi pendidikan	Jenis	3	3	8.000.000,00	0	-	Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
7	1	6	Sekretariat Baitul Mal Kabupaten			6.399.812.524,00		4.171.051.824,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	196.049.074,00	12	214.999.024,00	Baitul Mal
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	34.817.700,00	12	46.990.800,00	Baitul Mal
	Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Aparatur	BUMG			15.200.000,00			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab		
					Tahun 2018		Tahun 2019				
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)			
	Program Pemberdayaan Fakir miskin, anak yatim dan kaum dhuafa	Jumlah penerima zakat	orang	19.000	19.000	6.099.295.750,00	30.000	3.898.262.000,00	Baitul Mal		
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah publikasi informasi pengelolaan zakat	bulan	12	12	25.000.000,00	12	10.800.000,00	Baitul Mal		
	Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah penerimaan besaran zakat	Rupiah	0	0	29.450.000,00	6.000	-	Baitul Mal		
	KEWILAYAHAN					5.984.133.465,00		6.637.235.198,00			
	Kewilayahan										
8	1	1	Kecamatan			5.984.133.465,00		6.637.235.198,00			
			Kantor Camat Samalanga			322.194.272,00		375.047.500,00			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	173.390.072,00	12	183.003.300,00	Kantor Camat Samalanga
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	54.998.200,00	12	99.994.200,00	Kantor Camat Samalanga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	2	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	Kantor Camat Samalanga
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	30.000.000,00	100	39.550.000,00	Kantor Camat Samalanga
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	Gampong	46	46	15.000.000,00	46	27.500.000,00	Kantor Camat Samalanga
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	94	28.806.000,00	0	-	Kantor Camat Samalanga
	Kantor Camat Simpang Mamplam					442.640.197,00		438.173.537,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	165.308.097,00	12	176.625.787,00	Kantor Camat Simpang Mamplam
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	58.873.000,00	12	99.975.950,00	Kantor Camat Simpang Mamplam
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	2	3	19.978.300,00	3	25.000.000,00	Kantor Camat Simpang Mamplam

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	105.000.000,00	100	109.075.000,00	Kantor Camat Simpang Mamplam
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	Gampong	41	41	14.992.800,00	41	27.496.800,00	Kantor Camat Simpang Mamplam
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	84	28.548.000,00	0	-	Kantor Camat Simpang Mamplam
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Jumlah sarana BUMG	Unit	0	1	49.940.000,00	0	-	Kantor Camat Simpang Mamplam
	Kantor Camat Pandrah					378.630.343,00		427.608.100,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	160.624.443,00	12	184.253.500,00	Kantor Camat Pandrah
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	59.998.200,00	12	89.959.600,00	Kantor Camat Pandrah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	19.995.700,00	3	24.880.000,00	Kantor Camat Pandrah
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	101.520.000,00	100	103.515.000,00	Kantor Camat Pandrah
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	Gampong	19	19	15.000.000,00	19	25.000.000,00	Kantor Camat Pandrah
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	40	21.492.000,00	0	-	Kantor Camat Pandrah
	Kantor Camat Jeunieb					424.922.100,00		445.019.600,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	183.257.300,00	12	173.755.000,00	Kantor Camat Jeunieb
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	123.256.800,00	12	159.999.600,00	Kantor Camat Jeunieb
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	Kantor Camat Jeunieb

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	55.000.000,00	100	59.265.000,00	Kantor Camat Jeunieb
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	Gampong	43	43	15.000.000,00	43	27.000.000,00	Kantor Camat Jeunieb
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	88	28.408.000,00	0	-	Kantor Camat Jeunieb
	Kantor Camat Peulimbang					310.114.370,00		357.669.088,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	162.500.370,00	12	175.039.088,00	Kantor Camat Peulimbang
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	60.000.000,00	12	100.000.000,00	Kantor Camat Peulimbang
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	Kantor Camat Peulimbang
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	30.360.000,00	100	32.630.000,00	Kantor Camat Peulimbang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	Gampong	22	22	15.000.000,00	22	25.000.000,00	Kantor Camat Peulimbang
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	46	22.254.000,00	0	-	Kantor Camat Peulimbang
	Kantor Camat Peudada					321.265.455,00		363.736.624,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	153.529.855,00	12	167.087.073,00	Kantor Camat Peudada
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	69.840.600,00	12	119.879.551,00	Kantor Camat Peudada
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	20.000.000,00	3	15.000.000,00	Kantor Camat Peudada
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	31.650.000,00	100	36.770.000,00	Kantor Camat Peudada
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	52	52	15.000.000,00	52	25.000.000,00	Kantor Camat Peudada

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	106	31.245.000,00	0	-	Kantor Camat Peudada
	Kantor Camat Jeumpa					392.577.825,00		377.655.447,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	160.250.725,00	12	170.876.697,00	Kantor Camat Jeumpa
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	115.753.400,00	12	98.498.750,00	Kantor Camat Jeumpa
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	Kantor Camat Jeumpa
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	53.127.700,00	100	58.280.000,00	Kantor Camat Jeumpa
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	42	42	15.000.000,00	42	25.000.000,00	Kantor Camat Jeumpa
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga terlatih program MPM	Orang	0	86	28.446.000,00	0	-	Kantor Camat Jeumpa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Kantor Camat Kota Juang					433.309.233,00		387.682.874,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	210.635.783,00	12	175.789.774,00	Kantor Camat Kota Juang
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	74.861.450,00	12	66.788.100,00	Kantor Camat Kota Juang
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	Kantor Camat Kota Juang
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	90.240.000,00	100	92.605.000,00	Kantor Camat Kota Juang
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	Gampong	23	23	15.000.000,00	23	27.500.000,00	Kantor Camat Kota Juang
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	orang	0	48	22.572.000,00	0	-	Kantor Camat Kota Juang
	Kantor Camat Kuala					330.752.332,00		582.772.537,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	143.551.832,00	12	154.661.537,00	Kantor Camat Kuala

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	67.930.500,00	12	316.931.000,00	Kantor Camat Kuala
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	Kantor Camat Kuala
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	62.400.000,00	100	61.180.000,00	Kantor Camat Kuala
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	20	20	15.000.000,00	20	25.000.000,00	Kantor Camat Kuala
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	42	21.870.000,00	0	-	Kantor Camat Kuala
	Kantor Camat Juli					317.304.256,00		355.198.339,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	157.698.256,00	12	169.152.089,00	Kantor Camat Juli
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	65.000.000,00	12	99.966.600,00	Kantor Camat Juli

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	Kantor Camat Juli
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	32.480.000,00	100	36.080.000,00	Kantor Camat Juli
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	36	36	15.000.000,00	36	24.999.650,00	Kantor Camat Juli
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	74	27.126.000,00	0	-	Kantor Camat Juli
	Kantor Camat Peusangan					373.247.198,00		383.350.892,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	204.316.698,00	12	205.955.892,00	Kantor Camat Peusangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	54.187.500,00	12	69.350.000,00	Kantor Camat Peusangan
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	19.988.000,00	3	25.000.000,00	Kantor Camat Peusangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	44.043.000,00	100	53.055.000,00	Kantor Camat Peusangan
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	69	69	15.000.000,00	69	29.990.000,00	Kantor Camat Peusangan
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	140	35.712.000,00	0	-	Kantor Camat Peusangan
	Kantor Camat Jangka					337.736.040,00		371.300.996,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	163.898.140,00	12	170.225.346,00	Kantor Camat Jangka
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	61.002.000,00	12	95.545.650,00	Kantor Camat Jangka
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	Kantor Camat Jangka
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	48.480.000,00	100	53.030.000,00	Kantor Camat Jangka

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	46	46	15.000.000,00	46	27.500.000,00	Kantor Camat Jangka
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	94	29.355.900,00	0	-	Kantor Camat Jangka
	Kantor Camat Peusangan Siblah Krueng					332.207.770,00		324.962.454,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	174.377.270,00	12	158.778.654,00	Kantor Camat Peusangan Siblah Krueng
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	84.028.500,00	12	97.328.800,00	Kantor Camat Peusangan Siblah Krueng
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	Kantor Camat Peusangan Siblah Krueng
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	16.680.000,00	100	18.855.000,00	Kantor Camat Peusangan Siblah Krueng
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	21	21	15.000.000,00	21	25.000.000,00	Kantor Camat Peusangan Siblah Krueng

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	44	22.122.000,00	0	-	Kantor Camat Peusangan Siblah Krueng
	Kantor Camat Peusangan Selatan					294.914.246,00		329.343.761,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	139.939.146,00	12	152.898.411,00	Kantor Camat Peusangan Selatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	74.491.100,00	12	99.990.350,00	Kantor Camat Peusangan Selatan
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	Kantor Camat Peusangan Selatan
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	23.280.000,00	100	25.455.000,00	Kantor Camat Peusangan Selatan
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	21	21	15.000.000,00	21	26.000.000,00	Kantor Camat Peusangan Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	44	22.204.000,00	0	-	Kantor Camat Peusangan Selatan
	Kantor Camat Kutablang					343.078.050,00		362.115.373,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	170.169.250,00	12	177.902.173,00	Kantor Camat Kutablang
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	77.404.800,00	12	97.258.200,00	Kantor Camat Kutablang
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	Kantor Camat Kutablang
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	32.880.000,00	100	36.955.000,00	Kantor Camat Kutablang
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	41	41	15.000.000,00	41	25.000.000,00	Kantor Camat Kutablang
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	84	27.624.000,00	0	-	Kantor Camat Kutablang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Kantor Camat Makmur					316.507.150,00		388.954.300,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	160.627.790,00	12	171.103.000,00	Kantor Camat Makmur
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	64.395.360,00	12	129.846.300,00	Kantor Camat Makmur
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	Kantor Camat Makmur
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	32.760.000,00	100	35.505.000,00	Kantor Camat Makmur
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	27	27	15.000.000,00	27	27.500.000,00	Kantor Camat Makmur
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	56	23.724.000,00	0	-	Kantor Camat Makmur
	Kantor Camat Gandapura					312.732.628,00		366.643.776,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
					Tahun 2018		Tahun 2019		
					Volume	Rp (juta)	Volume	Rp (juta)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	181.013.428,00	12	181.090.876,00	Kantor Camat Gandapura
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	30.914.200,00	12	95.872.900,00	Kantor Camat Gandapura
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	20.000.000,00	3	25.000.000,00	Kantor Camat Gandapura
	Program Perencanaan pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	39.000.000,00	100	39.680.000,00	Kantor Camat Gandapura
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	40	40	14.875.000,00	40	25.000.000,00	Kantor Camat Gandapura
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan desa	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	82	26.930.000,00	0	-	Kantor Camat Gandapura
						569.151.688.567,00		683.905.149.325,70	

Tabel 7.4
 Penetapan Program Prioritas yang disertai dengan Kebutuhan
 Pendanaan Kabupaten Bireuen Tahun 2020

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					634.105.719.000,00
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					468.263.795.788,30
1	01	PENDIDIKAN :				
1	0101	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				102.512.824.139,45
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	2.068.531.200,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	130.000.000,00
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	50	60	2.168.696.000,00
	Program Wajib Belajar dan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Fasilitas Pendidikan dasar Sembilan Tahun	Persen	85	93	81.881.836.639,45
	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah pelatihan pendidikan Non formal	Pelatihan	2	2	7.688.828.000,00
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai Uji Kompetensi Guru	UKG	47,38	77	1.867.320.000,00
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah sekolah yang mengadakan ujian	sekolah	454	454	228.612.300,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan					6.236.000.000,00
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah event budaya daerah	event	6	4	30.000.000,00
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event budaya daerah	event	0	1	173.000.000,00
	Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah sanggar seni budaya dan kebudayaan daerah	Sanggar	1	1	40.000.000,00
1	02	KESEHATAN :				
1	0201	Dinas Kesehatan				95.925.940.273,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	4.319.716.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	354.680.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	PKM	4	20	47.200.000,00
	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71	71	3.176.614.000,00
	Program Upaya Kesehatan	Jumlah Jamaah Haji,	Orang	2.559	2.559	13.318.369.392,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020		
					Target	Rp	
	Masyarakat	Jumlah orang Gangguan Jiwa atau Kelompok Khusus mendapat layanan kesehatan yang layak					
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Keluarga Sehat	Keluarga Sehat	6.110	102.482	342.350.000,00	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah Kasus Kurang Gizi, Gizi Buruk dan Stunting	Orang	903	650	2.049.999.000,00	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Rumah Tangga Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)	Rumah Tangga	14.561	17.200	596.850.000,00	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah desa yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi dalam waktu < 24 jam	Desa	609	609	2.102.800.000,00	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kepesertaan JKN	Orang	407.222	440.000	50.612.534.381,00	
	Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya	Persen	70	85	15.168.299.500,00	
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Jumlah angka kematian ibu, bayi dan anak balita	Orang	159	130	1.648.529.000,00	
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase puskesmas yang melaksanakan Pandu PTM	Persen	50	80	2.187.999.000,00	
1	0 2	0 2	Badan Layanan Umum RSUD dr. Fauziah Bireuen			94.568.375.741,85	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.639.600.000,00	
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Persen	70	85	9.165.759.000,00
			Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Persen	60	80563	3.200.000.000,00
			Program Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persen	60	75	80.563.016.741,85
1	0 3		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :				
1	0 3	0 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			151.947.844.584,00	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	1.264.650.150,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020		
					Target	Rp	
		Layanan Pemerintahan					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	248.332.000,00	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan	Meter	79,573.00	80,158	47.689.682.111,00	
	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang saluran dan gorong-gorong	Meter	450	600	312.000.000,00	
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dan jembatan yang direhabilitasi	Meter	151,350.00	22,148	44.272.684.623,00	
	Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas Daerah Irigasi	Ha	14,210.00	800	27.012.340.700,00	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase layanan air minum layak	Persen	72	90	11.989.650.000,00	
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	Persen	60	75	14.005.778.000,00	
	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	panjang jalan dan jembatan perdesaan	Meter	5.000	1.600	1.908.659.000,00	
	Program Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Luas areal sawah teraliri	Persen	55	65	2.582.518.000,00	
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	Luas lahan konservasi sungai, danau dan sumber daya air	Persen	55	65	590.750.000,00	
	Program Penataan Ruang	Persentase tahapan perencanaan tata ruang	Persen	30	45	70.800.000,00	
1	04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN :					
1	0401	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				14.595.987.800,00	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	209.240.400,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	375.500.000,00
		Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah layak huni	Unit	171	250	14.011.247.400,00
1	06	SOSIAL					
1	0601	Dinas sosial				4.786.732.000,00	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Bulan	12	12	340.211.400,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
		Pemerintahan				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	206.009.000,00
	Program Peberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Fakir miskin, korban bencana dan PMKS lainnya	Persen	25	32	2.715.717.000,00
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	0,5	1	487.000.000,00
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah warga penyandang cacat dan trauma	Orang	102	110	524.962.600,00
	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Jumlah Panti sosial dan panti Jompo	Unit	11	11	272.952.000,00
	Program Pembinaan Penyandang Eks Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Eks Narkoba, Gelandangan, Pengemis, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Jumlah PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial	Orang	688	658	139.880.000,00
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial	Lembaga sosial	3	4	100.000.000,00
1	062	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				3.926.091.250,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	306.662.450,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	351.550.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pelatihan aparatur	Pelatihan	1	2	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Pasang	127	0	150.000.000,00
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tersedianya operasional TRC	orang	24	26	522.355.000,00
	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tersedianya operasional pencegahan bahaya kebakaran	orang	47	55	2.595.523.800,00
2		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				42.824.790.881,00
2	01	Tenaga Kerja				
2	011	Dinas Tenaga dan Transmigrasi				3.579.624.000,00
	Program Pelayanan	Meningkatnya	Bulan	12	12	251.325.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020		
					Target	Rp	
	Administrasi Perkantoran	Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	72.000.000,00	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Angkatan	15	7	838.130.000,00	
	Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan dan Peningkatan SDM	Persen	35	50	-	
	Program Pembangunan Wilayah Transmigrasi	Persentase pengembangan kawasan	Persen	50	65	2.378.559.000,00	
	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran swakarsa	Lokasi	50	1	39.610.000,00	
2	03	PANGAN :					
2	0301	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan				9.674.490.050,00	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	416.478.050,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	141.300.000,00
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Peternakan)	Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Kelompok Gapoktan	35 5	20 10	544.770.000,00
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Masyarakat	Meningkatnya Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan	1	6	80.600.000,00
		Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	Meningkatnya Sosialisasi Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	Pemangku Adat Laot Orang	11 -	11 200	159.650.000,00
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya	Ton	11,7	13	6.542.390.000,00
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	11,064	12	739.302.000,00
		Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan					1.050.000.000,00
2	05	LINGKUNGAN HIDUP :					
2	0501	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				8.913.758.950,00	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan	Bulan	12	12	352.859.600,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
		Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	83.400.000,00
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	76	86	8.229.349.350,00
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					-
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase luas lahan resapan air	Persen	10	25	160.000.000,00
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan hidup	Dokumen	3	2	25.000.000,00
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase pemeliharaan ruang terbuka hijau	Persen	50	65	63.150.000,00
2	06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL :				
2	061	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2.645.003.331,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	278.732.331,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	252.150.000,00
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pasang	45	47	-
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang			46.850.000,00
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persen	76	90	2.067.271.000,00
2	7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :				
2	71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana				11.680.394.000,00
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	340.632.500,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	70.000.000,00
		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan	Pelatihan	0	17	26.600.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020		
					Target	Rp	
	Perempuan						
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan anak	Persen	5	20	204.200.000,00	
	Program Penguatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah kasus KDRT	Kasus	23	19	-	
	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase peran serta kaum marginal dalam pembangunan	Persen	10	25	443.500.000,00	
	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (BOKB)	Jumlah akseptor KB	Akseptor	62.912	68.253	7.473.744.000,00	
	Program Peningkatan Dukungan Sarana Pelayanan KB	Persentase sarana pelayanan KB	Persen	30	70	1.233.975.000,00	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah PKK Kecamatan	Kecamatan	17	17	250.000.000,00	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi gampong aktif	Lembaga	5	5	80.667.500,00	
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase penyerapan APBG	Persen	60	75	258.675.000,00	
	Program Pembinaan Kelembagaan dan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong	Persentase pemilihan aparaturnya	Persen	50	80	100.000.000,00	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Imum Mukim	75 Imum Mukim dan 75 Tuha Peut Mukim	Bulan	12	12	1.198.400.000,00	
	Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah					-	
2	09	PERHUBUNGAN :					
2	09	01	Dinas Perhubungan			1.647.163.000,00	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	355.738.500,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	647.962.500,00
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparaturnya	orang	0	6	-
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persen	70	76	64.480.000,00
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase meningkatnya pelayanan angkutan umum	Persen	50	65	289.132.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020		
					Target	Rp	
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan	unit	5	2	-	
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Jumlah pengamanan lalu lintas	Persen	50	65	51.250.000,00	
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kendaraan umum	Buku uji Plat uji stiker	2500 5000 2000	5500 4000 2500	238.600.000,00	
	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	Jumlah dokumen analisis peningkatan manajemen transportasi	dokumen	0	12	-	
2	010	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :					
2	010	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian				1.120.628.000,00	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	349.828.000,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	158.400.000,00
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase peningkatan akses informasi masyarakat	Persen	70	82	90.000.000,00
		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen informasi dan komunikasi	Dokumen	0	1	30.000.000,00
		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi				-	
		Program Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informatika	Jumlah frekuensi BHP daerah	frekuensi	2	2	50.000.000,00
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	Jumlah sosialisasi dan pelatihan	Pelatihan / sosialisasi	0	2	1.400.000,00
		Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah publikasi melalui massa	publikasi	1	1	321.000.000,00
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Jumlah Masyarakat yang memiliki wawasan informasi	Pelatihan	0	2	80.000.000,00
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelatihan informasi	Kec	1	3	40.000.000,00
2	012	PENANAMAN MODAL :					
2	012	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				749.705.000,00	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan	Bulan	12	12	183.580.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
		Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	169.700.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					-
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Promosi	Persen	50	65	29.595.000,00
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi					-
	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah					-
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Perizinan	Perizinan	2,5	2,8	366.830.000,00
2	013	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2	013	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata				2.196.059.000,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	178.529.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	180.600.000,00
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah pembinaan dan pelatihan kepemudaan	Angkatan	4	6	296.730.000,00
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah pelatihan manajemen dan olahraga	Pelatihan	3	3	-
	Program Pembinaan dan Permasayarakatan Olahraga	Jumlah pembinaan dan pelatihan atlit dan pelatih	Orang	0	40	150.000.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana olahraga	Persen	40	46	1.200.200.000,00
	Program Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Kelompok usia cabang olahraga sepak bola	Kelompok usia	3	3	-
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Event pemasaran pariwisata	Event	1	2	-
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata	Destinasi wisata	22	22	150.000.000,00
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jenis usaha kreatifitas	Jenis Usaha	10	10	40.000.000,00
2	017	PERPUSTAKAAN :				
2	017	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				617.965.550,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	329.015.550,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	112.900.000,00
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Arsip Daerah	Arsip	8	8	36.500.000,00
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase SKPK yang mengelola arsip secara baku	Persen	39	60	-
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan umum daerah	Orang	5673	6847	93.550.000,00
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Tenaga Perpustakaan	Orang	15	18	46.000.000,00
3		URUSAN PILIHAN				21.892.190.245,00
3	03	PERTANIAN				
3	0301	Dinas Pertanian dan Perkebunan				11.818.723.388,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	641	12	482.194.888,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	2.523	12	157.000.000,00
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah pelaku usaha dan pelaku utama	Orang	125	150	53.150.000,00
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Produktivitas ketahanan Pangan Komoditas Pajale	Kwintal / Hektar	115,25	115,77	1.540.600.000,00
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Panjang Sarana Jalan Perkebunan dan kegiatan promosi produk unggulan	Meter dan Kali	18700; 1	7000;1	5.012.410.000,00
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Alsintan dan Infrastruktur Pertanian	Unit dan Meter	7 ; 3500	8 ; 3500	3.750.764.000,00
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan (kelapa, Karet dan Kakao)	Ton	246.571;17.038	255.270; 17.038	56.925.000,00
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Sarana BPP dan SDM Penyuluh	BPP	17;56	17;56	565.679.500,00
	Program Peningkatan Kelembagaan Petani	Jumlah Kelembagaan Petani	Lembaga	50	12	200.000.000,00
3	0302	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				5.829.186.857,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan	Bulan	641	12	156.907.500,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020		
					Target	Rp	
		Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	2.523	12	85.900.000,00	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah pelayanan kesehatan hewan dan aktifitas Puskesmas	Ekor	17.394 ;8	16,849;8	146.550.000,00	
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Populasi ternak, produksi daging ayam potong dan telur	Ekor Kg Kg Butir	877.668 1.146.680 79.389 410.000	1.272.366 1.470.630 91.130 473.280	5.439.829.357,00	
	Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Sarana dan prasarana pasar ternak, RPH dan Kontes Ternak	Paket	2	1	-	
			Kali	1	1		
3	06	PERDAGANGAN					
3	061	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				4.244.280.000,00	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	206.630.000,00
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	212.756.000,00
		Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	UMKM	50	150	1.330.700.000,00
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kegiatan	2	5	-
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	Koperasi	200	80	25.400.000,00
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Indeks Pemahaman Konsumen	Persen	50	90	143.994.000,00
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pasar dan Operasi Pasar	Kecamatan / Pasar	17	17	1.735.000.000,00
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah PKL dan Asongan	Orang	104	75	-
		Program Pengembangan Industri Potensial					494.800.000,00
		Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Kerajinan					95.000.000,00
		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					-

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
4	PENUNJANG URUSAN					36.249.471.928,51
4	01 PERENCANAAN					
4	0101 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					3.918.534.000,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	739.630.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	483.680.000,00
	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan	Rekomendasi	35	50	-
	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	Persen	60	75	431.400.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan kapasitas perencanaan daerah	Persen	80	85	260.000.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tahapan proses perencanaan pembangunan daerah	Persen	60	75	1.352.524.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat pertumbuhan ekonomi	Persen	4,5	5,3	181.500.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Indeks Pembangunan Manusia	IPM	71,11	74	469.800.000,00
4	02 KEUANGAN					
4	0201 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah					22.312.433.520,51
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	17.836.795.520,51
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	663.395.000,00
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM Aparatur	Orang	0	250	-
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kinerja Fisik dan Keuangan Daerah	Persen	100	100	95.000.000,00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kinerja Keuangan Daerah dalam pencapaian WTP	WTP	WTP	WTP	3.072.742.500,00
	Program Peningkatan PAD dan PBB	Persentase kenaikan PAD per tahun	Persen/kegiatan	100	100	260.000.000,00
	Program Optimalisasi Penghitungan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase kenaikan PBB dan retribusi per tahun	PBB	138,566	152	329.500.500,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
	Program Optimalisasi Perhitungan dan Penetapan Pajak/Retribusi Daerah	Persentase kenaikan wajib Pajak dan wajib retribusi per tahun	Wajib Pajak/ wajib Retribusi	0 0	0 0	55.000.000,00
4 0 3	KEPEGAWAIAN					
4 0 3 0 1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					1.883.553.808,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	361.352.808,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	92.310.000,00
	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah angkatan pendidikan kedinasan	Angkatan	4	3	518.750.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Pelatihan	5	2	139.578.000,00
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan	Kegiatan	3	3	771.563.000,00
4 0 6	INSPEKTORAT					
4 0 6 0 1	Inspektorat Kabupaten					1.794.072.100,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	240.476.600,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	283.600.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pencapaian Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan LPPD dan laporan kinerja	Dokumen	3	3	30.000.000,00
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat Kapabilitas pengawasan internal pemerintah	Level	2	3	1.181.155.500,00
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan	Jumlah auditor yang mendapatkan pelatihan	Orang	12	6	58.840.000,00
4 0 8	KEWILAYAHAN					6.340.878.500,00
4 0 8 0 1	Kecamatan Samalanga					371.645.000,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	175.612.500,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	83.400.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	Persen	100	100	67.120.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	2	3	13.000.000,00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	Gampong	46	46	32.512.500,00
4	0082	Kecamatan Simpang Mamplam				433.100.000,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	247.460.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	78.400.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	Persen	100	100	60.515.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	2	3	15.000.000,00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	Gampong	41	41	31.725.000,00
4	0083	Kecamatan Pandrah				400.922.500,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	252.580.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	73.400.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	Persen	100	100	31.399.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	15.000.000,00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	Gampong	19	19	28.543.500,00
4	0084	Kecamatan Jeunieb				386.347.500,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	194.725.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	78.400.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	Persen	100	100	63.151.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	15.000.000,00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	Gampong	43	43	35.071.500,00
4	0	0				371.922.500,00
8						
5						
	Kecamatan Peulimbang					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	181.680.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	95.890.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	Persen	100	100	35.368.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	15.000.000,00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	Gampong	22	22	43.984.500,00
4	0	0				344.203.700,00
8						
6						
	Kecamatan Peudada					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	141.908.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	73.400.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	Persen	100	100	75.058.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	15.000.000,00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	52	52	38.837.700,00
4	0	0				353.372.500,00
8						
7						
	Kecamatan Jeumpa					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	191.220.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	73.400.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	Persen	100	100	61.828.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	-
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	42	42	26.924.500,00
4	088	Kecamatan Kota Juang				439.855.900,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	265.623.400,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	98.400.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	Persen	100	100	36.701.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	15.000.000,00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	Gampong	23	23	24.131.500,00
4	089	Kecamatan Kuala				349.040.500,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	218.948.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	67.900.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	Persen	100	100	32.722.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	5.780.000,00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	20	20	23.690.500,00
4	080	Kecamatan Juli				335.997.500,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	164.565.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	83.400.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	Persen	100	100	53.890.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	14.000.000,00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	36	36	20.142.500,00
4	011	Kecamatan Peusangan				441.406.500,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	210.880.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	97.647.500,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	Persen	100	100	97.549.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	3.000.000,00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	69	69	32.330.000,00
4	012	Kecamatan Jangka				369.461.500,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	187.116.500,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	83.400.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	68.120.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	-
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	46	46	30.825.000,00
4	013	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng				300.412.500,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	154.130.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	83.400.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	34.045.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	5.000.000,00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	21	21	23.837.500,00
4	014	Kecamatan Peusangan Selatan				300.944.800,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	159.662.300,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	78.400.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	34.045.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	5.000.000,00
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	21	21	23.837.500,00
4	015	Kecamatan Kutablang				368.199.300,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	170.017.300,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	106.750.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	60.505.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	-
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	41	41	30.927.000,00
4	016	Kecamatan Makmur				342.567.500,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	182.465.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	83.400.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	41.983.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	-
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	27	27	34.719.500,00
4	017	Kantor Camat Gandapura				431.478.800,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	182.266.300,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	153.400.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persen	100	100	59.182.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	3	3	-
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	gampong	40	40	36.630.500,00
5		URUSAN PENDUKUNG				25.415.050.416,00
5	01	SEKRETARIAT DAERAH				15.749.881.500,00
5	0120	Sekretariat Daerah				2.622.926.500,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	2.622.926.500,00
5	0121	Bagian Pemerintahan				474.110.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					-
	Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Event Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tahun	1	1	22.576.000,00
	Program Pembinaan Otonomi Daerah	Nilai LPPD Pemerintah	Skor	2,6/tinggi	2,7/tinggi	319.867.000,00
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah penyelesaian batas wilayah	Lokasi Perbatasan	1	1	128.667.000,00
	Program Peningkatan Pelayanan Umum					3.000.000,00
5	0100	Bagian Hukum				360.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
5007	Bagian Organisasi					456.000.000,00
	Program Penataan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten	Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan Daerah	Dokumen	6	5	216.900.000,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perolehan nilai LAKIP Pemerintah	Skor	C	B	169.100.000,00
	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik					70.000.000,00
5008	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan					889.000.000,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bahan bacaan	Bahan bacaan	15	15	87.640.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari-hari besar	Hari besar	8	8	6.300.000,00
	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Jumlah tena informasi	Event	6	7	720.960.000,00
	Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah naskah protokoler Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Naskah	384	395	57.400.000,00
	Program Mengidensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase penanganan pengaduan	Persen	0	100	16.700.000,00
5009	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa					266.100.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan SDM Aparatur	Orang	17	25	-
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Paket Lelang	Paket	190	250	266.100.000,00
502	SEKRETARIAT DPRK					
5001	Sekretariat DPRK					9.351.044.916,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	1.602.046.950,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	1.246.300.000,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Orang	45	40	520.000.000,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Orang	40	40	-
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dewan	Persen	100	1	5.982.697.966,00
503	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
5001	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					314.124.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	145.871.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	38.360.000,00
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kasus keamanan dan kenyamanan lingkungan	kasus	8	15	-
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pengembangan wawasan	Persen	70	80	-
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kasus pelanggaran kebangsaan	kasus	13	7	104.809.000,00
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pendidikan politik masyarakat	Persen	45	60	25.084.000,00
6	KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH					39.460.419.741,19
6	01 KEISTIMEWAAN ACEH					
6	0101 Dinas Syariat Islam					3.397.630.000,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	bulan	12	12	270.930.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	bulan	12	12	93.000.000,00
	Program Pembinaan Syari'at Islam	Jumlah kegiatan pembinaan	Kegiatan	0	1	154.900.000,00
	Program Pembinaan Calon Qari-Qariah	Jumlah Qari/Qariah	orang	20	40	-
	Program Pelayanan dan Pembinaan Ibadah Haji	Jumlah kloter jamaah haji	kloter	1	1	-
	Program Penguatan Lembaga Keagamaan	Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga	186	190	2.593.800.000,00
	Program Peningkatan Pemahaman dan Penghayatan Al Quran					-
	Program Pendidikan Nonformal	Jumlah Pelatihan pendidikan Non Formal bidang keagamaan	Pelatihan	2	2	35.000.000,00
	Program Sarana dan Prasarana Keagamaan					50.000.000,00
	Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam	Jumlah kecamatan yang mendapat kegiatan pembinaan	Kegiatan	17	17	200.000.000,00
	Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelatihan pemahaman wawasan syariat Islam	Kecamatan	17	17	-

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
6002	Dinas Pendidikan Dayah					11.603.240.975,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	225.230.975,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	54.000.000,00
	Program Peningkatan Kapistas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	0	5	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	Jumlah dayah/balai pengajian	Dayah/ BP	105	105	8.357.700.000,00
	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	Jumlah pendidik dayah	orang	1.100	1.150	1.827.510.000,00
	Program Pembinaan Manajemen Dayah	Jumlah tenaga manajemen dayah	Orang	160	165	-
	Program Pendidikan Dayah dan Pemberdayaan Santri	Jumlah kegiatan Pemberdayaan santri	Kegiatan	3	3	1.138.800.000,00
6003	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama					1.343.187.800,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	1.132.887.800,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	58.800.000,00
	Program Pelaksanaan Kehidupan Beragama	Jumlah sidang mubahasah	sidang	1	2	151.500.000,00
6004	Sekretarian Majelis Adat Aceh					360.690.600,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	287.290.600,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	48.400.000,00
	Program Pengembangan Budaya Daerah	Jumlah Buletin/Buku Budaya Daerah	Dokumen	0	2	-
	Program Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Event Pelestarian Adat Budaya Daerah	Event	0	2	25.000.000,00
	Program Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat					-
6005	Sekretaris Majelis Pendidikan Aceh					341.550.000,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	113.150.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	43.000.000,00
	Program Pemeliharaan Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi	Jumlah jenis media informasi pendidikan	Jenis	3	3	5.000.000,00
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Pembinaan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pembinaan	35	35	180.400.000,00
6 0 0 1 6	Sekretaris Baitul Mal Kabupaten					17.971.872.668,19
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	140.784.500,00
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	40.000.000,00
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Anak Yatim dan Kaum Dhuafa	Jumlah penerima zakat	orang	19.000	30.000	17.779.288.168,19
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah publikasi informasi pengelolaan zakat	bulan	12	12	11.800.000,00
6 0 0 1 7	Dinas Pertanahan					1.023.254.724,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	246.960.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	262.000.000,00
	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah pelatihan teknis ASN	Pelatihan	0	3	-
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Persentase pendataan kepemilikan tanah asset Pemkab	Persen	0	45	-
	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan dan Pemamfaatan Tanah	Jumlah tanah asset Pemkab yang tersertifikasi	Sosialisasi Sertifikat	0	1 150	514.294.724,00
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Jumlah Konflik Tanah	Konflik Tanah	0	10	-
6 0 0 1 8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah					3.418.992.974,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	807.210.986,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	160.000.000,00
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Pasang	227	182	175.000.000,00

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2017)	Penetapan Tahun 2020	
					Target	Rp
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Orang	180	186	1.697.781.988,00
	Program Penegakan Hukum dan Peraturan Daerah	Jumlah pelanggaran qanun	Kasus	36	27	79.000.000,00
	Program Pemeliharaan Kantratribnas dan Pencegahan Tindak Kriminal					500.000.000,00
	Program Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari besar satpol	Kegiatan	1	1	-

Tabel 7.5
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
TAHUN 2021 DAN 2022 KABUPATEN BIREUEN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab								
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD										
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1,122,900,654,640.00		1,115,190,496,891.48		2,237,871,151,531.48									
1	01	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN :			494,073,262,081.00		499,893,108,416.00		993,746,370,497.00									
1	01	0	0	0	0	8	Dinas Pendidikan Dayah		15,831,601,416.00		15,956,601,416.00		31,788,202,832.00					
1	01	0	0	0	0	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	2,806,291,376.00	95	2,906,291,376.00	95	5,712,582,752.00	Disdik Dayah	
1	01	0	0	0	0	0	7	Program Pendidikan Dayah	Jumlah Dayah naik kelas	Dayah	135	13,025,310,040.00	135	13,050,310,040.00	135	26,075,620,080.00	Disdik Dayah	
1	01	0	0	0	0	0	9	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh				1,039,313,000.00		1,047,513,000.00		2,086,826,000.00		
1	01	0	0	0	0	0	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	855,370,670.00	95	862,570,670.00	95	1,717,941,340.00	MPA
1	01	0	0	0	0	0	0	8	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	Persentase sekolah/Dayah yang menerapkan pendidikan berkarakter	Persen	50	183,942,330.00	55	184,942,330.00	55	368,884,660.00	MPA
1	01	2	2	0	0	0	2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				477,202,347,665.00		482,888,994,000.00		959,871,341,665.00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 01 2 2 0 0 0 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	368,398,994,156.00	95	376,843,994,000	95	745,242,988,156.00	Dinas PK
1 01 2 2 0 0 0 0 2	Program Pengelolaan Pendidikan	APM Pendidikan Dasar 9 Tahun	Nilai	99,38	106,718,353,833.00	99,90/98,95	104,100,000,000.00	99,90/98,95	210,818,353,833.00	Dinas PK
1 01 2 2 0 0 0 0 3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal	Persen	-	-	85	100,000,000.00	85	100,000,000.00	Dinas PK
1 01 2 2 0 0 0 0 4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah Guru yang Berkompetensi	Persen	80	830,000,240.00	86	925,000,000.00	86	1,755,000,240.00	Dinas PK
1 01 2 2 0 0 0 0 2	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN									
1 01 2 2 0 0 0 0 2	Program Pengembangan Kebudayaan	Peningkatan jumlah karya budaya yang di revitalisasi dan diinventarisir	Persen	50	445,000,140.00	60	525,000,000.00	60	970,000,140.00	Dinas PK
1 01 2 2 0 0 0 0 3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kelompok Kesenian yang dibana	Kelompok	20	589,999,713.00	25	175,000,000.00	45	764,999,713.00	Dinas PK
1 01 2 2 0 0 0 0 5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya yang tertangani	Persen	70	119,999,583.00	80	100,000,000.00	80	219,999,583.00	Dinas PK
1 01 2 2 0 0 0 0 6	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Museum yang dikelola	Persen	100	100,000,000.00	100	120,000,000.00	100	220,000,000.00	Dinas PK
1 02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN									
1 02 0 0 0 0 0 0 1	Dinas Kesehatan				191,160,180,032.00		194,279,040,142.00		385,439,220,174.00	
1 02 0 0 0 0 0 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	113,490,299,142.00	95	115,109,040,142.00	95	228,599,339,284.00	Dinkes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 02 0 0 0 0 0 0 2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	SKOR	B	77,226,780,104.00	B	78,500,000,000.00	B	155,726,780,104.00	Dinkes
1 02 0 0 0 0 0 0 3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah PKM yang memiliki SDM dengan Kompetensi dan Kualifikasi Sesuai Standar	PKM	20	231,743,900.00	20	250,000,000.00	20	481,743,900.00	Dinkes
1 02 0 0 0 0 0 0 4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Jumlah Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang Diawasi	Sarana	187	211,356,886.00	196	220,000,000.00	196	431,356,886.00	Dinkes
1 02 0 0 0 0 0 0 5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah UKBM yang Aktif	UKBM	-	-	1.749 UKBM	200,000,000.00	1.749 UKBM	200,000,000.00	Dinkes
1 02 0 0 0 0 0 0 2	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen				163,348,441,000.00		164,018,000,000.00		327,366,441,000.00	
1 02 0 0 0 0 0 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	127,618,741,000.00	95	127,918,000,000.00	95	255,536,741,000.00	RSU
1 02 0 0 0 0 0 0 2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	B	34,156,505,000.00	B	34,500,000,000.00	B	68,656,505,000.00	RSU
1 02 0 0 0 0 0 0 3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemerataan SDM dan Kompetensi serta Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	80	1,573,195,000.00	85	1,600,000,000.00	85	3,173,195,000.00	RSU
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				245,141,439,911.00		227,015,483,807.48		472,156,923,718.48	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 03 0 0 0 0 0 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				245,141,439,911.00		227,015,483,807.48		472,156,923,718.48	
1 03 0 0 0 0 0 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	11,930,989,794	95	12,000,000,000	95	23,930,989,794.00	Dinas PUPR
1 03 0 0 0 0 0 1 2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase cakupan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian	Persen	70	65,146,495,600	75	45,116,798,807	75	110,263,294,407.48	Dinas PUPR
1 03 0 0 0 0 0 1 1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan akses air minum	Persen	75	5,048,288,000	80	5,148,288,000	80	10,196,576,000.00	Dinas PUPR
1 03 0 0 0 0 0 1 5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase kondisi IPAL terpusat dalam kondisi baik	Persen	70	4,525,397,000	76	4,525,397,000	76	9,050,794,000.00	Dinas PUPR
1 03 0 0 0 0 0 1 6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase kawasan perkotaan dan lingkungan yang tertangani banjir	Persen	60	1,225,000,000	70	1,325,000,000	70	2,550,000,000.00	Dinas PUPR
1 03 0 0 0 0 0 1 8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Pemerintah yang Terbangun	Persen	40	33,091,200,000	45	33,500,000,000	45	66,591,200,000.00	Dinas PUPR
1 03 0 0 0 0 0 1 9	Program Penataan Bangunan dan lingkungannya	Persentase Gedung Pemerintah dan Lingkungannya yang Terpelihara	Persen	-	-	80	1,000,000,000.00	80	1,000,000,000.00	Dinas PUPR
1 03 0 0 0 0 0 1 0	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	Persen	60	123,338,675,311	63	123,500,000,000	63	246,838,675,311.00	Dinas PUPR
1 03 0 0 0 0 0 1 1	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah aparatur jasa konstruksi yang bersertifikat	Orang		320,399,706		350,000,000		670,399,706.00	Dinas PUPR
1 03 0 0 0 0 0 1 2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan dengan Perencanaan penataan Ruang	Persen	60	514,994,500	70	550,000,000	70	1,064,994,500.00	Dinas PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 04		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN :			7,972,009,000.00		8,400,809,000.00		16,372,818,000.00	
1 04	0 0 0 0 0 1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			7,972,009,000.00		8,400,809,000.00		16,372,818,000.00	
1 04	0 0 0 0 0 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	90	2,729,710,053.00	95	3,250,809,000.00	95	5,980,519,053.00	PERKIM
1 04	0 0 0 0 0 1 2	Program Pengembangan Perumahan	Unit	175	1,587,951,801.00	177	1,800,000,000.00	1079	3,387,951,801.00	PERKIM
1 04	0 0 0 0 0 1 3	Program Kawasan Permukiman	Dokumen			1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	PERKIM
1 04	0 0 0 0 0 1 4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	57	3,404,347,146.00	57	2,800,000,000.00	57	6,204,347,146.00	PERKIM
1 04	0 0 0 0 0 1 5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persen	45	250,000,000.00	47	300,000,000.00	47	550,000,000.00	PERKIM
1 04	0 0 0 0 0 1 6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengembangan Perumahan			2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	PERKIM
1 05		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT :			13,902,804,616.00		14,252,847,067.00		28,155,651,683.00	
1 05	0 0 0 0 0 4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			6,832,138,616.00		7,052,847,067.00		13,884,985,683.00	
1 05	0 0 0 0 0 4 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	90	3,470,047,067.00	95	3,552,847,067.00	95	7,022,894,134.00	BPBD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 05 0 0 0 0 0 4 3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Upaya Pengurangan Kerentanan/Darurat Bencana dan Penanganan Bencana	Persen	100	605,148,004.00	100	700,000,000.00	100	1,305,148,004.00	BPBD
1 05 0 0 0 0 0 4 4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran.	Persen	100	2,756,943,545.00	100	2,800,000,000.00	100	5,556,943,545.00	BPBD
1 05 0 0 0 0 0 7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah				7,070,666,000.00		7,200,000,000.00		14,270,666,000.00	
1 05 0 0 0 0 0 7 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	4,502,611,338.00	95	4,600,000,000.00	95	9,102,611,338.00	Satpol PP & WH
1 05 0 0 0 0 0 7 2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah kasus pelanggaran Qanun yang diselesaikan	Persen	90	2,568,054,662.00	92	2,600,000,000.00	92	5,168,054,662.00	Satpol PP & WH
1 06	SOSIAL				7,302,518,000.00		7,331,208,459.00		14,633,726,459.00	
1 06 0 0 0 0 0 1	Dinas Sosial				7,302,518,000.00		7,331,208,459.00		14,633,726,459.00	
1 06 0 0 0 0 0 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	3,195,808,459.00	95	3,231,208,459.00	95	6,427,016,918.00	Dinsos
1 06 0 0 0 0 0 1 2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase kemampuan potensi sumber kesejahteraan dalam pemberdayaan sosial masyarakat	Persen	80	792,848,099.00	85	800,000,000.00	85	1,592,848,099.00	Dinsos
1 06 0 0 0 0 0 1 4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyediaan dan pemberian bagi penyandang rehabilitasi sosial	Persen	80	2,205,402,668.00	85	2,000,000,000.00	85	4,205,402,668.00	Dinsos

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 06 0 0 0 0 0 0 0 5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan anak terlantar dan tersedianya data fakir miskin	Persen	80	414,871,226.00	85	450,000,000.00	85	864,871,226.00	Dinsos
1 06 0 0 0 0 0 0 0 6	Program Penanganan Bencana	Tertanganinya sandang dan pangan korban bencana	Persen	90	693,587,548.00	95	750,000,000.00	95	1,443,587,548.00	Dinsos
1 06 0 0 0 0 0 0 0 7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemenuhan sarana dan pasarana taman makam pahawan	Persen	-	-	75	100,000,000.00	75	100,000,000.00	Dinsos
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIATAN DENGAN PELAYANAN DASAR				93,611,769,080.00		88,287,641,571.00		181,899,410,651.00	
2 07	Tenaga Kerja				4,304,289,000.00		4,588,805,828.00		8,893,094,828.00	
2 07 3 3 2 0 0 0 0 2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				4,304,289,000.00		4,588,805,828.00		8,893,094,828.00	
2 07 3 3 2 0 0 0 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	3,538,805,828.00	95	3,608,805,828.00	95	7,147,611,656.00	DISNAKERTRANS
2 07 3 3 2 0 0 0 0 3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	144	676,150,480.00	160	700,000,000.00	224	1,376,150,480.00	DISNAKERTRANS
2 07 3 3 2 0 0 0 0 4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang telah ditempatkan	Orang	150	15,000,000.00	200	55,000,000.00	350	70,000,000.00	DISNAKERTRANS
2 07 3 3 2 0 0 0 0 5	Program Hubungan Industrial	Jumlah karyawan dan pelaku usaha yang mengikuti Bimtek Penyelesaian Hubungan Industrial dan Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja	Orang	50	20,000,000.00	70	55,000,000.00	120	75,000,000.00	DISNAKERTRANS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Bersama (PKB)									
		Trasnigrasi									
2 07 3 3 2 0 0 0 0	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi	Persen	-	39.35	100,000,000.00	100.00	100,000,000.00	DISNAKERTRANS		
2 07 3 3 2 0 0 0 0	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase UPT mandiri	Persen	50	54,332,692.00	50	70,000,000.00	50	124,332,692.00	DISNAKERTRANS	
2 09	PANGAN :				14,293,542,080.00		14,691,806,957.00		28,985,349,037.00		
2 0.09 3 2 5 0 0 0 1	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan				14,293,542,080.00		14,691,806,957.00		28,985,349,037.00		
2 0.09 3 2 5 0 0 0 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	5,165,406,957.00	95	5,221,806,957.00	95	10,387,213,914.00	DPKP	
2 0.09 3 2 5 0 0 0 1 2	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan pangan utama	Persen	33.25	500,000,000.00	34,55	550,000,000.00	34,55	1,050,000,000.00	DPKP	
2 0.09 3 2 5 0 0 0 1 3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	80.2	1,170,141,925.00	84.6	1,200,000,000.00	84.6	2,370,141,925.00	DPKP	
2 0.09 3 2 5 0 0 0 1 4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Desa yang terindikasi rawan pangan	Persen	50	32,799,977.00	66	100,000,000.00	66	132,799,977.00	DPKP	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.09.3.25.0.0.0.0.5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	Persen	80	60,748,767.00	85	70,000,000.00	85	130,748,767.00	DPKP
	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
2.09.3.25.0.0.0.0.3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	13,000	2,234,899,782.00	13,200	2,250,000,000.00	62,600	4,484,899,782.00	DPKP
2.09.3.25.0.0.0.0.4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	13,500	5,064,760,587.00	13,800	5,150,000,000.00	64,500	10,214,760,587.00	DPKP
2.09.3.25.0.0.0.0.5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persen	-	-	55	50,000,000.00	55	50,000,000.00	DPKP
2.09.3.25.0.0.0.0.6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Ikan Olahan	Ton	1,400	64,784,085.00	1,500	100,000,000.00	6,500	164,784,085.00	DPKP
2.10		PERTANAHAN :			8,183,037,000.00		5,334,290,790.00		13,517,327,790.00	
2.10.0.0.0.0.0.1	Dinas Pertanahan				8,183,037,000.00		5,334,290,790.00		13,517,327,790.00	
2.10.0.0.0.0.0.0.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	2,063,090,790.00	95	2,079,290,790.00	95	4,142,381,580.00	Dinas Pertanahan
2.10.0.0.0.0.0.0.3	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase Pengadaan Tanah yang di fasilitasi	Persen	80	14,999,931.00	90	25,000,000.00	90	39,999,931.00	Dinas Pertanahan
2.10.0.0.0.0.0.0.5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Masyarakat terdampak yang disantuni	Persen	90	5,500,000,000.00	95	2,500,000,000.00	95	8,000,000,000.00	Dinas Pertanahan
2.10.0.0.0.0.0.0.6	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Tanah terlantar dan Absentee yang didistribusi	Persen	54	94,981,905.00	66	100,000,000.00	66	194,981,905.00	Dinas Pertanahan
2.10.0.0.0.0.0.1.0	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	Persen		-	55	35,000,000.00	55	35,000,000.00	Dinas Pertanahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sesuai dengan peruntukannya								
2 10 0 0 0 0 1 2	Program Pengurusan Hak-hak Atas Tanah	Presentase tanah yang bersertifikat pemda	Persen	54	430,779,441.00	66	450,000,000.00	66	880,779,441.00	Dinas Pertanahan
2 10 0 0 0 0 1 6	Program pengelolaan sistem informasi pertanahan	Adanya aplikasi sistem informasi pertanahan	Ada/Tidak			Ada	60,000,000.00	Ada	60,000,000.00	Dinas Pertanahan
2 10 0 0 0 0 1 7	Program Penanganan Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Persentase kasus konflik dan sengketa yang ditangani	Persen	80	79,184,933.00	85	85,000,000.00	85	164,184,933.00	Dinas Pertanahan
2 11	LINGKUNGAN HIDUP :				12,032,407,000.00		12,440,218,912.00	-	24,472,625,912.00	
2 11 3 2 0 0 0 2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				12,032,407,000.00		12,440,218,912.00		24,472,625,912.00	
2 11 3 2 0 0 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	3,944,018,912.00	95	3,885,218,912.00	95	7,829,237,824.00	Dinas LHK
2 11 3 2 0 0 0 3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	0<1	449,029,880.00	0<1	796,000,000.00	0<1	1,245,029,880.00	Dinas LHK
2 11 3 2 0 0 0 2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rasio RTH yang Tertangani	Persen	30	147,977,500.00	40	200,000,000.00	40	347,977,500.00	Dinas LHK
2 11 3 2 0 0 0 8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Orang	30	259,999,720.00	60	105,000,000.00	90	364,999,720.00	Dinas LHK
2 11 3 2 0 0 1 0	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah kasus lingkungan hidup yang tertangani	Kasus			2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	Dinas LHK
2 11 3 2 0 0 1 1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persen	88	7,231,380,988.00	90	7,404,000,000.00	90	14,635,380,988.00	Dinas LHK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 12		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL :			6,083,387,000.00		6,211,931,189.00		12,295,318,189.00	
2 12	0 0 0 0 0 0 1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			6,083,387,000.00		6,211,931,189.00		12,295,318,189.00	
2 12	0 0 0 0 0 0 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	90	4,213,131,189.00	95	4,256,931,189.00	95	8,470,062,378.00	Disdukcapil
12	0 0 0 0 0 0 1 2	Program Pendaftaran Penduduk	Persen	97.5	1,303,940,336.00	98	1,350,000,000.00	98	2,653,940,336.00	Disdukcapil
12	0 0 0 0 0 0 1 3	Program Pencatatan Sipil	Persen	95	220,647,110.00	98	235,000,000.00	98	455,647,110.00	Disdukcapil
12	0 0 0 0 0 0 1 4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	95	330,713,264.00	98	350,000,000.00	98	680,713,264.00	Disdukcapil
12	0 0 0 0 0 0 1 5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dokumen	1	14,955,101.00	1	20,000,000.00	1	34,955,101.00	Disdukcapil
2 13	2 0 8 2 1 4 0 3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana			19,558,098,000.00		19,770,101,582.00		39,328,199,582.00	
2 08		Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			1,759,047,261.00		1,850,000,000.00		3,609,047,261.00	
2 13	2 0 8 2 1 4 0 3 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	90	7,618,549,582.00	95	7,697,149,582.00	95	15,315,699,164.00	DPMGPKB
2 13	2 0 8 2 1 4 0 3 2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persen	70	389,999,872.00	80	400,000,000.00	80	789,999,872.00	DPMGPKB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 13 2 0 2 1 0 0	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan Perempuan yang tertangani	Persen	90	414,210,251.00	95	450,000,000.00	95	864,210,251.00	DPMGPKB
2 13 2 0 2 1 0 0	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan penanganan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Persen	90	629,985,787.00	95	650,000,000.00	95	1,279,985,787.00	DPMGPKB
2 13 2 0 2 1 0 0	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Gampong Layak Anak	Persen	25	133,851,443.00	45	150,000,000.00	45	283,851,443.00	DPMGPKB
2 13 2 0 2 1 0 0	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan anak yang tertangani	Persen	85	190,999,908.00	90	200,000,000.00	90	390,999,908.00	DPMGPKB
2 13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				2,181,779,157.00		2,215,000,000.00		4,396,779,157.00	
2 13 2 0 2 1 0 0	Program Penataan Desa	Adanya fasilitasi permasalahan gampong dan pendataan gampong	Ada/Tidak	Ada	1,198,320,225.00	Ada	1,210,000,000.00	Ada	2,408,320,225.00	DPMGPKB
2 13 2 0 2 1 0 0	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan dan Sistem pengelolaan keuangan yang baik	Persen	85	363,461,726.00	87	375,000,000.00	87	738,461,726.00	DPMGPKB
2 13 2 0 2 1 0 0	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	Lembaga	4	619,997,206.00	4	630,000,000.00	4	1,249,997,206.00	DPMGPKB
2 14	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				7,998,722,000.00		8,007,952,000.00		16,006,674,000.00	
2 13 2 0 2 1 0 0	Program Pengendalian Penduduk	Adanya Ketersediaan sistem Informasi keluarga penyuluhan, advokasi keluarga berencana dan ketahanan keluarga	Ada/Tidak	Ada	265,770,000.00	Ada	275,000,000.00	Ada	540,770,000.00	DPMGPKB
2 13 2 0 2 1 0 0	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Peningkatan Aseptor aseptor KB Aktif	Persen	70527	3,907,652,000.00	72931	3,907,652,000.00	72931	7,815,304,000.00	DPMGPKB

Kode								Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab	
											Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
2	13	2	0	2	1	0	0	4	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase desa yang memiliki kelompok Tribina	Persen	24.6	3,825,300,000.00	27.9	3,825,300,000.00	27.9	7,650,600,000.00	DPMGPKB
2	15								PERHUBUNGAN :				5,337,429,000.00		5,410,171,499.00		10,747,600,499.00	
2	15	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Perhubungan				5,337,429,000.00		5,410,171,499.00		10,747,600,499.00	
2	15	0	0	0	0	0	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	3,373,371,499.00	95	3,435,171,499.00	95	6,808,542,998.00	DISHUB
2	15	0	0	0	0	0	0	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase pelayanan lalu lintas	Persen	65	1,964,057,501.00	70	1,975,000,000.00	70	3,939,057,501.00	DISHUB
2	16	2	2	2	2	0	0	3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian				3,224,139,000.00		3,282,447,888.00		6,506,586,888.00	
2	16	2	2	2	2	0	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	2,187,247,888.00	95	2,212,447,888.00	95	4,399,695,776.00	Diskominsan
2	16								KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :									
2	16	2	2	2	2	0	0	2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Peringkat Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	97 (menuju Informatif)	787,394,953.00	97 (menuju Informatif)	800,000,000.00	97 (menuju Informatif)	1,587,394,953.00	Diskominsan
2	16	2	2	2	2	0	0	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Nilai	1,8 (Cukup)	149,904,663.00	2,6 (Baik)	160,000,000.00	2,6 (Baik)	309,904,663.00	Diskominsan
2	20								Bidang Statistik									
2	16	2	2	2	2	0	0	2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik sektoral	Persen	100	34,958,649.00	100	40,000,000.00	100	74,958,649.00	Diskominsan

Kode								Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
											Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1								2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	21							Bidang Persandian									
2	16	2	20	2	21	03	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI).	Tingkat	I+	64,632,847.00	II	70,000,000.00	II	134,632,847.00	Diskominsan
2	18							PENANAMAN MODAL :				4,206,938,000.00		4,281,093,853.00		8,488,031,853.00	
2	18	0	00	0	00	01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu				4,206,938,000.00		4,281,093,853.00		8,488,031,853.00	
2	18	0	00	0	00	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	3,670,893,853.00	95	3,705,093,853.00	95	7,375,987,706.00	DPMPPTSP
2	18	0	00	0	00	01	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh izin	Pelaku Usaha	600	31,572,479.00	630	35,000,000.00	630	66,572,479.00	DPMPPTSP
2	18	0	00	0	00	01	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peningkatan Pelaku Usaha yang memiliki izin	Pelaku Usaha	30	20,054,785.00	30	25,000,000.00	60	45,054,785.00	DPMPPTSP
2	18	0	00	0	00	01	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan yang diterbitkan	Persen	85	121,598,719.00	90	135,000,000.00	90	256,598,719.00	DPMPPTSP
2	18	0	00	0	00	01	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Realisasi Investasi	Perusahaan/ Pelaku Usaha	400	335,521,877.0	700	350,000,000.00	1200	685,521,877.00	DPMPPTSP
2	18	0	00	0	00	01	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Partisipasi/Masyarakat yang mengurus izin berbasis elektronik	Persen	50	27,296,287.00	75	31,000,000.00	75	58,296,287.00	DPMPPTSP
2	19	3	26	0	00	02		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata				11,768,330,000.00		7,477,918,872.00		19,246,248,872.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 19 3 2 0 0 0 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	2,875,918,872.00	95	2,902,918,872.00	95	5,778,837,744.00	Disporapar
2 19	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga				8,553,684,475.00		3,930,000,000.00		12,483,684,475.00	
2 19 3 2 0 0 0 0 2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif	Organi-sasi	23	1,079,089,585.00	24	1,100,000,000.00	24	2,179,089,585.00	Disporapar
2 19 3 2 0 0 0 0 3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabang olah raga yang mendapat medali di even Provinsi	Persen	20	7,174,594,890.00	25	2,500,000,000.00	25	9,674,594,890.00	Disporapar
2 19 3 2 0 0 0 0 4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kepramukaan Aktif	Persen	100	300,000,000.00	100	330,000,000.00	100	630,000,000.00	Disporapar
	Bidang Pariwisata				338,726,653.00		645,000,000.00		983,726,653.00	
2 19 3 2 0 0 0 0 3	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Promosi Wisata	Persen	85	59,998,704.00	90	75,000,000.00		134,998,704.00	Disporapar
2 19 3 2 0 0 0 0 2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisata	Persen	70	195,400,000.00	75	350,000,000.00	75	545,400,000.00	Disporapar
2 19 3 2 0 0 0 0 5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Pembinaan	Persen	50	83,327,949.00	55	220,000,000.00	55	303,327,949.00	Disporapar
2 22 0 0 0 0 0 5	Sekretariat Majelis Adat Aceh				1,440,797,000.00		1,537,745,937.00		2,978,542,937.00	
2 22 0 0 0 0 0 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	1,375,745,937.00	95	1,387,745,937.00	95	2,763,491,874.00	Sekretariat MAA
2 22 0 0 0 0 0 0 7	Program Majelis Adat Aceh	Jumlah Pembinaan Adat dan Adat Istiadat	Pembi-naan	3	65,051,063.00	4	150,000,000.00	7	215,051,063.00	Sekretariat MAA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 23 2 2 4 0 0 0 2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				3,179,376,000.00		3,261,108,264.00		6,440,484,264.00	
2 23 2 2 4 0 0 0 2 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	2,982,908,264.00	95	3,011,108,264.00	95	5,994,016,528.00	DPK
2 23	Bidang Perpustakaan				163,348,411.00		200,000,000.00		363,348,411.00	
2 23 2 2 4 0 0 0 2 2	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	7,038	163,348,411.00	7,280	200,000,000.00	14,318	363,348,411.00	DPK
2 24	Bidang Kearsipan				33,119,325.00		50,000,000.00		83,119,325.00	
2 23 2 2 4 0 0 0 2 2	Program Pengelolaan Arsip	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Persen	65	33,119,325.00	70	50,000,000.00	70	83,119,325.00	DPK
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				71,249,757,000.00		73,887,312,738.00		145,137,069,738.00	
3 27	PERTANIAN				47,040,853,000.00		48,933,862,560.00		95,974,715,560.00	
3 27 0 0 0 0 0 0 1	Dinas Pertanian dan Perkebunan				37,171,853,000.00		38,224,483,254.00		75,396,336,254.00	
3 27 0 0 0 0 0 0 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	20,881,683,254.00	95	21,174,483,254.00	95	42,056,166,508.00	Distanbun
3 27 0 0 0 0 0 0 1 2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan (kelapa, Karet dan Kakao)	Persen	5	954,549,526.00	5	1,100,000,000.00	5	2,054,549,526.00	Distanbun
3 27 0 0 0 0 0 0 1 3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah PDRB Sektor Pertanian	Triliun Rupiah	4.6	12,069,806,511.00	4.8	12,100,000,000.00	4,8	24,169,806,511.00	Distanbun

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 27 0 0 0 0 0 0 5	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanggulangan Luas Serangan OPT dan DPI	Persen	75	108,309,625.00	80	120,000,000.00	80	228,309,625.00	Distanbun
3 27 0 0 0 0 0 0 7	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas	Kelompok	8	3,157,504,084.00	9	3,730,000,000.00	17	6,887,504,084.00	Distanbun
3 27 0 0 0 0 0 0 8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				9,869,000,000.00		10,709,379,306.00		20,578,379,306.00	
3 27 0 0 0 0 0 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	5,158,975,429.00	95	5,479,379,306.00	95	10,638,354,735.00	Disnak Keswan
3 27 0 0 0 0 0 0 2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Populasi ternak	Persen	3	3,418,723,277.00	3	3,600,000,000.00	3	7,018,723,277.00	Disnak Keswan
3 27 0 0 0 0 0 0 3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan PAD Sektor Peternakan	Persen	2	1,085,001,033.00	2	1,150,000,000.00	2	2,235,001,033.00	Disnak Keswan
3 27 0 0 0 0 0 0 4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kasus Penyakit yang Hewan yang Tertangani	Persen	70	206,300,261.00	75	480,000,000.00	75	686,300,261.00	Disnak Keswan
3 30 3 3 2 1 0 0 3	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				14,339,904,000.00		14,244,070,872.00		28,583,974,872.00	
3 30 3 3 2 1 0 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	4,282,070,872.00	95	4,824,070,872.00	95	9,106,141,744.00	DPPKUKM
2 17	Bidang Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah				2,398,166,798.00		2,805,000,000.00		5,203,166,798.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 30 3 3 1 2 1 0 0	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah	Koperasi	-	20	60,000,000.00	20	60,000,000.00	DPPKUKM	
3 30 3 3 1 2 1 0 0	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang mendapat pengawasan	Persen	-	20	75,000,000.00	20	75,000,000.00	DPPKUKM	
3 30 3 3 1 2 1 0 0	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Dinilai	Persen	-	12	45,000,000.00	12	45,000,000.00	DPPKUKM	
3 30 3 3 1 2 1 0 0	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang mendapatkan pelatihan	Persen	14	49,999,936.00	21	175,000,000.00	21	224,999,936.00	DPPKUKM
3 30 3 3 1 2 1 0 0	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Persen	74,38	79,994,638.00	78,51	100,000,000.00	78,51	179,994,638.00	DPPKUKM
3 30 3 3 1 2 1 0 0	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	50	160,699,113.00	75	200,000,000.00	125	360,699,113.00	DPPKUKM
3 30 3 3 1 2 1 0 0	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang naik Kelas	UMKM	3	2,107,473,111.00	3	2,150,000,000.00	6	4,257,473,111.00	DPPKUKM
3 30	Bidang Perdagangan				7,469,976,421.00		5,400,000,000.00		12,869,976,421.00	
3 30 3 3 1 2 1 0 0	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Perusahaan yang memiliki Perizinan dan pendaftaran	Persen	50	44,999,295.00	50	55,000,000.00	50	99,999,295.00	DPPKUKM
3 30 3 3 1 2 1 0 0	Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan	Persentase Pengelolaan Sarana Perdagangan yang berfungsi	Persen	30	7,049,993,453.00	30	4,600,000,000.00	30	11,649,993,453.00	DPPKUKM
3 30 3 3 1 2 1 0 0	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalnya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting	Ya/ Tidak	Ya	194,988,041.00	Ya	550,000,000.00	Ya	744,988,041.00	DPPKUKM
3 30 3 3 1 2 1 0 0	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen di Kecamatan	Persen	100	139,995,890.00	100	150,000,000.00	100	289,995,890.00	DPPKUKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 30 3 3 1 2 1 0 0 7 3 7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan Daerah	Produk Unggulan	2	39,999,742.00	2	45,000,000.00	4	84,999,742.00	DPPKUKM
3 31	Bidang Perindustrian				189,689,909.00		1,215,000,000.00		1,404,689,909.00	
3 30 3 3 1 2 1 0 0 7 3 2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Pelaku Usaha Industri	Pelaku Usaha	1592	149,693,541.00	1600	1,170,000,000.00	1600	1,319,693,541.00	DPPKUKM
3 30 3 3 1 2 1 0 0 7 3 4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya data industri dalam Sistem Industri Nasional (SINAS)	Ya/Tidak	Ya	39,996,368.00	Ya	45,000,000.00	Ya	84,996,368.00	DPPKUKM
4	UNSUR PENDUKUNG				64,387,072,000.00		65,118,616,506.00		129,505,688,506.00	
4 01	SEKRETARIAT DAERAH	20,395,463,983.00			29,400,454,000.00		30,012,282,248.00		59,412,736,248.00	
4 01 0 0 0 0 0 0 1	Sekretariat Daerah				29,400,454,000.00		30,012,282,248.00		59,412,736,248.00	
4 01 0 0 0 0 0 0 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	24,341,882,248.00	95	24,512,282,248.00	95	48,854,164,496.00	Setda, Umum, ULP, Tapem, dan Humas
4 01 0 0 0 0 0 0 1 2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Cakupan Rekomendasi /Naskah Dinas yang terselesaikan	Persen	90	3,831,594,998.00	100	4,000,000,000.00	100	7,831,594,998.00	Setda, Tapem, orpeg, Umum, dan Humas,
4 01 0 0 0 0 0 0 1 3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Layanan Administrasi Umum, Organisasi, Protokoler, Perencanaan dan Keuangan	Persen	90	1,226,976,754.00	100	1,500,000,000.00	100	2,726,976,754.00	Bagian ekonomi, ULP, dan adm pembangunan
4 02	SEKRETARIAT DPRK				34,986,618,000.00		35,106,334,258.00		70,092,952,258.00	
4 02 0 0 0 0 0 0 1	Sekretariat DPRK				34,986,618,000.00		35,106,334,258.00		70,092,952,258.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 02 0 0 0 0 0 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	26,457,734,258.00	100	26,506,334,258.00	100	52,964,068,516.00	Sekretariat DPRK
4 02 0 0 0 0 0 1 2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Raperda yang di tetapkan menjadi Perda	Persen	60	8,528,883,742.00	65	8,600,000,000.00	65	17,128,883,742.00	Sekretariat DPRK
5	UNSUB	UNSUB			604,448,240,176.00		609,866,289,559.00		1,214,314,529,735.00	
5 01	PERENCANAAN				9,732,126,000.00		10,672,973,689.00		20,405,099,689.00	
5 01 5 0 5 0 0 0 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				9,732,126,000.00		10,672,973,689.00		20,405,099,689.00	
5 01 5 0 5 0 0 0 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	5,885,773,689.00	95	5,922,973,689.00	95	11,808,747,378.00	BAPPEDA
5 01 5 0 5 0 0 0 1 2	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Kesesuaian Penganggaran antara APBD dengan RPJM	Persen	90	1,124,974,899.00	95	1,900,000,000.00	95	3,024,974,899.00	BAPPEDA
5 01 5 0 5 0 0 0 1 3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program antara RPJM dengan APBK	Persen	100	2,056,378,646.00	100	1,965,000,000.00	100	4,021,378,646.00	BAPPEDA
5 05	Penelitian dan Pengembangan									
5 01 5 0 5 0 0 0 1 2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase SKPK yang melaksanakan Penelitian dan Pengembangan	Persen	85	664,998,766.00	90	885,000,000.00	90	1,549,998,766.00	BAPPEDA
5 02	KEUANGAN				584,522,701,176.00		588,736,514,975.00		1,173,259,216,151.00	
5 02 0 0 0 0 0 0 1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				584,522,701,176.00		588,736,514,975.00		1,173,259,216,151.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 02 0 0 0 0 0 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	31,942,323,981.00	95	32,011,923,981.00	95	63,954,247,962.00	BPKD
5 02 0 0 0 0 0 1 2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Keuangan Daerah	Persen	97	551,494,590,994.00	98	555,494,590,994.00	98	1,106,989,181,988.00	BPKD
5 02 0 0 0 0 0 1 3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Manajemen Aset Daerah	Persen	100	405,787,580.00	100	450,000,000.00	100	855,787,580.00	BPKD
5 02 0 0 0 0 0 1 4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD	Persen	100	679,998,621.00	100	780,000,000.00	100	1,459,998,621.00	BPKD
5 03		KEPEGAWAIAN			10,193,413,000.00		10,456,800,895.00		20,650,213,895.00	
5 03 5 0 4 0 0 0 1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				10,193,413,000.00		10,456,800,895.00		20,650,213,895.00	
5 03 5 0 4 0 0 0 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	5,722,600,895.00	95	5,756,800,895.00	95	11,479,401,790.00	BKPSDM
5 03 5 0 4 0 0 0 1 2	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Tata kelola kepegawaian sesuai Manajemen ASN	Persen	70	1,020,812,902.00	80	1,100,000,000.00	80	2,120,812,902.00	BKPSDM
5 04		Pendidikan dan Pelatihan								
5 03 5 0 4 0 0 0 1 2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM yang dilatih	Persen	80	3,449,999,203.00	85	3,600,000,000.00	85	7,049,999,203.00	BKPSDM
6		UNSUR PENGAWASAN			6,536,221,000.00		7,183,931,392.00		13,720,152,392.00	
6 01		INSPEKTORAT			6,536,221,000.00		7,183,931,392.00		13,720,152,392.00	
6 01 0 0 0 0 0 0 1	Inspektorat Kabupaten				6,536,221,000.00		7,183,931,392.00		13,720,152,392.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 01 0 0 0 0 0 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	90	5,129,331,392.00	95	5,159,931,392.00	95	10,289,262,784.00	Inspektorat
6 01 0 0 0 0 0 1 2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Kepatuhan dalam Pelaporan Keuangan dan kinerja	Persen	75	1,291,627,984.00	80	1,600,000,000.00	80	2,891,627,984.00	Inspektorat
6 01 0 0 0 0 0 1 3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Penurunan Jumlah Kasus Kesalahan Prosedur Pengelolaan Dana APBK	Kasus	6	115,261,624.00	4	424,000,000.00	4	539,261,624.00	Inspektorat
7	UNSUR KEWILAYAHAN				61,423,952,104.00		63,887,523,115.00		125,311,475,219.00	
7 01	Kecamatan				61,423,952,104.00		63,887,523,115.00		125,311,475,219.00	
7 01 0 0 0 0 0 1	Kecamatan Samalanga				4,875,404,900.00		5,028,628,600.00		9,904,033,500.00	
7 01 0 0 0 0 0 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	4,822,028,600.00	98	4,883,628,600.00	97	9,705,657,200.00	Kec. Samalanga
7 01 0 0 0 0 0 1 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen		-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Samalanga
7 01 0 0 0 0 0 1 3	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen		-	45	25,000,000.00	45	25,000,000.00	Kec. Samalanga
7 01 0 0 0 0 0 1 5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	16,597,920.00	75	20,000,000.00	75	36,597,920.00	Kec. Samalanga
7 01 0 0 0 0 0 1 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	36,778,380.00	80	50,000,000.00	80	86,778,380.00	Kec. Samalanga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 0 0 0 0 2 2	Kantor Camat Simpang Mamplam				4,182,223,684.00		4,369,110,649.00		8,551,334,333.00	
7 01 0 0 0 0 2 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	4,119,910,649.00	98	4,214,110,649.00	97	8,334,021,298.00	Kec. Simpang Mamplam
7 01 0 0 0 0 2 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen	-	-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Simpang Mamplam
7 01 0 0 0 0 2 3	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	-	-	45	25,000,000.00	45	25,000,000.00	Kec. Simpang Mamplam
7 01 0 0 0 0 2 5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	14,696,327.00	75	20,000,000.00	75	34,696,327.00	Kec. Simpang Mamplam
7 01 0 0 0 0 2 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	47,616,708.00	80	60,000,000.00	80	107,616,708.00	Kec. Simpang Mamplam
7 01 0 0 0 0 3	Kecamatan Pandrah				2,836,655,520.00		2,985,846,770.00		5,822,502,290.00	
7 01 0 0 0 0 3 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	2,783,846,770.00	98	2,835,846,770.00	97	5,619,693,540.00	Kec. Pandrah
7 01 0 0 0 0 3 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen	-	-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Pandrah
7 01 0 0 0 0 3 3	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	-	-	45	25,000,000.00	45	25,000,000.00	Kec. Pandrah
7 01 0 0 0 0 5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan	Cakupan Penyelenggaraan	Persen	70	19,970,600.00	75	25,000,000.00	75	44,970,600.00	Kec. Pandrah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	umum	Pemerintah Umum								
7 01 0 0 0 0 0 0 3 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	32,838,150.00	80	50,000,000.00	80	82,838,150.00	Kec. Pandrah
7 01 0 0 0 0 0 0 4	Kantor Camat Jeunieb				4,392,158,000.00		4,535,753,442.00		8,927,911,442.00	
7 01 0 0 0 0 0 0 4 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	4,285,953,442.00	98	4,345,753,442.00	98	8,631,706,884.00	Kec. Jeunieb
7 01 0 0 0 0 0 0 4 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen		-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Jeunieb
7 01 0 0 0 0 0 0 4 3	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen		-	45	25,000,000.00	45	25,000,000.00	Kec. Jeunieb
7 01 0 0 0 0 0 0 4 5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	24,633,670.00	75	25,000,000.00	75	49,633,670.00	Kec. Jeunieb
7 01 0 0 0 0 0 0 4 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	81,570,888.00	80	90,000,000.00	80	171,570,888.00	Kec. Jeunieb
7 01 0 0 0 0 0 0 5	Kecamatan Peulimbang				2,777,753,000.00		2,908,116,800.00		5,685,869,800.00	
7 01 0 0 0 0 0 0 5 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	2,701,916,800.00	98	2,743,116,800.00	97	5,445,033,600.00	Kec. Peulimbang
7 01 0 0 0 0 0 0 5 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen		-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Peulimbang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 0 0 0 0 0 0 3	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	-	45	25,000,000.00	45	25,000,000.00	Kec. Peulimbang	
7 01 0 0 0 0 0 0 5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	13,994,400.00	75	20,000,000.00	75	33,994,400.00	Kec. Peulimbang
7 01 0 0 0 0 0 0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	61,841,800.00	80	70,000,000.00	80	131,841,800.00	Kec. Peulimbang
7 01 0 0 0 0 0 0 6	Kecamatan Peudada				3,278,083,000.00		3,407,809,051.00		6,685,892,051.00	
7 01 0 0 0 0 0 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	3,196,809,051.00	98	3,242,809,051.00	98	6,439,618,102.00	Kec. Peudada
7 01 0 0 0 0 0 0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen	-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Peudada	
7 01 0 0 0 0 0 0 3	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	-	45	25,000,000.00	45	25,000,000.00	Kec. Peudada	
7 01 0 0 0 0 0 0 5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	16,424,254.00	75	20,000,000.00	75	36,424,254.00	Kec. Peudada
7 01 0 0 0 0 0 0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	64,849,695.00	80	70,000,000.00	80	134,849,695.00	Kec. Peudada
7 01 0 0 0 0 0 0 7	Kecamatan Jeumpa				3,676,460,000		3,813,132,681		7,489,592,681	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 0 0 0 0 0 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	3,613,932,681.00	98	3,673,132,681.00	98	7,287,065,362.00	Kec. Jeumpa
7 01 0 0 0 0 0 0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen	-	-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Jeumpa
7 01 0 0 0 0 0 0 3	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	30	5,005,740.00	45	25,000,000.00	45	30,005,740.00	Kec. Jeumpa
7 01 0 0 0 0 0 0 5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	20,777,900.00	75	25,000,000.00	75	45,777,900.00	Kec. Jeumpa
7 01 0 0 0 0 0 0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	36,743,679.00	80	40,000,000.00	80	76,743,679.00	Kec. Jeumpa
7 01 0 0 0 0 0 0 8	Kecamatan Kota Juang				3,395,419,000.00		3,546,257,481.00		6,941,676,481.00	
7 01 0 0 0 0 0 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	3,331,857,481.00	98	3,386,257,481.00	97	6,718,114,962.00	Kec. Kota Juang
7 01 0 0 0 0 0 0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen	-	-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Kota Juang
7 01 0 0 0 0 0 0 3	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	-	-	45	25,000,000.00	45	25,000,000.00	Kec. Kota Juang
7 01 0 0 0 0 0 0 5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	19,976,522.00	75	25,000,000.00	75	44,976,522.00	Kec. Kota Juang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 0 0 0 0 0 0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	43,584,997.00	80	60,000,000.00	80	103,584,997.00	Kec. Kota Juang
7 01 0 0 0 0 0 9	Kecamatan Kuala				2,545,517,000.00		2,677,198,435.00		5,222,715,435.00	
7 01 0 0 0 0 0 9 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	2,501,798,435.00	98	2,547,198,435.00	97	5,048,996,870.00	Kec. Kuala
7 01 0 0 0 0 0 9 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen		-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Kuala
7 01 0 0 0 0 0 9 3	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen		-	45	25,000,000.00	45	25,000,000.00	Kec. Kuala
7 01 0 0 0 0 0 9 5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	14,350,895.00	75	20,000,000.00	75	34,350,895.00	Kec. Kuala
7 01 0 0 0 0 0 9 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	29,367,670.00	80	35,000,000.00	80	64,367,670.00	Kec. Kuala
7 01 0 0 0 0 1 0	Kecamatan Juli				2,871,588,000.00		3,006,586,573.00		5,878,174,573.00	
7 01 0 0 0 0 1 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	2,802,786,573.00	98	2,841,586,573.00	97	5,644,373,146.00	Kec. Juli
7 01 0 0 0 0 1 0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen		-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Juli

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 0 0 0 0 1 0 3	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	-	45	25,000,000.00	45	25,000,000.00	Kec. Juli	
7 01 0 0 0 0 1 0 5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	17,946,150.00	75	20,000,000.00	75	37,946,150.00	Kec. Juli
7 01 0 0 0 0 1 0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	50,855,277.00	80	70,000,000.00	80	120,855,277.00	Kec. Juli
7 01 0 0 0 0 1 1	Kecamatan Peusangan				6,389,931,000.00		6,575,928,147.00		12,965,859,147.00	
7 01 0 0 0 0 1 1 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	6,288,128,147.00	98	6,380,928,147.00	97	12,669,056,294.00	Kec. Peusangan
7 01 0 0 0 0 1 1 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen	-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Peusangan	
7 01 0 0 0 0 1 1 3	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	-	45	30,000,000.00	45	30,000,000.00	Kec. Peusangan	
7 01 0 0 0 0 1 1 5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	34,895,000.00	75	40,000,000.00	75	74,895,000.00	Kec. Peusangan
7 01 0 0 0 0 1 1 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	66,907,853.00	80	75,000,000.00	80	141,907,853.00	Kec. Peusangan
7 01 0 0 0 0 1 2	Kecamatan Jangka				3,885,331,000.00		4,034,105,400.00		7,919,436,400.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 0 0 0 0 1 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	3,823,505,400.00	98	3,879,105,400.00	97	7,702,610,800.00	Kec. Jangka
7 01 0 0 0 0 1 0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen	-	-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Jangka
7 01 0 0 0 0 1 0 3	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	-	-	45	25,000,000.00	45	25,000,000.00	Kec. Jangka
7 01 0 0 0 0 1 0 5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	20,188,195.00	75	25,000,000.00	75	45,188,195.00	Kec. Jangka
7 01 0 0 0 0 1 0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	41,637,405.00	80	55,000,000.00	80	96,637,405.00	Kec. Jangka
7 01 0 0 0 0 1 3	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng				3,477,932,000.00		3,636,698,022.00		7,114,630,022.00	
7 01 0 0 0 0 1 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	3,409,298,022.00	98	3,466,698,022.00	97	6,875,996,044.00	Kec. Ps. Siblah Krueng
7 01 0 0 0 0 1 0 2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen	-	-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Ps. Siblah Krueng
7 01 0 0 0 0 1 0 3	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	-	-	45	25,000,000.00	45	25,000,000.00	Kec. Ps. Siblah Krueng
7 01 0 0 0 0 1 0 5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	16,970,468.00	75	20,000,000.00	75	36,970,468.00	Kec. Ps. Siblah Krueng

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 0 0 0 1 0	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	51,663,510.00	80	75,000,000.00	80	126,663,510.00	Kec. Ps. Siblah Krueng
7 01 0 0 0 1 4	Kecamatan Peusangan Selatan				2,622,233,000		2,756,585,514		5,378,818,514	
7 01 0 0 0 1 0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	2,575,985,514.00	98	2,616,585,514.00	97	5,192,571,028.00	Kec. Ps. Selatan
7 01 0 0 0 1 0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen		-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Ps. Selatan
7 01 0 0 0 1 0	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen		-	45	25,000,000.00	45	25,000,000.00	Kec. Ps. Selatan
7 01 0 0 0 1 0	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	15,528,777.00	75	20,000,000.00	75	35,528,777.00	Kec. Ps. Selatan
7 01 0 0 0 1 0	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	30,718,709.00	80	45,000,000.00	80	75,718,709.00	Kec. Ps. Selatan
7 01 0 0 0 1 5	Kecamatan Kutablang				3,876,114,000.00		3,975,774,360.00		7,851,888,360.00	
7 01 0 0 0 1 0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	3,793,775,667.00	98	3,845,774,360.00	98	7,639,550,027.00	Ke. Kuta Blang
7 01 0 0 0 1 0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen		-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Kuta Blang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 0 0 0 1 0	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	-	45	25,000,000.00	45	25,000,000.00	Ke. Kuta Blang	
7 01 0 0 0 1 0	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	22,297,780.00	75	25,000,000.00	75	47,297,780.00	Kec. Kuta Blang
7 01 0 0 0 1 0	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	60,040,553.00	80	30,000,000.00	80	90,040,553.00	Kec. Kuta Blang
7 01 0 0 0 1 6	Kecamatan Makmur				2,683,210,000.00		2,820,818,210.00		5,504,028,210.00	
7 01 0 0 0 1 0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	2,619,218,210.00	98	2,665,818,210.00	98	5,285,036,420.00	Kec. Makmur
7 01 0 0 0 1 0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen	-	80	50,000,000.00	80	50,000,000.00	Kec. Makmur	
7 01 0 0 0 1 6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	-	45	25,000,000.00	45	25,000,000.00	Kec. Makmur	
7 01 0 0 0 1 6	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	15,001,115.00	75	20,000,000.00	75	35,001,115.00	Kec. Makmur
7 01 0 0 0 1 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	75	48,990,675.00	80	60,000,000.00	80	108,990,675.00	Kec. Makmur
7 01 0 0 0 1 7	Kecamatan Gandapura				3,657,939,000.00		3,809,172,980.00		7,467,111,980.00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 01 0 0 0 0 1 0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	3,556,772,980.00	98	3,614,172,980.00	97	7,170,945,960.00	Kec. Gandapura
7 01 0 0 0 0 1 0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persen	-	-	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	Kec. Gandapura
7 01 0 0 0 0 1 0	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di Kecamatan	Persen	-	-	45	25,000,000.00	45	25,000,000.00	Kec. Gandapura
7 01 0 0 0 0 1 0	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	Persen	70	31,164,573.00	75	35,000,000.00	75	66,164,573.00	Kec. Gandapura
7 01 0 0 0 0 1 0	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	Persen	80	70,001,447.00	90	85,000,000.00	90	155,001,447.00	Kec. Gandapura
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				12,451,986,000.00		17,937,202,673.82		30,389,188,673.82	
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				12,451,986,000.00		17,937,202,673.82		30,389,188,673.82	
8 01 0 0 0 0 0 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				12,451,986,000.00		17,937,202,673.82		30,389,188,673.82	
8 01 0 0 0 0 0 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	1,382,096,579.00	98	1,399,096,579.00	97	2,781,193,158.00	Bakesbangpol
8 01 0 0 0 0 0 1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman terhadap penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	83	93,294,333.00	93	120,000,000.00	93	213,294,333.00	Bakesbangpol

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.00.00.00.01.03	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Peserta Partai politik yang memahami mekanisme pengelolaan partai	Persen	87	10,857,617,773.00	92	16,203,106,094.82	92	27,060,723,867.82	Bakesbangpol
8.01.00.00.00.01.04	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Persen	87	14,999,715.00	92	30,000,000.00	92	44,999,715.00	Bakesbangpol
8.01.00.00.00.01.05	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase tingkat ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Persen	65	54,509,792.00	70	110,000,000.00	70	164,509,792.00	Bakesbangpol
8.01.00.00.00.01.06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase Ancamaan/deteksi dini konflik yang tertangani	Persen	60	49,467,808.00	75	75,000,000.00	75	124,467,808.00	Bakesbangpol
9	UNSUR KEKHUSUSAN ACEH				26,626,986,000.00		24,627,013,614.00		51,253,999,614.00	
9.01	KEAGAMAAN				26,626,986,000.00		24,627,013,614.00		51,253,999,614.00	
9.01	Dinas Syariat Islam				10,518,106,000.00		7,464,736,987.00		17,982,842,987.00	
9.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persen	96	2,442,536,987.00	98	2,464,736,987.00	97	4,907,273,974.00	DSI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Kabupaten Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 01 0 0 0 0 0 0 2	Program Syariat Islam Aceh	Jumlah Gampong yang mengadakan pengajian rutin	Gampong	609	8,075,569,013.00	609	5,000,000,000.00	609	13,075,569,013.00	DSI
9 01 0 0 0 0 0 0 2	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama				2,530,867,000.00		2,569,868,065.00		5,100,735,065.00	
9 01 0 0 0 0 0 0 2 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	1,945,868,065.00	98	1,969,868,065.00	97	3,915,736,130.00	Sekretariat MPU
9 01 0 0 0 0 0 0 2 3	Program Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase sidang yang menghasilkan keputusan	Persen	90	584,998,935.00	90	600,000,000.00	90	1,184,998,935.00	Sekretariat MPU
9 01 0 0 0 0 0 0 3	Sekretariat Baitul Mal				13,578,013,000.00		14,592,408,562.00		28,170,421,562.00	
9 01 0 0 0 0 0 0 3 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	96	1,458,008,562.00	98	1,472,408,562.00	97	2,930,417,124.00	Baitul Mal
9 01 0 0 0 0 0 0 3 4	Program Baitul Mal Kabupaten Bireuen	Jumlah Mustahik	orang	30,975	12,120,004,438.00	32,000	13,120,000,000.00	62,975	25,240,004,438.00	Baitul Mal
			JUMLAH		2,053,767,638,000.00		2,055,276,648,754.30		4,108,824,286,754.30	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Program Prioritas dan Pendanaan Program pada Bab VII, selanjutnya akan ditetapkan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMK dapat dicapai. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (IKK) secara rinci dapat dilihat pada tabel 8.1 yang tersaji dibawah ini.

Tabel 8.1
Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	REALISASI		TARGET TAHUN		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Penerapan Syariat Islam	Indeks	N/A	N/A	N/A	0,97	0,95
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,37	72,27	72,28	72,29	72,3
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,17	9,27	9,28	9,29	9,30
4	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,92	71,16	71,22	71,3	71,38
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	Persen	4,33	5	2.5	3	3.3
6	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,52	3,88	4.15	4.00	3.95

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	REALISASI		TARGET TAHUN		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Persentase penduduk miskin	Persen	14,31	13,56	13,06	12,56	12,06
8	Tingkat Inflasi	Persen	2,05	1,20	2,5	3	2,7
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	64,96	67,1	67,20	67,09	67,1
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	N/A	N/A	N/A	CC	CC
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	SKOR	C	C	B	B	B
13	Persentase pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	Persen	N/A	N/A	N/A	70	75
14	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	N/A	N/A	N/A	69	70
15	Persentase Masyarakat yang menggunakan hak pilih	Persen	77	77,9	77,9	77,9	80,05
16	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	N/A	N/A	N/A	1,3	1,1
17	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,64	94,92	94,90	94,91	94,92

Tabel 8.2
 Capaian dan Target Indikator Kinerja Daerah
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2018-2020 Kabupaten Bireuen

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE						
				2018		2019		2020		
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Angka harapan hidup	Tahun	70,8	70,88	70,92	70,96	71,16	71,22	71,22	71,22
2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,16	9,17	9,17	9,18	9,27	9,28	9,28	9,28
3	Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,8	14,83	14,81	14,86	14,82	14,83	14,83	14,83
4	Jumlah Rumah Tangga Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)	Rumah Tangga	14.561	15.700	15.700	16.700	16.300	17.200	17.200	17.200
5	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	Kawasan	1	2	0	4	1	6	6	1
6	Jumlah koperasi aktif	Koperasi	200	40	205	80	169	80	80	173
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Jumlah lembaga ekonomi gampong aktif	Lembaga	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Luas Daerah Irigasi	Ha	14,210.00	0		735	735	800	800	800

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
3	Panjang jalan dan jembatan	Meter	79,573	37,119	37,119	75,345	75,345	80,158	80,158
4	Luas lahan konservasi sungai, danau dan sumber daya air	Persentase	55	57	57	60	60	65	65
5	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Angkatan	15	5	5	5	5	7	7
6	Jenis usaha kreatifitas	Jenis Usaha	10	10	10	10	10	10	10
7	Produksi dan Produktivitas Perikanan Budidaya	Ton	11,700	12,000	11,847	12,500	12,386	13,000	12,581
8	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	11,064	11,500	11,600	12,000	12,800	12,000	13,160.14
9	Populasi ternak, produksi ayam potong dan telur	Ekor	877.668	1.038.466	1.038.466	1.174.811	1.174.811	1.272.366	1.272.366
		Kg	79.389	85.277	85.277	88.34	88.34	91.13	91.13
		Butir	410	462	462	468.08	468.08	473.28	473.28

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
10	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	UMKM	50	50	50	135	135	150	150
11	Jumlah pelayanan kesehatan hewan dan aktifitas Puskesmas	Ekor	17.394;8	16,483;8	16,483;8	16,622;8	16,622;8	16,849;8	16,849;8
12	Jumlah Qari/Qariah	orang							
III	URUSAN WAJIB								
III.1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
A.	PENDIDIKAN :								
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
2	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
3	Jumlah pembinaan dan pelatihan	Angkatan	4	2	2	5	5	5	5

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	kepemudaan								
4	Jumlah pelatihan manajemen dan olahraga	Pelatihan	3	1	1	3	3	3	3
5	Jumlah pembinaan dan pelatihan atlit dan pelatih	Orang	0	40	40	40	40	40	40
6	Persentase sarana olahraga	Persentase	40	42	42	44	44	44	44
7	Kelompok usia cabang olahraga sepak bola	Kelompok usia	3	3	3	3	3	3	3
8	Jumlah event budaya daerah	event	0	1	1	1	1	1	1
9	Jumlah sanggar seni budaya dan kebudayaan daerah	Sanggar	1	1	1	1	1	1	1
10	Jumlah event budaya daerah	event	6	1	1	4	4	4	4
11	Jumlah Event pemasaran pariwisata	Event	1	1	1	2	2	2	2
12	Jumlah destinasi wisata	Destinasi wisata	22	22	22	22	22	22	22
13	Jenis usaha	Jenis Usaha	10	10	10	10	10	10	10

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	kreatifitas								
B.	KESEHATAN								
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintahan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
2	Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
3	Jumlah Jamaah Haji, Jumlah orang Gangguan Jiwa atau Kelompok Khusus mendapat layanan kesehatan yang layak	Orang	2.559	2.559	2.559	2.559	2.559	2.559	2.559
4	Jumlah Kepesertaan JKN	Orang	407.222	438	438	439	439	439	439
5	Jumlah Rumah Tangga Prilaku Hidup Bersih	Rumah Tangga	14.561	15.7	15.7	16.3	16.3	16.3	16.3

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	Sehat (PHBS)								
6	Jumlah Keluarga Sehat	Keluarga Sehat	6.110	40.547	40.547	55.771	55.771	55.771	55.771
7	Jumlah angka kematian ibu, bayi dan anak balita	Orang	159	140	140	135	135	135	135
8	Jumlah Kasus Kurang Gizi, Gizi Buruk dan Stunting	Orang	903	850	850	750	750	750	750
9	Persentase sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase	70	75	75	80	80	80	80
10	Jumlah desa yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi dalam waktu < 24 jam	Desa	609	609	609	609	609	609	609
11	Persentase puskesmas yang melaksanakan	Persentase	50	60	60	70	70	70	70

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	Pandu PTM								
12	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	PKM	4	13	13	20	20	20	20
13	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71	71	71	71	71	71	71
C.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :								
1	Panjang jalan dan jembatan yang direhabilitasi	Meter	151,350.00	18,401.00	18,401.00	20,780	20,780	22,148	22,148
2	panjang jalan dan jembatan perdesaan	Meter	5	1.25	1.25	1.583	1.583	1.6	1.6
3	Luas areal sawah teraliri	Persentase	55	57	57	60	60	65	65
4	Persentase layanan air minum layak	Persentase	72	80	80	85	85	90	90
5	Persentase pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh	Persentase	60	65	65	70	70	75	75
6	Panjang saluran dan gorong-gorong	Meter	450	500	500	550	550	600	600

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
7	Persentase pengendalian areal banjir	Persentase	50	55	55	60	60	65	65
8	Persentase tahapan perencanaan tata ruang	Persentase	30	35	35	40	40	45	45
D.	PEKERJAAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKINAN :								
1	Jumlah dokumen data dan informasi lingkungan hidup	Dokumen	3	0	0	1	1	2	2
2	Persentase luas lahan resapan air	Persentase	10	15	15	20	20	25	25
3	Persentase pemeliharaan ruang terbuka hijau	Persentase	50	55	55	60	60	65	65
4	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Persentase	76	80	80	83	83	86	86
E.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT :								

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Orang	180	182	182	184	184	186	186
2	Jumlah pelanggaran qanun	Kasus	36	33	33	30	30	27	27
3	Jumlah hari besar satpol	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1
F.	SOSIAL								
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase	0,5	0,85	0,85	0,95	0,95	1	1
2	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial	Lembaga sosial	3	3	3	3	3	4	4
3	Jumlah warga penyandang cacat dan trauma	Orang	102	77	77	100	100	110	110
4	Jumlah Panti sosial dan panti Jompo	Unit	11	11	11	11	11	11	11
5	Jumlah PMKS	Orang	688	678	678	668	668	658	658

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	skala yang memperoleh bantuan sosial								
6	Persentase Fakir miskin, korban bencana dan PMKS lainnya	Persentase	25	27	27	30	30	32	32
7	Tersedianya operasional TRC	orang	24	24	24	25	25	26	26
8	Jumlah pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Pelatihan	1	1	1	1	1	2	2
9	Tersedianya operasional pencegahan bahaya kebakaran	orang	47	48	48	50	50	55	55
10	Persentase wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi	Persentase	60	65	65	0	0	0	0
IV	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
A.	Tenaga Kerja								

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Persentase pengembangan dan Peningkatan SDM	Persentase	35	40	40	45	45	50	50
2	Persentase pengembangan kawasan	Persen	50	55	55	60	60	65	65
3	Jumlah lokasi transmigran swakarsa	Lokasi	1	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah pembinaan IKM	IKM	241	67	67	100	100	100	100
5	Jumlah pembinaan IKM	Kegiatan	0	0	0	3	3	1	1
6	Jumlah promosi daerah	Kegiatan	4	3	3	3	3	3	3
B.	PANGAN :								
1	Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Kelompok	35	13	0	20	1	20	0
		Gapoktan	5	6		8		10	
2	Jumlah Sosialisasi Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	Pemangku Adat Laot	11	11	3	11	3	11	0

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
		Orang	-	200		200		200	
C.	PERTANAHAN :								
1	Persentase pendataan kepemilikan tanah asset Pemkab	Persentase	0	30	30	40	40	45	45
2	Jumlah tanah asset pemkab yang tersertifikasi	Sosialisasi Sertifikat	0	1	1	1	1	1	1
				0	0	150	150	150	150
3	Persentase pengembangan system informasi pertanahan	Persentase	0	0	0	35	35	0	0
4	Jumlah Konflik Tanah	Konflik Tanah	0	0	0	0	0	10	10
D.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL :								
1	Persentase Cakupan database kependudukan	Persentase	76	85	85	87	87	90	90

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
E	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :								
1	Persentase pemilihan aparatur gampong	Persentase	50	60	60	70	70	80	80
2	Jumlah akseptor KB	Akseptor	62.912	64.912	64.912	66.912	66.912	68.253	68.253
3	Persentase sarana pelayanan KB	Persentase	30	35	35	60	60	70	70
4	Jumlah pelatihan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Pelatihan	0	17	17	17	17	17	17
5	Persentase penguatan lembaga pengarusutamaan gender dan anak	Persentase	5	10	10	15	15	20	20
6	Jumlah kasus KDRT	Kasus	23	23	23	21	21	19	19
7	Persentase peran serta kaum marginal dalam pembangunan	persentase	10	15	15	20	20	25	25
8	Jumlah PKK Kecamatan	Kecamatan	17	17	17	17	17	17	17

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
9	Persentase penyerapan APBG	Persentase	60	65	65	70	70	75	75
10	75 Imum Mukim dan 75 Tuha Peut Mukim	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
F.	PERHUBUNGAN :								
1	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan	unit	5	1	1	0	0	2	2
2	Persentase Jumlah pengamanan lalu lintas	Persentase	50	55	55	60	60	65	65
3	Jumlah dokumen analisis peningkatan manajemen transportasi	dokumen	0	0	0	12	12	12	12
4	Persentase meningkatnya pelayanan angkutan umum	Persentase	50	55	55	60	60	65	65
5	Jumlah alat uji kendaraan umum	Buku uji	2500	4000	4000	5000	5000	5500	5500
		Plat uji	5000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
		stiker	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2500
6	Jumlah aparatur	orang	0	0	0	6	6	6	6

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
7	Persentase peningkatan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase	70	72	72	74	74	76	76
G.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :								
1	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelatihan informasi	Kec	1	2	2	3	3	3	0
2	Jumlah Masyarakat yang memiliki wawasan informasi	Pelatihan	0	1	1	0	0	2	2
3	Persentase peningkatan akses informasi masyarakat	Persentase	70	74	74	78	78	82	82
4	Persentase peningkatan sarana dan prasarana teknologi informatika	Persentase	0	0	0	0	0	35	35

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
5	Jumlah frekuensi BHP daerah	frekuensi	2	2	2	0	0	2	2
6	Jumlah publikasi melalui massa	publikasi	1	1	1	1	1	1	1
7	Jumlah sosialisasi dan pelatihan	Pelatihan / sosialisasi	0	1	1	2	2	2	2
8	Jumlah dokumen informasi dan komunikasi	Dokumen	0	1	1	0	0	1	1
H.	PENANAMAN MODAL :								
1	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kegiatan	2	0	0	4	4	5	5
2	Jumlah Dokumen Kajian Investasi	Dokumen	0	0	0	3	3	2	2
3	Jumlah Perizinan	Perizinan	2,500	2,600	2,600	2,700	2,700	2,800	2,800
4	Persentase Promosi	Persentase	50	55	55	60	60	65	65
5	Indeks Pemahaman Konsumen	Persen	50	85	85	90	90	90	90
6	Jumlah PKL dan Asongan	Orang	104	69	69	70	70	75	75

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
7	Jumlah Pasar dan Operasi Pasar	Kecamatan / Pasar	17	17	17	17	17	17	17
I.	PERPUSTAKAAN :								
1	Jumlah Tenaga Perpustakaan	Orang	15	16	16	17	17	18	18
2	Persentase SKPK yang mengelola arsip secara baku	Persentase	39	50	50	55	55	60	60
3	Jumlah Arsip Daerah	Arsip	8	8	8	8	8	8	8
4	Jumlah kunjungan perpustakaan umum daerah	Orang	5673	5798	5798	6301	6301	6847	6847
IV	URUSAN PILIHAN								
A.	PERTANIAN								
1	Jumlah pelaku usaha dan pelaku utama	Orang	125	50	50	150	150	150	0
2	Produktivitas ketahanan Pangan Komoditas Pajale	Kwintal/ Hektar	115,25	0	117.5	115,66	119.25	115,77	123.3

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
3	Panjang Sarana Jalan Perkebunan dan kegiatan promosi produk unggulan	Meter dan Kali	18700;1	17075;1	17075;1	6500;1	6500;1	7000;1	7000;1
4	Jumlah Alsintan dan Infrastruktur Pertanian	Unit dan Meter	7 ; 3500	12 ; 4800	8;5150	6 ; 3000	4;6.110	8 ; 3500	10;4.837
5	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan (kelapa, Karet dan Kakao)	Ton	246.571;17.038	246.571;17.038	260.871:17,50	249.948;17.038	278.09719.243	255.270;17.038	257.63619.298
6	Jumlah Sarana BPP dan SDM Penyuluh	BPP	17;56	17;56	17;40	17;56	17;56	17;56	17;0
7	Jumlah Sarana dan prasarana pasar ternak, RPH dan Kontes Ternak	Paket	2	2	2	1	1	1	1
		Kali	1	1	1	1	1	1	1
8	Jumlah Kelembagaan Petani	Lembaga	50	6	6	0	0	12	12

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
V	PENUNJANG URUSAN								
A.	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Jumlah Event Pemberdayaan keagamaan dan keistimewaan aceh	Event	17	17	17	17	17	17	17
2	Jumlah Kecamatan eksplorasi minyak, gas dan air	Kec	5	5	5	5	5	5	5
3	Persentase pengembangan perdesaan	Persentase	45	50	50	0	0	50	50
4	Jumlah Pelatihan Pengetahuan Perundang-Undangan	Pelatihan	1	1	1	1	1	2	2
5	Jumlah Produk Hukum	Produk Hukum	38	552	552	550	550	550	550
6	Jumlah kerjasama informasi	Event	6	7	7	7	7	7	7
7	Jumlah bahan	Bahan	15	32	32	15	15	15	15

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	bacaan	bacaan							
8	Jumlah naskah protokoler Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Naskah	384	384	384	390	390	395	395
9	Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan Daerah	Dokumen	6	4	4	5	5	5	5
10	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian	persentase	30	50	50	65	65	80	80
11	Persentase Kinerja Fisik dan Keuangan Daerah	Dokumen	2	2	2	3	3	3	3
12	Persentase peningkatan harga pasar dan jumlah akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Kinerja Fisik dan Keuangan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
14	Jumlah dokumen kinerja keuangan	Dokumen	2	3	3	3	3	3	3

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	daerah								
15	Jumlah Paket Lelang	Paket	190	210	210	250	250	250	250
16	Jumlah Beasiswa bagi mahasiswa keluarga miskin	Kegiatan	2	1	1	3	3	3	3
17	Jumlah keluarga penerima manfaat	Kec	17	17	17	17	17	17	17
18	Persentase penanganan pengadaan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100
19	Jumlah Sertifikasi Tanah	Sertifikasi	2	4	4	5	5	5	5
20	Jumlah penyelesaian batas wilayah	Lokasi Perbatasan	1	1	1	1	1	1	1
21	Jumlah Event Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tahun	1	1	1	1	1	1	1
22	Jumlah hari-hari besar	Hari besar	8	7	7	8	8	8	8
B.	SEKRETARIAT DPRK								
1	Persentase peningkatan	Persentase	100	100	100	100	100	1	1

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	kapasitas kelembagaan dewan								
2	Jumlah tahun kerjasama dengan massmedia	Tahun	0	1	1	0	0	0	0
C. PENGAWASAN									
1	Jumlah dokumen laporan keuangan LPPD dan laporan kinerja	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3
2	Tingkat Kapabilitas pengawasan internal pemerintah	Level	2	2	2	3	3	3	3
3	Jumlah auditor yang mendapatkan pelatihan	Orang	12	6	6	6	6	6	6
D. PERENCANAAN									
1	Persentase tahapan proses perencanaan pembangunan	Persentase	60	65	65	70	70	75	75

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	daerah								
2	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	Persentase	60	65	65	70	70	75	75
3	Jumlah rekomendasi tata ruang yang dikeluarkan	rekomendasi	35	30	30	50	50	50	-
E.	KEUANGAN								
1	Persentase Kinerja Fisik dan Keuangan Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kenaikan PAD per tahun	Persentase/ kegiatan	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kenaikan PBB dan retribusi per tahun	PBB	138,566	144.418	144.418	150	150	152	152
4	Persentase kenaikan wajib Pajak dan wajib retribusi per tahun	Wajib Pajak/ wajib Retribusi	0	0	0	800	800	0	0
			0	0	0	650	650	0	0

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
F.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Jumlah angkatan pendidikan kedinasan	Angkatan	4	1	1	3	3	3	3
2	Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan	Kegiatan	3	5	5	3	3	3	3
VI	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
A.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Persentase pendidikan politik masyarakat	Persentase	45	50	50	55	55	60	60
2	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti pengembangan wawasan	Persentase	70	75	75	80	80	80	80

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
3	Jumlah kasus pelanggaran kebangsaan	kasus	13	8	8	8	8	7	7
4	Jumlah kasus keamanan dan kenyamanan lingkungan	kasus	8	9	9	15	15	15	15
VII	KEISTIMEWAAN DAN KHUSUSAN ACEH								
A.	KEISTIMEWAAN ACEH								
1	Jumlah kloter jamaah haji	kloter	1	0	0	1	1	1	1
2	Jumlah Pelatihan pendidikan Non Formal bidang keagamaan	Pelatihan	2	2	2	1	1	2	2
3	Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga	186	186	186	188	188	190	190
4	Jumlah kegiatan pembinaan	Kegiatan	0	0	0	1	1	1	1
5	Jumlah kecamatan yang mendapat kegiatan	Kegiatan	17	17	17	17	17	17	17

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	pembinaan								
6	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelatihan pemahaman wawasan syariat Islam	Kecamatan	17	17	17	0	0	17	17
7	Jumlah dayah/balai pengajian	Dayah/BP	105	92	92	100	100	105	105
8	Jumlah kegiatan Pemberdayaan santri	Kegiatan	3	2	2	0	0	3	3
9	Jumlah pendidik dayah	orang	1.1	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
10	Jumlah tenaga manajemen dayah	Orang	160	0	0	160	160	165	165
11	Jumlah aplikasi teknologi informasi dayah	Aplikasi	0	0	0	0	0	1	1
12	Jumlah dayah terakreditasi	Dayah	135	0	0	135	135	0	0
13	Jumlah sidang mubahasah	sidang	1	2	2	2	2	2	2

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
14	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Pelatihan	0	0	0	3	3	1	1
15	Jumlah Buletin/Buku Budaya Daerah	Dokumen	0	1	1	0	0	2	2
16	Jumlah Event Pelestarian Adat Budaya Daerah	Event	0	1	1	3	3	2	2
17	Jumlah Pembinaan Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pembinaan	35	25	25	35	35	35	35
18	Jumlah jenis media informasi pendidikan	Jenis	3	3	3	0	0	3	3
19	Jumlah penerimaan zakat	orang	19,000	19,000	25,349	30	19,709	30	9,917
20	Jumlah publikasi informasi pengelolaan zakat	bulan	12	12	12	12	12	12	12
21	Jumlah penerimaan besaran zakat	Juta Rupiah	0	0	6,938.08	6	4,802.18	6	4,661.88
VIII	KEWILAYAHAN								

NO	INDIKATOR	STANDAR KINERJA (SATUAN)	KONDISI AWAL	TAHUN KE					
				2018		2019		2020	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
A.	KECAMATAN								
1	Jumlah peringatan hari besar tingkat kecamatan	Event	51	51	51	51	51	51	51
2	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan yang aspiratif	persentase	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah gampong pelaksanaan Monev	Gampong	609	609	609	609	609	609	609
4	Jumlah tenaga telatih program MPM	Orang	0	1.252	1.252	0	0	1.252	0

Tabel 8.3
 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021-2022
 Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Kabupaten Bireuen

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	Persen	3	3,3	3,3	Indikator Tujuan	Disnakertrans, DPPKUKM, DLHK, Baitul mal, Dinas Sosial, DPMGPKB, DPKP, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bagian Ekonomi, ULP, dan ADM Pembangunan, DPMPSTSP dan BPKD
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,29	72,30	72,30	Indikator Tujuan	Dinas PK, MPA, dan Dinas PerpusArsip, Dinas Kesehatan dan RSUD Fauziah
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,29	9,30	9,30	Indikator sasaran	Dinas PK, MPA, dan Dinas Perpustakaan Arsip.

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
4	Angka harapan hidup	Tahun	71,30	71,38	71,38	Indikator sasaran	Dinas Kesehatan dan RSUD Fauziah
5	Persentase penduduk miskin	Persen	12,56	12,06	12,06	Indikator sasaran	Baitul mal, Dinas Sosial, Disnakertrans, dan DPMGPKB
6	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,91	94,92	94,92	Indikator sasaran	DPMGPKB
7	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	92	95	95	Indikator sasaran	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
8	Tingkat Inflasi	Persen	3	2,7	2,7	Indikator Sasaran	DPPKUKM, Bagian Ekonomi, ULP, dan ADM Pembangunan
Unsur Kekhususan							
9	Jumlah Mustahik	Orang	30.975	32	32	Indikator Program	Baitul Mal
Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar							
Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak							
10	Persentase Kesetaraan Gender di Lembaga Pemerintahan	Persen	49	74	74	Indikator Program	DPMGPKB
11	Persentase kasus kekerasan perempuan yang tertangani	Persen	100	100	100	Indikator Program	DPMGPKB

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
12	Cakupan penangan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	Persen	90	95	95	Indikator Program	DPMGPKB
13	Adanya ketersediaan system informasi keluarga penyuluhan, advokasi keluarga berencana dan ketahanan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Indikator Program	DPMGPKB
14	Persentase Gampong Layak Anak	Persen	25	45	45	Indikator Program	DPMGPKB
15	Persentase kasus kekerasan anak yang tertangani	Persen	85	90	90	Indikator Program	DPMGPKB
Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup							
16	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Orang	30	60	90	Indikator Program	Dinas LH dan Kehutanan
Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana							
17	Persentase peningkatan aseptor KB aktif	persen	32	55	55	Indikator Program	DPMGPKB
18	Persentase desa yang memiliki kelompok Tribina	Persen	24,6	27,9	58,45	Indikator Program	DPMGPKB

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah							
19	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah	Kopera si	-	20	20	Indikator Program	Disperindagkop
Urusan pemerintahan bidang perpustakaan							
20	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	7.038	7.28	14.318	Indikator Program	Dinas Perpustakaan
Urusan pemerintahan pilihan							
Urusan pemerintahan bidang perdagangan							
21	Terkendalnya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Ya/Tid ak	Ya	Ya	Ya	Indikator Program	Disperindagkop
Urusan pemerintahan bidang transmigrasi							
22	Persentase pengembangan kawasan Transmigrasi	Persen	-	39,35	39,35	Indikator Program	Disnakertrans
23	Persentase UPT mandiri	Persen	50	50	50	Indikator Program	Disnakertrans
Unsur pendukung urusan pemerintah							
Sekretariat Daerah							

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
24	Cakupan Layanan Administrasi Umum	persen	90	95	95	Indikator Program	Bagian ekonomi, ULP, dan adm pembangunan
II	ASPEK LAYANAN UMUM						
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	CC	CC	Indikator Tujuan	Seluruh SKPK
2	Persentase dayah yang terakreditasi	Persen	93	95	95	Indikator Sasaran	Dinas Pendidikan Dayah
3	Jumlah kasus konflik antar dan intra umat beragama	Kasus	1 (Intra)	0	0	Indikator Sasaran	Kesbangpol
4	Jumlah produk hukum daerah yang mengatur tentang perlindungan konsumen	Perbub	1	1	1	Indikator Sasaran	Disperindagkop
5	Jumlah bidang urusan pemerintahan yang menggunakan kearifan lokal	Urusan	5	5	5	Indikator sasaran	Dinas PK, Dinsos, Dinas PerpusArsip, DLHK, DPMGPKB, dan MAA
6	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	Indikator sasaran	BPKD dan Inspektorat
7	Indeks Perencanaan	Indeks	80.5	82.25	82.25	Indikator sasaran	Bappeda
8	Persentase Raqan yang disahkan menjadi Qanun	Persen	20	21	21	Indikator sasaran	Sekretariat DPRK

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
9	Persentase kebijakan inovasi yang dikembangkan dalam pembangunan	Persen	20	50	50	Indikator sasaran	Bappeda
10	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Skor	B	B	B	Indikator sasaran	Seluruh SKPK
11	Persentase pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan	Persen	70	75	75	Indikator Tujuan	Dinas PUPR, Dishub, Perkim, DLHK, dan Dinas Pertanahan
12	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	69	70	70	Indikator sasaran	Dinas PUPR, Perkim dan Dishub
13	Luas kawasan lindung	Ha	40.647,38	40.647,38	40.647,38	Indikator sasaran	Dinas LH dan Hut
14	Luas daerah yang irigasi	Ha	2.878,22	2.878,22	2.878,22	Indikator sasaran	Dinas PUPR
15	Persentase pelayanan pertanahan yang tertangani	Persen	85	90	90	Indikator sasaran	Dinas Pertanahan
16	Indeks kualitas lingkungan hidup (Air, udara, dan tanah)	Indeks	80	81	81	Indikator sasaran	Dinas LH dan Hut
17	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	1,3	1,1	1,1	Indikator Tujuan	Pol PP & WH, Bankesbangpol, Dinsos, BPBD, dan DPMGPKB
18	Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	Persen	77,9	80,05	80,05	Indikator sasaran	Bakesbangpol

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
19	Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan	Persen	0,8	0,9	0,9	Indikator sasaran	Satpol PP, Dinas Sosial dan BPBD
Unsur Kekhususan							
20	Cakupan pembinaan Syariat Islam	Indeks	100	100	100	Indikator Tujuan	DSI, MPU, Disdikdayah, dan Bakesbangpol
21	Indeks Penerapan syariat islam	Indeks	0,97	0,95	0,95	Indikator Sasaran	DSI dan MPU
22	Jumlah Gampong yang mengadakan pengajian rutin	Gapon g	609	609	609	Indikator Program	DSI
23	Persentase kasus pelanggaran qanun yang diselesaikan	Persen	90	92	92	Indikator Program	Pol PP dan WH
24	Persentase Sidang yang menghasilkan keputusan	sidang	90	90	90	Indikator Program	Sekreteriat MPU
25	Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Persen	-	100	100	Indikator Program	Seluruh Kecamatan
26	Jumlah Pembinaan Adat dan Adat Istiadat	Pelatih an	3	4	7	Indikator Program	MAA
Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar							
Urusan pemerintahan bidang pendidikan							

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
27	Persentase sekolah/Dayah yang menerapkan pendidikan berkarakter	Persen	50	55	55	Indikator Program	MPA
28	Jumlah Dayah yang naik kelas	Dayah	135	135	135	Indikator Program	Dinas Pendidikan Dayah
29	APM Pendidikan dasar 9 tahun	Nilai	99,38	99,43	99,43	Indikator Program	Dinas PK
30	Persentase sekolah yang menerapkan muatan lokal	Persen	-	75	75	Indikator Program	Dinas PK
31	Persentase Jumlah Guru yang Berkompetensi	Persen	80	86	86	Indikator Program	Dinas PK
	Urusan pemerintahan bidang kesehatan						
32	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	SKOR	B	B	B	Indikator Program	Dinkes & RSUD
33	Pemerataan SDM dan Kompetensi serta Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	PKM	20	20	20	Indikator Program	Dinkes
34	Persentase Pemerataan SDM dan Kompetensi serta Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	80	85	85	Indikator Program	RSUD

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
35	Pengawasan sarana Kefarmasian, makanan minuman dan perizinan obat tradisional	Sarana	187	196	196	Indikator Program	Dinkes
36	Pengawasan sarana Kefarmasian, Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	UKBM	1.181	1.181	1.181	Indikator Program	Dinkes
	Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang						
37	Jumlah aparatur jasa konstruksi yang bersertifikat	Orang	175	225	400	Indikator Program	Dinas PUPR
38	Persentase kondisi IPAL terpusat dalam kondisi baik	Persen	70	76	76	Indikator Program	Dinas PUPR
39	Persentase kawasan perkotaan dan lingkungan yang tertangani banjir	Persen	60	70	70	Indikator Program	Dinas PUPR
40	Persentase Gedung Pemerintah yang terbangun	Persen	40	45	45	Indikator Program	Dinas PUPR

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
41	Persentase Gedung Pemerintah dan lingkungannya yang terpelihar	Persen	-	80	80	Indikator Program	Dinas PUPR
42	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan dengan Perencanaan Penataan Ruang	Persen	60	70	70	Indikator Program	Dinas PUPR
43	Proporsi jalan dalam kondisi baik	Km	586,58	610,10	610,10	Indikator Program	Dinas PUPR
44	Cakupan akses air minum	Persen	75	80	80	Indikator Program	Dinas PUPR
45	Persentase cakupan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian	Persen	70	75	75	Indikator Program	Dinas PUPR
	Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman						
46	Jumlah rumah layak huni	Unit	175	177	352	Indikator Program	Perkim
47	Persentase kawasan permukiman kumuh	Persen	57	57	57	Indikator Program	Perkim

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
48	Persentase kawasan perumahan dengan kondisi PSU yang layak	Persen	45	47	47	Indikator Program	Perkim
49	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang memiliki sertifikasi	Penge mbang perusa haan	-	2	2	Indikator Program	Perkim
	Urusan pemerintahan bidang sosial						
50	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana taman makam pahlawan	Persen	70	75	75	Indikator Program	Dinsos
51	Persentase terpenuhinya kebutuhan anak terlantar dan tersedianya data fakir miskin	Persen	80	85	85	Indikator Program	Dinsos
52	Persentase kemampuan potensi sumber kesejahteraan dalam pemberdayaan sosial masyarakat	Persen	80	85	85	Indikator Program	Dinsos
53	Persentase Penyediaan dan pemberian bagi penyandang rehabilitasi sosial	Persen	80	85	85	Indikator Program	Dinsos

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
54	Tertanganinya sandang dan pangan korban bencana	Persen	90	95	95	Indikator Program	Dinsos
Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar							
	Urusan pemerintahan bidang pertanahan						
55	Jumlah kasus Sengketa Tanah yang tertangani	Kasus	-	4	4	Indikator Program	Dinas Pertanahan
56	Persentase Tanah yang bersertifikat	Persen	54	66	66	Indikator Program	Dinas Pertanahan
57	Persentase Data Tanah Kosong	persen	-	60	60	Indikator Program	Dinas Pertanahan
58	Persentase Penatagunaan Tanah sesuai dengan peruntukannya	Persen	-	55	55	Indikator Program	Dinas Pertanahan
59	Persentase pengadaan tanah yang difasilitasi	Persen	80	90	90	Indikator Program	Dinas Pertanahan
60	Persentase masyarakat terdampak yang disantuni	Persen	90	95	95	Indikator Program	Dinas Pertanahan
61	Persentase tanah terlantar dan absente yang didistribusi	persen	54	66	66	Indikator Program	Dinas Pertanahan
62	Persentase kasus konflik dan sengketa yang ditangani	Persen	80	85	85	Indikator Program	Dinas Pertanahan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup						
63	Indeks Kualitas Air	Indeks	0<1	0<1	0<1	Indikator Program	Dinas LH dan Hut
64	Persentase limbah B3 yang ditangani	Persen	90	95	95	Indikator Program	Dinas LH dan Hut
65	Persentase timbulan sampah yang tertangani	persen	88	90	90	Indikator Program	Dinas LH dan Hut
	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil						
66	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	97,5	98	98	Indikator Program	Disdukcapil
67	Cakupan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Persen	95	98	98	Indikator Program	Disdukcapil
68	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	95	98	98	Indikator Program	Disdukcapil
69	Profil Kependudukan	Doku men	1	1	2	Indikator Program	Disdukcapil

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa						
70	Adanya fasilitasi permasalahan gampong dan penataan gampong	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Indikator Program	DPMGPKB
71	Persentase desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan dan Sistem pengelolaan keuangan yang baik	Persen	85	87	87	Indikator Program	DPMGPKB
72	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif	Lemba ga	5	5	5	Indikator Program	DPMGPKB
	Urusan pemerintahan bidang perhubungan						
73	Persentase pelayanan lalu lintas	Persen	65	70	70	Indikator Program	Dishub
	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika						

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
74	Peringkat Nilai Keterbukaan Informasi Publik.	Peringkat	97 (Menuju informatif)	97 (Menuju informatif)	97 (Menuju informatif)	Indikator Program	Diskominfo
75	Indeks SPBE	Nilai	1,8 (cukup)	2,6 (baik)	2,6 (baik)	Indikator Program	Diskominfo
	Urusan pemerintahan bidang statistik						
76	Persentase Ketersediaan Data Statistik sektoral	Persen	100	100	100	Indikator Program	Diskominfo
	Urusan pemerintahan bidang persandian						
77	Indeks Keamanan Informasi (KAMI).	Tingkat	I+	II	II	Indikator Program	Diskominfo
	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan						
78	Peningkatan jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisir	Persen	50	60	60	Indikator Program	Dinas PK
79	Jumlah kelompok kesenian yang dibina	Kelompok	20	25	45	Indikator Program	Dinas PK

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
80	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya yang tertangani	Persen	70	80	80	Indikator Program	Dinas PK
81	Persentase museum yang dikelola	Persen	100	100	100	Indikator Program	Dinas PK
	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan						
82	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	7.038	7.28	14.318	Indikator Program	Dinas Perpustakaan
	Urusan pemerintahan bidang kearsipan						
Unsur pendukung urusan pemerintahan							
	Sekretariat Daerah						
83	Cakupan Rekomendasi/ Naskah Dinas yang terselesaikan	persen	90	100	100	Indikator Program	Setda, Sosial kemasyarakatan, hukum, Perekonomian Daerah, Adm. Pembangunan, Orpeg dan Tapem
84	Cakupan Layanan Administrasi Umum, Organisasi, Protokoler, Perencanaan dan Keuangan	persen	90	100	100	Indikator Program	Setda, Tapem, orpeg, Umum, dan Humas,
	Sekretariat DPRK						
85	Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	Persen	60	65	65	Indikator Program	Sekretariat DPRK

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
Unsur penunjang urusan pemerintahan							
Perencanaan							
86	Persentase Kesesuaian Penganggaran antara APBD dengan RPJM	Persen	90	95	95	Indikator Program	Bappeda
87	Persentase konsistensi program antara RPJM dengan APBK	Doku men	100	100	100	Indikator Program	Bappeda
Keuangan							
88	Persentase Realisasi Kinerja Keuangan Daerah	persen	97	98	98	Indikator Program	BPKD
89	Persentase Peningkatan Manajemen Aset Daerah	persen	100	100	100	Indikator Program	BPKD
Kepegawaian							
90	Persentase Tata kelola kepegawaian sesuai Manajemen ASN	persen	70	80	80	Indikator Program	BKPSDM
Pendidikan dan pelatihan							
91	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM yang dilatih	persen	80	85	85	Indikator Program	BKPSDM
Penelitian dan pengembangan							

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
92	Persentase SKPK yang melaksanakan Penelitian dan Pengembangan	persen	85	90	90	Indikator Program	Bappeda
Unsur pengawasan urusan pemerintahan							
Inspektorat daerah							
93	Persentase Kepatuhan dalam Pelaporan Keuangan dan kinerja	persen	75	80	80	Indikator Program	Inspektorat
94	Penurunan Jumlah Kasus Kesalahan Prosedur Pengelolaan Dana APBK	kasus	6	4	4	Indikator Program	Inspektorat
Unsur Kewilayahan							
Kecamatan							
95	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum	persen	70	75	75	Indikator Program	Seluruh Kecamatan
96	Persentase desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	persen	80	90	90	Indikator Program	Seluruh Kecamatan
97	Cakupan koordinasi pelayanan publik di tingkat kecamatan	Indeks	100	100	100	Indikator Program	Seluruh Kecamatan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
Unsur pemerintahan umum							
Kesatuan bangsa dan politik							
98	Persentase peserta partai politik yang memahami mekanisme pengelolaan partai	Persen	87	92	92	Indikator Program	Kesbangpol
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
99	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67,09	67,1	67,1	Indikator Tujuan	Disnakertrans
100	Persentase tingkat pengangguran Terbuka	Persen	4	3,95	3,95	Indikator Sasaran	Disnakertrans
101	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Milyar Rupiah	4.441,6	4.670,8	4.670,8	Indikator Sasaran	Dinas Pertanian
102	Jumlah UMKM dan Koperasi yang diberdayakan	UMKM dan Koperasi	230	260	315	Indikator Sasaran	DPPKUKM
103	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Juta Rupiah	235,98	248,89	248,89	Indikator Sasaran	DPPKUKM
104	Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah	Persen	7,8	7,75	7,75	Indikator Sasaran	BPKD

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
105	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	92	95	95	Indikator sasaran	Disporapar
106	Jumlah destinasi wisata	Destinasi	54	65	65	Indikator sasaran	Disporapar
Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar							
	Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat						
107	Persentase Upaya Pengurangan Kerentanan/Darurat Bencana dan Penanganan Bencana	Persen	100	100	100	Indikator Program	BPBD
108	Persentase Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran.	Persen	100	100	100	Indikator Program	BPBD
Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar							
	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja						

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
109	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	144	160	224	Indikator Program	Disnakertrans
110	Jumlah Pencari Kerja yang telah ditempatkan	Orang	150	200	200	Indikator Program	Disnakertrans
111	Jumlah karyawan dan pelaku usaha yang mengikuti Bimtek Penyelesaian Hubungan Industrial dan Bimtek Penyusunan Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Orang	50	70	70	Indikator Program	Disnakertrans
	Urusan pemerintahan bidang pangan						
112	Persentase Ketersediaan pangan utama (beras)	Persen	33,25	34,55	34,55	Indikator Program	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
113	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan	Skor	80,2	84,6	84,6	Indikator Program	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
114	Persentase Penanganan Desa yang terindikasi rawan pangan	Persen	50	66	66	Indikator Program	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
115	Persentase Pangan Segar yang aman dikonsumsi di Kabupaten Bireuen	Persen	80	85	85	Indikator Program	Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan
	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah						
116	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah	Kopera si		20	20	Indikator Program	DPPKUKM
117	Persentase Koperasi yang mendapat pengawasan	Persen	-	20	20	Indikator Program	DPPKUKM
118	Persentase Koperasi yang dinilai	Persen	-	12	12	Indikator Program	DPPKUKM
119	Persentase pengurus Koperasi yang mendapatkan pelatihan	Persen	14	21	21	Indikator Program	DPPKUKM
120	Persentase Koperasi Aktif	Persen	74.38	78.51	78.51	Indikator Program	DPPKUKM
121	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	50	75	125	Indikator Program	DPPKUKM
122	Jumlah UMKM yang naik kelas	UMKM	3	3	6	Indikator Program	DPPKUKM

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal						
123	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin	Pelaku Usaha	600	630	630	Indikator Program	DPMPTSP
124	Jumlah peningkatan pelaku usaha yang memperoleh izin	Persen	30	30	60	Indikator Program	DPMPTSP
125	Persentase Perizinan yang diterbitkan	Persen	85	90	90	Indikator Program	DPMPTSP
126	Peningkatan Realisasi Investasi	Perusahaan/ Pelaku usaha	400	700	700	Indikator Program	DPMPTSP
127	Persentase partisipan/masyarakat yang mengurus izin berbasis elektronik	Persen	50	75	75	Indikator Program	DPMPTSP
	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga						
128	Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	23	24	24	Indikator Program	Disporapar
129	Persentase cabang olahraga yang memperoleh medali di even provinsi	Persen	55	65	65	Indikator Program	Disporapar

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
130	Persentase kepramukaan yang aktif	Persen	100	100	100	Indikator Program	Disporapar
Urusan pemerintahan pilihan							
	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan						
131	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	13	13.5	62.6	Indikator Program	Dinas Pangan dan Kelautan
132	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	13.5	14	64.7	Indikator Program	Dinas Pangan dan Kelautan
133	Persentase pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persen	-	55	55	Indikator Program	Dinas Pangan dan Kelautan
134	Jumlah Produksi Ikan Olahan	Ton	1.4	1.5	6.5	Indikator Program	Dinas Pangan dan Kelautan
Urusan pemerintahan bidang pariwisata							
135	Cakupan Peningkatan Promosi Wisata	Persen	85	90	90	Indikator Program	Disporapar
136	Persentase Kunjungan Wisata	Persen	70	75	75	Indikator Program	Disporapar

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
137	Persentase ekonomi kreatif yang mendapatkan Pembinaan	Persen	50	55	55	Indikator Program	Disporapar
	Urusan pemerintahan bidang pertanian						
138	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan (kelapa, Karet dan Kakao)	Persen	5	5	5	Indikator Program	Dinas Pertanian dan Perkebunan
139	Jumlah PDRB sector pertanian	Triliun Rupiah	4.6	4.8	4.8	Indikator Program	Dinas Pertanian dan Perkebunan
140	Persentase Penanggulangan Luas Serangan OPT dan DPI	Persen	75	80	80	Indikator Program	Dinas Pertanian dan Perkebunan
141	Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas	Kelompok	8	9	9	Indikator Program	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Urusan pemerintahan bidang kehutanan						
142	Rasio RTH yang Tertangani	persen	30	40	40	Indikator Program	Dinas LH dan Kehutann
	Urusan pemerintahan bidang perdagangan						

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
143	Persentase peningkatan perusahaan yang memiliki perizinan dan pendaftaran	Persen	50	50	50	Indikator Program	DPPKUKM
144	Persentase pengelolaan sarana perdagangan yang berfungsi	Persen	30	30	30	Indikator Program	DPPKUKM
145	Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Indikator Program	DPPKUKM
146	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen di kecamatan	Persen	100	100	100	Indikator Program	DPPKUKM
147	Jumlah produk unggulan daerah	Produk unggulan	2	2	4	Indikator Program	DPPKUKM
	Urusan pemerintahan bidang perindustrian						
148	Jumlah pelaku usaha industri	Pelaku usaha	1.592	1.6	1.6	Indikator Program	DPPKUKM
149	Tersedianya data industry dalam Sistem Industri Nasional (SINAS)	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Indikator Program	DPPKUKM
	Unsur penunjang urusan pemerintahan						
	Keuangan						

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	TARGET CAPAIAN		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK (2022)	Jenis Indikator	Penanggung Jawab
			2021	2022			
150	Persentase Realisasi PAD	Persen	100	100	100	Indikator Program	BPKD
Unsur pemerintahan umum							
	Kesatuan bangsa dan politik						
151	Persentase peningkatan pemahaman terhadap penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	83	93	93	Indikator Program	Kesbangpol
152	Persentase tingkat ketahanan ekonomi, social, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Persen	65	70	70	Indikator Program	Kesbangpol
153	Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Persen	87	92	92	Indikator Program	Kesbangpol
154	Persentase Ancaman/deteksi dini konflik yang tertangani	Persen	60	75	75	Indikator Program	Kesbangpol

